

INOVASI DALAM SEMANGAT KEINDONESIAAN

Penulis:

**Sunarso, Cholisin, Suyato, Taat Wulandari, Hastuti,
Muhammad Yuanda Zara, Suranto AW, Raras Gistha
Rosadi, Ririn Darini, Benni Setiawan, Sudrajat, Halili,
Dyah Respati Suryo Sumunar, Agustina Tri Wijayanti,
Yuhanida Milhani**

Editor:

Pandhu Yuanjaya dan Danu Eko Agustinova

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Inovasi dalam Semangat Keindonesiaan

Penulis

Sunarso, Cholisin, Suyato, Taat Wulandari, Hastuti, Muhammad Yuanda Zara, Suranto AW, Raras Gistha Rosadi, Ririn Darini, Benni Setiawan, Sudrajat, Halili, Dyah Respati Suryo Sumunar, Agustina Tri Wijayanti, Yuhanida Milhani

Editor:

Pandhu Yuanjaya dan Danu Eko Agustinova

ISBN: 978-602-60578-4-6

Penerbit:

FIS UNY

Jl. Colombo, No. 1

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon: 0274-586168, 0274-548202, Fax: 0274-548201

<http://fis.uny.ac.id>, email: fis@uny.ac.id

Cetakan Pertama, September 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

PENGANTAR

Mengawali lembaran-lembaran buku ini, tidak ada ungkapan yang lebih luhur dari puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya atas perkenan dan karunia-NYA lah seluruh proses dapat dilalui dengan lancar sehingga buku ini sampai kepada pembaca sekalian yang juga dirahmati-NYA.

Buku dengan judul “Inovasi dalam Semangat Keindonesiaan” ini merupakan bentuk kontribusi akademik dan faktual dari para akademisi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta untuk menjawab tantangan Indonesia kontemporer. Lebih dari itu, mengingat sebagian besar karya yang dihasilkan oleh para akademisi FIS UNY ini merupakan resultante dari praktik berdiskursus, meneliti, dan melaksanakan pembelajaran di ruang-ruang kelas, maka kompilasi tulisan ini harus kita baca sebagai refleksi dari pengalaman riil dan konkrit yang dapat kita akumulasi agar menjadi ‘bola salju’ inovasi yang dapat dimanfaatkan dan direpetisi dalam lingkup dan cakupan yang lebih luas untuk merespons tuntutan kekinian.

Buku ini secara sengaja diterbitkan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun FIS UNY yang ke-53. Di satu sisi, ia dapat dibaca sebagai selebrasi atas kelahiran yang dalam hampir seluruh spektrum peradaban pasti dipandang sebagai momen sakral. Di dalam perayaan atas momen kelahiran pada dasarnya mengindikasikan adanya kehendak untuk merefleksikan muasal dan *sangkan paraning dumadi*. Peringatan kelahiran, dalam wujud lain, juga menuntut kesadaran akan pergerakan maju (*process and progress*) agar sanggup menghadapi tuntutan dan keharusan alamiah untuk terus bertumbuh, berkembang dan menjadi (*to be and to become*).

Di sisi lain lain, buku ini juga harus dinilai sebagai apresiasi atas keras para akademisi di lingkungan FIS yang tidak pernah lelah berusaha untuk membawa institusi FIS dan UNY ke titik pencapaian yang lebih tinggi. Kita harus bersyukur bahwa begitu banyak prestasi sudah kita raih. Kerja individual dan kolektif seluruh civitas akademika telah mengakselerasi kemajuan dan prestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Universitas Negeri Yogyakarta. Kita tentu tidak boleh berpuas diri dengan posisi yang saat ini telah dicapai. Standar prestasi dan kemajuan secara objektif meningkat dan secara subjektif harus kita tingkatkan.

Konsekuensinya seluruh pihak harus terus bekerja keras dan bekerja cerdas. Kita harus semakin dinamis. Kita tidak boleh statis. *Static condition means death*. Kondisi statis sesungguhnya bermakna kematian. Penerbitan buku ini merupakan apresiasi atas kerja dinamis para penulisnya.

Di luar itu, publikasi ini juga tentu harus dibaca sebagai ajakan kepada semua untuk terus meningkatkan produktivitas gagasan ilmiah di lingkungan akademik untuk mengatasi persoalan-persoalan kolektif kita yang menunggu ‘uluran’ gagasan dan solusi dari para cerdas cendekia di perguruan tinggi. Formula ‘Yang dikerjakan harus dituliskan dan yang dituliskan harus dikerjakan’ harus kita jadikan esensi bagi upaya untuk menjadikan lembaga perguruan tinggi, kampus kita, fakultas kita sebagai agen sekaligus katalisator strategis bagi dinamika keseharian di sekitarnya. Kita harus terus buktikan bahwa kampus adalah ‘menara air’ yang menghidupi dan menggerakkan kehidupan, bukan ‘menara gading’ yang terkungkung dalam kemewahan intelektual yang berjarak dari realitas sosial di sekelilingnya.

Selaku pimpinan FIS UNY, saya secara pribadi dan atas nama lembaga fakultas menyampaikan ucapan terimakasih kepada para penulis yang telah dengan penuh komitmen menghadirkan gagasan-gagasan inovatif untuk didiskusikan, dibentah, dipersoalkan, dan yang terpenting disebarluaskan dan direpetisi dalam jangkauan yang lebih luas. Saya juga berterima kasih kepada tim editor yang telah mengupayakan terbitnya buku ini dalam tantangan substansi maupun waktu yang tidak mudah.

Kami sangat berharap, pemikiran dan gagasan yang disajikan dalam buku ini, semakin mendorong lahirnya inovasi dan kerja-kerja inovatif dalam kerangka semangat keindonesiaan. Gagasan ilmu-ilmu sosial dalam bingkai keindonesiaan yang telah menjadi mimpi besar Fakultas Ilmu Sosial dalam hampir satu dekade terakhir harus berakselerasi dalam perkembangan tantangan baru, era disrupsi dan revolusi industri 4.0, dalam bentuk inovasi-inovasi praktikal di banyak ranah, dalam dan luar ruang-ruang perkuliahan.

Namun begitu, kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam buku ini terdapat banyak kekurangan teknis maupun substantif, Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi segala bentuk kritik, saran

dan usulan demi perbaikan karya-karya yang kami produksi di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada para pembaca yang budiman disampaikan selamat menikmati sajian dalam terbitan ini. Semoga semua yang tersaji dapat berkontribusi bagi kehidupan individual dan kolektif kita yang lebih baik. Aamiin Yaa Rahmaan Yaa Rahiim.

Yogyakarta, 7 September 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta,

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.

DAFTAR ISI

Sambutan Dekan FIS UNY	iii
<i>Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag</i>	
Prolog	
Inovasi, Kebijakan, dan Keindonesiaan	1
<i>Pandhu Yuanjaya</i>	
Bagian I: Merawat Keindonesiaan	
Merajut Tali Persatuan dalam Keberagaman	15
<i>Sunarso</i>	
Mengembangkan Berpikir Kritis dan Kreatif dalam Membentuk Warga Negara yang Cerdas dalam Berdemokrasi Pancasila	24
<i>Cholisin</i>	
Merawat Keberagaman Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kontekstual	49
<i>Suyato</i>	
Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Merawat Keberagaman	69
<i>Taat Wulandari</i>	
Peran Perempuan Indonesia dengan Semangat Keindonesiaan	95
<i>Hastuti</i>	
Bagian II: Inovasi Keilmuan di Indonesia	
Sejarah Inovasi di Indonesia: Pengetahuan Publik, Historiografi dan Peluang	111
<i>Muhammad Yuanda Zara</i>	
Inovasi Tata Kelola Komunikasi Organisasi Berbasis Nilai-Nilai Keindonesiaan	127
<i>Suranto AW</i>	

Membangun Mental <i>Entrepreneur</i> untuk Memperkaya Semangat Kemerdekaan <i>Raras Gistha Rosadi</i>	142
Pemberontakan Petani Banten 1888: Pendekatan Baru dalam Penulisan Sejarah Indonesia dan Landasan Filosofisnya <i>Ririn Darini</i>	167
Inovasi Membangun Keadaban <i>Benni Setiawan</i>	198
Bagian III: Inovasi Pembelajaran Keindonesiaan	
Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. Dr. Sodik A. Kuntoro, M. Ed. Sudrajat	208
Proyek Pekan HAM: Inovasi Pembelajaran dalam Mata Kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia <i>Halili</i>	213
<i>Mountain Geospatial Modelling</i> : Informasi Geospasial untuk Pendakian dan Kegiatan di Alam Bebas <i>Dyah Respati Suryo Sumunar</i>	242
Implementasi Strategi “Petruk” sebagai Upaya Penguatan Nilai Kearifan Lokal di Sekolah Berbasis Budaya <i>Agustina Tri Wijayanti</i>	260
Implementasi Model Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal pada Penyusunan Lembar Kerja Siswa <i>Yuhanida Milhani</i>	276
Epilog	
Inovasi Media Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Danu Eko Agustinova</i>	292

Prolog

INOVASI, KEBIJAKAN, DAN KEINDONESIAAN

Pandhu Yuanjaya

Kajian mengenai inovasi telah menginspirasi sekian banyak penelitian, teorisasi, spekulasi, dan pemikiran-pemikiran dari berbagai bidang dalam beberapa dekade. Bisa dikatakan, setiap hari pada abad ke-20 dan ke-21 dunia selalu menyaksikan inovasi-inovasi baru, entah pembaharuan dan perbaikan atas kinerja teknologi atau penemuan yang sebelumnya, atau malah pemusnahan yang sebelumnya (Kasali, 2017). Hal ini karena inovasi didorong oleh semua orang, ilmuwan, filsuf, jurnalis, politisi, industrialis, bahkan reformis sosial (Osborne dan Brown, 2011).

Kebutuhan akan adanya inovasi seiring dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia (Bekkers, Edelenbos, dan Steijn, 2011). Kompleksitas masalah tersebut merentang luas mulai dari krisis pangan, kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan, dan ekonomi yang tidak kunjung terselesaikan. Kondisi ini diperparah dengan kondisi stabilitas sosial politik yang sering tidak menentu di banyak negara, atau bahkan komunitas.

Kemajuan teknologi juga menjadi pemacu kuat bagi perkembangan inovasi. Intervensi teknologi memungkinkan masalah dapat terselesaikan dengan lebih cepat (Veenswijk, 2005). Pemecahan masalah ini tidak hanya berlaku pada barang yang diproduksi oleh perusahaan atau seseorang, namun juga dapat diaplikasikan misalnya

dalam diplomasi, penyelesaian konflik, distribusi bantuan sosial dan lain sebagainya. Namun, harus disadari bahwa inovasi teknologi memiliki prasyarat utama yaitu infrastruktur penunjang dan kapasitas sumber daya manusia.

Indonesia dihadapkan pada dilemma yang sama dengan banyak negara berkembang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan publik. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (Borins, 2008). Di sisi lain, Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya yang cukup kompleks, mulai dari kapasitas yang kurang memadai, sistem yang belum sempurna dan perkembangan teknologi yang relatif lambat. Padahal, sumber daya tersebut merupakan perangkat vital dalam pemenuhan kebutuhan publik yang semakin kompleks dan beragam. Hal ini bisa terjadi karena disaat bersamaan inovasi dalam berbagai bidang tidak berjalan optimal, bila tidak bisa dikatakan gagal.

Hampir seluruh sumber daya alam di Indonesia terutama pertambangan, perkebunan dan kelautan dikelola oleh perusahaan asing atau perusahaan multinasional. Sebagai pemilik sumber daya alam, Indonesia tidak memiliki cukup teknologi untuk memanfaatkan secara massif dan komersial. Dibeberapa tempat, pengelolaan sumber daya alam masih sangat tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya pertambangan minyak bumi tradisional di Blok Cepu dan Kabupaten Bojonegoro atau sistem perkebunan sawit di Sumatra, Kalimantan atau Sulawesi, yang nantinya mereka harus menjual ke perusahaan besar dengan harga relatif rendah. Alih teknologi juga bukan satu-satunya cara instan untuk meningkatkan produktifitas seperti yang terjadi Bali setelah kedatangan “Traktor” yang kemudian meninggalkan Subak sebagai sejarah (Aditjondro, 2003).

Tidak hanya itu, dalam bidang sosial dan politik, ketidakmampuan Indonesia dalam berinovasi terlihat tidak berdaya. Tidak perlu merunut lebih jauh ke masa orde baru, pasca reformasi (tepat 20 tahun pada saat buku ini dipublikasikan), program IMF, World Bank, atau program-program lain yang dicontoh dari keberhasilan negara lain ada di hampir semua kementerian/lembaga di Indonesia. Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagai bantuan pendamping untuk sekolah, diimitasi dan *dicangkokkan* sedemikian rupa dengan alasan program ini berhasil di Amerika Latin dan beberapa negara Asia Tenggara yang disebut dengan *Conditional Cash Transfer* (Fiszbein dan Schady, 2009). Padahal ada beberapa bukti yang bervariasi di beberapa negara antara lain seperti Meksiko (Schultz, 2004), Ekuador (Schady dan Araujo, 2008), Brasil (Janvry et al., 2008), Kolombia (Attanasio et al., 2005), Nikaragua (Malucio dan Flores, 2005), Pakistan (Chaudhury dan Parajuli, 2008), dan Kamboja (Filmer dan Schady, 2008). Terlebih lagi proyek multi tahun dan multi rezim yang membuat Indonesia terus berhutang pada World Bank seperti PNPM Mandiri yang tidak menunjukkan keberhasilan seperti yang dijanjikan. Kondisi demikian menuntut pemerintah untuk lebih inovatif dalam mengembangkan kebijakan dan program, selain untuk menumbuhkan inovasi dalam kebijakan, juga sebagai motor penggerak inovasi sektor bisnis dan masyarakat pada umumnya.

Studi tentang inovasi kebijakan publik telah lama dilakukan dalam konteks negara maju seperti studi yang dilakukan oleh Osborne & Gaebler (1995) dan Denhardt & Denhardt (2003). Kebijakan tersebut dianggap inovatif karena menawarkan pemenuhan kebutuhan publik yang berbasis efektivitas dan efisiensi yang disebut *New Public*

Management (NPM). Konsep kebijakan *new public management* ini kemudian diinovasi dengan gagasan *new public value* (Moore, 1995; Moore & Khagram, 2004; O'Flynn, 2005; Alford & Hughes, 2008). Gagasan *new public value* tersebut menawarkan pemikiran bahwa kebijakan yang efektif dan efisien tidak hanya dilihat dari output saja, namun juga *input*, proses dan *outcome*. Kebijakan yang ada juga harus adaptatif dengan kondisi zaman yang semakin mementingkan pola jaringan antar tingkat pemerintahan, lembaga, stakeholder, bahkan masyarakat untuk optimalisasi pelayanan.

Beberapa kondisi yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat dan mandiri, perlu inovasi khas Indonesia. Inovasi yang ditemukan dan dikembangkan karena kita mengenal diri kita sendiri. Inovasi dengan semangat keindonesiaan.

Inovasi dan kebijakan Publik

Studi inovasi kebijakan telah menjadi topik besar dalam tiga dekade ini terutama bagi peneliti politik dan administrasi publik. Walker (1969) mulai dengan meneliti inovasi kebijakan pada 88 program di satu negara bagian yang berjudul *the diffusion of innovations among the American states*. Penelitian Walker meneliti mengenai para pemimpin di negara bagian tersebut melakukan adopsi kebijakan dalam bentuk program baru yang kemudian diimplementasikan. Penelitian inovasi dalam kebijakan selanjutnya diteliti Gray (1973) melakukan penelitian inovasi kebijakan tentang hak masyarakat sipil, kesejahteraan dan pendidikan. Penelitian Gray ini kemudian diikuti Grupp dan Richard (1975) yang melakukan penelitian mengenai difusi kebijakan dalam

beragam jenis kebijakan. Penelitian inovasi kebijakan sejak tahun 70an dan 80an menjadi makin banyak.

Bassolo dan Scally (2008:741) juga mengajukan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inovasi dalam kebijakan. Menurut mereka, faktor-faktor tersebut ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal adalah birokrasi seperti kecukupan anggaran dan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sedangkan faktor-faktor eksternal adanya otonomi daerah dan aktivitas kelompok pemerhati.

Inovasi adalah menghadirkan sebuah gagasan baru berupa program atau kebijakan dalam sebuah konteks, meskipun gagasan tersebut merupakan gagasan lama atau sudah pernah diterapkan di konteks ruang dan waktu yang lain. Terdapat tiga tipe tingkatan sebuah gagasan dapat disebut sebagai inovasi. Tingkatan ini didasarkan pada sumber gagasan yang digunakan dalam inovasi (Peltz & Munson, 1982). Pertama, orisinalitas yaitu gagasan yang benar-benar baru diciptakan untuk konteks situasi yang sedang dihadapi. Kedua, tingkat adaptasi yaitu menggunakan gagasan yang pernah diterapkan oleh konteks lain untuk situasi yang sedang kita hadapi. Ketiga, meminjam, yaitu menggunakan gagasan yang pernah diterapkan untuk konteks lain ke dalam situasi yang sedang dihadapi secara mentah.

Inovasi kebijakan bukanlah sesuatu yang sederhana. Sebuah gagasan yang inovatif tidak akan terjadi jika tidak dapat dipercaya (*reliable*) dengan kondisi politik dan ekonomi yang ada, tidak mendapat dukungan dari para pemangku, pelaku, dan objek kebijakan, dan tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia (Roberts & King, 1996). Oleh karena itu, sebuah gagasan harus didesain secara matang

supaya dapat bisa diimplementasikan sehingga menjadi kebijakan yang inovatif yang membawa dampak yang signifikan.

Perubahan dari gagasan menjadi sebuah kebijakan melalui tahapan-tahapan yang disebut tahapan proses inovasi. Empat tahap ini memiliki titik masuk dan hasil akhir pada masing-masing tahap yang masing-masing tahap tersebut berkesinambungan. Keempat tahap tersebut merupakan syarat fungsional dan institusional sebuah gagasan dapat disebut inovasi (kebijakan) (Peltz & Munson, 1982; Poole & van de ven 1989). Jadi, tiap-tiap tahapan harus dijalankan sebaik dan profesional mungkin agar bermuara pada sebuah inovasi yang baik.

Nancy C Roberts & Paula J. King (1996: 176) dalam *Transforming Public Policy: Dynamics of Policy Entrepreneurship and Innovation* memberikan indikator yang dapat menunjukkan tercapainya keberhasilan yang disebutnya dengan kata strategi kebijakan yang inovatif. Indikator-indikator tersebut adalah

1. Mampu melakukan perubahan yang radikal untuk menyelesaikan persoalan kompleks dan tidak hanya mengubah gagasan menjadi sebuah kebijakan saja
2. Gagasan yang menjadi kunci dari perubahan radikal tersebut dipraktikkan dan ditetapkan menjadi produk hukum yang siap diimplentasikan.
3. Mampu menjamin bahwa kebijakan tersebut berhasil menyelesaikan persoalan.
4. Institusi/lokasi yang mendapatkan program dari kebijakan tersebut tetap dalam keadaan stabil.

Inovasi dalam Semangat Keindonesiaan

Bineka Tunggal Ika bagi masyarakat Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pemersatu, namun juga refleksi bagi seluruh perbedaan. Masyarakat Indonesia benar-benar berada pada latar belakang yang beragam, mulai dari kondisi geografis, bahasa, agama, suku, budaya yang nantinya akan berpengaruh besar pada pola pikir dan gaya hidup. Oleh karena itu perlu semangat untuk merawat keindonesiaan secara berkesinambungan.

Sunarso dalam tulisannya yang berjudul “Merajut Tali Persatuan dalam Keberagaman” menggambarkan dengan jelas Indonesia sebagai negara multikultur, merupakan masyarakat paling pluralistik di dunia. Memiliki sedikitnya 250 kelompok suku dengan 250 lebih bahasa lokal. Negara besar ini terdiri lebih dari 17.000 pulau, 34 provinsi, 500 lebih kabupaten dan kota, 7000 lebih kecamatan, serta 60.000 lebih desa. Berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara nomor empat berpenduduk terbesar di dunia. Keberagaman tersebut potensi besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Konflik sosial dapat dihindari dengan mengemai nilai-nilai multikultur dan integrasi bangsa salah satunya melalui pendidikan.

Lantas, bagaimana menyemai kebersamaan dalam keberagaman? Cholisin mengajak kita untuk mengembangkan berpikir kritis dan kreatif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting agar produk dari pemikiran kreatif bersifat fungsional karena tidak kehilangan konteks Indonesia serta sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Sehingga hasil pemikiran kritis dan kreatif yang demikian berkontribusi dalam mengembangkan demokrasi yang mensejahterakan/berkeadilan sosial.

Sementara itu, Suyato mendiskusikan mengenai cara merawat keberagaman melalui pendidikan kewarganegaraan kontekstual. Seiring

dengan neoliberalisme di dunia pendidikan, perlu adanya usaha yang sesuai dengan perkembangan jaman dalam merawat keberagaman. Beberapa teori dapat digunakan sebagai panduan dalam merespon fenomena globalisasi, lokalisasi, individualisasi, namun dengan orientasi nasionalis.

Taat Wulandari mengajak kita melihat bagaimana banyak negara berhasil merawat keberagaman melalui pendidikan multikultur. Usaha ini yang seharusnya diadopsi oleh pemerintah untuk diberlakukan di sekolah hingga perguruan tinggi. Dengan dimasukkannya pendidikan multikultur dalam kurikulum, usaha merawat keberagaman semakin luas dan terlembaga.

Hastuti melalui tulisannya berusaha mendorong perempuan Indonesia untuk semakin aktif berperan dalam urusan publik. Lebih lanjut, kultur patriarki yang masih mewarnai kehidupan perempuan Indonesia turut menyumbang kegamangan perempuan untuk aktif masuk pada ranah publik. Akses yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja seharusnya dapat dimaksimalkan oleh perempuan untuk mewujudkan kesetaraan.

Muhammad Yuanda Zara dalam tulisannya berjudul “Sejarah Inovasi di Indonesia: Pengetahuan Publik, Historiografi, dan Peluang”, memaparkan bahwa inovasi memiliki arti penting tidak hanya dalam bidang teknologi, namun juga sosial humaniora. Kenyataan bahwa pengetahuan publik yang minim tentang inovasi di Indonesia lebih karena inovasi sering diasosiasikan sebagai penemuan produk teknologi, terutama dari penemu-penemu barat. Padahal, bila dilihat lebih mendalam, perubahan masyarakat yang hidup lebih baik dapat juga dimaknai sebagai inovasi. Penulisan sejarah inovasi di Indonesia

menjadi peluang besar karena dapat meningkatkan pengetahuan dan motivasi untuk berinovasi dengan semangat keindonesiaan.

Suranto AW dalam tulisannya menyoroti tentang perlunya inovasi dalam proses komunikasi organisasi. Hal ini penting karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Di era disrupsi, organisasi harus mengembangkan tata kelola komunikasi yang lebih efektif dan tetap mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan.

Keberhasilan penyelenggaraan Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang dimanfaatkan Raras Gistha Rosardi untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun semangat entrepreneur. Semangat ini dapat menumbuhkan inovasi masyarakat untuk membangun ide dan memulai usaha mandiri. Pemuda perlu meningkatkan skill dan cerdas dalam menangkap peluang yang datang.

Ririn Darini dalam tulisannya berjudul “Pemberontakan Petani Banten 1888: Pendekatan Baru dalam Penulisan Sejarah Indonesia dan Landasan Filosofisnya” memberikan gambaran kebaruan pendekatan penulisan sejarah Indonesia. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa Sartono mendapat pengaruh dari Mazhab Annales yang strukturalis. Pengaruh pandangan strukturalisme yang utama adalah bahwa struktur memengaruhi tindakan para agen sejarah. Sartono menegaskan bahwa setiap proses sejarah adalah perubahan sosial, sehingga di satu pihak kejadian merupakan proses dan di pihak lain dapat dipandang sebagai aktualisasi dari struktur. Menurutnya setiap struktur merupakan aspek statis dari proses dan sebaliknya setiap proses merupakan aspek dinamis dari struktur. Setiap kelakuan atau aksi telah dibentuk atau distrukturisasikan dalam suatu struktur.

Tulisan Benni Setiawan berjudul “Inovasi Membangun Keadaban”. Inovasi merupakan sebuah tantangan dan peluang. Perlu

persiapan dan rencana yang matang untuk masa depan. Pada akhirnya, inovasi berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengukuhkan pendidikan sebagai medium minat bakat dan potensi.

Sudrajat dalam tulisannya berjudul “Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. DR. Sodik A. Kuntoro, M.Ed”, memaparkan tentang inovasi membangun harmonisasi pendidikan dalam semua lini, baik formal, informal maupun nonformal yang mencerminkan jati diri bangsa. Proses pendidikan juga perlu didukung oleh institusi lain seperti keluarga dan masyarakat sehingga berjalan dengan sinergis.

Halili kemudian mengajak kita belajar bagaimana membuat pembelajaran yang inovatif, menyenangkan dan bermakna melalui Proyek Pekan HAM. Proyek Pendidikan HAM didisain untuk menghasilkan dampak signifikan bagi penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Promosi HAM melalui Proyek HAM diharapkan dapat menjadi media pembelajaran untuk memperkuat tumbuhnya nilai-nilai yang mendorong dan memberikan keyakinan kepada peserta untuk bersikap dan bertindak secara konstruktif bagi penghormatan kepada derajat kemanusiaan yang setinggi-tingginya.

Dyah Respati Suryo Sumunar dalam tulisannya menjelaskan tentang informasi geospasial untuk pendakian dan kegiatan alam bebas. Pendakian yang berisiko tinggi dibutuhkan manajemen perjalanan yang baik untuk meminimalisasi setiap risiko kecelakaan pendakian. Pengenalan medan dan lingkungan melalui referensi geospasial dengan peta-peta tematik sangat penting dan diperlukan. Selain itu, perlu juga untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku di daerah tempat pendakian.

Agustina Tri Wijayanti membahas tentang penguatan nilai kearifan lokal di sekolah. Selain keteladanan, sekolah perlu melakukan pengkondisian dalam rangka menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dan mendukung dalam usaha pendidikan dan pembelajaran. Pengkondisian dengan dekorasi ruangan disetiap kelas ada wayang, kemudian di setiap depan ruang kelas terdapat batik dari hasil karya para siswa. Pemasangan berupa slogan-slogan dan petuah jawa juga digantungkan pada depan kelas, sebagai sarana untuk mendukung penanaman nilai kearifan lokal

Yuhanida Milhani dalam tulisannya menyorot tentang arus globalisasi menjadi penyebab terkikisnya nilai-nilai kebangsaan pelajar diberbagai tingkat pendidikan. Sekolah perlu mengembangkan model pembelajaran dengan pendekatan scientific approach berbasis kearifan lokal menggunakan lembar kerja siswa dengan strategi pelatihan dan penugasan individu sehingga berhasil melakukan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Sebagai penutup, Danu Eko Agustinova dalam tulisannya berjudul “Inovasi Media Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0” menyimpulkan bahwa seiring dengan era revolusi industry 4.0, dituntut untuk inovasi dalam berbagai bidang. Revolusi Industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan *manual* menjadi *otomatisasi* atau *digitalisasi*. Inovasi menjadi kunci eksistensi dari perubahan itu sendiri. Revolusi indutsri 4.0 berdampak pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan dituntut untuk berinovasi agar sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Inovasi pembelajaran sejarah ditekankan terjadap metode pembelajaran dan media pembelajaran.

Referensi

- Aditjondro, G, J. 2003. *Pola-Pola Gerakan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Attanasio et. al. 2005. *How Effective are Conditional Cash Transfers? Evidence from Colombia*. IFS Briefing Note No. 54. The Institute for Fiscal Studies, London, UK. <http://www.ifs.org.uk/bns/bn54.pdf>.
- Basolo, Victoria and Corianne P. Scally, 2008, *State Innovations in Affordable Housing Policy: Lessons from California and New Jersey*, Housing Policy Debate 19 (4): 741-774.
- Bekkers, V, Edelenbos, J dan Steijn, B. 2011. *Innovation in the public sector : linking capacity and leadership*. Palgrave Macmillan
- Borins, Sandford. 2008. *Innovative governance in the 21st century*. ash institute for democratic governance and innovation Harvard University
- Chaudhury, Nazmul, Parajuli, Dilip, 2008. *Conditional cash transfers and female schooling: the impact of the female school stipend programme on public school enrolments in Punjab, Pakistan*. <http://www.informaworld.com/10.1080/00036840802167376>.
- Dendhart, Janet & Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service*. New York : M.E. Sharpe.
- Filmer, D & Schady, N. 2010. *Does More Cash in Conditional Cash Transfer Program Always Lead to Larger Impacts on School attendance?.* Journal of Development Economics 96 (2011) 150–157
- Janvry et. al. 2006. *Making conditional cash transfer programs more efficient: designing for maximum effect of the conditionality*. World Bank Economic Review 20 (1), 1–29.
- Kasali, Renald. 2017. *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia
- Maluccio et. al. 2005. *Impact Evaluation of a Conditional Cash Transfer Program: The Nicaraguan Red de Protección Social*. Research

Report 141 International Food Policy Research Institute,
Washington, DC.

- Osborne, David and Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Penguin.
- Roberts, Nancy C. and Paula J. King, 1996, *Transforming Public Policy: Dynamics of Policy Entrepreneurship and Innovation*, California: Jossey-Bass Inc.
- Schady, Norbert, Araujo, María Caridad, 2008. *Cash transfers, conditions, and school enrollment in Ecuador*. *Economía* 8 (2), 43–70.
- Schultz, T. Paul, 2004. *School subsidies for the poor: evaluating the Mexican PROGRESA poverty program*. *Journal of Development Economics* 74 (1), 199–250.
- Veenswijk, M. 2005. *Organizing Innovation*. IOS Press
- Walker, Jack, L., 1969, *The Diffusion of Innovations among the American States*, *American Political Science Review* 63 (3): 880-99.

BAGIAN I: MERAWAT KEINDONESIAAN

MERAJUT TALI PERSATUAN DALAM KEBERAGAMAN

Sunarso

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Kemajemukan ini ditandai dengan banyaknya suku bangsa budaya, bahasa daerah, agama, serta berbagai kemajemukan lainnya. Hal inilah yang sering menimbulkan terjadinya konflik di antara suku bangsa, maupun penganut agama yang beragam itu, di dalam memenuhi kepentingan mereka yang berbeda-beda.

Sebagai negara multikultur, Indonesia merupakan masyarakat paling pluralistik di dunia. Memiliki sedikitnya 250 kelompok suku dengan 250-an lebih bahasa lokal. Negara besar ini terdiri lebih dari 17.000 pulau, 34 provinsi, 500 lebih kabupaten dan kota, 7000 lebih kecamatan, serta 60.000 lebih desa. Berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara nomor empat berpenduduk terbesar di dunia. Negeri ini memiliki tiga zona waktu, waktu Indonesia barat, tengah, dan timur. Jarak antara wilayah paling barat dan timur, Sabang dan Merauke sama dengan jarak Teheran dan Paris atau sama dengan jarak Jeddah dan London. Indonesia juga memiliki sekurang-kurangnya 6 agama besar: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Dari setiap suku, dalam batas-batas tertentu juga setiap agama, masing-masing memiliki varian sendiri-sendiri.

Karakteristik Masyarakat Indonesia

Uraian di atas menjelaskan, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan berbagai ciri-cirinya.

Pluralisme tersebut kiranya penting untuk diungkapkan dalam rangka merajut tali persatuan dalam keberagaman, karena dengan mengungkapkan karakteristik masyarakat pluralis, akan didapati gambaran faktor-faktor dan unsur-unsur yang perlu dipadukan dalam rangka integrasi nasional.

Beberapa karakteristik sebagai sifat dasar dari masyarakat majemuk, antara lain: (1) Terjadinya segmentasi kelompok-kelompok, yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lainnya; (2) Memiliki struktur sosial; (3) Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; (4) Secara relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; dan (6) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain (Nasikun, 1989: 36).

Kondisi masyarakat semacam ini, jelas membutuhkan perekat integrasi yang tidak sederhana, karena sangat berkaitan dengan berbagai hal. Masyarakat tersebut dapat terintegrasi di atas kesepakatan sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental. Dalam kondisi semacam ini kesepakatan terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental sangat penting karena mampu meredam kemungkinan berkembangnya konflik-konflik ideologi akibat dari kebencian atau antipati terhadap nilai-nilai kelompok lain (Usman, 1994: 4).

Keberagaman itu Potensi

Multikulturalisme, baik yang terbangun karena keragaman suku maupun agama, jika dikelola secara proporsional sebenarnya bisa

dijadikan modal bagi terciptanya persatuan dan kemajuan bangsa. Bagaimana caranya, sampai saat ini belum ada pilihan selain melalui pendekatan politik yang demokratis. Pendekatan politik ini harus dilakukan oleh negara sebagai institusi demokrasi yang dianggap sah.

1. Nilai-nilai demokrasi perlu dikedepankan seperti dikemukakan oleh Henry B. Mayo. Dalam sistem politik yang demokratis, kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil rakyat yang dipilih secara berkala atas dasar kesamaan dan kebebasan politik. Nilai-nilai demokratis itu antara lain: (1) Menyelesaikan perselisihan secara damai; (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai; (3) Mengadakan pergantian pemimpin secara teratur; (3) Membatasi kekerasan sampai minimum; dan (4) Menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Kemauan politik dari pemerintah yang tengah berkuasa merupakan hal yang sangat menentukan. Beberapa hal bisa diupayakan oleh negara:
2. Sebagai institusi tertinggi, melalui tangan pemerintah, negara berhak dan wajib memperhatikan pluralitas suku, agama, dan keyakinan warga.

Perlakuan dan kebijakan negara atas pluralitas suku dan agama harus demokratis. Di era Orde Baru misalnya jumlah agama yang resmi hanya lima, mereka yang memeluk agama lain (Konghuchu) atau kepercayaan lain diwajibkan mencantumkan salah satu agama resmi itu.

Negara tidak boleh menolerir perbuatan kelompok yang dilakukan atas nama suku atau agama, namun membahayakan anggota masyarakat. Setiap warga bangsa senantiasa harus dengan sadar mengolah kelebihan dan keunggulan dari kemajemukan masyarakat, sehingga kesatuan bangsa berada dalam keanekaragaman, dan persatuan

kita dalam perbedaan. Oleh karena itu, dibutuhkan keikutsertaan semua komponen masyarakat untuk membangun Indonesia.

Pada hakekatnya, negara dituntut peduli untuk menciptakan iklim politik yang kondusif bagi pluralisme dan mencegah prasangka-prasangka kultural dan teologis yang mengakibatkan gesekan-gesekan dan kekerasan-kekerasan fisik, intelektual, maupun psikologis antarsuku atau antarpenganut agama dan spiritualisme. Hanya dengan iklim politik yang kondusif bagi pluralisme, kohesivitas masyarakat akan terbangun secara sehat, tanpa pemaksaan kehendak. Empat Pilar Indonesia yaitu:

1. Pancasila. Indonesia memerlukan *common platform* yang dapat menyatukan segala macam perbedaan yang ada, dan semua itu ada dalam Pancasila.
2. UUD 1945. Sebagai hukum dasar negara sangat berpengaruh dalam mengatur hubungan antar sesama warga negara, maupun antara warga negara dengan negara. Di dalam UUD 1945 semuanya telah diatur dengan jelas.
3. NKRI. NKRI adalah rumah kita semua, rumah bagi semua warga negara Indonesia. Keutuhan, kedamaian, dan keadilan di rumah Indonesia ini adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk terus menjaganya.
4. Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman di Indonesia adalah sebuah fakta, yang tidak mungkin diingkari, dan tidak boleh dipaksa untuk diseragamkan. Tugas kita semua adalah, mewujudkan perdamaian, persaudaraan, dan kerjasama di atas perbedaan tersebut. Keragaman bukanlah musibah namun sebuah anugerah. Adalah kewajiban kita bersama untuk mewujudkan persatuan di atas keragaman.

Internalisasi Nilai-nilai Multikultural

Menelusuri akar konflik di Indonesia sejak pertengahan abad ke-20 hingga penghujung awal milenium abad-21, secara umum berlatar belakang perbedaan kultur. Hal ini meliputi, benturan antar nilai, perbedaan sudut pandang dan persepsi yang dibedakan oleh masing-masing nilai masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada penentu lain. Cara bersikap yang tak dimengerti suatu etnis tertentu terhadap etnis lainnya ternyata dapat menyinggung perasaan dan berakhir pada pertumpahan darah. Begitu pula rasa saling curiga dan muncul rasa takut dan tidak aman serta penghinaan atas keyakinan warga terhadap warga lainnya. Beberapa upaya untuk merajut tali persatuan dalam keberagaman, perlu dilakukan untuk menciptakan kedamaian di negara majemuk ini.

1. Perlu internalisasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Berbagai upaya seperti workshop, seminar, pelatihan dan program pendidikan multikultural perlu dilakukan.
2. Diperlukan kesediaan dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi “proyek kemanusiaan” untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat yang toleran dan inklusif.
3. Berbagai elemen masyarakat termasuk LSM, organisasi kemasyarakatan, keagamaan harus ikut merumuskan nilai-nilai multikultural. Dengan skala prioritas mengidentifikasi masalah dari berbagai etnis dan agama, serta mencoba menemukan berbagai strategi untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan tersebut.

4. Partai politik hendaknya tidak hanya mencari kekuasaan saja, akan tetapi ikut dalam proyek kemanusiaan melalui karya nyata. Misalnya dengan memasukkan materi-materi yang bermuatan nilai-nilai multikultural dan *local wisdom* agar para kader dan simpatisan peka terhadap nilai-nilai multikultural.
5. Hendaknya para pemuka agama menginformasikan pada umatnya perihal ayat-ayat suci yang berkaitan dengan etika universal. Ayat-ayat yang memuat inklusifitas dan toleransi, agar tercipta suasana damai.
6. Dibutuhkan gerakan bersama untuk mengusung multikulturalisme di berbagai forum.

Semua itu dalam rangka mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan, menuju masyarakat multikultural. Ini perlu dilakukan dalam rangka mengembalikan lagi sifat-sifat toleran, inklusif, saling menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada, yang dulu pernah hilang dan hampir tercerabut akar-akarnya dari kesantunan yang dimiliki oleh bangsa ini.

Kondisi Pendidikan di Indonesia

Dari sisi pemikiran:

1. Pendidikan di Indonesia lebih banyak mencangkok dan meminjam teori-teori dari luar, terutama Barat.
2. Pendidikan lebih dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang sifatnya keduniawian, mementingkan kesuksesan hidup secara material, bukan pengembangan sisi kemanusiaan secara utuh.
3. Pendidikan difokuskan pada upaya mencetak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam masyarakat industri.

4. Idealnya pendidikan harus mengembangkan jasmani, rohani; makhluk individu, makhluk sosial; makhluk otonom, makhluk Tuhan. Mengembangkan IQ, EQ dan SQ. Mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang.
5. Pendidikan harus dapat mencetak manusia yang baik (*being good*) dan manusia cerdas (*being smart*).

Dari sisi praktik:

1. Pendidikan bergeser dari institusi yang meluhurkan manusia menjadi lembaga yang mencari laba.
2. Pendidikan bergeser dari wahana transformasi, menjadi proses transaksi.
3. Suasana belajar kurang menunjukkan keceriaan dan kebahagiaan anak.
4. Suasana takut berlangsung di sekolah. Anak takut kepada guru, guru takut kepada kepala sekolah, kepala sekolah takut pada pengawas, pengawas takut pada kepala dinas dst.
5. Kompetisi lebih diutamakan daripada kolaborasi (kerjasama).
6. Komunikasi sekolah dengan orang tua siswa kurang terjalin dengan baik.
7. Pembelajaran terkotak-kotak, tidak terpadu. Pendidikan moral sekolah hanya tugas guru agama dan PKn saja.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus dilakukan melalui tiga lingkungan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. menurut para ahli, keluarga selalu berpengaruh besar terhadap perkembangan anak manusia. Keluarga sangat berperan dalam memberikan dasar pendidikan agama, pendidikan sikap, dan budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, serta menanamkan kebiasaan.

Penutup

Dengan menggunakan teori konflik untuk memahami masyarakat majemuk seperti Indonesia, maka diharapkan dapat menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu masyarakat multi etnik, meskipun disadari bahwa setiap teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi memiliki kekurangan. Setiap kelompok etnis dalam masyarakat majemuk mempunyai potensi untuk melakukan integrasi maupun konflik, sehingga perlu adanya manajemen konflik yang dapat merekayasa agar masyarakat semakin terintegrasi.

Menurut teori konflik, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Pembangunan nasional selama ini belum mengedepankan nilai-nilai keadilan, kelompok masyarakat kelas bawah semakin termarginalisasi, dan semakin terpuruk dan mudah sekali dihasut untuk melakukan kerusuhan.
2. Persaingan antar elit lokal dan kelompok masyarakat dalam memperebutkan sumber daya alam, ekonomi, sosial dan politik, budaya telah menimbulkan benturan. Kelompok masyarakat yang tersisih, berusaha mengaktifkan lagi simbol-simbol agama, etnisitas untuk memenangkan kembali akses tersebut.
3. Perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industri menyebabkan terjadinya pergeseran pranata sosial, nilai-nilai lama ditinggalkan namun nilai-nilai baru belum mengakar, sehingga keterasingan ini akan mengaktifkan lagi simbol-simbol lama.
4. Untuk mengatasi konflik nasional diperlukan acuan kerangka budaya nasional yang dapat diterima oleh seluruh etnis dalam masyarakat majemuk dengan mengedepankan nilai-nilai

demokratis, rasa keadilan, dan kebebasan mengembangkan budaya.

5. Dalam mengatasi konflik dan membangun Indonesia Baru diperlukan penyelesaian akar permasalahan konflik, baik masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, hubungan pusat dan daerah oleh setiap elemen bangsa. Setiap elemen bangsa juga harus mengembangkan keunggulan masyarakat majemuk dalam koridor negara kesatuan RI.

Referensi

- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Usman, Sunyoto. 1994. "*Integrasi dan Ketahanan Nasional*". Makalah dalam Seminar Nasional Sumbangan Ilmu-ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional Pascasarjana UGM.
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosologi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Weiner Myron, dkk. 1988. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

MENGEMBANGKAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG CERDAS DALAM BERDEMOKRASI PANCASILA

Cholisin

Pengembangan intelektual adalah “berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau pemikiran dan pemahaman” (KBBI, 2007: 437). Ini berarti berpikir kritis dan kreatif masuk dalam pengembangan intelektual. Karena dalam proses berpikir kritis dan kreatif ada aktivitas berpikiran jernih dan sampai pada pemahaman terhadap suatu fenomena sosial, sehingga sampai menghasilkan banyak pemikiran alternatif sebagai pilihan dalam pengambilan keputusan.

Berpikir kritis merupakan gejala psikologis dan sebagai prinsip filosofis.” Sebagai gejala psikologis berpikir kritis sifatnya deskriptif sedangkan sebagai prinsip filosofis mempunyai nilai kritisal, artinya memenuhi standar atau kriteria akseptabilitas artinya suatu yang dianggap baik” (Tilaar, Jimmy Paat, Lody Paat, ed., 2011: 15). Dalam berpikir kritis tidak hanya mampu mendeskripsikan sesuatu dengan baik tetapi sekaligus memberikan penilaian berdasarkan ukuran nilai dan konteks tertentu sehingga memberikan fasilitasi pengambilan keputusan yang kuat. Berpikir kritis menjadikan seseorang memiliki kemandirian berpikir dan berpendirian kuat, dan tanggung jawab. Hal ini seperti ditegaskan oleh Richard Paul, “berpikir kritis merupakan suatu kemampuan dan disposisi untuk mengevaluasi secara kritis suatu kepercayaan atau keyakinan, asumsi apa yang mendasarinya dan atas dasar pandangan hidup mana asumsi tersebut terletak” (Tilaar, Jimmy Paat, Lody Paat, ed., 2011: 16). Berpikir kritis sering disamakan dengan berpikir kreatif. Tetapi ada yang membedakannya bahwa sebelum mengembangkan berpikir kreatif terlebih dahulu melakukan kajian

penilaian, sehingga berpikir kreatif dapat dinyatakan kelanjutan dari berpikir kritis . Tetapi yang pasti “berpikir kritis memerlukan deliberasi rasional yang pelik” (Tilaar, Jimmy Paat, Lody Paat,ed., 2011:16) Prof. Noeng Muhadjir, menyatakan bahwa faktor lain yang berperan dalam kreativitas, yaitu *flexibility*, *originality*, *elaboration* (kemampuan mengoperasionalkan), dan minat dasar tertentu dalam berpikir divergen, menyukai berpikir toleran terhadap kejumuhan, menyukai berpikir divergen, menyukai berpikir reflektif dan menyukai ekspresi estetis (1993: 87). Dengan demikian berpikir kritis dan kreatif tidak terbatas pada mereproduksi suatu pengetahuan, sikap dan perilaku/ketrampilan, tetapi juga sampai pada memproduksinya sebagai respon terhadap tuntutan dinamika maupun masalah yang dihadapi. Karena pemikiran kritis dan kreatif bisa menghadirkan nilai kebenaran dan keadilan sosial. Juga mampu memerdekakan dari kekuatan dominasi yang membelenggu, sehingga lahirnya manusia dan warga negara yang merdeka tetapi tetap memiliki tanggung jawab sosial (jiwa publik).

Tilaar, menyatakan “berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan demokratis. Demokrasi hanya dapat berkembang apabila warga negaranya dapat berpikir kritis di dalam masalah-masalah politik, sosial dan ekonomi” (Tilaar, Jimmy Paat, Lody Paat,ed., 2011: 17). Kajian berpikir kritis dan kreatif menjadi relevan dan penting melihat kondisi demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi atau jalan di tempat. Yaitu untuk melihat apakah secara konseptual pengembangan berpikir kritis dan kreatif bisa memberikan sumbangan dalam menggerakkan demokrasi. Biro Pusat Statistik (BPS) menggambarkan stagnasi demokrasi di Indonesia melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Kompas 16 Agustus 2018) berbasis pada tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga

demokrasi yang diluncurkan BPS (15/8/2018) dengan tiga kategori demokrasi, yakni buruk (kurang dari 60), sedang (60-80), dan baik (lebih dari 80). Pada tahun 2017 IDI mencapai angka 77,11. Stagnasi demokrasi tampak pada capaian IDI tahun 2009 (67,30), tahun 2014 (73,04), tahun 2015 (72, 82), pada tahun 2016 (70,09). Capaian IDI sejak tahun 2019 – 2017, tampak berjalan ditempat karena masih dalam kategori sedang.

Penilaian IDI bersifat kuantitatif sehingga secara kualitatif dimungkinkan lebih rendah. Hal ini dinyatakan Direktur Perludem Titi Anggraini (Kompas 16 Agustus 2018), bahwa naiknya peran partai politik (aspek lembaga demokrasi,pen.) tidak terlepas dari adanya Pilkada 2017. Anggraini meyakini “...stagnasi demokrasi dapat didobrak dengan mengoptimalkan fungsi parpol, terutama dalam pendidikan politik, kaderisasi, dan perekrutan politik”.

Pengembangan berpikir kritis dan kreatif di kalangan warga negara, tentunya masuk cara mendobrak stagnasi demokrasi melalui pendidikan politik (pendidikan demokrasi baik yang dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal). Pengembangan berpikir kritis melalui PKn sebagai pendidikan demokrasi perlu berdasarkan nilai – nilai Pancasila, bukan didasarkan ideologi lain agar mampu mengembangkan kehidupan demokratis yang hendak dibangun masyarakat Indonesia.

Dalam tulisan ini akan secara substansial dibahas: Mengapa pengembangan berpikir kritis dan kreatif kurang berkembang dalam dunia pendidikan Indonesia? Bagaimana mengembangkan berpikir kritis dan kreatif berdasarkan nilai nilai Pancasila? Membentuk warga negara yang cerdas dalam berdemokrasi Pancasila melalui berpikir kritis dan kreatif.

Mengapa Berpikir Kritis Dan Kreatif Kurang Berkembang Dalam Dunia Pendidikan Indonesia?

Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam pendidikan di Indonesia kurang berkembang. Untuk menjelaskan hal ini, dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, dari perspektif pedagogik. Munandar (1987:126) “Pada umumnya proses-proses pemikiran yang dilatih di sekolah terbatas pada kognisi, ingatan, dan berpikir konvergen. Berpikir divergen dan evaluasi kurang diperhatikan pengembangannya”. Padahal pelatihan berpikir divergen dan evaluatif sangat diperlukandalam pengembangan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian dari lacakan historis menunjukkan pedagogik Indonesia sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 sangat dipengaruhi oleh Langeveldisme yang kemudian digeser oleh pandangan progresivisme John Dewey dan dewasa ini cenderung berkembang rintisan kearah pedagogik kritis (Tilaar, 2011: 45 -48). Langeveldisme, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa pada waktu buku teks karya Prof. M.J. Langenveld, melihat masalah pendidikan sebagai masalah esensial yang diperlukan oleh keberadaan manusia. Pandangan Langenveld sangat dipengaruhi idealisme dan eksistensialisme dirasakan terlalu abstrak tidak menjawab tantangan kehidupan yang realistis, kemudian digeser pandangan progresivisme John Dewey dengan pandangan duniaya yang pragmatis. Bergesernya dari Langenveld ke pragmatisme John Dewey mendegradasikan pendidikan sebagai lembaga latihan. Program-program yang menghasilkan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar tampak menguat. Kondisi lahirnya rintisan pedagogik kritis yang melihat pendidikan dilihatnya sebagai bagian dari perubahan sosial dan jika mungkin perubahan sosial

tersebut diawali atau dipengaruhi oleh pendidikan. Oleh sebab itu menurut Tilaar, “pendidikan atau pedagogik untuk masyarakat Indonesia perlu diredifinisi” (Tilaar , 2011:52). Padahal berpikir kritis dan kreatif telah berkembang menjadi karakteristik atau watak bangsa Indonesia. Ada diskontinuitas antara yang dikembangkan para pendiri negara dengan yang dikembangkan di sekolah yang sangat kental orientasi pendidikannya ke Barat. Seperti dalam hal ini dikemukakan Roeslan Abdulgani (1986:63-64): “Tiga watak bangsa Indonesia, yaitu : keterbukaan (*receptivity*), keluwesan dan kekenyalan (*flexibility*), dan menyaring serta memilih-milih (*selectivity*), yang secara sintesa dipegang teguh sepanjang sejarah ...”.

Kedua , dari perspektif institusi pendidikan. Hal ini tampak bahwa “Institusi pendidikan mestinya menjadi ruang bagi para calon agen perubahan untuk menumbuhkan karakter, tanggung jawab, kemandirian berpikir dan bersikap, inovasi dan kreativitas. Situasi tersebut tidak akan pernah tercapai selama pendidikan masih menjadi alat/instrumen kekuasaan negara. Pada masa Orde Baru, sekolah merupakan instrumen negara untuk mencetak warga negara yang patuh. Pada masa Reformasi, fenomena instrumentalisme sistem pendidikan terjadi pada pemilihan para birokrat pendidikan, karena birokrat pendidikan ditunjuk berdasarkan afiliasi partai politik” (Adnan Buyung Nasution et.all.ed, 2007:298). Kondisi kurang mengembangkan berpikir kritis dan kreatif dalam hal ini lebih merupakan akibat institusi pendidikan dikembangkan tidak netral secara politik. Hal ini juga terjadi di sekolah tetapi karena penerapan pedagogik yang belum memusatkan perhatian kepada siswa. Seperti dinyatakan Prof. Sodik A. Kuntoro, sebagai “suatu sistem institusi sekolah selama ini banyak kelemahannya. Pada umumnya kegiatan pembelajaran didominasi guru dan buku untuk menyampaikan

pengetahuan yang ada di buku dan dikuasai guru. Pembelajaran di sekolah kurang memperhatikan dan menghargai pengetahuan yang dimiliki siswa dari pengalaman hidup sehari-hari di luar sekolah. Kondisi ini menyebabkan belajar di sekolah menjadi tidak kreatif, terasa kering dari keterlibatan perasaan dan emosi, tidak orisinal dan cenderung bersifat artificial dan penuh keterpaksaan” (Sodiq A. Kuntoro, 2007).

Ketiga, dari perspektif/teori imperialisme intelektual. Secara umum dalam masyarakat termasuk para akademisi juga tidak mudah mengembangkan berpikir kritis. Karena pada umumnya mereka terjebak atau menyediakan diri untuk melakukan pembenaran terhadap berbagai keinginan atau kepentingan elit pemerintah. Mengapa posisi sebagai intelektual begitu rapuh?. Hal ini dapat dijelaskan dengan Teori Imperialisme Intektual dan fenomena *Captive mind*. Teori atau perpektif ini pertama kali dikemukakan oleh Syed Husein Alatas pada 1969 bahwa imperialism tidak terbatas pada dimensi ekonomi dan politik. Menurut Alatas (Syed Farid Alatas, 2010: 41) ada enam ciri utama imperialisme: eksploitasi, pengawasan, penyesuaian (*conformity*), penempatan pihak pihak terdominasi ke dalam peran sekunder dalam masyarakat, rasionalisasi imperialism secara intelektual, dan watak inferior yang ditanamkan para penguasa imperialis. Selanjutnya Alatas menyatakan karakteristik imperialis ini beroperasi melalui penundukan secara politik, ekonomi dan sosial oleh bangsa lain. Karakteristik tersebut berlaku juga melalui imperialisme intelektual yang merupakan “dominasi pikiran satu bangsa atas bangsa lain.” Imperialisme intelektual tidak memungkinkan asimilasi kritis dan selektif atas pengetahuan yang bersumber asing dan mengakibatkan pengabaian tradisi intelektual lokal.

Keempat, dari perspektif budaya. Taufiq Ismail (Yudi Latif, 2014), menyatakan”... dewasa ini ada kecenderungan berkembang generasi sebagai ”generasi nol buku”, yang berpotensi mengalami kelumpuhan daya tulis, daya baca, dan daya pikir, secara tepat menysasar pusat syaraf kelumpuhan kebudayaan Indonesia.” Sementara, Yudi Latif (2014) menyatakan “...terdapat tanda-tanda bahwa ‘pikiran’ dan keberaksaraan tak lagi menjadi ukuran kehormatan. Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipta, karena kepintaran kembali dihinakan oleh ‘kebangsawanan baru’: kroni dan daulat modal.” Maraknya, ujaran kebencian, hoaks di media sosial juga mencerminkan kecenderungan melemahnya pengembangan berpikir kritis dan kreatif dalam masyarakat dewasa ini.

Bagaimana Mengembangkan Berpikir Kritis Dan Kreatif Berdasarkan Nilai Nilai Pancasila ?

Mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif dalam bidang politik (demokrasi) tentunya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga terhindar *dari Captive mind*. Hal ini penting agar produk dari pemikiran kreatif bersifat fungsional karena tidak kehilangan konteks Indonesia serta sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Prof. Sodik A. Kuntoro, dalam konteks ini menyatakan bahwa “Pengetahuan, nilai-nilai, dan ketrampilan dibangun manusia sebenarnya adalah sebuah konstruksi, kreasi (ciptaan), atau penciptaan kembali yang berada dan melekat dalam diri manusia (seseorang) dan digunakan untuk memecahkan masalah hidupnya untuk mewujudkan kehidupan yang mulia” (2008: 16). Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pengembangan pemikiran kritis dalam proses dan sebagai produk pendidikan yang berdimensi kemaslahatan bersama.

Mengembangkan pemikiran (intelektualitas) warga negara dalam pembelajaran PKn sebagai pendidikan demokrasi mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila maupun karakteristik pemikiran dalam ilmu – ilmu sosial utamanya ilmu politik. Maka dalam menumbuh kembangkan berpikir kritis dan kreatif sebagai salah satu bentuk pemikiran yang dikembangkan dalam pendidikan demokrasi berdasarkan Pancasila berarti mengacu pada nilai – nilai dasar Pancasila. Oleh karena itu, maka dapat pemikiran yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yakni pemikiran religius, humanis, nasionalisme, demokratis, dan keadilan sosial. Uraian berpikir kritis dan kreatif berbasis pada Pancasila, dapat digambarkan pada uraian berikut ini.

Pemikiran Religius

Dimaksudkan pemikiran religius, merupakan pemikiran yang didasarkan pada inspirasi atau referensi agama. Hal ini didasarkan bahwa “Ketuhanan dalam rangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur..... Ketuhanan dalam kerangka Pancasila menyerupai konsepsi “agama sipil” (*civic religion*), yang bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama namun juga secara jelas dapat dibedakan dari agama. Pretensinya adalah bagaimana menjadikan nilai – nilai moral Ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan publik-politik dalam konteks masyarakat multikultur-multiagama, tanpa menjadikan salah satu agama (unsur keagamaan) mendikte negara” (Yudi Latif, 2011: 110). Pemikiran yang demikian selalu menjunjung tinggi nilai agama . khususnya dalam hal membentuk warga negara yang baik. Oleh karena itu, karakteristik pendidikan demokrasi, tidak mengenal pemikiran sekular. Suatu

pemikiran yang memisahkan secara ketat antara agama dengan persoalan duniawian (khususnya politik). Sekularisme beralasan bahwa agama adalah persoalan individu, tidak boleh dibawa dalam persoalan publik (negara). Mengapa demikian, karena agama kebenarannya sudah pasti tidak dapat diperdebatkan lagi, sedangkan politik hakikatnya bagaimana mengkompromikan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Pandangan ini sebenarnya lemah, sebab nilai-nilai agama juga memiliki posisi universal yang dapat menjadi acuan atau inspirasi dalam menata kehidupan publik (bernegara). Begitu pula agama dan politik dalam interaksinya dapat saling melengkapi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti dikemukakan Kinloch (1989:236), yang melihat peranan agama (lembaga agama) membantu melestarikan kekuasaan politik, menekankan etika kerja dan merefleksikan struktur kelas, mendukung peranan dan moralitas keluarga, membantu menentukan norma yang dikembangkan pendidikan, dan menggunakan media berdasarkan basis kelompok dunia. Kemudian, agama dilihat dalam kaitannya dengan stabilitas sosial, berfungsi sebagai: (1) Mengikat masyarakat secara bersama-sama melalui ritual ibadah dan ketaatan pada kekuasaan yang suci. (2) Membekali masyarakat dengan norma dan nilai-nilai dasar yang lebih penting dan juga lebih dapat diterima masyarakat. (3) Membantu mengawasi penyimpangan sosial. (4) Menolong mendamaikan masyarakat terhadap kekerasan dan ketimpangan (Popenoe, 1989: 412-413). Munculnya instabilitas sosial di bidang politik, akhir-akhir ini terutama karena kemiskinan, apatisme terhadap pemerintahan yang sah, otoriterisme, kebiasaan menggunakan kekerasan, kurangnya toleransi. Dan agama sesungguhnya dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dengan demikian mengembangkan intelektual yang religius dapat dinyatakan sebagai pemaduan pikir dan zikir akan menghasilkan pemikiran yang berdimensi mengangkat martabat manusia dalam kedamaian dan ketertiban. Dimensi-dimensi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu sekularisme dalam segala bentuknya harus dihindarkan. Bentuk-bentuk sekularisme itu, misalnya: (1) Sekularisasi konstitusional, di sini lembaga-lembaga agama tidak lagi memberikan pengakuan dan dukungan khusus konstitusional. Dengan begitu ciri dan tujuan negara tidak lagi berdimensi keagamaan. (2) Sekularisasi kebijakan yaitu negara berhenti mengatur masyarakat berdasarkan kriteria keagamaan, dan memperluas peranan negara dengan mengambil peran yang sebelumnya dimainkan oleh agama. (3) Sekularisasi kelembagaan, yaitu struktur agama kehilangan arti penting dan pengaruh politik sebagai kelompok penekan, partai dan gerakan. (4) Sekularisasi agenda, yaitu proses di mana kebutuhan dan problem yang relevan dengan proses politik kehilangan isi keagamaan yang jelas, dan pemecahan berbagai masalah tidak lagi berdasarkan prinsip-prinsip agama. (4) Sekularisasi ideologis, yaitu proses di mana nilai-nilai utama dan sistem keyakinan yang digunakan untuk mengevaluasi kenyataan politik dan untuk pemberian maknanya tidak lagi diramu berdasarkan agama (Moyser, 1991: 1415).

Warga negara yang memiliki pemikiran religius berarti ia akan meramu pemikirannya dengan nilai-nilai agama dalam berpartisipasi memecahkan berbagai persoalan khususnya persoalan politik (kenegaraan), baik yang berkenaan dengan konstitusi (misal sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum), institusi politik (partai politik, kelompok penekan, gerakan) serta kebijakan politik. Juga tidak dibenarkan dalam konteks kehidupan publik mengembangkan dan

menyebarkan pemikiran yang melahirkan atheis dan tidak toleransi. Karena “Didalam ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dibenarkan adanya sikap dan perbuatan yang anti Tuhan Yang Maha Esa dan anti agama, atau dengan kata lain tidak menerima adanya faham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (atheisme). Dan yang seharusnya ada setelah melaksanakan semua perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya sehingga yang menjadi kebiasaan adalah toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan dan tidak dibenarkan tanpa ajaran agama, dan antara penganut agama harus saling hormat menghormati dan bekerjasama” (Noor Ms.Bakry, 2001: 101).

Pemikiran-pemikiran kritis dan kreatif terkait pemikiran relegius sebagai pemikiran mengkaitkan agama dengan politik (negara Pancasila), mengemuka dikalangan kiai, ulama, intelektual muslim, diantaranya Nasaruddin Umar, Kiai Sahal Mahfudh, dan Abdillah Toha. Nasaruddin Umar, dalam Zuhud Politik dan Politik Zuhud (Kompas, 3 Agustus 2018, halaman 6), menggambarkan fenomena pemikiran politik dalam kaitannya dengan agama. Zuhud politik, dapat digambarkan ketika Abu Bakar didaulat menjadi khalifah pengganti Nabi. Dalam pidato pengukuhan, Abu Bakar mengatakan:”Saya sadar bukan orang terbaik untuk menggantikan sebagai Nabi Muhammad SAW. Tetapi, karena kalian sepakat mengamanahkan hal ini kepadaku, saya terima dengan catatan kalian semua akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam mengemban amanah yang besar ini...”. Sedangkan yang dimaksud dengan “...politik zuhud atau politisi yang menggunakan dandanan agama sebagai upaya meraih simpati dan dukungan masyarakat.” Politik zuhud menggunakan agama sebagai alat politik untuk kepentingan diri maupun kelompok atau politik partisan. Politik zuhud ada pada agama

manapun. Politik zuhud tidak memfungsikan agama sebagai penjaga moral dan untuk rahmatan lilalamin. Dengan demikian politik zuhud tentunya tidak sejalan dengan pemikiran relegius. Pemikiran relegius lebih dekat menjadikan agama sebagai penjaga moral dan untuk rahmatan lilalamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa Nasaruddin Umar, “Carilah pemimpin yang *murū’ah*, yakni menjunjung tinggi kesetiakawanan dan nilai-nilai kemanusiaan”. Atau dalam pemikiran Kiai Zahal Mahfudh perintis Fiqih Sosial (Titik Nurul Aziz, eds., 2016: 251) berpolitik bagi umat Islam mestinya pada kerangka politik kebangsaan dan kerakyatan yang merupakan politik tingkat tinggi (*siyāsah ‘aliyah samiyyah*). Secara lebih lengkap Kiai Zahal, membagi politik dalam kerangka politik kebangsaan, kerakyatan dan politik kekuasaan. Politik kekuasaan merupakan wilayah dari partai politik untuk berdialog maupun berkompetisi dalam merebut ruang-ruang kekuasaan dan struktural. Sementara, politik kebangsaan dan kerakyatan merupakan ijihad politik untuk memperjuangkan nilai-nilai prinsip keagamaan, tanpa terjebak pada proses kontestasi perebutan kuasa. Selain itu Kiai Sahal, berpedoman bahwa Islam merupakan inspirasi politik, bukan aspirasi dan figih siyāsah dikembangkan dalam konfigurasi pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan Kiai Sahal adalah pandangan Abdillah Toha dalam Politik Ulama (Kompas, 4 Agustus 2018, halaman 6) “Bimbingan ulama dalam kehidupan bernegara harus lebih diarahkan pada kemaslahatan orang banyak dalam bentuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara”. Pendapat ini didasarkan bahwa ulama adalah ahli waris Nabi. Bila politik Nabi adalah untuk kemaslahatan dan bukan politik kekuasaan maka seharusnya itulah yang diteladani oleh ulama.

Pemikiran Humanistis

Dimaksudkan pemikiran humanistis, bahwa seorang warga negara dalam memecahkan berbagai persoalan harus mempertimbangan hak-hak asasi manusia. Ini berarti harus menghargai hak-hak atau kebebasan orang lain, tidak bersifat diskriminatif baik atas dasar perbedaan agama, suku, tradisi, budaya dan saling mencintai sesama manusia serta sikap tenggang rasa. Karena “Perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini, pertama yang perlu diperhatikan dan yang merupakan dasar hubungan sesama umat manusia, ialah pengakuan hak – hak asasi manusia. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepa – selira, yaitu: (1) Secara negatif : Janganlah berbuat sesuatu terhadap orang lain apa yang tidak saudara kehendaki orang lain berbuat demikian terhadap saudara. (2) Secara positif: Berbuatlah terhadap orang lain apa yang saudara kehendaki orang lain juga berbuat demikian terhadap saudara” (Noor Ms.Bakry, 2001: 105-106). Pemikiran humanistis dikembangkan baik dalam pergaulan nasional maupun pergaulan internasional.

Pemikiran Nasionalisme

Dimaksudkan pemikiran nasionalisme (kebangsaan), seorang warga negara dalam partisipasi memecahkan persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa mempertimbangkan jangan sampai dapat mengakibatkan atau memicu berkembangnya perpecahan di antara kelompok bangsa yang menjurus disintegrasi nasional. Sebab prinsip sila ketiga Pancasila adalah “meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul

persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*), yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan “bhineka tunggal ika (Yudi Latif, 2011: 369). Begitu pula berpikir yang diwarnai oleh nilai nasionalisme, tidak mengarah pada melenyapkan kepentingan individu karena semata-mata mengedepankan kepentingan kolektif, tetapi berpikir bagaimana mengharmoniskan antara kedua kepentingan itu.

Berpikir yang diwarnai nilai kebangsaan, pada dasarnya untuk mempertebal identitas sebagai bangsa dan untuk kemandirian sebagai bangsa (*elfreliance*). Tetapi harus dihindari berpikir kebangsaan yang dapat mengarah pada nasionalisme sempit (*chauvinisme*) yang menganggap rendah bangsa lain. Begitu pula kemandirian sebagai bangsa, tidak mengarah kepada “membenci bangsa lain (*xenophobia*), dan bukan isolasi dan imitasi” terhadap bangsa lain (Roeslan Abdulgani, 1986:196). Mandiri, juga tidak berarti tertutup terhadap pergaulan dan kerja sama dengan bangsa lain. Kerja sama dengan bangsa lain tetap harus dikembangkan dalam paradigma (model) *interdependensi* (saling ketergantungan) yang memposisikan kesederajatan dalam berbagai kepentingan (politik, ekonomi, dsb.). Oleh karena itu harus dihindari pemikiran kerja sama yang menjurus berkembangnya model ketergantungan (*dependent*), yang akan memposisikan negara dunia ketiga sebagai kepanjangan kepentingan kapitalisme internasional, sehingga secara politik dan ekonomi menjadi negara pinggiran.

Dengan demikian dapat dinyatakan pemikiran kebangsaan (nasionalisme) menghendaki pengembangan pemikiran yang berdimensi *identitas nasional* berarti harus memperhatikan kepentingan masyarakat

Indonesia yang majemuk dan kemandirian sebagai bangsa (bangsa yang merdeka dan berdaulat). Sampai kita memperingati 73 tahun kemerdekaan negara Indonesia yang tercinta, keberagaman bangsa menjadi suatu kebanggaan yang menonjol. Ketika ditanyakan “Selama kemerdekaan Indonesia, apa yang membuat anda bangga menjadi warga negara Indonesia?”, jawaban yang muncul: 75,2 persen keragaman suku dan budaya, 16 persen kekayaan alam, 2,7 persen makanan khas, 3,5 persen lainnya dan 1,7 persen tidak tahu (Kompas, 20 Agustus 2018). Pemikiran kebangsaan juga semestinya berdimensi *humanistis* dalam arti harus menghindari *chauvinistis*, *xenophobia*, tetapi berpikir untuk memperkuat kesederajatan dalam posisi maupun memetik kemanfaatan dalam kerja sama dengan bangsa lain.

Pemikiran Demokratis

Berpikir yang dilandasi nilai demokratis, dimaksudkan setiap warga negara dalam berpartisipasi memecahkan berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Ini berarti rakyatlah sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. Negara dan pemerintah berada di bawah kendali atau kontrol rakyat baik langsung atau tidak langsung (melalui perwakilan). Apa yang dilakukan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan rakyat dan dipertanggung-jawabkan kepada rakyat, karena mereka menduduki jabatan atas pilihan rakyat secara langsung atau tidak langsung. Pemerintah bertugas memberikan pelayanan kepada rakyat (*public service*), bukan justru rakyat yang memberikan pelayanan kepada pemerintah.

Berpikir demokratis yang berintikan kedaulatan rakyat, mengandung jaminan terhadap keberadaan nilai-nilai perbedaan (*pluralisme*),

kebebasan, persamaan, suara mayoritas atau musyawarah, oposisi yang loyal (kontrol yang konstruktif terhadap penguasa atau oposisi yang tidak bermaksud menjatuhkan pemerintah tetapi dimaksudkan agar pemerintah selalu memperhatikan aturan main dan/atau kepentingan umum) dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Ini berarti pemikiran demokratis, menghendaki setiap warga negara yang baik mampu menghasilkan pemikiran yang akomodatif terhadap pluralisme, atau konsisten pada pendirian pemikirannya sendiri tetapi tetap menghargai pemikiran orang lain. Juga menghendaki pemikiran warga negara yang mampu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penguasa terhadap publik (*accountability*).

Pengembangan pemikiran demokratis, perlu memperhatikan ungkapan Bung Karno,

“Demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan rakyat” (Yudi Latif, 2011:475). Pemikiran yang mendasarkan pada demokrasi Indonesia (demokrasi Pancasila) adalah bukan pemikiran yang berlandaskan individualisme maupun kolektivisme, melainkan pada jiwa kekeluargaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Bung Karno, pada pidato 1 Juni 1945: “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi, kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan...Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang member hidup...” (Yudi Latif, 2011:383). Pemikiran demokratis di atas

dapat menjamin untuk mewujudkan cita – cita nasional sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pemikiran Berorientasi pada Keadilan Sosial

Pemikiran berorientasi pada keadilan sosial, pada dasarnya memandang bahwa setiap warga negara semestinya mampu memecahkan masalah-masalah yang menjadi kendala upaya untuk mewujudkan keseimbangan kesejahteraan ekonomi dan sosial (kesejahteraan umum) bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, maka setiap warga negara hendaknya juga memiliki pemikiran bagaimana agar dirinya menjadi warga negara yang berekonomi secara efektif. Yaitu belajar untuk mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga setiap warga negara akan menjadi produktif. Produktivitas warga negara ini pada gilirannya dapat memberikan sumbangan pada upaya meningkat kesejahteraan umum. Misalnya pemikiran-pemikiran yang perlu dikembangkan antara lain pemikiran yang mengarah pada upaya mewujudkan imbalan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi di tingkat daerah dalam kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial (Mubyarto,1991: 241).

Pemikiran yang berorientasi kepada keadilan sosial, banyak menghadapi kendala. Kendala itu misalnya, masih kuatnya pemikiran-pemikiran yang mengarah pada pemenuhan kepentingan: keluarga atau kerabat (*nepotisme*), praktik ekonomi perkoncoan (*crony capitalism*), pemerintahan yang suka “ngutil” (*cleptocracy*), dan monopoli dalam segala bentuknya, dan menguatnya neo-liberalisme. Sesungguhnya berbagai persoalan di atas, telah diantisipasi oleh Bung Hatta bapak

pendiri bangsa dengan pemikiran kritis dan kreatif yaitu ekonomi kerakyatan. Hanya saja belum secara sungguh- sungguh direalisasikan, hingga usia kemerdekaan Indonesia ke 73 tahun.

Revrisond Baswir (2016:105) menggambarkan bahwa “...ekonomi kerakyatan adalah sebuah upaya politik yang secara jelas bertujuan untuk mencegah berlanjutnya kesewenang-wenangan kaum kapitalis, termasuk kesewenang-wenangan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral seperti ADB, Bank Dunia, IMF, dan WTO, yang merupakan alat pihak kolonial untuk melaksanakan agenda-agenda ekonomi neo liberal terhadap Indonesia”. Sedangkan Sri Edi Swasono (Baswir, 2016:28) berpandangan bahwa kedudukan anggota masyarakat sebagai subyek perekonomian Indonesia (ekonomi kerakyatan,pen.) tergambar dalam konsep Triple-Co, yaitu “...turut memiliki alat-alat produksi (*co-ownership*), turut mengambil keputusan-keputusan ekonomi (*co-determination*), dan turut menanggung segala akibat dari pelaksanaan keputusan-keputusan ekonomi tersebut (*co-responsibility*).” Pemikiran Swasono ini, merupakan produk pemikiran kritis dan kreatif yang berorientasi keadilan sosial. Karena pemikiran ini hendak melepaskan dari belenggu terhadap determinisme dari neoliberal yang menjadi masalah mengapa tidak mudah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sulitnya Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial tampak masih menghadapi tantangan kemiskinan. Gambaran tentang kemiskinan (lihat, Suwidi Tono, 2018) tampak pada catatan Bank Dunia pada akhir 2017 memperkirakan tahun ada 35 % penduduk miskin dan rentan kemiskinan, 45% bersiap masuk kelas menengah, 20% menengah - atas. Menurut BPS, Maret 2018 ada 25,95 juta penduduk miskin. Dari jumlah itu 15,81 juta tinggal di Pedasaan. Kemudian Bank Dunia mencatat pada

th 2018 ada peningkatan kelas menengah menjadi 52 juta orang. Menghadapi persoalan kemiskinan ini lahirlah pemikiran kritis dan kreatif berorientasi keadilan sosial yaitu meningkatkan kapabilitas dan aksestabilitas warga negara /masyarakat miskin dan secara struktural perlu penataan ekonomi dan politik agar kesenjangan tidak semakin menganga. Misalnya secara struktural ada kebijakan politik yang tegas agar kedaulatan rakyat (demokrasi) di bidang ekonomi jangan sampai digusur oleh kedaulatan pasar (kapitalisme). Pemikiran semacam ini harus ditumbuh kembangkan dalam masyarakat sampai menjadi suatu realitas.

Membentuk Warga Negara Yang Cerdas Dalam Berdemokrasi Pancasila Melalui Berpikir Kritis Dan Kreatif

Warga Negara yang cerdas dimaksud warga negara sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya terhdap kemuliaan diri dan kemuliaan bangsa dan negaranya. Warga negara yang cerdas adalah sadar bahwa ia merupakan anggota suatu institusi politik yang bernama negara atau menjadi warga politik. Dalam konteks ini Hannah Arendt (Yudi Latif.2001) menyatakan "...menjadi warga politik berarti hidup dalam suatu polis, tempat segala sesuatu diselesaikan lewat kata dan persuasi, bukan lewat paksaan dan kekerasan". Dalam tradisi Yunani memaksa orang lewat ancaman, kebiasaan memaksa ketimbang membujuk dinilai cara-cara prapolitik dinisbatkan kepada karakteristik orang-orang yang hidup di luar polis. Sebagai warga negara seharusnya menjadi manusia yang beradab, manusia yang memiliki sopan-santun dan hidup dalam keteraturan sosial. Yudi Latif (2001) menegaskan bahwa "...tugas insan politik adalah membangun suatu *civil society*,

mengembangkan tertib politik dan nilai-nilai keberadaban di bawah kepemimpinan hukum.”

Seharusnya manusia berkemampuan untuk membangun masyarakat madani. Sebab “...*fitrah* adalah universal bagi semua orang... *hanifah* adalah sifat alami setiap individu, maka setiap orang mempunyai potensi menemukan kebenaran yang akan membawanya pada keselamatan...untuk menjaga fitrah Tuhan mengirimkan rasul-rasul untuk setiap bangsa dan semua masyarakat” (Nurcholish Madjid, 2007: 28). Dengan memiliki potensi tersebut, maka “...suatu hak dasar setiap individu untuk berpartisipasi dalam semua proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka melalui diskusi terbuka dan musyawarah (*syura*). Nabi sendiri telah diperintahkan untuk melaksanakan musyawarah” (Nurcholish Madjid, 2007: 33-34). Bahkan salah satu tokoh pemikir demokrasi liberal yaitu J.Schumpater (Zamroni, 2003: 2), menyatakan bahwa “...kehidupan politik menjadi perjuangan kekuasaan yang tidak jarang melecehkan jiwa demokrasi. Oleh karena itu perjuangan politik harus diimbangi dengan upaya penciptaan konsensus, sebab tanpa konsensus tidak ada demokrasi.”

Mekanisme demokrasi Pancasila dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup berbangsa dan bernegara mengedepankan musyawarah mufakat (konsensus). Bukan mengedepankan voting yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan politik demokrasi liberal. Disini tampak dalam demokrasi Pancasila memberikan ruang untuk berpartisipasi melalui pemikiran kritis dan kreatif warga negara dalam pengambilan keputusan yang terkait kehidupan bersama.

Bung Hatta (Kahar & Susila, 2012: 132) mengkritik “Revolusi Perancis 1789 yang dikenal sebagai sumber demokrasi Barat, yang bersemboyan: kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tidak

terlaksana dalam praktek. Karena revolusi sebagai perjuangan bersifat individual yaitu kemerdekaan orang – perorangan dari ikatan feodalisme”. Dengan demikian, kemerdekaan individu di utamakan, sehingga melupakan semboyan yang lain yaitu persamaan dan persaudaraan sebagai kesatuan. Dalam politik persamaan relatif dapat diwujudkan tetapi dalam ekonomi tetap berlaku dasar yang tidak sama. Kapitalisme tumbuh dengan subur, persaudaraan juga semakin sulit dikembangkan. Demokrasi Barat hanya terbatas pada demokrasi politik, tidak samapai pada demokrasi ekonomi. Kritik Bung Hatta atas demokrasi Barat/liberal di atas, kemudian dengan mengajukan demokrasi alternatif yang dinilai tepat dalam mewujudkan kemanusiaan dan keadilan sosial, yang dikenalkan sebagai demokrasi sosial. Selengkapnya Bung Hatta (Kahar & Susila,2012:133), menyatakan:

“Nyata bahwa demokrasi semacam itu (demokrasi Barat,pen.) tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang menciptakan terlaksananya dasar – dasar kemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidak dapat mewujudkan persamaan dan persaudaraan. Disamping demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh aspek kehidupan yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di depan, dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktek kehidupan nasional di kemudian hari”.

Dengan demikian untuk membentuk warga negara yang berkemampuan berpartisipasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembuatan keputusan politik, diperlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk mengembangkan demokrasi yang berkeadilan sosial. Dalam kontek ini Eric Weiner (2016) menengarai bahwa “tidak ada korelasi antara era keemasan kenegaraan dan demokrasi. Substansi

yang perlu dihadirkan adalah kebebasan kreatif, bukan demokrasi semata” (Yudi Latif, 2018). Richard Florida dalam *The Rise of the Creative Class* (2002) sebagaimana dikutip Yudi Latif, telah melukiskan secara baik tentang peran esensial dari kreativitas ini. Bahwa pusat pertarungan ekonomi saat ini tidaklah seperti pada transisi dari era pertanian ke industri yang mengandalkan input fisik (tanah dan tenaga manusia), melainkan bersandarkan pada inteligensia, pengetahuan dan kreativitas. Kreativitas manusia-lah satu-satunya sumberdaya yang tak terbatas. Negara-negara dengan *creative capital* yang tumbuh baik, seperti Finlandia, Swedia, Denmark, Belanda, Irlandia, Canada, Australia dan New Zealand, terbukti memiliki daya saing perekonomian yang lebih kuat.

Namun untuk mengembangkan berpikir kritis dan kreatif diperlukan upaya memfasilitasi kemunculannya dengan memahami karakteristik atau ciri-cirinya. Menurut Munandar (1987: 137) “...perilaku kreatif baru akan muncul jika individu memiliki baik ciri-ciri kognitif dari kreativitas, seperti kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas dalam berpikir, maupun ciri-ciri aktif dari kreativitas, seperti rasa ingin tahu, berani mengambil resiko, merasatantangan dan sebagainya.” Juga perlu memperhatikan pandangan Prof.Noeng Muhadjir (1993: 13), bahwa “...nilai demokrasi, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan semacamnya merupakan bagian dari pilar kehidupan kemasyarakatan. Bila setiap kali pilar dicabut dan diganti betapa akan berulang kali stabilitas kehidupan kemasyarakatan tergoncang...Bila gagasan demokrasi Indonesia terrealisasikan penuh, gagasan demokrasi atas musyawarah dan mufakat menampilkan konsep yang jauh lebih sempurna daripada gabungan demokrasi politik dan demokrasi sosial.” Ini berarti membentuk warga negara cerdas dalam berdemokrasi Pancasila perlu mensinergikan dan

merangkaikan secara utuh antara kondisi dan situasi yang dapat menumbuhkan berpikir kritis dan kreatif, aktivitas berpikir kritis dan kreatif serta nilai-nilai demokrasi Pancasila. Sehingga hasil pemikiran kritis dan kreatif yang demikian berkontribusi dalam mengembangkan demokrasi yang mensejahterakan/berkeadilan sosial.

Referensi

- Abdulgani, Ruslan. 1986. *Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta : Pustaka Merdeka.
- Alatas, Syed Farid. 2010. *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia Tanggapan Terhadap Eurosentrisme*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Bakry, Noor Ms. 2001. *Orientasi Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Liberty.
- Baswir, Revrisond. 2016. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baswir, Revrisond. 2009. *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme*. Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.
- Kompas 16 Agustus 2018. Demokrasi Masih Stagnan.
- Janah, Titik Nurul. Eds. 2015. *Metodologi Fiqih Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji*. Pati-Jawa Tengah : STAIMAFAPRESS.
- Kahar,Joko S; Susila, Adib. 2012. *Pokok Pokok Pemikiran Bung Hatta*. Yogyakarta : Buku Litera.
- Kuntoro, Sodiq A. 2007. *Dinamika Belajar Informal dan Implikasi Edukatif di Sekolah*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Kuntoro, Sodiq A. 2008. Sketsa Pendidikan Humanis Religius, Paper disampaikan sebagai bahan diskusi dosen di FIP. 5 April 2008. FIP UNY.

- Kinloch, Graham C. 1989. *Power as Society*. New Jersey: Prentice Hall.
- Latif, Yudi. 2018. Kepemimpinan Kemerdekaan. Kompas 16 Agustus 2018.
- Latif, Yudi. 2014. Rahim Budaya Pemimpinan Pergerakan. <http://www.aktual.co/kakihari/rahim-budaya-pemimpin-pergerakan-bagian-akhir>.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2001. Menjadi Warga Politik. Kompas 12 Maret 2001.
- Madjid, Nurcholish. 2007. Konsep Islam tentang Manusia dan Implikasinya terhadap Apresiasi Muslim Mengenai Hak – hak Sipil dan Politik. Dalam Kamdani, Penyunting. *Islam dan Humanisme*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, Noeng. 1993, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*. Edisi IV . Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Mubyarto. 1991. “*Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi*”, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (eds.), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Nasution, Adnan Buyung, et.al. 2007. *Membongkar Budaya : Visi Indonesia 2030 dan Tantangan Menuju Raksasa Dunia*. Jakarta : Kompas.
- Pepeno, David. 1989. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Perayaan Kemerdekaan dan Nasionalisme. Kompas 20 Agustus 2018.
- Tilaar, H.A.R. 2011. Pedagogik Kritis : Perkembangan, Substansi, dan Perkembangannya di Indonesia, dalam Tilaar, H.A.R., Jimmy Ph.Paat., Lody Paat., Ed. *Pedagogik Kritis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tono, Suwidi. 2018. Kemiskinan dan Ketimpangan. Kompas 10 Agustus 2018.

Umar, Nasaruddin. 2018. Zuhud Politik dan Politik Zuhud. Kompas , 3 Agustus 2018.

Utami, SC Munandar. 1987. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*. Jakarta : Gramedia.

Zamroni. 2003. *Pendidikan Untuk Demokrasi : Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta : BIGRAF.

MERAWAT KEBERAGAMAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KONTEKSTUAL

Suyato

Menurut Friedman (2007), di dalam bukunya yang berjudul *the World is Flat*, dunia saat ini sudah rata. Menurut dia, ada sepuluh faktor yang “meratakan” dunia saat ini, yaitu peristiwa 11/9/89, peristiwa 8/9/95, *Work Flow Software*, *Uploading Flattener*, *Outsourcing Flattener*, *Offshoring*, *Supply-Chaining*, *Insourcing*, *In-forming*, dan *The Steroids*. Di dalam buku tersebut dipaparkan bagaimana kesepuluh “kekuatan” tersebut telah mengubah wajah dunia seolah sama. Di dalam berbagai kesempatan saya sering menggambarkan kondisi tersebut dengan pernyataan bahwa “wajah” dan (dan mungkin juga perilaku warga) Solo (Indonesia) nyaris sama dengan “wajah” Oslo (Norwegia). Apa yang mendominasi pemikiran warga Klaten (Jawa Tengah) nyaris sama dengan pola pikir orang Clyton (Victoria, Australia). Hal ini diperkuat oleh Peters (2001) yang menyatakan bahwa neoliberalisme telah melanda ke seluruh penjuru dunia yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan, bukan hanya di bidang ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, keberagaman Indonesia tentu berada dalam bahaya. Oleh karena itu perlu adanya rekayasa pendidikan, khususnya PKn. Saya menawarkan PKn kontekstual, yang bisa mengakomodasi gejala globalisasi, lokalisasi, dan individualisasi.

David Korten (1998: 12) menyatakan bahwa kisah perdamaian, kesetaraan, hak asasi manusia, lingkungan yang sehat dan kesejahteraan universal yang mendasarkan diri pada masyarakat pasar global yang dilambangkan dengan paradigma globalisasi neoliberal mengandung tiga kelemahan. Pertama, paradigma semacam itu mengakui tidak adanya

keterbatasan pertumbuhan. Kedua, ekspansi global ekonomi pasar “menguangkan hubungan manusia, melemahkan jaringan sosial, dan merusak kehidupan lebih cepat dibanding lapangan kerja yang ditawarkan. Ketiga, institusi pasar global yang mengontrol aset-aset yang telah diprivatisasi merespon hanya tuntutan dunia uang, melupakan tuntutan dunia kehidupan. Oleh karena itu, Korten menyarankan sejumlah prinsip untuk milenium ketiga: prinsip kesinambungan, prinsip kesetaraan, dan prinsip keterlibatan sipil. Dan dia mengharapkan lahirnya pluralitas demokratis di mana efisiensi pasar berkaitan dan dikondisikan oleh kepentingan bersama (*public good*). Dengan kata lain, Korten secara implisit menyarankan penyandaran pada konsepsi baru tentang relasi sosial dan ekososial yang tidak mungkin dalam pengertian liberal atau neoliberal tentang individu. Di dalam membentangkan kemungkinan-kemungkinan bagi reformasi global, Pieterse (2000) membedakan tiga perspektif: neoliberalisme, didukung IMF dan WTO, yang mengandalkan penyesuaian struktural dan teknikal sebagai cara reformasi, liberalisme sosial, didukung oleh lembaga-lembaga Bank Dunia dan OECD, yang berusaha melakukan reformasi di dalam struktur, dan demokrasi sosial, yang ia sebut “*global New Deal*”, didukung oleh ILO, dan PBB, yang mengupayakan reformasi melalui struktur baru.

Hegemoni Agenda Neoliberalisme di dunia Pendidikan

Agenda neoliberalisme di dalam dunia pendidikan antara lain dapat disarikan melalui pemahaman tentang mental tatakelola yang oleh Peters disebut dengan *Neoliberal Governmentality* (Peters, 2001, pp. 21-22). Menurut dia ada dua belas unsur tata kelola yang diusung

neoliberalisme ke dalam dunia pendidikan. Keduabelas unsur itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Liberalisme klasik sebagai kritik terhadap *state reason*. Sebuah doktrin politik berkaitan dengan *self-limiting state* di mana keterbatasan-keterbatasan pemerintah dipahami berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan *state reason*, misalnya kemampuannya untuk mengetahui (*its power to know*) sehingga menjadi sebuah kritik abadi terhadap aktivitas hukum dan pemerintah.
2. Bentuk alami versus bentuk buatan tentang pasar. Pandangan Hayek tentang hukum alam berdasarkan lembaga yang teratur secara spontan di dalam dunia fisik (seperti kristal, galaksi) dan sosial (seperti moralitas, bahasa, pasar) telah digantikan dengan penekanan pada pasar sebagai sebuah artefak atau bentuk yang diturunkan secara budaya dan perspektif konstitusional (tumbuh di luar pendekatan *catallaxy*) yang memfokuskan pada aturan hukum-yuridis mengatur kerangka pikir di mana *game of enterprise* dimainkan.
3. Politik sebagai inovasi pertukaran *Public Choice theory* (“marketisasi negara”). Perluasan pengertian tertata secara spontan tentang lembaga pasar yang dikemukakan Hayek melampaui dari pertukaran sederhana ke pertukaran kompleks dan pada akhirnya ke semua proses kesepakatan secara sukarela di antara orang-orang.
4. Hubungan antara pemerintahan dan pemerintah sendiri (*The relation between government and self-governmen*). Liberalisme sebagai sebuah doktrin yang menuntut syarat bahwa para individu bebas untuk mengatur. Oleh karena itu pemerintah

dikonsepsikan sebagai komunitas dari para individu yang bebas, otonom, dan bisa mengatur diri sendiri (*self-regulating*). Ini merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang mengarah pada “proses pertanggung-jawaban” kepada individu sebagai pelaku moral berdasarkan kebangkitan neoliberal (berdasarkan premis dengan asumsi pada individualitas, rasionalitas, dan *self-interest*) sebagai pendeskripsian ulang yang bersifat mencakup semua tentang sosial sebagai sebuah bentuk ekonomis.

5. Hubungan baru antara pemerintahan dengan manajemen. Munculnya manajerialisme baru yang disebut “*New Public Management*” yang menerapkan pengalihan dari kebijakan dan administrasi menuju manajemen, dengan menerapkan gaya-gaya manajemen sektor privat, menekankan pada “kebebasan untuk mengelola” dan pemajuan “swa-kelola” (yaitu entitas-entitas dan individu yang semi-otonom).
6. Sebuah proses “*degovernmentalization*” negara (dipandang sebagai sebuah teknik positif pemerintahan). Pemerintahan berlangsung atau terjadi “melalui” pasar, termasuk pemajuan bentuk-bentuk pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan, dan keajahteraan sosial) yang bersifat *consumer-driven* termasuk pengalihan daya (*contracting-out*), pengembangan semi-pasar untuk pelayanan publik dan privatisasi.
7. Pemajuan hubungan baru antara pemerintahan dan pengetahuan. “*government at a distance*” dikembangkan melalui hubungan antar bentuk-bentuk keahlian (sistem keahlian) dan politik, disertai dengan pengembangan bentuk-bentuk baru akuntabilitas sosial yang bertanggung jawab atas *actuarial rationality*. Referendum dan jajak pendapat yang intensif menjadi mungkin

dilakukan melalui teknologi informasi baru, dan privatisasi dan individualisasi tentang “pengelolaan risiko” (*risk management*) bersama-sama dengan pengembangan bentuk baru prudensialisme.

8. Sebuah teori ekonomi demokrasi (marketisasi demokrasi). Ada paralel secara struktural yang sedang muncul antara sistem politik dan ekonomi. Partai politik telah menjadi wira usaha di dalam pasar pencari suara (*entrepreneur in vote-seeking marketplace*), pemanfaatan konsultan media profesional untuk menjual kebijakan kandidat sebagai sebuah produk, pemilih telah menjadi konsumen individual yang pasif. Singkatnya, demokrasi telah menjadi barang komoditas dengan mengorbankan proyek atau agenda demokratisasi, dan negara telah menjadi bawahan pasar.
9. Penggantian “komunitas” menjadi “sosial”. Desentralisasi, pelimpahan, pendelegasian kekuasaan atau otoritas serta tanggung jawab dari pusat ke daerah, lembaga lokal, dan “komunitas”, dengan pengembangan bentuk-bentuk baru “*social capital*” dan saling penetrasi antara wilayah *private* dan *public*.
10. Rekonstruksi budaya sebagai tujuan kebijakan yang disengaja (marketisasi sosial). Pengembangan “masyarakat usaha” sebagai tujuan kebijakan mencakup privatisasi sektor publik, pengembangan pasar semu, marketisasi pendidikan dan kesehatan, dan penekanan pada sebuah kurikulum nasional tentang kompetisi dan usaha.
11. Kesadaran ekologis yang rendah. Munculnya konsep “kapitalisme hijau” dan “konsumerisme hijau” disertai dengan modernisasi ekologis yang bersifat linier. Juga telah terbukti di

dalam “pertumbuhan takterbatas” dan adopsi solusi pasar terhadap masalah ekologis.

12. Pemajuan paradigma globalisasi neoliberal. Perekonomian dunia diintegrasikan oleh IMF, World Bank, dan WTO berdasarkan pada konsep “perdagangan bebas” dan dilaksanakan pada persetujuan regional dan internasional yang tidak ada kontrol regulasi pada kapital global.

Penulis berpendapat, setidaknya ada tiga catatan penting yang perlu dikritisi berkaitan dengan praksis pendidikan saat ini. Pertama, dominasi paradigma positivistik di dalam pengembangan disiplin ilmu, termasuk Ilmu Pendidikan. Kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama adalah pendekatan *one size fits all*. Yang ketiga, kelemahan Teori Asimilasionist di dalam pembelajaran PKn. Uraian singkat ketiga catatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Paradigma positivistik yang dicirikan oleh beberapa asumsi (1) semua pengetahuan yang *legitimate* adalah pengetahuan ilmiah-semua pengetahuan ilmiah harus bisa diverifikasi secara empiris; (2) semua peneliti pendidikan harus menggunakan metode yang dengan yang digunakan untuk meneliti ilmu alam; (3) dunia ini adalah seragam dan objek kajian akan selalu konsisten di dalam eksistensi dan perilakunya; (4) variabel penyebab sesuatu hal terjadi bersifat terbatas dan dapat diketahui, dan di dalam tradisi positivistik, dapat dikontrol; (5) jika para peneliti menggunakan metode kuantitatif secara cermat dan hati-hati maka kita akan tahu apa yang dibutuhkan di dalam reformasi pendidikan sehingga pada akhirnya kita akan memahami kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut; (6) objektivitas adalah sesuatu yang mungkin –fakta dan nilai di dalam penelitian pendidikan dapat selalu dipisahkan; (7) hanya ada satu kebenaran yang sejati-yang diungkap dengan penelitian

positivistik dan tujuan pendidikan adalah terdiri dari penyampaian realita tersebut kepada siswa; dan (8) tidak menghargai kompleksitas profesional tindakan pembelajaran- guru menjadi penyampai informasi bukan praktisi ahli yang berketerampilan tinggi (Kincheloe, 2006, hal. 12-15).

Kritik keras terhadap dominasi paradigma positivistik antara lain dikemukakan Kincheloe dengan istilah FIDUROD (Kincheloe, 2008). Fidurod adalah sebuah epistemologi yang berpendirian bahwa pengetahuan itu bersifat formal, intractable, decontextualized, universalistic, reductionistic, dan One Dimensional. Dasar-dasar epistemologi tersebut bisa dijelaskan secara singkat sebagai berikut. **Formal**, dihasilkan dengan cara kepatuhan yang ketat atau kaku terhadap metodologi penelitian yang tidak akan pernah berubah tidak peduli seberapa baru kondisi lingkungan yang dihadapi sekalipun memberikan stimulasi untuk memikirkan ulang cara penelitian yang sedang digunakan. **Intractable**, mendasarkan asumsi bahwa dunia pada hakikatnya merupakan entitas yang bersifat statis, tidak berubah. Apa yang kita temukan saat ini, misalnya konsep tentang dunia anak-anak, maka akan tetap seperti saat ditemukan untuk selamanya. Tentu saja pemahaman semacam ini mengabaikan kondisi lingkungan yang selalu berubah, termasuk orang yang menelitinya. **Decontextualized**, bahwa pengetahuan telah dikonstruksi oleh peneliti yang telah melakukan dekontekstualisasi dari beragam konteks yang merupakan bagian dari dan memberikan makna. Sebagai contoh, pengalaman hidup siswa diabaikan oleh para penguji tes kecerdasan yang biasa disebut *IQ Test*.

Universalistic, bahwa apa yang diungkap peneliti yang telah mengikuti prosedur peneliian dengan ketat adalah pengetahuan yang bersifat universal. Sebelum era Einstein, universalitas gravitasi

merupakan kebenaran yang mendominasi dunia, tetapi setelah terungkap bahwa fenomena yang mendukung teori baru (Teori Relativitas), keuniversalan teori dipertanyakan, apalagi di dalam ilmu sosial. **Reductionistic**, di mana di didalam membangun sebuah teori untuk mengungkap kebenaran hanya memfokuskan pada faktor-faktor atau fenomena terpilih dengan mengabaikan (*to exclude*) banyak faktor lainnya. Dengan demikian pemahaman yang dihasilkan bersifat reduksionistik. Struktur nilai dan keyakinan peneliti termasuk keberagaman konteks yang berpengaruh terhadap pembentukan sebuah teori diabaikan di dalam paradigma positivistik ini. **One Dimensional**, dibangun atas dasar keyakinan bahwa ada dan hanya satu realitas kebenaran yang bisa diungkap para peneliti apabila mereka mengikuti langkah-langkah prosedural di dalam penelitian secara cermat dan ketat. Singkat kata, pengetahuan yang dibangun Barat lebih dari 350 tahun merupakan refleksi yang telah resertifikasi atas realitas dunia ini. Siapapun yang membangun di luar pedoman FIDUROD tersebut dijuluki gila, anti Barat, musuh peradaban Barat, atau minimal seorang ahli yang buruk (Kincheloe, 2008: 22-23).

Connell (2009) sampai pada kesimpulan bahwa guru-guru yang baik saat ini berada pada lapangan yang berbahaya. Oleh karena itu dia menggagas perlunya dikembangkan pandangan baru tentang kualitas dan profesionalisme guru. Sementara Liasidou and Symeou (2016) menyatakan bahwa kapitalisme baru dan orientasi ideologis neoliberal telah menciptakan budaya standardisasi kependidikan, di mana kualitas pendidikan sebangun dengan seberapa sekolah atau lembaga pendidikan mampu memenuhi atau mencapai standard yang telah ditetapkan. Hal senada dikemukakan Dudley-Marling & Barker (2012: 13) bahwa *...professional effectiveness has been solely gauged againts performance*

indicators linked to examination results and data driven accountability regimes. Bahkan lebih tegas lagi Tsang (2018:13) menyatakan bahwa dampak dari kebijakan berupa reformasi administrasi dan manajerial sebagai berikut.

“The findings indicate school administration and managerialist educational reforms as two institutional forces that technically and cognitively disempower teachers. To some extent, they are not independent but correlated forces....in other words, school administration and managerialist educational reforms may conjointly disempower the technical and cognitive dimensions of teachers’ moral agency”.

Lebih lanjut, Kincheloe (2008:4) mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk “menyadarkan” para guru akan keterjajahan mereka secara epistemologi di dunia pengetahuan, antar lain (1) bagaimana pengetahuan itu dihasilkan; (2) darimana datangnya – siapa yang memproduksinya; (3) bagaimana ia mendapatkan jalannya sehingga masuk ke kurikulum; (4) siapa yang mendapatkan keuntungan berkat ketertundukan siswa kepada otoritas; (5) dengan cara bagaimana pendidikan melayani kebutuhan penjajah neoliberal; (6) bagaimana peran interpretasi di dalam konfrontasi dengan pengetahuan semacam itu dan apa maknanya, memberikan gambaran seperti apa tentang pandangan dunia dari kelompok yang memproduksi pengetahuan semacam itu; (7) bagaimana pengetahuan semacam itu dalam hubungannya dengan siapa kita saat ini dan akan seperti apa kita ke depan; (8) apa alternatif terhadap informasi semacam itu yang datang dari tempat lain dan cara memandang dunia ini; dan (9) bagaimana kita menghasilkan pengetahuan yang lebih cermat dan komprehensif.

Pada akhirnya, Kincheloe (2008: 10) memaparkan pentingnya pedagogi kritis sebagai narasi tandingan (*counter narrative*), yang menurutnya berasumsi bahwa pendidikan (1) harus berdasarkan pada visi kependidikan dan sosial akan keadilan dan kesetaraan; (2) dikonstruksi atas dasar keyakinan bahwa pendidikan secara inheren bersifat politik; (3) didedikasikan untuk mengentaskan manusia dari kesengsaraan; (4) peduli akan kesejahteraan peserta didik; (5) dilaksanakan melalui tema-tema yang diangkat berdasarkan masalah untuk membaca dunia; (6) memusatkan pada pengertian bahwa guru adalah peneliti, guru belajar untuk menghasilkan dan mengajarkan pengetahuan kepada siswa untuk menghasilkan pengetahuan mereka sendiri; (7) didasarkan pada keyakinan bahwa guru adalah peneliti murid mereka sendiri; (8) tertarik untuk mempertahankan keterikatan antara perubahan sosial dengan penanaman rasa keingintahuan; (9) peduli akan kelompok marginal, pengalaman dan kebutuhan kelompok tertindas; (10) dikonstruksi atas keyakinan bahwa ilmu dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mengatur dan mengontrol; (11) didedikasikan untuk memahami konteks di mana aktivitas pendidikan berlangsung; (12) diselaraskan dengan kompleksitas di dalam merumuskan pendidikan transformatif dan cermat; dan (13) difokuskan pada pemahaman yang mendalam akan dampak yang luar biasa dari struktur neo-kolonial di dalam membentuk pengetahuan dan pendidikan.

Kesimpulan yang berupa tawaran untuk mewujudkan pedagogi kritis yang ditawarkan Kincheloe (2008: 227-252) mencakup; (1) ketidakterpisahan antara “yang tahu” (*knower*) dan “yang diketahui” (*known*); (2) keutamaan perspektif dari orang-orang yang tertindas yaitu dengan menghargai pemahaman orang-orang yang menderita akibat tatanan sosial yang ada; (3) eksistensi realitas jamak sehingga membuat

makna dunia jauh lebih kompleks dibanding pemahaman yang sudah ada; (4) menjadi pekerja pengetahuan yang rendah hati (*humble knowledge workers*) dengan cara memahami keberadaan kita dalam rangkaian jejaring realita; (5) pandangan epistemologi dengan menempatkan diri kita sebagai pelaku yang paling siap dibekali untuk menghasilkan pengetahuan diri kita sendiri di dalam jejaring realita yang ada; (6) mengonstruksi pengetahuan praktis untuk tindakan sosial kritis; (7) pengetahuan selalu bersifat dinamis dalam proses yang lebih besar; (8) pentingnya interpretasi melalui hermeneutik kritis; dan (8) pejuang baru pengetahuan ruang kelas yang memadukan pengalaman pribadi dengan informasi yang bersifat pluriversal.

Empat Konsepsi Kewarganegaraan dan Konsekuensinya terhadap Keberagaman

Mengacu pada pembedaan elemen konsepsi kewarganegaraan Marshall yaitu *civil, political and social elements of citizenship*, Kiwan (2008) menawarkan empat model konsepsi kewarganegaraan, yaitu moral, legal, partisipatori, dan berbasis identitas. Keempat konsepsi kewarganegaraan dan implikasinya bagi pengelolaan keberagaman di Indonesia akan menjadi basis untuk pembahasan pada bagian ini.

Konsepsi moral kewarganegaraan dapat dilacak dari para pemikir Yunani, terutama Plato dengan karyanya *Republic*. Di sini negara berdasarkan atas rasa keadilan dan ada hubungan yang erat antara masyarakat yang adil dengan individu-individu yang adil. Senada dengan ini, Aristotle memadamang manusia pada hakikatnya sebagai makhluk politik dan hanya bisa terpenuhi kalau mereka berpartisipasi aktif di dalam urusan umum (*public affairs*). Implikasi bagi keberagaman etika dan keagamaan dari konsepsi kewarganegaraan

semacam ini menurut Parekh (2000) bahwa akomodasi keberagaman moral dan politik tidak otomatis meluas ke bidang etika dan agama. Berkaitan dengan persyaratan adanya *shared values*, Kiwan (2008) tidak memandang sebagai suatu masalah di dalam masyarakat multikultural, yang perlu mendapat perhatian adalah proses pencapaian *shared values* tersebut. Dalam dunia pendidikan dibutuhkan kerangka dialog yang konstruktif yang diarahkan pada penyelesaian masalah secara realistik.

Konsepsi legal kewarganegaraan pertama kali dikembangkan bangsa Romawi dalam kerangka hak asasi. Teori hak asasi manusia kontemporer membingkainya di dalam arti hak-hak individu berhadapan dengan negara. Wacana kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan semakin disandingkan dengan wacana hak asasi manusia. Yang membedakan hak asasi manusia ini dengan hak warga negara adalah bahwa hak asasi manusia bersifat universal, sedangkan hak warga negara berasal dari pengakuan negara.

Konsepsi partisipatoris kewarganegaraan beranggapan bahwa hubungan antara negara dengan warga negara ditentukan oleh seberapa besar tingkat dan kualitas partisipasi warga negara di dalam kehidupan bersama, khususnya di dalam bidang politik kenegaraan. Berkaitan dengan keberagaman kondisi masyarakat Indonesia justru harus dimaknai sebagai potensi untuk melibatkan beragam unsur masyarakat sehingga semua warga negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjalankan kesepakatan yang telah dihasilkan bersama.

Konsepsi berbasis identitas kewarganegaraan secara inheren berkaitan dengan identitas, yang dibagi lebih lanjut menjadi empat kategori: nasional, global, anti rasis, dan multikultural. Identitas di sini

dimaknasi sebagai sesuatu yang tidak bersifat statis tetapi dinamis atau *a state of flux*.

Pendidikan Kewarganegaraan Kontekstual

McCowan (2009) menyodorkan gagasannya berupa *curricular transposition theories* dan *seamless enactment*. Gagasan McCowan yang menekankan pentingnya perubahan paradigma pendekatan praktik dan rekayasa pendidikan dari yang bersifat *top down*, *centralized*, dan *uniform* menjadi *bottom up*, *decentralized*, dan *segmented*,

Kontekstual dalam Dimensi waktu

Rasionalitas bagi dikembangkannya sistem pendidikan publik pada abad ke sembilan belas adalah pebentukan negara (bangsa) dan perkembangan ekonomi yang didasari atas etos pencerahan abad sebelumnya. Nuansa upaya pengenalan perilaku dan orientasi nasional yang diharapkan ditampilkan warga negara melalui pendidikan publik sangat kental. Singkat kata, pendidikan publik menjadi rekayasa sosial yang efektif untuk membentuk karakter kebangsaan. Namun demikian, kondisi di lapangan tidak sesederhana yang digambarkan para teoritis barat. Di dalam salah satu tulisan Ito (2017) yang berjudul “*Everyday Citizenship in Village Java*”, misalnya, menyatakan bahwa “*citizenship in village Java is fluid and elusive. Therefore, the institutional view of citizenship falls short of capturing the still image of everyday citizenship*” (2017: 65).

Sementara itu, Mitchell (2003) menggambarkan perubahan orientasi Pendidikan Kewarganegaraan di era neoliberal dari diri yang bersifat multikultural ke kosmopolitan strategis. Sejalan dengan perkembangan pendidikan publik melalui pendidikan formal

(*Schooling*), kata Mitchell (2003: 399), penekanan pada orientasi nasionalistik harus dilengkapi dengan wawasan global dengan mengembangkan prinsip-prinsip *cosmopolitan values*.

Kontekstual dalam Dimensi Ruang

Dalam rangka rekayasa Pendidikan Kewarganegaraan kontekstual, gagasan Cheng berikut bisa dijadikan pedoman. Cheng (2005) mengemukakan ada enam teori yang bisa digunakan sebagai panduan dalam merespon fenomena globalisasi, lokalisasi, dan individualisasi, yaitu Teori Pohon, Teori Kristal, Teori Sangkar Burung, Teori DNA, Teori Jamur, dan Teori Amoeba. Teori-teori ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk melakukan rekayasa pendidikan, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan kontekstual dalam rangka merawat kebhinekaan Indonesia. Asumsi dan rekomendasi keenam teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Teori Pohon (*Theory of Tree*)

Karakteristik dari teori ini menekankan pada keyakinan bahwa proses pendidikan memiliki akar pada nilai-nilai dan tradisi lokal tetapi menyerap sumber-sumber luar yang relevan dan bermanfaat untuk berkembang ke luar. Dengan kata lain untuk mengembangkan pendidikan yang berorientasi global membutuhkan akar yang kuat yang berbasis budaya lokal. Dalam bidang kurikulum PKn, budaya dan nilai-nilai lokal tetap merupakan aset tetapi menyerap budaya dan pengetahuan global untuk mengembangkan warga masyarakat lokal. Pemilihan pengetahuan global di dalam pembelajaran sangat tergantung pada kebutuhan yang dirasakan masyarakat lokal dan preferensi budaya mereka. Luaran pendidikan yang diharapkan adalah terciptanya pribadi dengan wawasan global; bertindak lokal dan tumbuh secara global. Kelebihan dari teori ini adalah bahwa masyarakat lokal dapat

mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka. Kelemahannya, jika nilai-nilai dan budaya lokal sempit dan lemah, perkembangan individu dan komunitas lokal sangat terbatas. Konversi pengetahuan dan nilai-nilai global menjadi pengetahuan dan nilai-nilai lokal bisa sangat selektif dan terbatas karena bias budaya.

Teori Kristal (*Theory of Crystal*)

Proses utama pendidikan berdasarkan teori ini adalah bahwa benih-benih lokal akan mengkristalisasi dan mengakumulasi pengetahuan global sepanjang mengikuti tatanan yang sudah ada yang bersifat lokal. Memajukan pengetahuan lokal adalah dengan cara mengakumulasi pengetahuan global di sekitar benih-benih lokal. Implikasinya bagi kurikulum PKn adalah bahwa desain dan pembelajaran PKn dengan cara melakukan identifikasi nilai-nilai inti sebagai benih dasar untuk mengakumulasi pengetahuan global yang relevan. Sosok warga negara yang akan dihasilkan adalah tetap warga lokal yang berwawasan global. Bertindak dan berpikir lokal dengan teknik global yang semakin meningkat. Kelebihannya, tidak ada pertentangan antara nilai-nilai lokal dengan pengetahuan global yang akan dikembangkan. Cukup mudah dalam mengidentifikasi apa yang diinginkan dan tidak diinginkan warga lokal ditengah terpaan tuntutan global. Kelemahannya, tidak mudah untuk menemukan seperangkat nilai-nilai lokal yang bisa digunakan untuk mengristalkan dan mengakumulasi atau melokalkan kearifan dan pengetahuan global yang cukup kuat.

Teori Sangkar Burung (*Theory of Birdcage*)

Teori ini memandang proses pendidikan terbuka terhadap masuknya pengetahuan dari luar tetapi membatasinya sesuai dengan

kerangka yang pasti (*a fixed framework*). Memajukan pengetahuan lokal di dalam dunia pendidikan yang semakin mengglobal membutuhkan kerangka lokal untuk memproteksi dan menyaringnya. Sosok warga negara yang direkomendasikan oleh teori ini adalah pribadi lokal dengan ikatan global. Bertindak lokal dengan pengetahuan global yang sudah tersaring. Kelebihannya, kerangka yang telah dibuat dapat membantu untuk menjamin relevansi lokal terhadap pengetahuan atau pendidikan global. Dapat juga membantu menjaga kehilangan identitas dan kepentingan lokal di tengah gempuran global. Sedangkan kelemahannya, adalah sulit untuk menentukan batas-batas budaya dan sosial sebagai kerangka filterisasi pengaruh global. Batas-batasnya bisa jadi terlalu ketat atau kaku dan bisa menutup segala kemungkinan masuknya pengaruh global sehingga membantasi perkembangan lokal.

Teori DNA (*Theory of DNA*)

Proses pendidikan adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan transplantasi atau pencangkokan elemen-elemen global terbaik untuk menggantikan komponen lokal yang lemah di dalam pengembangan lokal. Pengembangan pengetahuan lokal adalah menggantikan pengetahuan lokal yang tidak valid dengan pengetahuan global yang vital. Dengan demikian desain kurikulum PKn harus bersifat selektif baik terhadap komponen lokal maupun global dengan tujuan untuk memilih elemen terbaik. Untuk memahami kelebihan dan kelemahan elemen lokal dan global sangat penting di dalam dunia pendidikan. Siswa didorong untuk terbuka terhadap segala hal yang positif meskipun berasal dari luar. Sosok warga negara yang diharapkan adalah seseorang yang bisa menggabungkan elemen terbaik baik lokal maupun global. Bertindak dan berpikir dengan paduan elemen lokal dan

global. Kelebihannya, terbuka terhadap sembarang investigasi rasional dan melakukan transplantasi elemen terbaik tanpa hambatan lokal. Nampaknya cara yang efisien untuk belajar dan meningkatkan praktik dan pembangunan lokal. Sedangkan kelemahannya, mungkin tidak benar kalau identifikasi kelebihan dan kelemahan elemen mudah secara budaya dan sosial. Bisa jadi terlalu mekanistik dengan asumsi tidak ada resistensi lokal terhadap pencakokan elemen-elemen global dan lokal tersebut.

Teori Jamur (*Theory of Fungus*)

Teori ini beranggapan bahwa proses pendidikan adalah untuk mencerna tipe pengetahuan global tertentu sebagai nutrisi pengembangan lokal dan individual. Pengembangan pengetahuan lokal berarti mencerna pengetahuan global sebagai nutrisi untuk dikonversi menjadi nutrisi dalam pengembangan pengetahuan dan komunitas lokal. Pembelajaran yang dilakukan diharapkan yang memungkinkan siswa mampu menyerap budaya dan pengetahuan global sebagai nutrisi pengembangan dirinya dan komunitasnya. Sosok warga negara yang diharapkan adalah warga negara yang memiliki pengetahuan global tertentu, bertindak dan berpikir dengan menggantungkan diri pada pengetahuan global yang relevan. Kelebihannya, adalah mudah untuk menyerap dan mencerna elemen pengetahuan global sejak awal. Akar dari pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan adalah pengetahuan global, bukan lokal. Kelemahannya, proses utamanya bersifat satu arah, menyerap dan mencerna pengetahuan global. Kontribusinya terhadap pengembangan pengetahuan lokal sangat terbatas. Sangat susah untuk mengidentifikasi pengetahuan dan identitas lokal sebagai basis untuk

pengembangannya tetapi tergantung pada sumberdaya dan pengetahuan global.

Teori Amoeba (*Theory of Amoeba*)

Teori ini memandang bahwa proses pendidikan adalah untuk menggunakan sepenuhnya pengetahuan global dengan hambatan lokal yang bersifat minimal. Memperkuat pengetahuan lokal berarti menggunakan sepenuhnya pengetahuan global dan mengakumulasi ke konteks lokal. Implikasinya terhadap pengembangan kurikulum dan pembelajaran adalah bahwa para pengembang kurikulum harus memasukkan pengetahuan dan perspektif global. Hambatan lokal dapat diminimalkan dengan harapan siswa bisa terbuka secara totalitas terhadap budaya dan pengetahuan global. Sosok warga negara yang diharapkan adalah mereka yang bersifat fleksibel dan terbuka tanpa identitas lokal. Bertindak dan berpikir secara global dan cair. Kelebihannya, sepenuhnya terbuka dan fleksibel terhadap paparan asing atau global. Sedikit sekali hambatan yang bersifat lokal. Kelemahannya, akan kehilangan identitas dan nilai-nilai lokal. Ada potensi masyarakat lokal akan kehilangan arah dan solidaritas sosial di era globalisasi ini. Tidak cukup jelas kontribusi apa yang bisa disumbangkan oleh pengetahuan dan budaya lokal terhadap pengembangan budaya dan pengetahuan lokal.

Dengan mempertimbangkan beragam teori tersebut, kiranya cara yang paling bijak untuk mengembangkan PKn kontekstual adalah dengan mempertimbangkan pertanyaan: siapa sasaran PKn; kapan PKn dilaksanakan; di mana PKn dilaksanakan. Dengan demikian tidak mungkin ada tempat PKn dengan paradigma *uniform, top-down*, dan

doctrinaire. Keberagaman Indonesia hanya bisa terawat lewat Pendidikan Kewarganegaraan yang kontekstual.

Referensi

- Bank, J.A. 2009. Diversity and Citizenship Education in Multicultural Nations. *Multicultural Education Review*.
- Biesta, J.J. 2011. *Learning democracy in school and society*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Cheng, Y.C. 2005. *New paradigm for re-engineering education, gloablization, localization, individualization*. Dordrecht: Springers.
- Connell, R. 2009. Good teachers on dangerous ground: towards a new of teacher quality and professionalism. *Critical Studies in Education*.
- Connell, R. 2013. The neoliberal cascade and education: an essay on the market agenda and its consequences. *Critical Studies in Education*.
- Dudley-Marling, C., & Baker, D. 2012. The effects of market-based school reforms on students with disabilities. *Disablty Studies Quarterly*.
- Friedman, T.L. 2007. *the World is Flat, A Brief History of the Twenty-first Century*. New York: Picador.
- Ito, T. 2017. “Everyday citizenship in village Java” in Ward, B. Henk, S.N. and Laurens B. (Eds.). *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*.
<http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76ws5.7>
- Kincheloe, J.L. 2006. “What you don’t know is hurting you and the country. In J.L. Kicheloe and S.R. Steinberg (eds.). *What You don’t know about school*. Macmillan: Palgrave.
- Kincheloe, J.L. 2008. *Knowledge and critical pedagogy an introduction*. Montreal: Springer.

- Kiwan, D. 2008. "Citizenship education in England at the cross-road? Four models of citizenship and their implications for ethnic and religious diversity", *Oxford Review of Education*, Vol. 34, No. 1 (Feb, 2008), pp. 39-58. <http://www.jstor.org/stable/20462370>. Diunduh 14-11-2017 05:14 UTC.
- Liasidou, A., & Symeou, L. 2016. Neoliberal versus social justice reforms in education policy and practice: discourses, politics and disability rights in education, *Critical Studies in Education*, DOI: 10.1080/17508487.2016.1186102.
- Mayo, P. 2015. *Hegemony and Education under Neoliberalism Insights from Gramsci*. New York: Routledge.
- McCowan, T. 2009. *Rethinking citizenship education a curriculum for participatory democracy*. New York: Continuum.
- Mitchell, K. 2003. "Educating the national citizen in neoliberal times: from the multicultural self to the strateic cosmopolitan" *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 28, No. 4 (Dec., 2003), pp. 387-403.
- Nieto, S, 2017, Re-imagining multicultural education: new visions, new possibilities, *Multicultural Education Review*.
- Peters, M.A. 2001. *Poststructuralism, marxism, and neoliberalism between theory and politics*. New York: Rowman & Littlefield Publishers.
- Tsang, K.K. 2018. Teachers as disempowered and demoralised moral agents: school borad management and teachers in Hong Kong. *British journal of Educational Studies*.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI UPAYA MERAHWAT KEBERAGAMAN

Taat Wulandari

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, bahasa dan budaya yang beraneka ragam. Suku yang tersebar dan berdiam di wilayah Indonesia berjumlah sekitar 300 suku. Jumlah tersebut masih didukung oleh bahasa yang bisa mencapai sekitar 750 bahasa yang digunakan didaerah Indonesia (Apri Subagio, 2013: 107-108). Keragaman suku dan bahasa ini menjadi bentuk dari kekayaan nasional yang bisa menjadi kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

Indonesia sebagai negara multikultural diikiat oleh persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Ideologi yang dimiliki oleh Indonesia berbeda dengan negara lain atau ideologi global. Bangsa Indonesia sudah sejak zaman kerajaan hingga kini hidup dalam kebiasaan dan adat istiadat yang turun temurun diturunkan. Kebiasaan yang sudah mendasar dan menjadi falsafah hidup Indonesia yang mencirikan kehidupan multikultural yang sudah mendarah daging dan menjadi pedoman dalam hidup sebagai bangsa Indonesia.

Sudah sejak lama bangsa Indonesia hidup di pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Peradaban pertama bangsa Indonesia bisa dibuktikan dengan eksistensi dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai disebutkan dalam Prasasti Yupa sudah ada sejak abad ke-4 (Agus Aris Munandar dkk, 2012: 42-43). Kerajaan bercorak Hindu-Budha kemudian terus tumbuh sampai besarnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berkuasa

merupakan kerajaan yang besar dan wilayahnya bahkan melebihi wilayah Indonesia saat ini (Slamet Muljana, 2009: 161).

Berakhirnya kejayaan kerajaan bercorak Hindu Budha kemudian berganti kepada kejayaan kerajaan bercorak Islam. Mulai dari kerajaan Perlak, Samudra Pasai dan Aceh yang berdiri di Sumatera sampai eksistensi kerajaan Demak dan Mataram Islam di Jawa serta kerajaan Gowa-Tallo, Ternate dan Tidore yang berada di Indonesia bagian Timur . Pertumbuhan kerajaan Islam disertai dengan penyebaran agama Islam yang mulai di anut oleh mayoritas penduduk di Indonesia pada saat itu, menggeser agama Hindu Budha yang sebelumnya dianut (Daliman, 2012).

Kedatangan bangsa Barat ke wilayah Indonesia tidak hanya disertai dengan keinginan untuk mencari kekayaan dan kejayaan. Semboyan *Gold Glory Gospel* yang diemban oleh bangsa Barat memberikan dampak yang sangat besar setelah kemunduruan dari kerajaan bercorak Islam. Agama Nasrani baik Katholik maupun Kristen kemudian disebar oleh *missionaris-missionaris* bangsa Barat (M.C. Ricklefs, 2008). Portugis yang datang ke Indonesia dan berhasil menguasai Maluku mulai menyebarkan agama Katholik melalui pendeta-pendeta mereka yang berkeliling kampung dan melalui pendidikan di Gereja. Sementara Belanda yang datang kemudian menyebarkan Agama Kristen yang disebarkan melalui *Zending*. Mereka menyebarkan melalui pendekatan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kegiatan ekonomi (Poesponegoro dan Marwati Djoned. 2011).

Sejarah panjang bangsa Indonesia yang mulai terpengaruh oleh masuknya Agama dari mulai Hindu Budha, Islam hingga penyearan Kathlok dan Kristen bisa dirasakan hingga saat ini. Kita seharusnya patut berbangga dan bersyukur meskipun agama Islam menjadi mayoritas di

Indonesia namun masih bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Harmonisasi kehidupan di Indonesia bisa dikatakan masih dalam taraf yang damai meskipun masih ada saja oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa melalui perbedaan agama. Namun masalah ini masih bisa diatasi dan dapat diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah.

Persatuan dan kesatuan Indonesia yang kokoh hingga saat ini salah satu faktornya adalah karena Indonesia mempunyai Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini sudah di ikrarkan dalam sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di dalam kongres pemuda. Pengakuan Bahasa Indonesia menjadi bahasa Nasional kemudian dituangkan setelah Indonesia merdeka kedalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36.

Masyarakat Indonesia yang multikultural haruslah terus dijaga dan dipertahankan. Beberapa negara di dunia juga mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi sama seperti Indonesia. Namun beberapa negara-negara yang mempunyai tingkat heterogenitas tersebut tidak sanggup untuk bertahan sebagai sebuah negara. Negara-negara tersebut contohnya adalah Yugoslavia, Unisoviet dan Republik Ceko-Slovakia. Mereka terpecah karena disebabkan oleh perselisihan dalam bidang agama, etnis dan ideologi.

Yugoslavia secara geografis terletak di semenanjung Balkan. Etnis yang berada di wilayah Yugoslavia sebelum pecah terbagi menjadi 36% Serbia, 20% Kroasia, 9% keturunan Muslim Bosnia, 8% suku Slovenia, 6% Makedonia dan 8% keturunan Albania dan ada beberapa diantara etnis tersebut berasal dari keturunan Turki. Ada tiga agama yang menjadi utama di Yugoslavia yaitu Kristen Ortodoks (Serbia), Katholik Roma (Kroasia dan Slovenia), dan Islam (Bosnia Herzegovina, Abania dan Makedonia). Perbedaan etnis di Yugoslavia sangat sulit

untuk disatukan. Bahasa resmi yang digunakan ada tiga yaitu bahasa Slovenia, Serbo-Kroasia dan bahasa Makedonia. Sejak awal di didirkan Yugoslavia sudah mempunyai bibit-bibit kecil permusuhan. Setiap negara dalam lingkup federasi merepresentasikan kekuatan dari masing-masing etnis. Sejak Joseph Broz Tito wafat pada 4 Mei 1980 tidak ada lagi sosok pemersatu dan panutan dari setiap etnis. Semenjak kematiannya masing-masing etnis menguat perasaan etnonasionalismenya. Masalah etnis dan ekonomi yang semakin buruk menjadikan negara-negara federal yang ada di Yugoslavia berdaulat masing-masing (Zeffry Alkatiri, 2016: 188-189).

Uni Soviet juga merupakan salah satu negara yang dahulu mempunyai kebergaman etnis yang tinggi. Uni Soviet sebagai pemenang perang dunia ke-II bersama Amerika Serikat sibuk dengan perang dingin yang dilancarkan oleh masing-masing negara pasca perang dunia ke-II. Dimulai dari pengaruh Ideologi sampai eksploitasi luar angkasa. Berbagai perselisihan diatas menimbulkan gejolak baru dalam tubuh Uni Soviet. Permasalahan etnis tidak diperhatiakan dengan baik. Pada saat itu telah terjadi kerusuhan, demosntrasi dan protes dari kelompok-kelompok etnis di beberapa tempat di Uni Soviet pada bulan Februari 1986. Beberapa realitis telah dibuat oleh Gorbachev namun gejolak permasalahan etnis terus berlanjut. pada akhirnya Uni Soviet bubar dan masing masing etnis mendirikan negaranya masing-masing seperti Rusia, Ukraina, Belarusia, Lithuania, Latvia, Estonia, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakkstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kirgistan, Turkmenistan dan Checnya (Zulfikar Ghazali dkk, 2014: 36-42).

Semenjak tiran komunis runtuh pada saat *Velvet Revolution* di Republik Cekoslovakia pada 1989 membuat iklim demokratis menjadi lebih bebas. Di bawah Vaclav Havel sebagai presiden dan Vaclav Klaus

sebagai Perdana Menteri, sentralisasi kehidupan masyarakat Cekoslovakia berganti dari sentralisasi menjadi privatisasi dalam hampir semua bidang. Sistem privatisasi kemudian menyebabkan ketidakmerataan ekonomi antara etnis Ceko dan Slovakia. Masing-masing etnis kemudian saling tarik menarik kepentingan dalam politik dan sudah tidak dapat dihindari., sistem privatisasi dianggap merugikan etnis Slovakia. Setelah beberapa negosiasi yang gagal kemudian pada 1 Januari 1993 negara Ceko dan Slovakia berdisri sendiri (Kurnia Novianti, 2010: 30-31).

Negara seperti Yugoslavia, Uni Soviet dan Republik Cekoslovakia pecah akibat permasalahan etnisitas. Indonesia sebagai negara multikultur menjadi bermacam persatuan dan kesatuannya jika masing-masing etnis mendominasi dan tidak ada rasa saling menghargai dan menghormati. Perlu kiranya ada bentuk responsif untuk menjadikan multikultural sebagai alat untuk mengakomodir persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu jalan dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa yang multikultur adalah dengan Pendidikan Multikulturalisme.

Pengertian Pendidikan Multikultural menurut Mochtar Buchori dalam (Ma'rifah, 2009) pada setiap masyarakat majemuk seperti Indonesia, akan kerap muncul prasangka-prasangka yang berpengaruh terhadap interaksi sosial antara berbagai golongan masyarakat. berbagai prasangka tersebut biasanya diwariskan dari generasi sebelumnya. Masyarakat pribumi, misalnya hidup dengan sejumlah prasangka terhadap keturunan Cina, dan sebaliknya. Umat Islam menyampaikan sejumlah prasangka terhadap umat Kristiani dan sebaliknya. Berbagai prasangka sosial dalam masyarakat majemuk tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis. Ia dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya proses interaksi sosial suatu masyarakat. Ia dapat menuju interaksi sosial yang

lebih baik ataupun lebih buruk. Dalam kurun waktu tertentu, golongan-golongan penduduk bisa menjadi saling mencurigai, saling membenci, tetapi juga bisa menjadi saling memahami dan saling menghormati. Hal ini ditentukan oleh cara berbagai golongan penduduk dalam suatu masyarakat majemuk mengelola prasangka-prasangka sosial yang ada dalam diri masyarakat. Menurut Banks (1984: 164) Istilah “multibudaya” (*multiculture*) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap *melting pot* yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika khususnya di New York dan California.

Demokrasi masyarakat Multikultural meliputi bebera aspek seperti kehidupan, kebebasan, mendapat kebahagiaan, kebaikan bersama, keadilan, kesetaraan, keanekaragaman, kepercayaan, kedaulatan rakyat dan patriotisme.



Istilah pendidikan multikultural di berbagai negara berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat jika di Amerika Serikat istilah pendidikan multikultural dikenal dengan naman *multicultural education*, di Inggris

dikenal dengan nama *antiracism education*, dan di Kanada Australia dikenal dengan naman *intercultural education*, sedangkan di Indonesia dikenal dengan naman pendidikan multikultural itu sendiri. Pendidikan multikultural diberbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki dan visi dalam memandang tentang multikultural. Tiap negara memiliki kekhasan dalam memahami fenomena multikultural.

Sejak Perang Dunia II, beberapa kelompok imigran telah tinggal di Inggris dan di negara Eropa daratan Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, dan Swiss. Beberapa imigran ini seperti orang Asia, India Barat, Afrika Utara, dan Indocina di Perancis telah berdatangan dari daerah koloni sebelumnya. Beberapa imigran Eropa Selatan dan Timur telah tinggal di negara-negara Eropa Barat dan Utara dalam usaha menaikkan taraf hidup, menghindari perang, persoalan politik atau sebab yang lain. kelompok seperti orang Italia, Yunani, dan Turki telah berimigrasi ke negara Eropa Utara dan Barat dalam jumlah besar. Populasi etnis dan imigrasi telah meningkat secara signifikan di Australia dan Kanada sejak PD II.

Sebagian besar imigran dan etnis di Eropa, Australia, dan Kanada menghadapi masalah yang sama dengan yang dialami oleh kelompok etnis di AS. Kelompok seperti orang Jamaika di Inggris, orang Algeria di Perancis, dan Suku Aborigin di Australia. Berikut ini akan diuraikan karakteristik Pendidikan Multikultural dari beberapa negara untuk menunjukkan bahwa persoalan multikultural setiap negara itu ada yang bersifat unik dan perlu penanganan yang unik pula, di samping hal-hal umum yang berlaku pada semua negara (Sutarno, 2012: 3). Berikut ini akan dijabarkan pendidikan multikultural di berbagai negara:

Pendidikan Multikultural Amerika Serikat. Pendidikan di AS pada mulanya hanya dibatasi pada imigran berkulit putih, sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Baru tahun 1934 dikeluarkan Undang Undan *Indian Reservation Reorganization Act* di daerah reservasi suku Indian. Tujuan pendidikannya adalah proses Amerikanisasi. Di samping itu ada sekolah yang di dalamnya terdapat imigran berbahasa Spanyol (Mexico, Puerto Rico, Kuba) yang disebut Hispanis. Berikut ini gambaran tentang kelompok etnis yang hidup di Amerika Serikat:

Pertama, White Anglo Saxon Protestan (WASP). Pendidikan di AS didominasi oleh budaya dominan yaitu budaya WASP, artinya dikhususkan untuk kelompok berkulit putih (White) yang kebanyakan berasal dari Inggris, atau yang berbahasa Inggris (Anglo Saxon) dan beragama Protestan. WASP adalah sebuah tradisi tentang siapa yang seharusnya menjadi penguasa di Amerika Serikat. Pada awalnya, tradisi ini diperkenalkan dan dipertahankan oleh orang Inggris yang merasa superior karena merekalah yang membangun AS dengan pengetahuan dan ketrampilan mereka. Keyakinan orang Inggris itu dilandasi oleh moralitas agama Protestan yang diasumsikan sebagai agama yang paling kuat mendorong orang bekerja keras dan produktif. Belakangan, WASP tidak saja dianut oleh orang Inggris, tetapi semua White Americans karena dalam kenyataannya kelompok kulit putih ini memiliki pendapatan tinggi, mempunyai prestasi kerja yang tinggi, yang sebagian besar anggotanya didominasi oleh jemaat gereja Protestan.

Kedua, orang Amerika keturunan penduduk asli Amerika (Native Americans). Native Americans adalah penduduk asli Amerika yang kini populasinya diperkirakan setengah juta orang. Bangsa India ini disebut

penduduk asli karena telah ada di benua Amerika sebelum terjadi gelombang migrasi dari kelompok etnik dari Eropah, Afrika, maupun Asia selama lima ratus tahun. Sejarah mencatat bahwa hampir semua migran memperlakukan mereka secara tidak adil. Baru tahun 1924, terjadi perubahan hubungan antara white dan black Americans dengan native Americans.

Ketiga, orang Amerika keturunan Afrika (African Americans). Orang Afrika Amerika merupakan kelompok etnik dari benua Afrika yang pertama yang dijadikan budak oleh orang Spanyol dalam eksplorasi ke dunia baru, Amerika sejak 1619 sampai dengan abad 18. Kedatangan orang kulit hitam ini jumlahnya semakin membesar dan hal ini mendorong pemerintah untuk mengakui kehadiran mereka sebagai budak dalam *The Thirteenth Amendment to the Constitution*, yang mengatur perbudakan secara hukum di tahun 1865. Jumlah mereka di AS diperkirakan 10 juta orang yang tinggal di bagian barat benua. Kelompok etnik ini pada tahun 1960-an melakukan gerakan hak sipil yang memenangkan secara legal berupa penghapusan diskriminasi ras, termasuk penghapusan diskriminasi sekolah, hak sipil, serta penggunaan fasilitas umum. Masalah umum yang dihadapi oleh kelompok ini adalah pendapatan yang rendah, bekerja pada jenis pekerjaan kasar dengan jumlah pengangguran dua kali lebih besar dari orang kulit putih. Kini, makin banyak orang African Americans yang mencapai kedudukan puncak kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik.

Keempat, orang Amerika Keturunan Asia (Asian Americans). Yang termasuk dalam kelompok ini adalah sekitar 4 persen dari penduduk Amerika Serikat dengan mayoritas berasal dari Cina dan Jepang, di samping imigran dari Filipina, Korea, disusul orang Vietnam yang baru masuk ke AS dalam beberapa tahun terakhir ini. Tiga

kelompok terakhir ini dikenal di AS sebagai *Recent Asian Immigrants*. Orang Cina Amerika (*Chinese Americans*) merupakan bagian dari Asian Americans yang tercatat memasuki Amerika ketika terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1870-an. Mereka dikenal sebagai pekerja keras di wilayah Barat AS. Pertumbuhan orang Cina di AS kini sangat cepat dibandingkan pertumbuhan orang Cina di berbagai belahan dunia, termasuk Cina sendiri. Orang Jepang Amerika (*Japanese Americans*) adalah imigran Jepang yang merupakan bagian dari Asian Americans yang mulai berdatangan ke AS tahun 1860-an. Orang Jepang jumlahnya sedikit dan dikenal selalu menghindari prasangka dan diskriminasi langsung sebagaimana yang terjadi atas orang Cina. Hukum imigran tahun 1920-an menghentikan imigrasi orang Jepang ke benua Amerika.

Kelima, orang Amerika yang berkebudayaan Spanyol (*Hispanic Americans*). Secara etimologi *Hispanis/Hispano* berasal dari bahasa Latin *Hispanus*, yang merupakan kata sifat dari *Hispania*, nama yang diberikan oleh orang Romawi selama periode Republik Romawi pada seluruh *Iberian Peninsula*. Untuk jaman modern Iberian Peninsula mencakup Spanyol dan Portugal. Di dalam era modern, *Hispanis/Hispano* biasanya hanya diterapkan pada Spanyol, orang-orang dan budayanya, sedangkan Portugal dan orang-orangnya (meliputi Brazil dan Orang Brazil yang berbahasa Portugis) secara umum disebut Luso/Lusitanis. Dalam bahasa Spanyol, kata “Hispano” juga digunakan sebagai elemen pertama yang menunjuk pada Spanyol dan orang Spanyol, sebagai pembeda dari Anglo yang digunakan untuk menunjuk pada Inggris dan bahasa Inggris. Jadi, “Spanyol Amerika” adalah Hispano-amerika.

Keenam, white ethnic Americans. White Ethnic Americans merupakan kelompok orang Amerika berkulit putih yang menyatakan dirinya “tidak terikat” dengan WASP. Jadi, mereka digolongkan dalam kelompok etnik non-WASP. Mereka yang termasuk golongan ini adalah orang Jerman, Irlandia, Italia dan Polandia. Memang pernah terjadi kebijakan di AS untuk membatasi kuota imigran yang berasal dari empat negara ini antara 1921 dan 1968 namun tidak berhasil. Masuknya etnis karena migrasi pekerja atau budak dari Afrika mengembangkan budayanya yang khas, walaupun sudah dipengaruhi budaya Amerika. Sesudah perang saudara meletus pertengahan abad 19, Presiden Abraham Lincoln memberikan pendidikan terhadap veteran perang etnis Negro dan pendidikan bagi anak-anaknya. Sesudah Perang Dunia II gerakan *Civil Rights Movement* (Gerakan Hak-hak Sipil) terutama di bawah Dr Martin Luther King telah menghasilkan praktek pendidikan yang tidak membedakan warna kulit.

Demikianlah wajah pluralis AS yang disertai gelombang hak asasi manusia membangkitkan semangat baru untuk menumbuhkan masyarakat yang lebih demokratis. Kelompok etnis ini mendapat perlakuan yang sama. Kini, dalam bidang pendidikan, pengaruh kesetaraan ini melahirkan pedagogik yang memberikan kesempatan dan penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal usul serta agamanya. Masalahnya bagaimana menghargai kebudayaannya masing-masing kelompok etnis agar supaya kekayaan dari masing-masing budaya kelompok tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat AS. Untuk mewujudkan tujuan tersebut muncullah gagasan mengenai pendidikan yang cocok untuk masyarakat yang pluralistis itu. Diperlukan perubahan di dalam tujuan pendidikan, kurikulum, proses belajar mengajar mengajar juga

kedudukan sekolah di dalam masyarakat yang pluralistik. Sekalipun secara hukum, sistem pendidikan tidak mengenal perbedaan tetapi di dalam kenyataan masih terdapat prasangka buruk terhadap etnis lain. Jika tahun 1990 an sekolah untuk semua rakyat (publik school) dibiayai oleh negara bagian, maka sekarang kelompok etnis khusus, dengan kebudayaannya masing-masing diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikannya sendiri atas biaya negara. Inilah yang dikenal dengan *Charter School*. Ada kelompok minoritas Meksiko, etnis Cina yang bermigrasi sesudah perang dingin, Vietnam (imigran gelap melalui perahu), dan Karibia.

Pendidikan Multikultural berkembang di dalam masyarakat multikultural Amerika yang bersifat antarbudaya etnis yang besar yaitu budaya antarbangsa. Ada upaya untuk mengubah Pendidikan Multikultural dari yang bersifat asimilasi (berupa penambahan materi multikultural) menuju ke arah yang lebih radikal berupa Aksi Sosial. Di Indonesia kita menghadapi masalah bukan terutama antar bangsa seperti di Amerika melainkan antar suku bangsa atau sub etnis yang pluralistik. Namun pengalaman multikultural antar bangsa juga dimanfaatkan sebagai bahan introspeksi untuk menyelesaikan masalah Indonesia.

Pendidikan Multikultural di Inggris. Pendidikan Multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya Inggris terkenal sebagai masyarakat yang *monokultur* dan baru sesudah PD II menjadi multikultur ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Meskipun oleh pemerintah Inggris telah berusaha memperbaiki taraf kehidupan kelompok kulit berwarna ini, ternyata di dalam masyarakat terlihat adanya pembedaan-pembedaan di dalam perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Gerakan wanita bermula di akhir tahun 1700-an dan awal

yahun 1800-an. Perubahan seperti revolusi Amerika dan Prancis mendorong gagasan mengenai "kesamaan" dan "kebebasan". Sekalipun demikian kaum wanita tidak diizinkan untuk memberikan suara, dan sebagian besar mempunyai akses terbatas pada pendidikan. Pada tahun 1792, seorang penulis Inggris bernama Mary Wollstonecraft menerbitkan *A Vindication of the Rights of Woman*, mengemukakan keyakinannya dalam persamaan hak untuk pria dan wanita. Ide ini mendapat dukungan kuat selama tahun 1800-an, dan banyak wanita yang mulai melakukan kampanye menuntut reformasi.

Pendidikan Multikultural berkembang sejalan dengan banyaknya kaum imigran yang memasuki Inggris, namun masih terdapat perlakuan yang diskriminatif sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya. Gerakan ini merupakan gerakan politik yang didukung pandangan liberal, demokrasi dan gerakan kesetaraan manusia. Hal ini tidak lepas dari pemikiran kelompok progresif di Universitas Birmingham yang melahirkan studi budaya (cultural studies) pada tahun 1964 yang menentang pemikiran progresif kaum terpinggirkan yang didukung oleh Kaum Buruh (Labor party). Pendidikan Multikultural terjadi karena dorongan dari bawah, yaitu kelompok liberal (orang putih) bersama dengan kelompok kulit berwarna.. Hal ini diperkuat oleh politik imigrasi melalui undangundang *Commonwealth Immigrant Act* tahun 1962 yang mengubah status kelompok kulit berwarna dari kelompok imigran menjadi "shelter" (penghuni tetap).

Pendidikan Multikultural di Kanada. Di Kanada ada konsep dan kebijakan multikultural yang harus memajukan bangsa dengan membandingkannya dengan negara lain. Negara ini berusaha keras untuk tidak terlalu menggantungkan ekonominya pada AS dan mencoba mempersatukan multikulturalnya demi kemajuan bangsa. Pendidikan

Multikultural di Kanada berbeda dengan negara tetangganya AS karena perbedaan sejarah dan komposisi penduduknya. Etnis terbesar dari Perancis dan Inggris selanjutnya dari etnis lain seperti Jerman, Cina, Italia, penduduk asli Indian, Asia Selatan, Ukraina serta etnis lain.

Sekalipun kebijakan multikultural merupakan kebijakan federal, namun masing-masing negara bagian melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan multikultural dimasukkan dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam program sekolah, penataran guru. Kurikulum dikaji ulang untuk dilihat hal-hal yang mengandung stereotipe dan prasangka antaretnis. Demikian pula di dalam pendidikan oleh *Ontario Heritage Language Programme* yang didirikan tahun 1977 memberikan bantuan terhadap pengajaran bahasa etnis yang bermacam-macam sesudah jam resmi sekolah. Diberikan penataran guru untuk menyebarluaskan sumber-sumber yang bebas dari prasangka, terutama kelompok kulit berwarna (*black population*). Di propinsi Manitoba, Alberta, Saskatchewan diijinkan memberikan bahasa di luar bahasa Inggris dan Perancis sampai 50 % dari jumlah jam di sekolah.

Pendidikan Multikultural di Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya orang Asia sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik, karena karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat. Akibatnya, Australia mengubah kebijakannya dari *White Australia Policy* ke *multicultural policy*. Dampak dari perubahan kebijakan itu membuat orang Aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya. Paham multikulturalisme di Australia berkaitan erat dengan perkembangan politik, terutama Partai Buruh. Pelaksanaan Pendidikan Multikultural dapat dibedakan tiga fase perkembangan yaitu dari politik pasif ke arah asimilasi aktif (1945-1972), pendidikan untuk kaum migran bersifat

pasif. Artinya anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Karena ada kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris bagi anak imigran diberikanlah bantuan laboratorium bahasa. Hingga tahun 1970-an kurikulum masih terpusat hingga menyulitkan di dalam menyesuaikan dengan kebutuhan multietnis Australia. Kedua, dari pendidikan imigran ke Pendidikan Multikultural (1972-1986) semua propinsi di Australia telah mengadopsi kebijakan Pendidikan Multikultural. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : “ Di dalam masyarakat multi budaya, masing-masing orang memiliki hak atas integritas budaya; memiliki citra diri yang positif (a positif self image), dan untuk pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Masing-masing orang tidak hanya harus menyatakan perasaan yang positif terhadap warisan budayanya sendiri tetapi juga harus mengalami seperti perasaan terhadap warisan budaya orang lain.” Tujuan Pendidikan Multikultural adalah : a) Pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropah; b) Menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia; c) Pengertian antar budaya melalui kajian-kajian tentang tingkah laku, kepercayaan, nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme; d) Tingkah laku yang memperkuat keselarasan antaretnis; dan e) Memperluas kesadaran akan penerimaannya sebagai seseorang yang mempunyai identitas nasional Australia tetapi juga akan identitas yang spesifik di dalam masyarakat multi budaya Australia. Program Pendidikan Multikultural antara lain berbentuk bahasa Inggris sebagai.

Pendidikan multikultural di Indonesia menurut soft multiculturalism (waston) masih bersifat emosional sedangkan menurut Stephen May dalam praktiknya pendidikan multikultural masih

“idealistis” dan “naïve” yang menitikberatkan pembelajaran nilai-nilai multikultural dari dimensi budaya. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengharagai perbedaan. Sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi inilah yang nantinya akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradapan dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama, tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi atau dianggap lebih tinggi (superior) dari kebudayaan yang lain, dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan diantara pihak-pihak yang terlibat, anggapan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain akan melahirkan fasisme, nativisme dan chauvinism, dengan dialog, diharapkan terjadi sumbang pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan atau peradapan yang bersangkutan sehingga nantinya terwujud masyarakat yang makmur, adil, sejahtera yang saling menghargai perbedaan. Untuk itu dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan kerena suku,

ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasi baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

Muhaemin el Ma'hady berpendapat bahwa pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global) (Choirul Mahfud, 2006: 168). Kemudian dalam bukunya *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*, Hilda Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, dan gender, etnisitas, agama, status sosial, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Dengan kata lain bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun sosio budaya yang melingkupinya.

Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural yang terjadi di lingkungan tertentu atau bahkan di dunia secara keseluruhan. Jadi, secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membeda-bedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnic, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia

adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia sendiri dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan kebudayaan. Sedangkan perspektif vertical, kemajemukan bangsa dapat kita lihat dari perbedaan tingkat pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. (Choirul Mahfud, 2006: 176).

Kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, yang mencapai 17.667 pulau besar dan kecil. Dengan jumlah pulau yang sebanyak itu maka wajarlah jika kemajemukan masyarakat di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Pada satu sisi, kemajemukan masyarakat memberikan dampak secara positif, namun juga menimbulkan dampak negatif, karena faktor kemajemukan itulah yang justru sering menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Pada akhirnya konflik-konflik antar kelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial. Paradigma ini dimaksudkan, kita hendaknya apresiasif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan pandangan tersebut diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri dan menyalahgunakan pandangan dan pilihan orang lain. Banyak bukti di negeri kita ini, tentang kerusuhan dan konflik yang berlatar belakang SARA (suku, adat, ras, dan agama). Fakta tersebut sebetulnya menunjukkan kegagalan pendidikan dalam menciptakan kesadaran pluralisme dan multikulturalisme. Symbol budaya, agama,

ideologi, bendera, pakaian, dan sebagainya, itu sebenarnya boleh berbeda. Tetapi pada hakikatnya kita satu, yaitu satu bangsa.

Pendidikan multicultural disini juga dimaksudkan bahwa manusia dipandang sebagai makhluk makro dan sekaligus makhluk mikro yang tidak akan terlepas dari akar budaya bangsa dan kelompok etnisnya. Akar makro yang kuat akan menyebabkan manusia tidak pernah tercabut dari akar kemanusiaannya. Sedangkan akar mikro yang kuat akan menyebabkan manusia mempunyai tempat berpijak yang kuat, dan dengan demikian manusia tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan yang cepat.

Men-*design* pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antar kelompok, budaya, suku, dan lain sebagainya, seperti Indonesia, mengandung tantangan yang tidak ringan. Perlu disadari bersama bahwa pendidikan multikultural bukan hanya sebatas "*merayakan keragaman*". Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi. (Choirul Mahfud, 2006: 183). Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Maka dari itu, untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sejumlah pendekatan. Ada beberapa pendekatan pendidikan multicultural yaitu sebagai berikut:

1. Tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling), atau pendidikan multicultural dengan program-program dengan sekolah formal.
2. Menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional para pendidik lebih mengasosiasikan kebudayaan dengan kelompok-

kelompok sosial yang *relative self sufficient* (mandiri), ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus-menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan.

3. Karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antiestetis terhadap tujuan pendidikan multikultural.
4. Pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi itu ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional.

Kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal dan non-formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan

Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari *dikotomi* (pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan) dan menembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik. Perlu diketahui bahwa di Indonesia multicultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, plural. Pendidikan multicultural dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai *counter* terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tetapi, apabila tidak dijalankan secara hati-hati maka kita akan terjerumus kedalam perpecahan nasional (disintegrasi bangsa dan separatisme). Selain itu

wacana pendidikan multicultural dimungkinkan akan terus berkembang seperti bola salju, yang menggelinding semakin membesar dan ramai diperbincangkan. Yang lebih penting dan yang diharapkan adalah, wacana pendidikan multicultural akan dapat diberlakukan dalam dunia pendidikan di negeri yang multicultural ini. Pendidikan multikulturalisme memiliki beberapa urgensi, diantaranya adalah:

1. Pendidikan multikulturalisme berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Pendidikan multikultural merupakan solusi bagi konflik dan disharmonisasi yang kerap terjadi di dalam masyarakat Indonesia yang plural. Budaya Indonesia yang beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan suatu perpecahan. Pendidikan multicultural memiliki andil untuk menyiapkan bangsa Indonesia siap menghadapi arus budaya luar di era global dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. (*Choirul Mahfud, 2006: 208*). Model pembelajaran dalam pendidikan multikultural yang berkaitan dengan kebangsaan pada dasarnya memang sudah ada, akan tetapi hal tersebut masih dirasa kurang cukup memadai sebagai sarana pendidikan guna menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Maka sudah saatnya semua elemen dalam masyarakat Indonesia ikut berperan dalam menyelenggarakan pendidikan multicultural ini.
2. Siswa tidak melupakan akar budayanya. Dalam era globalisasi saat ini pendidikan multikulturalisme sangat dibutuhkan. Apalagi dengan adanya pertemuan antar budaya yang telah menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi siswa. Untuk itu perlu adanya antisipasi agar siswa tidak melupakan budayanya sendiri

karena begitu banyaknya budaya yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu siswa diberi penyadaran pengetahuan yang beragam sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas tentang pengetahuan global, termasuk aspek budaya.

3. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Pengembangan kurikulum pendidikan multicultural sangat penting dilakukan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menjadikan filosofi yang progresif seperti humanism, progresivisme, dan rekonstruksi social sebagai landasan pengembangan kurikulum.
 - b. Merubah teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisifakta, teori, generalisasi kepengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses dan keterampilan yang harus dimiliki generasi muda.
 - c. Teori belajar yang memerhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik yang hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia yang harus diseragamkan oleh instansi pendidikan.
 - d. Proses belajar yang mengandalkan siswa belajar secara individualistis dan bersaing secara kompetitif individualistis diganti dengan cara belajar secara berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Sehingga siswa dapat berkembang dan terbiasa hidup dengan berbagai budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

- e. Evaluasi dalam penilaian harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.

Pemerintah harus menyusun konsep pendidikan multikultural untuk dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Sehingga generasi muda memiliki ketahanan dan identitas nasional dan terhindari dari ancaman disintegrasi bangsa. Selain itu generasi muda mampu bersaing di era globalisasi dan era perdagangan bebas seperti saat ini. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

1. Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat.
2. Keragaman budaya dijadikan dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi.
3. Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa.
4. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional.

Pendekatan multicultural untuk kurikulum nasional diartikan sebagai prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan siswa dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, komponen kurikulum, dan lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. (*Choirul Mahfud, 2006: 226*).

Upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang multicultural dapat terwujud jika; pertama, konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami urgensinya bagi bangsa Indonesia dan keinginan untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Kedua, adanya kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Proses enkulturasi dilakukan dengan cara-cara strategis
2. Pembelajaran kebudayaan perlu dilakukan melalui berbagai institusi dengan meningkatkan peran lembaga pendidikan.
3. Penciptaan minat terhadap kebudayaan merupakan proses penting untuk mendidik masyarakat tentang perlunya kebudayaan baik dalam kehidupan individu maupun sosial.
4. Pemberdayaan kebudayaan suku bangsa di berbagai tempat merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Proses ini dilakukan untuk optimalisasi peran kebudayaan dalam penataan social dalam komunitas.
5. Pemahaman kebudayaan secara lintas budaya yang memungkinkan pengenalan budaya yang berbeda dan difusi unsur-unsur kebudayaan dalam kehidupan berbagai kelompok masyarakat.
6. Konflik yang terjadi dapat dipicu oleh berbagai proses sejalan dengan globalisasi. Peran lembaga mediasi memiliki strategi yang kontekstual perlu diberdayakan agar berfungsi dengan baik.
7. Nilai dan norma yang berfungsi sebagai aturan dalam melindungi kekayaan budaya difungsikan kembali dalam melestarikan kebudayaan dalam berbagai bentuknya.

8. Penguatan kelembagaan perlu ditingkatkan. Kelembagaan tidak hanya berfungsi dalam enkulturasi dan internalisasi berbagai aspek kebudayaan, tetapi juga dalam pengembangan kebudayaan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik.
9. Proses pengembangan kebudayaan selain berorientasi pada pengembangan rasionalitas, juga menekankan pada pendidikan moral.
10. Peranan Negara dibutuhkan untuk menumbuhkan pola kebudayaan yang sesuai untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut sebaiknya pemerintah mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan di sekolah sampai perguruan tinggi. Pendidikan multicultural dimasukkan kedalam kurikulum sekolah atau menjadi materi pelajaran tersendiri (khususnya bagi daerah bekas konflik antar suku). Dewasa ini, masyarakat yang sudah mencoba untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural antara lain: Sekolah Pembaruan (Medan), Kampung Pancasila (Lamongan), dan Kampung Multikultural (Maluku).

Referensi

- Agus Aris Munandar, dkk. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah Kerajaan Hindu Budha*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Apri Subagio. 2013. *Go Go Indonesia*. Jakarta: Cerdas Interaktif.
- Banks, James. 1984. *Teaching Strategies For Ethnic Studies*. Newton: Allyn and Bacon.
- Choirul, Mahfud. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Daliman, A. 2012. *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Obor.
- Kurnia Novianti. “Enviromental Movement di Republik Ceko: Dinamika NGO Lingkungan Pasca-Revolusi Beludru”. *Jurnal Globabl dan Strategis*. Vol. 4. No. 1. 30-31. Surabaya: Universitas Airlangga.
- M, Ainun Yaqin. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- M.C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Ma'rifah Indriyani. 2009. *Signifikansi Pendidikan Multikultural dalam Novel dan Damai di Bumi Karl May Terhadap Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ngainun, Naim dan Sauqi, Achmad. 2010. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Slamet Muljana. 2009. *Tafsir Sejarah Nagarakertagama*. Yogyakarta: LkiS.
- Sutarno. 2012. *Karakteristik Pendidikan Multikultural di Berbagai Negara*. Yogyakarta.
- Zeffry Alkatiri. 2016. *Transisi Demokrasi di Eropa Timur: Baltik, Jerman Timur, Rumania dan Balkan*. Jakarta: Obor.
- Zulfikar Ghazali dkk. 2014. *Migrasi sebagai Dampak Perubahan Politik dan Ekonomi di Wilayah Eks Uni Soviet*. Jakarta: Obor.

PERAN PEREMPUAN INDONESIA DENGAN SEMANGAT KEINDONESIAAN

Hastuti

Laki-laki dan perempuan adalah bagai seekor burung dengan dua sayapnya. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai yang setinggi-tingginya, jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali (Soekarno).

Ungkapan Soekarno dalam karyanya Sarinah menunjukkan bahwa laki-laki perempuan bukan sebagai dikotomi yang harus dipertentangkan. Perempuan dan laki-laki adalah sebagai satu kekuatan utuh yang secara bersama harus seiring sejalan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Perempuan Indonesia saat ini dapat menikmati hasil perjuangan menuju kesetaraan dari kultur patriarki telah mendominasi kehidupan perempuan di Indonesia. Istilah “Perempuan” dan “Wanita” memiliki konteks berbeda dalam paradigma kesetaraan. Perempuan memiliki konteks bebas stereotipe apabila menggunakan istilah per “empu” an untuk sosok kaum Hawa. Perempuan terkait dengan istilah empu adalah sosok yang ahli (KBBI Online). Istilah untuk kaum Hawa wanita memiliki konteks “*wani ditoto*” meskipun ada yang memaknai sebagai “*wani mranoto*”. Wanita memiliki konteks pasif pada istilah *ditoto* yakni perempuan seharusnya wanita bersedia diatur dalam gerak langkahnya, sedangkan konotasi kemandirian dan dominan pada istilah *mranoto*, bahwasannya perempuan seharusnya menempatkan posisi mengatur. Istilah wanita jarang digunakan untuk membahas tentang kaum Hawa terkait dengan kesetaraan gender.

Perempuan di Indonesia sebenarnya sejak lama memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pahlawan wanita sudah dikenal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada Cut Nyak

Dien, Laksamana Malahayati, Dewi Sartika, Kartini, Martina Christina Tiahahu yang memiliki peran dalam perjuangan bangsa guna mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bebas dari belenggu penjajahan. Perjuangan perempuan yang disimbulkan dengan perjuangan Kartini dalam meraih kesetaraan menjadi amunisi bagi perempuan di Indonesia untuk terbebas dari belenggu patriarki, kultur yang menempatkan perempuan sebagai stereotipe. Sejak perjuangan pembebasan perempuan dari belenggu kultur patriarki dicanangkan, maka perempuan mulai melebarkan kiprah mereka di sektor publik seperti bidang ekonomi, sosial, kultural baik tingkat lokal, regional, dan nasional. Perempuan Indonesia meskipun telah masuk pada ruang publik, namun ruang domestik masih tetap menjadi tanggung jawab utama perempuan.

Wanita Indonesia telah aktif sejak lama, bahkan ketika tahun 1928 sudah dimulai dengan Kongres Perempuan pertama, kala itu tonggak peran perempuan pada sektor publik di Indonesia mulai diperjuangkan secara terus menerus. Wanita dengan kemampuan inovasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemajuan suatu negara (Kompas, 2018). Secara eksplisit peran perempuan dalam proses pembangunan di Indonesia mendapat perhatian luas dengan terbukanya kesempatan bagi perempuan masuk ke segala lini sektor publik. Meningkatkan kemampuan perempuan agar memiliki kualitas memadai sehingga mampu berkompetisi secara transparan dalam kehidupan ini, sebagai keniscayaan yang harus terus diperjuangkan. Perempuan merupakan sosok penting dalam pembangunan bangsa sampai saat ini representasi perempuan terus dilakukan termasuk keterwakilan perempuan di parlemen dan peran perempuan pada lembaga pemerintah dan lembaga lain. Satu sisi upaya memperhatikan potensi

perempuan untuk mencapai kesetaraan masih terus dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat mendorong perempuan terjun ke sektor publik. Beratnya beban yang harus dipikul perempuan mengharuskan perempuan dapat bertindak bijaksana untuk meraih kesempatan dapat berperan optimal dalam publik tanpa mengabaikan tugas domestik.

Kewajiban domestik dan publik seharusnya menjadi tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan sehingga perempuan memiliki peluang yang sama untuk berkiprah meningkatkan kualitas dirinya. Perjuangan kesetaraan gender di Indonesia untuk menempatkan perempuan pada kedudukan setara dengan lawan jenisnya tetap memperhatikan etika ketimuran. Etika dengan semangat keindonesiaan yang memperhatikan kodrat perempuan mengatur rumah tangga, mengasuh anak, dan melaksanakan kewajiban sosial kemasyarakatan. Kondisi itu menempatkan perjuangan kesetaraan perempuan berbeda dengan negara barat. Kebebasan perempuan di sektor publik masih terikat pada tugas utama perempuan pada tugas domestiknya.

Kondisi Wanita Indonesia

Perempuan sebagai sumberdaya manusia merupakan potensi yang harus dimanfaatkan dalam peningkatan kemajuan bangsa mengingat kuantitas penduduk perempuan di Indonesia seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Upaya perbaikan kehidupan perempuan terus dilakukan melalui antara lain peningkatan pendidikan, dan perluasan kesempatan kerja, perbaikan kesehatan. Jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 126,8 juta jiwa dan jumlah penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa dengan ratio 101,2 (BPS, 2016). Kualitas perempuan dilihat dari angka melek huruf perempuan berumur

15 tahun ke atas sebesar 90,64 persen. Angka melek huruf tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka melek huruf kelompok penduduk laki-laki yaitu 95,87 persen pada kelompok umur yang sama (BPS, 2016). Kualitas perempuan terus ditingkatkan mengingat potensi perempuan sebagai sumberdaya diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam kehidupan berbangsa. Kualitas perempuan ditingkatkan melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan memadai, jaminan kesehatan, serta perluasan kesempatan berusaha yang terbuka dan berkeadilan. Terkait kondisi kualitas perempuan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel. 1. Kondisi Kualitas Perempuan

No	Indikator	Tahun 2015
1.	Angka Harapan Hidup	72,78
2.	IPM	66,98
3.	Harapan Lama Sekolah	12,68
4.	Rata-rata lama sekolah	7,35
5.	Pengeluaran per Kapita	8.464

Sumber: BPS, 2015

Menurut laporan Biro Pusat Statistik persentase perempuan yang mengurus rumah tangga secara total adalah 36,97 persen, dilihat menurut daerah tempat tinggal persentase perempuan yang mengurus rumah tangga di perkotaan sebesar 38,52 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 35,41 persen. Selanjutnya bila dilihat perbandingan kegiatan selama seminggu yang lalu antara perempuan dan laki-laki, persentase tertinggi baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah pada kelompok yang bekerja. Hal yang menarik adalah pada perbedaan persentase yang cukup besar, dimana persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 47,91 persen sedangkan laki-laki sebesar 79,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja lebih dominan dibanding

yang melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga yaitu hanya sebesar 1,63 persen, sedangkan perempuan yang bekerja tidak terlalu dominan karena persentase perempuan yang mengurus rumah tangga juga cukup tinggi yaitu sebesar 36,97 persen (BPS, 2016). Tugas rumah tangga tentu saja menyita banyak waktu dan tenaga perempuan sehingga diperlukan pembagian kerja secara berkeadilan pada tugas rumah tangga yang dapat dipertukarkan secara kultural.

Kultur di Indonesia bahwa laki-laki seharusnya menjadi pencari nafkah utama sehingga laki-laki yang diprioritaskan harus bekerja guna memperoleh pendapatan, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum perempuan. Pembagian kerja demikian mendorong laki-laki hanya memilih pekerjaan yang menjanjikan pendapatan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja dengan usia 15 tahun keatas (usia produktif) di perkotaan 48,67 persen di perdesaan mencapai 54,13 persen. Perbandingan TPAK laki-laki 84,42 persen dan perempuan hanya 51,39 persen (BPS, 2016). Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan, dan tingkat partisipasi laki-laki jauh diatas perempuan. Sesuai dengan kultur di Indonesia yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama bahwa laki-laki memiliki tingkat partisipasi angkata kerja lebih tinggi. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi perempuan untuk bekerja karena meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan perluasan perempuan di sektor publik. Perluasan peran perempuan di sektor publik berarti memberi kesempatan perempuan untuk ikut berkiprah pada berbagai kegiatan yang memiliki sumbangan pada kemajuan negara mengingat jumlah penduduk perempuan hampir separuh penduduk laki-laki.

Peran serta perempuan Indonesia harus terus ditingkatkan agar Indonesia tidak tertinggal pada percaturan regional dan global. Nilai Indeks Pengarusutamaan Gender Indonesia bahkan masih di bawah nilai rata-rata global yang sebesar 93,8 (BPS, 2016). Indeks pengarusutamaan gender sebagai indikator kesetaraan gender yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dari berbagai sektor. Berawal dari titik ini upaya untuk meningkatkan peran perempuan terus perbaiki agar perempuan sebagai sumberdaya memiliki kesempatan yang luas untuk berkecimpung dan berkompetisi secara berkeadilan.

Perempuan terus didorong untuk dilibatkan pada peran publik yakni pada legislatif agar perempuan dapat secara aktif berperan dalam setiap kebijakan terkait peningkatan kualitas manusia. Hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki diatur negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Amendemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ditegaskan dalam Undang- Undang No 7 Tahun 1984.

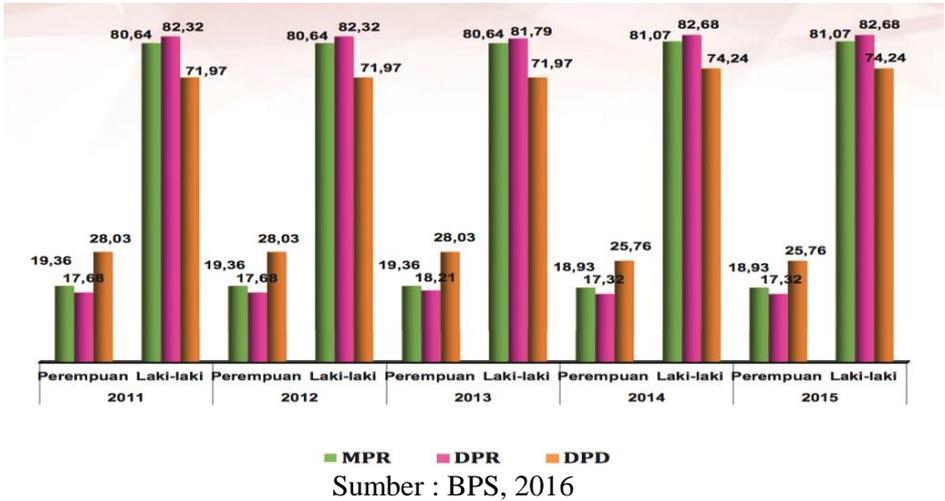
Struktur sosial patriaki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki dan beranggapan panggung politik adalah dunianya laki-laki, perempuan pantas melakukan pekerjaan rumah tangga (Siti Nimrah dan Sakaria, 2015). Perempuan dengan beban ganda (domestik publik), dan masih rendahnya kualitas perempuan menjadi kendala bagi perempuan melakukan kegiatan pada ranah formal. Ranah tersebut misalnya pada kontestasi legislatif yang

belum dapat dimanfaatkan oleh perempuan dengan optimal meskipun regulasi sudah dibuka lebar. Perempuan yang terlibat secara aktif dalam bidang tersebut belum memenuhi harapan. Peluang sudah dibuka, regulasi sudah disiapkan namun perempuan belum dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik karena perempuan belum sepenuhnya siap untuk masuk ke ranah tersebut. Rendahnya kualitas perempuan serta kegamangan perempuan sendiri untuk masuk ke ranah tersebut menjadi kendala yang masih membelenggu perempuan di Indonesia pada umumnya.

Peningkatan peran serta perempuan terus dilakukan dengan keperpihakan melalui regulasi yang disediakan, namun demikian struktur sosial patriarki masih lekat dengan kehidupan perempuan sampai saat ini sehingga regulasi yang tersedia belum dapat secara optimal mendobrak patriarki. Perempuan untuk mencapai kesetaraan 30 persen peran dalam pemerintahan sangat susah. Di legislatif saja saat ini baru 17 persen, belum sampai ke atas. Lalu kabinet meteri yang baru saat ini masih 23 persen. Kemudian perempuan yang menjadi kepala daerah saat ini baru 86 orang dari 516 kabupaten/kota di Indonesia (Yohana, 2018). Bukti ini sebagai penjelasan betapa kesetaraan gender masih harus terus diperjuangkan untuk mendorong perempuan dapat berperan secara optimal di sektor publik.

Kultur patriarki yang mewarnai kehidupan perempuan Indonesia sejak lama turut menyumbang kegamangan perempuan masuk pada ranah publik yang memerlukan keseriusan dan totalitas perempuan. Perempuan Indonesia masih tetap memikirkan tugas domestiknya yang bersifat kultural meskipun perempuan sadar tugas tersebut dapat diselesaikan bersama dengan lawan jenisnya. Distribusi laki-laki dan perempuan pada legislatif dapat dilihat di tabel berikut;

**Grafik.1. Distribusi Perempuan dan Laki-laki Pada Legislatif
Tahun 2011-2015**



Perempuan dilihat dari grafik mengenai keterlibatan perempuan pada ruang legislatif dalam lima tahun jauh persentasenya dengan persentase kurang dari 30 persen. Rendahnya partisipasi perempuan pada ruang legislatif karena kegamangan perempuan untuk masuk kedalam ruang tersebut. Kerasnya kompetisi tanpa kecukupan modal yang dimiliki perempuan menjadi kendala utama.

Penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam UUD No 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan indikator peningkatan kualitas perempuan yang strategis, dengan pendidikan yang baik maka perempuan akan memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan publik yang berkualitas. Perempuan dengan pendidikan yang lebih baik memungkinkan perempuan menjadi pengasuh yang baik bagi generasi masa depan. Mengenai distribusi pendidikan laki-laki dan perempuan pada wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel.2. Distribusi Pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	PT
1	2	3	4	5	6
Perkotaan	Perempuan	107,99	93,78	87,57	31,47
	Laki-laki	108,63	92,59	83,46	27,28
Perdesaan	Perempuan	112,06	90,68	71,32	11,84
	Laki-laki	112,97	88,04	69,26	9,52
K+D	Perempuan	110,09	92,15	79,77	22,63
	Laki-laki	110,88	90,22	76,40	19,20

Sumber : BPS RI, Susenas 2015

Perempuan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi semakin kecil persentasenya, perempuan pada daerah perdesaan memiliki tingkat pendidikan yang lebih parah dengan persentase pendidikan rendah lebih dominan dibandingkan daerah perkotaan. Perluasan kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan berusaha terus dilakukan agar perempuan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas hidup yang lebih baik, tentu saja penting bagi perempuan mengingat peran perempuan yang meliputi separuh penduduk dan perempuan merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Perempuan dengan tugas publik yang mulai terbuka luas disatu kaki, maka satu kaki yang

lain tugas perempuan adalah menyiapkan generasi masa depan sesuai dengan tugas domestik yang harus diemban.

Tugas domestik alami yang tidak dapat dipertukarkan secara gender yakni mengandung, melahirkan, dan menyusui. Tugas domestik konstruksi social dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Konsekuensi perempuan masuk ke ruang publik, apalagi dengan dalih membantu kepala rumah tangga mencari nafkah tentu saja memerlukan upaya penyadaran laki-laki. Penyadaran kesetaraan gender bahwa tugas domestik hasil konstruksi sosial dapat dipertukarkan sehingga beban domestik tersebut secara bersama dipikul laki-laki dan perempuan. Penyadaran kesetaraan gender perlu terus disosialisasikan ke masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang setara pada ruang publik dan ruang domestik hasil konstruksi sosial

Dinamika Peran Wanita Indonesia Dalam Konteks Keindonesiaan

Era global didominasi dinamika perubahan ditandai cepatnya penyebaran informasi, pendeknya waktu tempuh ke berbagai belahan bumi, tentu saja berpengaruh terhadap dinamika perempuan di Indonesia. Perempuan dalam mengakses informasi melalui internet pada seluruh kelompok umur ternyata persentase perempuan lebih kecil dibanding laki-laki (BPS, 2016). Ketatnya persaingan dan beban hidup yang semakin berat dihadapkan tata nilai yang semakin longgar seiring pesatnya kemajuan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia memberi dampak pada perubahan gaya hidup. Perempuan memperoleh kesempatan lebih sedikit dalam menikmati hasil kemajuan teknologi sehingga tantangan yang harus dihadapi perempuan sebagai ibu, sosok yang harus bertanggung jawab pada generasi anak bangsa di masa depan menjadi lebih berat. Bagi perempuan sendiri era tersebut juga

memerlukan kepiawaian dalam mensiasati, betapa perempuan yang sudah mulai menapakkan di sektor publik tanpa dapat melepaskan tugas domestik sesuai etika ketimuran yang dianut di Indonesia. Kompetisi yang semakin ketat untuk membangun kekuatan dan menguasai dunia dari sisi ekonomi, politik, teknologi, ilmu pengetahuan bahkan ideologi sehingga pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan sengaja dibangun sulit menghindar dari pengaruh global.

Peran perempuan semakin menarik dikaji ditandai dengan banyaknya tulisan dengan topik perempuan, berdalih untuk mengangkat perempuan agar mampu berperan dalam proyek peningkatan kesejahteraan umat manusia. Namun demikian kontroversi terpinggirkannya perempuan sebagai dampak pembangunan terus mengedepan meskipun gagasan untuk mendudukkan perempuan secara proporsional telah dicanangkan. Gagasan pengintegrasian perempuan dalam pembangunan dengan mengedepankan kesetaraan gender dalam pendekatan pembangunan sampai saat ini dianggap belum sepenuhnya mampu membawa perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki secara proporsional. Pasca MDGs 2015 kemudian dilakukan kesepakatan melalui SDGs, perempuan masih menjadi perhatian pembangunan dengan menempatkan tujuan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan perempuan dan kesetaraan gender. Selama ini ada anggapan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sehingga perempuan terperangkap dalam ketidakberdayaan karena kultur patriarki yang menempatkan perempuan sebagai stereotype.

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan komitmen yang telah diratifikasi banyak negara di dunia termasuk Indonesia untuk mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Satu terobosan yang dilakukan dalam SDGs adalah menempatkan penduduk sebagai

pelaku aktif dan tujuan akhir pembangunan. Prinsip yang diusung SDGs yakni, *No One Should Left Behind*, telah menempatkan kaum perempuan sebagai kelompok yang mendapat perhatian penuh (BPS, 2016). Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan melalui industri rumahan dan wirausaha perempuan untuk penanggulangan kemiskinan, pencegahan kekerasan, dan peningkatan indeks ketahanan rumah tangga (Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). Selama ini perempuan lebih dilihat sebagai objek pembangunan sehingga perempuan kurang dilibatkan secara aktif dalam program pembangunan untuk perempuan. Perempuan dalam program pembangunan seharusnya ditempatkan sebagai subjek pembangunan, dilibatkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Keterlibatan perempuan dalam program pembangunan sebagai subjek tentu akan berdampak luas pada percepatan peningkatan peran perempuan. Kesetaraan gender merupakan pintu untuk memasuki gerbang kesejahteraan dengan menghapuskan kemiskinan. Kunci untuk menghapuskan kemiskinan adalah membuka kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk dapat akses pada pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan. Badan sehat dan pendidikan baik dengan pemenuhan gizi pada perempuan dan laki-laki yang memadai memungkinkan mereka terbebas dari belenggu kemiskinan. Pilihan yang dapat dilakukan menjadi lebih luas ketika kualitas perempuan baik. Perempuan dengan kualitas yang lebih baik memungkinkan perempuan dapat berperan lebih luas untuk membangun semangat keindonesia. Kiprah perempuan dalam konteks keindonesiaan dapat dilakukan pada ruang domestik dan ruang publik. Memahami cita-cita pembangunan berkelanjutan di Indonesia maka peran perempuan dalam pembangunan

berkelanjutan sesuai dengan yang dicanangkan dalam SDGs dan Nawacita sebagai program pembangunan pemerintah saat ini. Penulis menterjemahkan peran perempuan dalam konteks keindonesiaan dapat dilakukan dalam berbagai peluang baik pada ruang domestik dan ruang publik.

Peran perempuan dalam konteks keindonesiaan dapat dilakukan dalam berbagai peluang baik pada ruang domestik dan ruang publik. Perempuan pada ruang domestik meliputi antara lain tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat memaksa perempuan dapat memperoleh pendapatan guna membantu menopang pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tugas rumah tangga yang dapat dipertukarkan seharusnya dibagikan dengan lawan jenisnya agar perempuan tidak harus menanggung beban yang lebih berat ketika perempuan masuk ke ruang publik. Perjuangan untuk pembagian kerja secara berkeadilan ini terus diperjuangkan dalam kesetaraan gender agar perempuan memperoleh keadilan pada sektor domestik dan publik. Ketika perempuan masuk ke sektor publik diharapkan beban domestiknya dapat dilakukan bersama dengan lawan jenisnya.

Peran perempuan dalam bidang pendidikan melalui peningkatan pendidikan yang berujung pada perluasan kesempatan kerja bagi perempuan yang makin luas. Perempuan dengan modal pendidikan yang memadai, maka perempuan akan memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam mengakses kesempatan kerja yang menjanjikan pendapatan lebih memadai. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi perempuan sudah terbuka lebar sehingga perempuan dapat memperoleh pendidikan ke segala jenjang pendidikan tanpa pengecualian. Kultur patriarki pada awalnya membelenggu perempuan

untuk menikmati pendidikan karena peluang pendidikan lebih diprioritaskan untuk laki-laki terutama ketika satu rumah tangga mengalami tekanan ekonomi, maka kesempatan memperoleh pendidikan akan diprioritaskan untuk laki-laki. Peran perempuan dalam ekonomi akan mendorong pertumbuhan industri dan peningkatan kebutuhan hidup yang lebih berkualitas. Pendapatan yang memadai memungkinkan pemenuhan kebutuhan yang lebih bervariasi. Secara sinergi dengan pendidikan yang baik, maka kesempatan memperoleh pendapatan memadai lebih terbuka. Pendapatan yang memadai tentu akan berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, hal demikian tentu akan berdampak pada peningkatan pergerakan sektor industri.

Penutup

Saat ini kondisi perempuan Indonesia telah memperoleh kesempatan untuk peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan kesetaraan gender yang lebih baik. Peran perempuan Indonesia pada ruang publik tentu saja tetap harus berpegang pada semangat keindonesiaan yang memegang etika ketimuran. Perempuan terjun ke ruang publik dengan tetap memperhatikan tugas utama perempuan pada ruang domestik. Tuntutan yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah pengertian dari laki-laki, bahwa tugas domestik yang dapat dipertukarkan seharusnya dapat dilakukan secara berkeadilan antara laki-laki dan perempuan.

Referensi

- Alami, Atiqah Nur. 2016. *Perempuan dan Globalisasi Studi Kasus Trafficking di Kabupaten Kerawang*. Mahara Publishing. Banten.
- Biro Pusat Statistik. 2016. *Profil Perempuan Indonesia 2011-2015*. Lintas Khatulistiwa. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia On Line.
- Kompas. 2018. Indonesia Bisa Maju Dengan Inovasi Kreativitas Generasi Muda Dan Wanita. *Kompas Online* 27 April 2018.
- Soekarno. 1947. *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.
- Siti Nimrah dan Sakaria. 2015. Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 1 No. 2, July 2015 | P-ISSN: 2407-9138*.
- Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Kajian Peran Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Industri Rumah Tangga*. BISA. Jakarta.
- Yohana. 2018. Perempuan Indonesia Banyak Tidak Tertarik Dengan Politik. *Merdeka.com* 10 Juli 2018.

BAGIAN II: INOVASI KEILMUAN DI INDONESIA

SEJARAH INOVASI DI INDONESIA: PENGETAHUAN PUBLIK, HISTORIOGRAFI DAN PELUANG

Muhammad Yuanda Zara

Dalam beberapa dekade terakhir, kata ‘inovasi’ telah menjadi sebuah kata kunci dalam cara bagaimana perguruan tinggi di Indonesia memandang perannya yang seharusnya di zaman yang tengah berubah ini. Problem masyarakat yang kian kompleks mendorong institusi pendidikan tinggi untuk senantiasa mencari cara baru atau solusi yang belum pernah dibuat sebelumnya. Riset, baik yang dasar maupun aplikatif, giat dilaksanakan. Para peneliti menerbitkan tulisan mereka di jurnal maupun media cetak, serta turun ke lapangan untuk mendiseminasikan terobosan-terobosan inovatif mereka.

Arti penting inovasi, terutama di bidang teknologi, ditegaskan pula oleh institusi pemerintah yang mengelola bidang penelitian, teknologi dan pendidikan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Pidato Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2016 menekankan bahwa teknologi dan inovasi adalah motor penggerak pembangunan, mengingat sumber daya alam, bila dikonsumsi terus-menerus, bisa habis. “Pembangunan Indonesia”, terang Nasir, “memerlukan inovasi, sebagai tulang punggung industri dan untuk terciptanya ekonomi berbasis pengetahuan.”¹ Dalam pidato untuk menyambut HUT ke-73 RI tahun 2018 Nasir kembali menekankan arti penting inovasi. Ia menyebut bahwa berbagai produk inovasi yang dilahirkan oleh putra-putri

¹ ‘Pidato Menristekdikti: HUT RI ke-71’, <https://ristekdikti.go.id/pidato-menristekdikti-tentang-hut-ri-ke-71/>, diakses 27 Agustus 2018.

Indonesia telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian dan daya saing Indonesia.²

Di luar Indonesia, para peneliti, baik di bidang teknik, sosial maupun humaniora juga telah menaruh perhatian pada arti penting penemu dan inovasinya dalam mengubah cara masyarakat berpikir, bertindak dan memecahkan masalahnya. Kajian tentang inovasi masuk ke dalam studi *science, technology and society* (STS) dan *science, technology and innovation* (STI). Beberapa studi penting bisa dikemukakan di sini. Kajian Steven Johnson menggarisbawahi dua ruang yang memberi ruang dan stimulan bagi lahirnya inovasi, yakni kota dan internet.³ Francis C. Moon, lewat bukunya, *Social Networks in the History of Innovation and Invention*, mematahkan mitos bahwa seorang inovator besar adalah seorang jenius penyendiri, yang menghabiskan waktunya di ruang kerja atau laboratoriumnya dan, pada saat yang sama, tidak memiliki dunia sosial. Menurut Moon, inovator atau penemu besar yang kita kenal selama ini bukanlah seorang soliter, melainkan ilmuwan yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam sistem jaringan modern.⁴ Sementara itu, Taco C.R. van Someren dan Shuhua van Someren-Wang, dalam *Innovative China*, mengutarakan bahwa dalam konteks sejarah kuno Cina (bangsa yang dikenal sebagai penemu kertas, alat cetak dan bubuk mesiu), inovasi tidak didasarkan pada inisiatif dan upaya personal ilmuwan, melainkan atas perintah raja atau bangsawan

² ‘Sambutan Menristekdikti Pada Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan HUT ke-73 Republik Indonesia’, <https://ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Sambutan-Menristekdikti-17-Agustus-2018-final.pdf>, diakses 27 Agustus 2018.

³ Steven Johnson, *Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation* (London: Allen Lane, 2010).

⁴ Francis C. Moon, *Social Networks in the History of Innovation and Invention* (Dordrecht: Springer, 2014), hlm. 1.

yang membutuhkan teknologi terobosan untuk memecahkan persoalan di istananya.⁵

Meskipun ada cukup banyak kajian tentang asal usul inovasi serta perihal para penemu dan temuannya di dunia Barat maupun Asia Timur, para ahli yang mengkaji inovasi nyaris belum mendiskusikan secara serius perihal bagaimana inovasi, khususnya inovasi teknologi, menjadi kekuatan sejarah di Indonesia pada masa lalu. Padahal, relevansi pengetahuan tentang sejarah inovasi amat tinggi dengan aspirasi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk memajukan inovasi. Dewasa ini inovasi selalu dikaitkan dengan fungsinya sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan di zaman ini serta sebagai persiapan atau antisipasi terhadap ketidakpastian di masa depan. Asumsi dasar semacam ini menyiratkan bahwa era inovasi adalah era baru di Indonesia dan tidak memiliki akar di masa lalu Indonesia.

Tanpa pemahaman tentang sejarah inovasi di Indonesia kita akan senantiasa berpikir bahwa inovasi adalah sebuah tujuan besar yang masih jauh dari kata tercapai alih-alih sebagai introduksi perlahan-lahan berbagai elemen temuan baru dari berbagai level, dari eksperimen sederhana hingga terobosan fundamental. Pada gilirannya, asumsi tentang kurangnya inovasi ini akan dikaitkan dengan masih belum majunya teknologi yang dihasilkan oleh penemu Indonesia sendiri. Alhasil, ketika menyebut tentang inovasi teknologi, kita akan cenderung untuk senantiasa menyebut temuan-temuan hebat para peneliti dari tradisi intelektual Barat, mulai dari mesin cetaknya Gutenberg hingga pesawatnya Wright bersaudara, dan melupakan temuan para penemu Indonesia sendiri yang, kendati implikasi temuan mereka tidak sampai

⁵ Taco C.R. van Someren dan Shuhua van Someren-Wang, *Innovative China: Innovation Race between East and West* (Dordrecht: Springer, 2013), hlm. 27-34.

‘mengubah peradaban dunia’ (istilah yang kerap dilekatkan dengan dampak penemuan inovator besar dunia), sangat berperan membantu Indonesia memecahkan masalah-masalah khususnya dalam berdekade-dekade terakhir ini. Di dalam kajian inovasi dewasa ini telah banyak ditekankan bahwa *‘the lone inventor’* (penemu tunggal) adalah mitos belaka, dan bahwa setiap inovasi atau temuan baru pada dasarnya adalah hasil dari kombinasi atau pelipatgandaan berbagai penemuan sebelumnya, baik yang kecil maupun besar.

Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk merekam secara kronologis, rinci dan kritis berbagai aspek dari sejarah inovasi di Indonesia. Dengan kerangka historis, dibutuhkan penilikan terhadap asal usul tradisi inovasi di Indonesia, berbagai percobaan yang dilakukan oleh para penemu Indonesia dan hasilnya, baik yang berhasil maupun yang gagal, konsekuensi inovasi mereka, serta respon masyarakat terhadap inovasi tersebut.

Inovasi Indonesia dan Kurangnya Pengetahuan Publik

Kurangnya atensi publik terhadap sejarah inovasi di Indonesia tampak dalam beberapa indikasi. Pertama, publik kerap memiliki ingatan pendek tentang inovasi yang dilahirkan orang Indonesia. Mereka bisa menyebutkan inovasi yang dibuat para peneliti Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tapi tidak dalam beberapa dekade, apalagi beberapa abad terakhir. Artinya, ada pandangan bahwa hingga beberapa tahun atau beberapa dekade terakhir ini Indonesia statis dan tidak atau kurang inovatif. Cukup banyak yang tahu tentang mobil hemat energi karya mahasiswa Indonesia yang baru-baru ini memenangkan lomba di luar negeri. Tapi adakah yang tahu tentang inovasi para mahasiswa di era 1980-an, saat perekonomian Indonesia tengah melaju dan

industrialisasi menggeliat—dua kondisi yang secara alamiah mendorong inovasi?

Kedua, pengetahuan umum tentang kata ‘inovasi’ hampir selalu berasosiasi dengan teknologi dan pencapaian keilmuan yang diinisiasi di luar Indonesia, tepatnya di dunia Anglo-Sakson. Istilah ‘inovasi’ senantiasa berkaitan dengan sosok seorang penemu, yang lewat risetnya, berhasil mendapatkan cara baru dalam memahami atau menjalankan sesuatu. Para penemu ini, di dalam ruang publik Indonesia, lebih banyak mengacu pada para inovator Eropa dan Amerika dalam setidaknya dua abad terakhir. Ini bisa dilihat dari buku sejarah populer di perpustakaan publik ataupun di toko buku. Buku-buku ini membahas para penemu kelas dunia dengan menggunakan term yang superlatif, seperti ‘para penemu paling hebat’ atau ‘para penemu superjenius’. Nama-nama yang masuk ke dalam daftar sudah bisa ditebak, dan lebih banyak berasal dari tradisi intelektual Barat, mulai dari Albert Einstein (pembangun teori relativitas), Thomas Alva Edison (penemu lampu), hingga James Watt (penemu mesin uap).

Sangat sulit penemu Indonesia untuk masuk ke dalam daftar penemu besar dunia. Kalaupun ada, umumnya hanya ada satu nama yang kemudian masuk, yakni B.J. Habibie, yang menciptakan apa yang di dunia dirgantara dunia dikenal sebagai Teori Habibie, Faktor Habibie dan Metode Habibie. Namun, perlu dicatat bahwa di dalam memori kolektif masyarakat Indonesia sendiri, terobosan keilmuan Habibie, dan aplikasinya, tidaklah banyak diketahui lantaran berbagai studi yang tersedia tentang Habibie lebih banyak mengulas kiprah politiknya, terutama di tahun transisi politik, 1998, saat ia menjadi presiden Republik Indonesia menggantikan mentor politiknya, Soeharto.

Historiografi Sejarah Inovasi di Indonesia

Sejauh ini, sejarah tematik yang dikaji para sejarawan Indonesia lebih banyak berkisar pada beberapa topik pokok saja. Sejarah politik, sejarah sosial, dan sejarah budaya adalah bidang kajian yang paling populer. Beberapa tren baru muncul belakangan ini, umpamanya sejarah maritim dan sejarah kota. Meskipun terjadi proliferasi karya-karya sejarah dalam setidaknya dua dekade terakhir ini, perkembangan keragaman tema-tema penelitian sejarah tidaklah secepat perkembangan jumlah buku sejarah yang diterbitkan. Salah satu tema sejarah yang hanya mendapat tempat minimal dalam kajian sejarah Indonesia adalah sejarah inovasi, khususnya teknologi. Walau sejumlah studi menyebut-nyebut tentang inovasi di Indonesia, kajiannya masih sangat terbatas dan dikalahkan oleh mendalamnya analisis terhadap aspek lain yang dianggap lebih besar dan lebih penting dibandingkan dengan inovasi.

Di dalam *The History of Java*, Thomas Stamford Raffles, sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan di masa berkembangnya Revolusi Industri di Inggris yang digerakkan oleh mesin dan mekanisasi—dan oleh sebab itu, terbiasa dengan inovasi dan teknologi—menilai bahwa inovasi nyaris tidak ada di Tanah Jawa, setidaknya di dekade-dekade awal abad ke-19. Inovasi minim sekali di bidang pertanian, yang merupakan pekerjaan pokok penduduk Jawa kala itu. Ia menyebut beberapa penyebabnya, antara lain lantaran masyarakat Jawa lebih banyak bekerja pada orang Eropa, gaya hidup yang simpel, kebutuhan yang sedikit, modal tidak banyak dan jenis pekerjaan yang tidak bervariasi.⁶ Dengan kata lain, tanpa berinovasi pun, penduduk Jawa,

⁶ Thomas Stamford Raffles, *The History of Java* (Yogyakarta: Narasi, 2014), hlm. 103. Buku ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris pada tahun 1817. Pada tahun itu, ia diangkat sebagai gubernur Bencoolen (Bengkulu). Sebelumnya (1811-1815) ia merupakan Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Jawa sehingga

dengan teknik pertaniannya yang sederhana, sudah bisa memenuhi kebutuhannya. Barangkali gagasan Raffles ini masih diadopsi oleh sebagian orang, yang dengan menekankan segi agraris masyarakat Indonesia berpandangan bahwa inovasi bukan hanya tidak eksis di Indonesia, tapi bahkan tidak diperlukan sama sekali, menimbang bahwa tanpa inovasi pun orang Indonesia tetap bisa hidup.

Salah satu buku rujukan utama tentang sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia*, sebenarnya menyinggung soal inovasi dan teknologi pada masyarakat Indonesia, bahkan dari zaman prasejarah. Ini tampak dari jilid I buku tersebut, *Zaman Prasejarah di Indonesia*. Namun, kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkreasi ditempatkan dalam konteks ‘kemampuan membuat alat’, contohnya dengan memanfaatkan batu, kayu dan tulang guna mencari dan mengolah bahan makanan.⁷ Konsep ‘inovasi’ absen di sini. Implikasinya, fokusnya di sini adalah alat itu sendiri, dan bukan ide, aspirasi, eksplorasi, penemuan, dan nilai baru yang diciptakan masyarakat Indonesia itu sendiri melalui pembuatan dan pemanfaatan alat tersebut. Kurangnya informasi tentang cara hidup manusia purba mungkin menjadi alasan minimalnya penggunaan pendekatan inovasi dalam memahami bagaimana manusia prasejarah Indonesia membangun gagasan, solusi ataupun produk baru di masa lalu.

Dibandingkan dengan agama, politik, dan ekonomi, aspek inovasi hanya mendapat tempat yang selintas saja. Inovasi dianggap sebagai salah satu cara orang Indonesia kuno untuk beradaptasi dengan

ia mempunyai pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang budaya dan masyarakat Jawa.

⁷ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto (editor umum), *Sejarah Nasional Indonesia I: Zaman Prasejarah di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 93

lingkungannya semata, dan bukan sebagai kekuatan sejarah yang mengubah perspektif masyarakat kuno dalam mendapatkan cara baru untuk membangun ide kreatif dan menciptakan produk yang memberikan manfaat dan nilai baru. Pendeknya, inovasi bukan hanya soal penyesuaian diri demi bertahan hidup, tapi lebih jauh lagi, inovasi adalah progres demi kehidupan yang lebih efisien, produktif dan bermakna.

Ketika era modern masuk ke Indonesia, berbagai produk inovatif turut hadir di Indonesia. Namun, pembawanya bukanlah orang Indonesia, melainkan orang Belanda khususnya dan orang Eropa pada umumnya. Inovasi, oleh karenanya, diasosiasikan dengan penemu dan penemuan Barat. Ini bisa dilihat dari narasi yang dikemukakan di *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Introduksi produk-produk inovatif dari Eropa, khususnya yang berkaitan dengan teknologi, terjadi terutama sekali sejak akhir abad ke-18. Listrik merupakan produk inovatif bagi kebanyakan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19, dan adalah perusahaan Belanda, *Nederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij* (NIEM) di Batavia yang pertama kali menjual listrik (Mei 1897).⁸

Pendirian berbagai pabrik gula di Jawa mendorong lahirnya pemanfaatan berbagai teknologi industri termutakhir di bidang permesinan serta juga penciptaan produk-produk inovatif. Tujuannya agar produksi gula menjadi lebih efisien, hemat waktu dan tenaga manusia, serta memiliki hasil yang berlimpah. Di pabrik gula, mesin dipakai untuk mengubah tebu menjadi gula. Demikian pula di bidang pertambangan, di mana perusahaan-perusahaan Belanda mengandalkan

⁸ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto (editor umum), *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 205-212.

penggunaan tenaga uap dan belakangan, tenaga listrik, untuk menggerakkan mesin yang mengolah hasil tambang. Mesin menjadi kian banyak dipakai di Hindia Belanda, baik untuk industri besar seperti perkapalan di Tanjung Priok dan Surabaya, serta untuk memproduksi barang-barang konsumsi seperti sabun dan kertas.⁹

Kontribusi besar Belanda dengan pemanfaatan produk-produk inovatif yang mencirikan dunia modern di Indonesia ditekankan pula oleh Sartono Kartodirdjo. Di dalam studinya, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium*, Sartono menyebut tentang beberapa produk teknologi yang merupakan terobosan pada zamannya dan mengubah cara masyarakat Hindia Belanda menjalankan aktivitasnya. Di bidang komunikasi dan transportasi, Sartono mengemukakan kapal api dan kereta api—dua teknologi temuan Barat—sebagai sarana yang memudahkan pergerakan orang dan barang di Hindia Belanda sejak paroh kedua abad ke-19.¹⁰

Meskipun Sartono menggarisbawahi arti penting teknologi komunikasi dan transportasi termutakhir di zamannya, ia tak banyak mengulas soal dampak kedua teknologi itu pada cara bagaimana jarak didefinisikan ulang, pada bagaimana masyarakat Hindia Belanda merenungkan relasi dan interdependensi antardaerah (yang banyak di antaranya tidak terjangkau di era pra-kapal api dan pra-kereta api) di Hindia Belanda, dan, yang tak kalah penting, pada bagaimana teknologi inovatif ini memberikan atmosfer dan stimulan pada lahirnya inovasi-inovasi lainnya di koloni. Untuk yang disebut terakhir ini contohnya adalah termasuk inovasi dalam teknis perjalanan kereta, umpamanya

⁹ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto (editor umum), *Sejarah Nasional Indonesia V*, hlm. 209-210.

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 419.

dalam hal sistem pembelian tiket, pelayanan di atas kereta, desain arsitektur dan interior stasiun, dan papan petunjuk (*signage system*) kereta.

Di dalam karya yang sama, Sartono juga menyebut kota sebagai faktor penting dalam proses modernisasi di Hindia Belanda pada abad ke-19. “Kota-kota dalam abad ke-19”, tulis Sartono, “tidak hanya merupakan pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan serta kemudahan dan pelayanan.”¹¹ Tidak ada yang salah dalam pernyataan Sartono. Hanya saja, kiranya perlu ditambahkan di sini bahwa kota, yang perkembangannya didorong oleh temuan dan teknologi baru (termasuk kota-kota besar Hindia Belanda), tidak hanya mendukung perekonomian, pemerintahan dan jasa, melainkan juga memberikan tempat yang kondusif bagi lahirnya inovasi.

Para ahli, khususnya di bidang pembangunan urban, telah menekankan bahwa lingkungan kota turut mempengaruhi inovasi di kota tersebut. Nicos Komninos, dalam *Intelligent Cities*, menyebutkan contohnya: di dekade-dekade terakhir abad ke-20, tempat-tempat yang memiliki kapasitas luar biasa untuk membangun pengetahuan baru dan inovasi adalah beberapa kota dan wilayah di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.¹² Alasannya antara lain karena kota-kota ini menyediakan lingkungan yang suportif bagi penelitian, teknologi dan inovasi. Menilik relasi antara kota-kota Hindia Belanda dengan perkembangan inovasi di koloni, dengan demikian, adalah sebuah upaya yang memiliki alasan yang kuat.

Karya Rudolf Mrázek, *Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony*, merupakan satu dari sedikit studi

¹¹Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, hlm. 427.

¹²Nicos Komninos, *Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces* (London & New York: Routledge, 2002).

mendalam yang secara khusus menilik sejarah inovasi, dan terutama sekali aplikasinya, di masa kolonial Hindia Belanda.¹³ Di sini, Mrázek mendiskusikan bagaimana masyarakat pribumi di Hindia Belanda menjadi manusia modern lewat konsumsi mereka terhadap produk-produk inovatif yang diciptakan di Eropa dan dibawa ke koloni. Produk itu beragam dan jelas membuat hidup masyarakat Hindia menjadi lebih praktis dan produktif dibandingkan sebelumnya. Daftarnya membentang dari benda teknologi kecil seperti radio, kamera, mesin ketik hingga produk teknologi besar seperti sepeda motor, mobil dan kereta api. Walaupun banyak bertutur tentang inovasi teknologi dan aplikasinya, Mrazek juga menggarisbawahi bahwa modernisasi yang diperkenalkan Belanda sebenarnya merupakan cara Belanda untuk mengawasi dan mengendalikan kaum pribumi agar sesuai dengan standar yang diinginkan Belanda.

Telah ada sejumlah buku tentang inovator Indonesia, terutama yang berkreasi beberapa dekade terakhir. Namun, buku-buku ini tergolong ringkas dan lebih banyak ditulis oleh penulis populer yang menysar pembaca muda.¹⁴ Isinya lebih banyak memberikan pujian pada kehebatan temuan inovator Indonesia dan keteladanan yang bisa diikuti dari mereka. Dengan kata lain, melalui penempatan para inovator sebagai pahlawan alih-alih ilmuwan murni, sasaran tulisan tersebut lebih banyak ditujukan untuk membangun rasa kebanggaan berbangsa dan kepercayaan diri di tengah masyarakat Indonesia bahwa peneliti Indonesia pun bisa berinovasi dan tidak kalah dengan peneliti asing.

¹³Rudolf Mrázek, *Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony* (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2002).

¹⁴Dua di antaranya adalah buku Lilih Prilian Ari Pranowo, *30 Tokoh Penemu Indonesia* (Yogyakarta: Narasi, 2009) dan Tim NARASI, *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia* (Yogyakarta: Narasi, 2009).

Yang masih hilang dari tulisan jenis ini kedalaman analisis perihal bagaimana pikiran mereka sebagai inovator bekerja, metode dan metodologi penelitian mereka, proses kreatif mereka (dari ide mentah, eksperimen dan hasil), tempat seperti apa yang mereka temukan kondusif bagi kreativitas mereka, penelaahan sejawat (*peer review*) terhadap temuan mereka, hingga sistem manajemen inovasi mereka.

Sejarah Inovasi sebagai Pendekatan: Sebuah Peluang

Sebagai sebuah bidang kajian yang belum banyak dikaji padahal relevan dengan usaha Indonesia menggalakkan inovasi, sejarah inovasi sebenarnya menawarkan banyak ruang untuk bisa dieksplor. Aplikasi pendekatan sejarah inovasi pada B.J. Habibie sebagai seorang inovator Indonesia bisa dijadikan sebagai contoh. Bila Habibie dikatakan sebagai salah satu contoh ilmuwan Indonesia paling inovatif di zamannya, yang kepakarannya di bidang teknik kedirgantaraan diakui di dalam dan di luar negeri, maka orang akan terkejut dengan sedikitnya kajian serius yang tersedia tentang terobosannya dalam ilmu pengetahuan.

Biografi Habibie termasuk salah satu biografi tokoh Indonesia yang paling banyak ditulis. Namun, fokus kajian lebih banyak diberikan pada perannya sebagai politisi di zaman yang berubah. Adian Husaini, misalnya, menulis tentang posisi Habibie di tengah politik pendekatan yang dilakukan Presiden Soeharto terhadap kaum Muslim di era 1990-an.¹⁵ Biografi Habibie lainnya ditulis oleh A. Makmur Makka. Dari 33 bab yang ditulisnya, fokus lebih banyak diberikan pada setidaknya empat aspek pokok: masa kecil Habibie, kuliahnya di Jerman, pengalaman pribadi dan keluarganya, serta karier sosial-politiknya

¹⁵Adian Husaini, *Habibie, Soeharto, dan Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995).

sekembalinya ia ke Indonesia.¹⁶ Beberapa biografi lainnya tentang Habibie, dalam skala berbeda-beda, juga telah ditulis, namun fokusnya tetap lebih banyak pada pandangan dan aktivitas politik Habibie daripada sisi inovasi teknologinya. Biografi yang ditulis oleh Habibie sendiri, *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, sebagaimana diindikasikan oleh judulnya, sebenarnya bukan otobiografi utuh, melainkan otobiografi politik Habibie di salah satu tahun yang paling menentukan dalam hidupnya, 1998, saat ia menjadi presiden RI.¹⁷ Narasi komprehensif sosok Habibie sebagai ilmuwan inovatif, dengan demikian, masih terabaikan.

Oleh sebab itu, dalam konteks menjadikan sejarah inovasi sebagai sebuah peluang dalam memahami pencapaian teknologi Indonesia di masa lalu, diperlukan upaya untuk menilik proses pembelajaran yang dijalani para penemu Indonesia, eksperimen yang mereka lakukan, dan temuan baru yang mereka dapatkan. Perihal Habibie, umpamanya, dibutuhkan studi khusus yang mengulas tentang dirinya sebagai seorang penemu yang inovatif, studi yang secara mendalam menilik tentang bagaimana seorang anak biasa berubah menjadi pemuda jenius di bidang keilmuan yang sulit, tentang asal-usul ide-ide uniknya, tentang inovasi besarnya untuk ilmu pengetahuan (yang diletakkan dalam perspektif keilmuan di zamannya), tentang jaringan ilmuwan mondial yang membantunya, tentang kritik para ilmuwan lain pada risetnya, tentang di lingkungan seperti apa yang ia rasakan paling suportif untuk inovasi, tentang bagaimana ia membayangkan tak hanya

¹⁶ A. Makmur Makka, *The True Life of Habibie: Cerita di Balik Kesuksesan* (Depok: Pustaka IIMaN, 2008).

¹⁷ Bacharuddin Jusuf Habibie, *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi* (Jakarta: THC Mandiri, 2006).

kontribusi dari temuannya, tapi juga implikasinya, dan, yang tak kalah pentingnya, tentang bagaimana ia ‘membangkitkan’ dunia kedirgantaraan, sehingga baik pejabat negara hingga masyarakat biasa merasa dekat dengan bidang ini.

Dengan kata lain, yang masih perlu ditulis adalah buku dengan judul semacam ‘akar dan perkembangan inovasi Habibie’, ‘Habibie: ide, inovasi dan kontroversinya’, atau ‘Habibie: proses inovasi dan kreasi seorang jenius teknologi.’ Topik tentang inovasi Habibie dan berbagai subtopik di atas merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam memikirkan ulang temuan-temuan inovatif Habibie, yang pada gilirannya akan memperkaya pengetahuan tentang akar-akar inovasi dalam sejarah Indonesia modern.

Pendekatan ini pun bisa dipakai untuk mengulas sosok inovator Indonesia lainnya, misalnya Sedijatmo dengan konstruksi cakar ayamnya dan Tjokorda Raka Sukawati dengan tiang pancang Sosrobahunya, maupun para inovator kolektif yang tergabung dalam tim-tim riset di kampus atau lembaga penelitian. Bahkan, pendekatan sejarah inovasi ini dapat pula dipakai untuk melacak kelahiran dan dinamika inovasi di kalangan para mahasiswa Indonesia, yang kiprahnya dalam sejarah Indonesia modern lebih banyak dikaitkan dengan gejolak politik nasional.

Pada akhirnya, studi sejarah inovasi akan memetakan dengan tepat kapan era inovasi dimulai di Indonesia dan bagaimana perkembangannya dari masa ke masa. Studi ini akan menunjukkan bagaimana ide baru muncul, diuji dalam eksperimen dan diwujudkan dalam hasil jadi. Mengingat bahwa efektivitas sebuah inovasi mesti diuji dalam aplikasinya, sejarah inovasi akan menjelaskan bagaimana ujian ini tidak hanya akan menghasilkan penerimaan dan apresiasi publik, tapi

juga resistensi dan kontroversi. Dengan pendekatan sejarah inovasi, setidaknya dalam rentang 70 tahun terakhir, bukan hanya pencapaian-pencapaian teknologi yang dihasilkan oleh inovator Indonesia saja yang akan terdokumentasikan, tapi juga perihal bagaimana perbedaan suasana zaman akan menentukan besar kecilnya dorongan pada kemunculan inovasi. Dokumentasi historis ini akan menjadi pengakuan pula pada berbagai ide dan produk inovatif yang telah dihasilkan para penemu Indonesia di masa lalu, yang telah memungkinkan masyarakat Indonesia dewasa ini untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan lebih mudah, lebih praktis, dan lebih produktif.

Referensi

- Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Husaini, Adian. 1995. *Habibie, Soeharto, dan Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Johnson, Steven. 2010. *Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation*. London: Allen Lane.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium*. Yogyakarta: Ombak.
- Komminos, Nicos. 2002. *Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces*. London & New York: Routledge.
- Makka, A. Makmur. 2008. *The True Life of Habibie: Cerita di Balik Kesuksesan*. Depok: Pustaka IIMaN.
- Moon, Francis C. 2014. *Social Networks in the History of Innovation and Invention*. Dordrecht: Springer.
- Mrázek, Rudolf. 2002. *Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony*. Princeton & Oxford: Princeton University Press.

‘Pidato Menristekdikti: HUT RI ke-71’, <https://ristekdikti.go.id/pidato-menristekdikti-tentang-hut-ri-ke-71/>, diakses 27 Agustus 2018.

Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notokusanto (editor umum). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia I: Zaman Prasejarah di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notokusanto (editor umum). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pranowo, Lilih Prilian Ari. 2009. *30 Tokoh Penemu Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.

Raffles, Thomas Stamford. 2014. *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.

‘Sambutan Menristekdikti Pada Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan HUT ke-73 Republik Indonesia’, <https://ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Sambutan-Menristekdikti-17-Agustus-2018-final.pdf>, diakses 27 Agustus 2018.

Tim NARASI. 2009. *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.

van Someren, Taco C.R. dan Shuhua van Someren-Wang. 2013. *Innovative China: Innovation Race Between East and West*. Dordrecht: Springer.

INOVASI TATA KELOLA KOMUNIKASI ORGANISASI BERBASIS NILAI-NILAI KEINDONESIAAN

Suranto AW

Dinamika proses kerjasama untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dapat ditingkatkan keefektifannya melalui penerapan inovasi tata kelola komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas pertukaran informasi untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam suatu sistem organisasi. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan merancang dan melaksanakan tata kelola komunikasi. Berbagai hasil kajian menunjukkan kerjasama yang baik antara pimpinan organisasi dengan para anggota menjadi kunci kualitas tata kelola komunikasi. Ketika pimpinan memiliki kemauan dan kemampuan mengelola sistem komunikasi dengan berbagai pendekatan yang inovatif, kemudian anggota merespon dengan tindakan yang positif maka komunikasi organisasi akan dapat berjalan secara memadai. Fasilitas media hanyalah merupakan faktor sekunder, karena pada prinsipnya media hanya sebagai saluran yang memudahkan para pelaku komunikasi.

Tata kelola komunikasi organisasi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, karena semakin maju sebuah organisasi menuntut adanya pengelolaan yang profesional agar semua komponen dapat melaksanakan tugas fungsi sebagai bagian penting dari sistem komunikasi. Semua organisasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi, baik organisasi komersial seperti lembaga bisnis dan industri, ataupun organisasi-organisasi sosial seperti institusi pendidikan, lembaga rumah sakit, dan sebagainya.

Tata kelola komunikasi ialah sistem pengaturan atau pengelolaan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Sistem pengaturan ini dimaksudkan agar: (1) proses komunikasi berada dalam koridor aturan dan kesepakatan yang berlaku dan berfungsi sesuai dengan harapan, (2) sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi dan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis komunikasi organisasi, dan (3) menciptakan pengelolaan komunikasi organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata komunikasi yang baik.

Tata kelola komunikasi sangat penting dalam rangka menjalin kerjasama dan integrasi. Dengan tata kelola yang baik, maka komunikasi akan mengantarkan terbentuknya kesatuan dan keharmonisan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung serta terciptanya pola hubungan tata kerja yang harmonis. Temuan penelitian Dewi dan Jati (2014: 251-252) menunjukkan tata kelola organisasi yang baik, diawali dengan adanya pemisahan kepentingan antara kepentingan pribadi pemilik kapital dengan kepentingan organisasi. Organisasi perlu dikelola secara profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu hasil penelitian Utomo dan Mariana (2011: 139) mengungkap bahwa tata kelola komunikasi organisasi merupakan struktur hubungan dan proses yang memandu, mengendalikan, dan mengarahkan organisasi untuk dapat mencapai tujuannya, dengan mengutamakan fungsi komunikasi dan koordinasi untuk keharmonisan kerja.

Sistem organisasi merupakan paduan dari berbagai bagian atau sub sistem yang satu sama lainnya saling bergantung. Komunikasi sangat penting untuk mempersatukan bagian-bagian tersebut guna

mencapai tujuan bersama. Wayne Pace dan Don F. Faules (1998: 26) memberikan definisi tata hubungan komunikasi sebagai sebuah sistem pengaturan proses penciptaan dan pengiriman pesan oleh komunikator serta penerimaan dan penafsiran pesan oleh komunikan yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama para anggota organisasi. Sementara itu Ig. Wursanto (1987: 25) menjelaskan bahwa tata kelola komunikasi di tempat kerja (terutama pada organisasi formal perkantoran) dapat dibedakan menjadi dua macam pengertian, sebagai berikut:

1. *Tata hubungan administrasi*, disebut juga tata hubungan fungsi, yaitu tata hubungan (komunikasi) yang dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai administrator atau manajer dengan para bawahan atau para pegawai pelaksana yang mengandung unsur perintah.
2. *Hubungan tata usaha*, adalah hubungan yang terjadi atau yang berlangsung antara satuan organisasi dengan satuan lain di dalam organisasi dan tidak mengandung unsur perintah. Hubungan ini hanya bersifat pengiriman informasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan organisasi. Pengiriman informasi ini dapat dilakukan melalui surat-surat atau dapat juga melalui telepon.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disarikan bahwa tata hubungan komunikasi ialah sistem pengaturan komunikasi yang diterapkan untuk mendukung kelancaran komunikasi, kerjasama, dan pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengaturan komunikasi tersebut biasanya sudah terpola, dan semua pengurus maupun anggota mempunyai komitmen untuk menjaga efisiensi tata kelola tersebut. Pada tataran teknis, tata kelola komunikasi adalah berupa sebuah prosedur

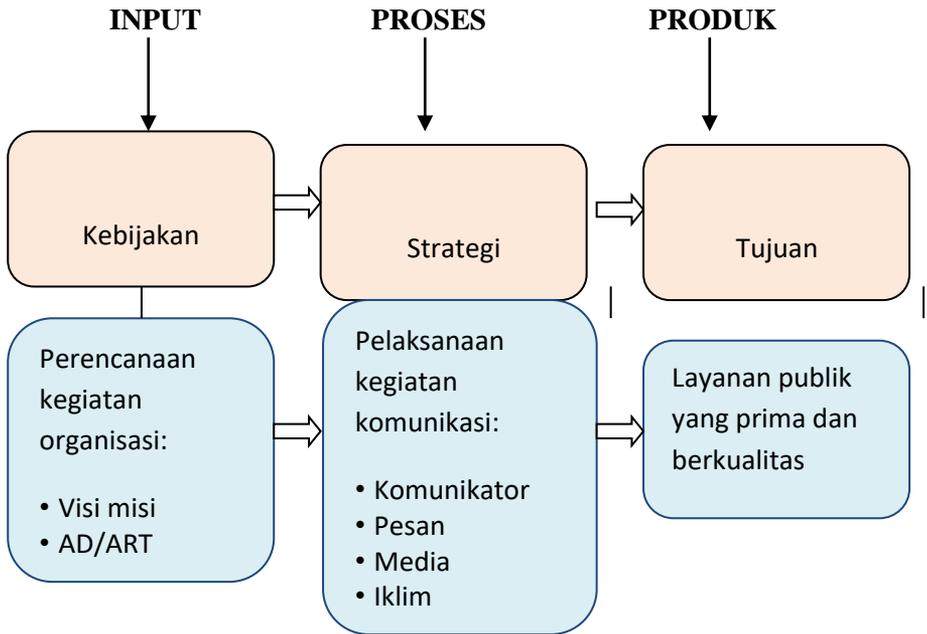
baku. Misalnya Anda akan menyampaikan gagasan kepada pimpinan, maka prosedur bakunya harus Anda perhatikan. Bahwa Anda tidak dapat menyampaikannya di sembarang waktu, melainkan harus membuat janji terlebih dahulu. Untuk membuat janji, prosedurnya Anda harus mengurusnya melalui sekretaris pimpinan. Sekretaris akan berkonsultasi dahulu dengan pimpinan, baru setelah itu menginformasikan kepada Anda tentang kesanggupan pimpinan.

Inovasi Tata Kelola Komunikasi Organisasi

Untuk menghadapi era disrupsi yang penuh tantangan dan peluang, para pimpinan organisasi dituntut untuk mengembangkan kebijakan guna mewujudkan sistem tata kelola komunikasi yang efektif dan efisien sesuai zamannya. Untuk merealisasi tata kelola komunikasi organisasi yang baik, diperlukan langkah-langkah inovatif, sehingga komunikasi organisasi dapat memberikan pelayanan informasi yang sebaik-baiknya, berorientasi kepada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Mardani Eka Ningrum (2013: 28) menyebut dalam menjalankan pekerjaan yang melibatkan banyak pihak dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda, diperlukan kreativitas dan inovasi tata kelola komunikasi, agar semua pimpinan dan anggota organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan berlangsung dalam suasana kerja yang harmonis untuk melayani masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat adalah pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik.

Karakteristik tata kelola komunikasi yang inovatif ditandai oleh adanya beberapa indikator, antara lain: (a) kebijakan yang aktual, (b) Sumber Daya manusia (SDM) yang unggul, dan (c) teknologi yang mendukung. Tata kelola komunikasi pada dasarnya merupakan langkah

teknis untuk melaksanakan kebijakan organisasi. Dengan demikian kebijakan organisasi harus selalu didiskusikan, disegarkan, dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Kebijakan dijabarkan ke dalam berbagai dokumen formal seperti visi dan misi, AD/ART, Renstra. Ketika kebijakan organisasi sudah *diupdate* sesuai dengan tantangan dan perubahan, maka tata kelola komunikasi juga harus menyesuaikan secara inovatif. Inovasi tata kelola komunikasi ini menyangkut semua komponen komunikasi: komunikator, pesan, media, iklim komunikasi, dan sebagainya. Selanjutnya, inovasi tata kelola komunikasi perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas. Langkah konkret yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi kualitas SDM, serta melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Apabila kebijakan sudah aktual, tersedia SDM yang berkualitas, maka tata kelola komunikasi memerlukan dukungan teknologi yang memadai. Ketersediaan perangkat teknologi akan meningkatkan kualitas layanan komunikasi bagi semua pemangku kepentingan, baik publik internal maupun eksternal, sehingga mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan prima secara berkelanjutan. Tata kelola komunikasi adalah sebuah sistem pengaturan yang bertujuan untuk menjamin pelayanan informasi yang berkualitas, sebagaimana digambarkan berikut ini:



Gambar di atas melukiskan bahwa setiap organisasi pasti memiliki kebijakan tertentu yang menjadi input bagi organisasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam visi-misi organisasi, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dalam rencana strategis, dan sebagainya. Berdasarkan kebijakan tersebut maka disusun tata kelola atau pengaturan kegiatan komunikasi dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang menjadi input organisasi, misalnya: sumberdaya manusia, norma dan aturan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan sebagainya. Strategi pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dan dijabarkan dalam proses dan tata kelola pelaksanaan kegiatan komunikasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada proses pelaksanaan kegiatan komunikasi ini, misalnya: kapasitas komunikator, organisasi pesan, media yang digunakan, iklim komunikasi, dan sebagainya. Sedangkan produk atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi pada dasarnya adalah terwujudnya layanan publik yang prima dan berkualitas.

Perlu dipahami, bahwa pelaku komunikasi tidak selamanya adalah perorangan/individu, melainkan seringkali komunikasi itu berlangsung antara pihak satu dengan pihak lain sama-sama mengatasnamakan organisasi, unit kerja, atau sebuah seksi tertentu. Dalam konteks ini, pengertian tata hubungan komunikasi ialah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara unit kerja yang merupakan bagian dari suatu susunan organisasi atau perusahaan. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit kerja yang menunjukkan adanya hubungan-hubungan horisontal dan vertikal. Misalnya, komunikasi antara unit produksi dengan unit pemasaran, menunjukkan bahwa meskipun yang saling berbicara hanyalah seorang kepala unit produksi dan seorang kepala unit pemasaran, tetapi keduanya berkomunikasi atas nama unit kerjanya masing-masing.

Tata kelola komunikasi menyangkut kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan komunikasi. Pada tataran teknis yang berkompeten untuk menyusun kebijakan tata kelola komunikasi adalah para pimpinan dengan memperoleh persetujuan anggota. Pada tahap pelaksanaan kegiatan melibatkan semua unsur, baik pimpinan maupun anggota. Sedangkan tahapan evaluasi menjadi tanggung jawab pimpinan, supaya diperoleh informasi mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan komunikasi, faktor pendukung dan penghambat, partisipasi masyarakat, dan sebagainya.

Pada tahap perencanaan, tata kelola komunikasi berupaya menghasilkan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai panduan kerja bagi organisasi. Untuk menyusun perencanaan yang baik, diperlukan informasi yang lengkap sebagai bahan pertimbangan. Aktivitas teknis yang memungkinkan, adalah dilakukannya analisis situasi untuk memotret dan memahami situasi dan kondisi sesuai dengan realitas di

lapangan. Dengan analisis situasi dan kegiatan pengumpulan informasi, maka akan diperoleh informasi faktual terkait dengan berbagai kondisi input bagi tata kelola komunikasi, mencakup: visi misi organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rencana strategis, dan sebagainya.

Pada tahap pelaksanaan diperlukan kecermatan untuk menganalisis kelancaran pelaksanaan program dalam menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Pada situasi tertentu, dirasa perlu menyesuaikan dengan perubahan. Sedangkan pada tahap evaluasi, pimpinan melakukan kajian sejauhmana tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kenyataannya, masih dapat dijumpai adanya pimpinan organisasi yang belum memiliki kesadaran untuk melakukan evaluasi, sehingga tidak diketahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program komunikasi. Keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dijabarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1 Keterkaitan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi
dalam Tata Kelola Komunikasi**

Merencanakan ➡	Melaksanakan ➡	Mengevaluasi
Menganalisis situasi , bahwa kegiatan komunikasi yang direncanakan harus sesuai dengan situasi (kekuatan dan kelemahan) pada organisasi, serta sesuai dengan karakteristik lembaga atau individu yang akan menjadi sasaran komunikasi	Pelaksanaan kegiatan komunikasi senantiasa bersifat adaptif dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi yang riil terjadi.	Perlu dilakukan evaluasi secara objektif untuk memperoleh informasi tingkat keberhasilan kegiatan komunikasi. Apakah tujuan program komunikasi sudah tercapai?
Mengumpulkan informasi , bahwa sebelum perencanaan komunikasi disahkan, perlu dipertimbangkan informasi dari para pimpinan anggota. Informasi ini dianalisis kemudian sebagai pertimbangan untuk menetapkan prioritas kegiatan-kegiatan yang penting dan strategis.	Pada tahap pelaksanaan kegiatan, informasi-informasi teraktual perlu menjadi perhatian.	Apakah situasi dan kondisi mendukung kegiatan komunikasi? Apakah informasi sudah memadai untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan komunikasi?
Memilih media , bahwa media yang digunakan untuk memperlancar penyampaian informasi haruslah dipilih yang tepat dan efisien sesuai dengan karakteristik penerima.	Perlu dilakukan pencermatan, apabila media yang direncanakan ternyata mengalami kendala, maka perlu segera dicari solusi agar penyampaian informasi tetap berjalan lancar.	Apakah media yang digunakan sudah representatif? Apakah strategi komunikasi yang diterapkan sudah tepat?
Mengorganisasikan pesan , yaitu strategi penyampaian pesan yang tepat.	Pada situasi tertentu perlu adanya revisi cara penyampaian pesan sesuai keadaan di lapangan.	

Tata hubungan komunikasi terlihat dari pola penataan hubungan antarindividu, hubungan individu dengan kelompok, dan hubungan antarkelompok. Timbulnya keterhubungan ini disebabkan masing-masing individu atau kelompok saling membutuhkan dan saling ketergantungan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss mengemukakan tiga model tata kelola komunikasi organisasi, yaitu model komunikasi linier, interaksional, dan transaksional.

1. *Tata Kelola Komunikasi Model Linier*

Model komunikasi linier menunjukkan tata kelola komunikasi diseting dengan pola komunikasi satu arah (*one-way communication*). Dalam tata kelola seperti ini pimpinan berposisi sebagai sumber informasi utama, memberikan stimuli kepada bawahan, dan pihak bawahan berposisi sebagai penerima, penyeleksi, dan penginterpretasi informasi.

Tata kelola komunikasi ini mirip dengan pola komunikasi jarum hipodermis, dimana komunikator menyuntikkan pesan-pesan dengan tujuan agar komunikan mengikuti keinginan komunikator. Jadi komunikasi didominasi dengan proses penyebaran pesan secara satu arah. Pesan yang disampaikan berupa perintah, petunjuk, dan instruksi. Bawahan tidak berkesempatan untuk mengemukakan keberatan atas perintah tersebut. Tata kelola komunikasi seperti ini berlaku di organisasi militer, organisasi kerajaan, dan sebagainya. Tata kelola secara linier mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya dalam hal efisiensi waktu, karena informasi itu langsung ditindak lanjuti tanpa melalui pembahasan dan protes dari bawahan. Kelemahannya, rasa percaya bawahan kepada atasan

akan menipis, karena bawahan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.

2. *Tata Kelola Komunikasi Model Interaksional*

Tata kelola komunikasi yang kedua mengikuti model interaksional. Model ini merupakan kelanjutan dari tata kelola secara linier. Pada tata kelola model interaksional mensyaratkan adanya komunikasi timbal balik, adanya pengiriman pesan dan penyampaian umpan balik (*feedback*) secara berkelanjutan. Dalam tata kelola interaksional ini, penerima (*receiver*) melakukan seleksi, interpretasi, dan memberikan respon atau umpan balik kepada pengirim (*sender*).

Tata kelola komunikasi model ini mengarah kepada sistem komunikasi timbal balik, dua arah, dan merupakan proses siklus (*ciclical process*), dimana setiap partisipan memiliki peran ganda, bahwa pada satu kesempatan berperan sebagai pengirim informasi, tetapi pada kesempatan lain bertukar peran sebagai penerima. Model ini bersifat terbuka. Para anggota organisasi mempunyai kesempatan untuk menawarkan ide-ide untuk kemajuan organisasi. Setiap personil yang ada, mulai dari para manajer sampai karyawan biasa, semuanya mempunyai informasi yang diperlukan untuk kemajuan organisasi. Proses pengambilan keputusan juga dilakukan setelah melalui proses pembahasan yang melibatkan anggota organisasi. Dengan demikian, tata kelola komunikasi sesuai model interaksional dipandang sesuai diterapkan pada organisasi-organisasi profesi, maupun birokrasi.

3. *Tata Kelola Komunikasi Model Transaksional*

Tata kelola komunikasi yang ketiga mengikuti model transaksional. Dalam pandangan transaksional, komunikasi dipahami sebagai proses membina hubungan (*relationship*) yang saling menguntungkan semua pihak yang berpartisipasi dalam proses komunikasi. Misalnya dalam pola komunikasi antara pimpinan dan staf, maka dipahami sebagai proses membina hubungan personal dan profesional saling menguntungkan. Di pihak pimpinan dengan terjalinnya komunikasi akan meningkatkan peluang untuk memperoleh informasi faktua dari staf di lapangan. Sementara di pihak staf merasakan memperoleh pengawasan dan pengarahan sehingga dapat bekerja lebih baik dan lebih produktif.

Nilai-nilai Keindonesiaan

Tata hubungan komunikasi yang berkualitas pada suatu organisasi, dapat meminimumkan gangguan, memperlancar proses komunikasi, dan pada giliran berikutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Pada umumnya kualitas tata kelola komunikasi sangat dipengaruhi oleh kecakapan pimpinan organisasi. Hal ini disebabkan pimpinan organisasi memegang kewenangan untuk mengkoordinasikan semua orang sehingga tercipta proses komunikasi yang harmonis. Tata kelola yang baik, akan mengurangi gangguan komunikasi. Contohnya pada saat dilaksanakan rapat, peran pimpinan rapat adalah menjamin kelancaran jalannya rapat. Apabila terjadi gangguan misalnya peserta rapat gaduh, banyak interupsi, atau sebagian peserta rapat bermain *handphone*, maka diperlukan langkah tegas

seorang pimpinan untuk mengelola rapat secara kondusif dengan mengatasi gangguan tersebut.

Inovasi tata kelola komunikasi sebaiknya selalu memperhatikan nilai-nilai yang unggul untuk dijadikan sebagai rujukan berinteraksi dan berkoordinasi. Nilai-nilai unggul tersebut, dapat bersumber dari nilai-nilai budaya dan nilai kearifan lokal yang sudah berkembang dan menyatu dalam praktik berkomunikasi. Nilai kearifan lokal yang dimaksudkan dalam tulisan ini, adalah nilai-nilai keindonesiaan. Posisi nilai keindonesiaan adalah sebagai perangkat nilai dan norma yang memandu warga organisasi dalam berkomunikasi, sehingga dalam berkomunikasi mereka menggunakan pendekatan yang inovatif tanpa kehilangan filter nilai-nilai luhur.

Secara konseptual, nilai-nilai keindonesiaan sebagai kearifan lokal adalah nilai-nilai yang diaktualisasikan, atau dilaksanakan dalam praktik komunikasi organisasi sehari-hari, yang mencerminkan jati diri suatu komunitas dalam batas kolektivitas tertentu. Kearifan lokal merupakan *local genius* sehingga merupakan kekayaan luar biasa yang di miliki Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah konkret untuk mengidentifikasi seperangkat nilai-nilai keindonesiaan yang sampai saat ini tetap relevan digunakan sebagai acuan berkomunikasi. Ambil contoh nilai keindonesiaan yang berumber dari Budaya Jawa: *unggah-ungguh, empan papan, lembah manah andhap asor, dan sebagainya*. Dengan pendekatan yang inovatif dan dikawal nilai-nilai keindonesiaan yang aktual, maka tata hubungan komunikasi diharapkan berjalan dengan baik dan menyenangkan.

Perpaduan inovasi dan nilai keindonesiaan menjadi potensi yang diprioritaskan untuk mendukung tercapainya tujuan komunikasi, yaitu membina hubungan harmonis untuk peningkatan kinerja organisasi.

Selanjutnya inovasi tata kelola komunikasi organisasi yang berbasis nilai-nilai keindonesiaan tersebut akan menjelma dalam praktik komunikasi yang ditandai dengan adanya sikap dan kecakapan sebagai berikut:

- Sopan dan ramah kepada siapa saja
- Memberikan perhatian kepada orang lain/tidak mementingkan diri sendiri
- Menjaga perasaan orang lain
- Ingin membantu
- Memiliki rasa toleransi
- Dapat menguasai diri, mengendalikan emosi dalam setiap situasi
- Penggunaan bahasa yang sesuai
- Menghargai waktu orang lain
- Penampilan yang pas
- Berusaha mendahului menyapa
- Memiliki keterampilan mendengarkan.

Implementasi nilai-nilai keindonesiaan dalam berkomunikasi menghendaki adanya pemahaman bahwa setiap orang itu memiliki martabat. Sikap yang baik untuk mendukung terbinanya kerjasama harmonis dengan orang lain adalah sikap menghargai martabat orang lain. Oleh karena itu seseorang tidak boleh melecehkan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila ingin menyampaikan pendapat, konfirmasi, atau respon, maka sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak melecehkan. Berikut ini diberikan contoh.

- Pengakuan langsung, apabila merasa sepeham dengan orang lain , “*Saya tahu anda berkata benar.*”

- Pernyataan perasaan positif, “*Itu gagasan yang sangat bagus.*”
- Respon yang menjelaskan, “*Saya dapat membantu anda menjelaskan masalah ini*”
- Respon yang menghibur, “*Saya tahu bagaimana perasaan anda.*”-

Referensi

- Afrina, M., & Ibrahim, A. (2015). “Pengembangan Sistem Informasi SMS Gateway Dalam Meningkatkan Layanan Komunikasi Sekitar Akademika Fakultas Ilmu Komputer Unsri”. *Jurnal Sistem Informasi*, 7(2).
- Arni Muhammad. 2002. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bovee & Thill. 2007. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta : Indeks.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia”. *E-Jurnal Akuntansi*, 249-260.
- Hermin Indah Wahyuni. (2015). *Ilmu Komunikasi untuk Memuliakan Martabat Bangsa*. Makalah Seminar Prodi Ilmu Komunikasi FIS UNY 7 April 2015.
- Kitty O. Locker. (2004). *Business and Administrative Communication*. Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Ningrum, M. E. (2018). “Peranan Komunikasi Internal di Lingkungan Kerja”. *Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan*, 3(1).
- Wayne Pace, Don F. Faulos. 2002. *Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan* (editor Deddy Mulyana) Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

MEMBANGUN MENTAL ENTREPRENEUR UNTUK MEMPERKAYA SEMANGAT KEMERDEKAAN

Raras Gistha Rosardi

Perhelatan *Asian Games* ke-18 2018 di Jakarta dan Palembang, Indonesia yang berlangsung dari 18 Agustus sampai 2 September 2018 membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Medali emas disumbangkan oleh putra putri terbaik bangsa dengan kerja keras dan perjuangan tanpa lelah. Pembukaan yang spektakuler kemarin yang dikomando oleh salah satu putra terbaik bangsa yaitu Wisnutama (pengusaha bergerak dibidang industri kreatif pertelivisian yaitu Net Mediatama). Semua mata tertuju pada *Opening Ceremony Asian Games ke-18* dengan suguhan tari-tarian tradisional nan megah namun tidak meninggalkan identitas keaslinannya. *Hashtag EnergyAsia* mewarnai jagat sosial media tidak hanya di Indonesia akan tetapi di beberapa negara yang ikut serta dalam pertandingan cabang-cabang olahraga *Asian Games*. Semakin semarak dan membangkitkan euphoria untuk bangga dan kontributif pada bangsanya.M

Melihat fenomena hajat besar masyarakat Asia tentu tidak luput dari semangat kemerdekaan yang belum lama dirayakan secara khidmat oleh bangsa Indonesia. 73 tahun sudah Indonesia merdeka sejak 1945 silam. Berbagai perayaan yang dilangsungkan oleh elemen masyarakat semakin beraneka ragam. Dalam dua tahun ini kesadaran untuk memamerkan atribut kearifan local mulai bergairah, walaupun dalam perayaan kemerdekaan di daerah-daerah yang jauh dari ibukota, pengenalan seperti: baju adat, tarian daerah dan upacara adat yang tidak hanya ditunjukkan pada moment kemerdekaan saja akan tetapi dilestarikan perhelatannya di era modern seperti ini. Perayaan

kemerdekaan RI yaitu upacara pengibaran bendera yang dipimpin langsung oleh presiden RI yaitu Bapak Ir. Joko Widodo pada tahun 2017 membuat kekaguman banyak masyarakat dengan konsep baju adat. Bahkan konsep upacara dengan baju adat diturunkan ke berbagai Kementerian seperti upacara kemerdekaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Seperti dikutip dalam berita dari Tribunnews.com bahwa HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 lebih semarak dengan kehadiran Kereta Kencana Ki Jaga Raksa. Pertama kali dalam sejarah peringatan HUT Kemerdekaan RI kereta kencana menjadi bagian penting dalam detik-detik proklamasi (Rina Ayu, tribunnews.com).

Jika melihat sejarah, perayaan kemerdekaan pertama kali yaitu tahun 1946 itulah dimana Gagasan Paskibraka muncul pada saat ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Presiden pertama RI yaitu Ir. Soekarno memerintahkan ajudannya, Mayor Husein Mutahar untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Ketika itu berlintas dalam benak Mutahar sebaiknya pengibaran bendera Pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru Tanah Air, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Pada saat itu karena kondisi yang mendesak untuk mempersiapkan sehingga hanya bisa menghadirkan lima orang pemuda (3 putra dan 2 putri) yang berasal dari berbagai daerah (Toni Firman, <https://tirto.id/husein-mutahar-penyelamat-bendera-pusaka-7-November-2016>). Luar biasa gagasan Husen Mutahar tersebut yang harapan terimplementasikan sampai tahun 2018, bahwa pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh pemuda perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia sebagai representasi dari walaupun berbeda suku dan Bahasa daerah tetapi menjadi satu kesatuan yaitu Bangsa Indonesia. Pemuda memang mampu

menghadirkan gairah semangat persatuan dan kemajuan bangsanya. Dari tangan dan pemikiran pemuda lahir gagasan dan ide baru yang segar untuk mampu menyelesaikan problem-problem negeri. Problem pemanfaatan sumber daya alam, kemiskinan, kebodohan, teknologi dan pembangunan yang lain mampu lahir dari cendikia-cendikia muda. Pada zaman milenial seperti ini sudah tidak relevan jika pemuda hanya berteriak-teriak ikut aksi demonstrasi bahkan berujung anarkis. Permasalahan tidak selesai dengan retorika semu yang efeknya pada kemacetan, kerusuhan, dan massa berkumpul karena diakomodir oleh kepentingan segolongan orang. Sudah saatnya pemuda maju dengan pemikirannya, kepintarannya, kecerdasannya, dan mental *problem solver* bukan *trouble maker*.

Di awal paragraph, penulis membahas berkaitan dengan perhelatan besar Asian Games ke-18 tahun 2018 yang saat ini Indonesai sebagai tuan rumah. Akan tetapi disini tidak akan membahas mengenai atlet-atlet dari cabang olahraga yang berkompetisi. Pada tulisan ini akan melihat kesuksesan *Opening Ceremony Asian Games* ke-18 yang seorang *Creative Director* nya adalah putra terbaik bangsa yaitu Wisnutama. Sosok pengusaha yang bergerak dibidang *Broadcasting* yang mengawali karir sebagai bagian dari stasiun TV swasta dan sekarang mendirikan stasiun TV sendiri dengan konsep yang berbeda dan saat ini sangat diterima oleh masyarakat walaupun tergolong stasiun TV baru. Wisnutama dapat dikatakan sebagai tokoh Creativepreneur milik bangsa Indonesia. Kepemimpinanya dalam merancang *project* panggung sangat diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Keberaniannya mengambil peluang merupakan karakter *entrepreneur* yang handal dan bekal untuk mampu survive dengan ide-ide terbaru. Selain dua karakter tersebut, kemampuan market yang luas merupakan modal untuk

menjadi pengusaha yang dapat dipercaya oleh banyak pihak. Market yang luas tidak hanya menghasilkan omzet dan laba yang signifikan dari segi kuantitas akan tetapi menghasilkan sesuatu yang berskala luas tidak hanya local akan tetapi internasional sehingga menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat lebih luas.

Selain sosok Wisnutama, ada dua orang anak muda yang sangat kreatif membuat sebuah aplikasi untuk teman belajar anak. Aplikasi tersebut bernama Ruang Guru dan dapat didownload di Playstore atau Googlestore. Dua sosok anak muda tersebut adalah putra terbaik bangsa Indonesia yaitu Iman Usman dan Adamas Belva Syah Devara. Keduanya pernah menempuh Pendidikan di kampus ternama di luar negeri. Iman Usman baru menempuh S2 di luar negeri sedangkan S1 dia tempuh di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Berawal dari keresahan masyarakat yang memiliki anak usia sekolah lebih menyukai bermain gadget dengan mengdownload games dan *have fun* dengan akun social media daripada membaca buku pelajaran dan mengerjakan PR. Dua anak muda ini akhirnya membuat sebuah aplikasi sebagai teman belajar anak di sekolah yaitu Ruang Guru. Aplikasi tersebut memiliki *design* sangat menarik dengan tampilan audio visual dengan materi yang dikomunikasikan dengan santai dan mudah dipahami anak-anak. Belajar menjadi menyenangkan bahkan ada tutor *online* yang siap melayani diskusi tentang materi pelajaran. Era millennial seperti ini adanya gadget dan produk-produk teknologi lain tidak dapat dipisahkan dari dunia anak-anak zaman sekarang. Oleh sebab itu, belajar memang perlu penyesuaian zaman. Dua anak muda jenius ini membuktikan bahwa mereka mengkritik keadaan yang tidak seimbang tapi mereka tidak demo anarki bahkan bekerja dengan tidak digaji pemerintah menciptakan produk cerdas yang mampu menyelesaikan masalah secara tepat guna.

Karakter entrepreneur yang melekat pada contoh dua sosok *technopreneur* ini adalah peduli. Seorang pengusaha untuk mampu sukses mereka berangkat dari kepedulian terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. Kepedulian tidak hanya ditunjukkan dengan retorika akan tetapi *take action*.

Tokoh-tokoh entrepreneur yang sudah dibahas tentu jumlahnya di Indonesia masih tergolong sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh bagaimana kondisi Pendidikan di Indonesia. Mutu dan kualitas pendidikan yang belum mengalami kemajuan signifikan dapat dilihat dalam pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Data Badan Pusat Statistik pada pada tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk berumur 7-12 tahun sebanyak 97,83%, penduduk berumur 13-15 tahun sebanyak 84,41%, penduduk berumur 16-18 tahun sebanyak 54,7% dan penduduk berumur 19-24 tahun sebanyak 12,43%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa penduduk berumur 7-12 tahun sebanyak 97,95%, penduduk berumur 13-15 tahun sebanyak 85,43% dan penduduk berumur 16-18 tahun sebanyak 55,05% dan penduduk berumur 19-24 tahun sebanyak 12,43%. Dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi pendidikan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah partisipasi penduduknya. Dengan demikian, terjadi pengangguran dalam tiap jenjang pendidikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 113,74 juta orang, bertambah 1,79 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2008 sebesar 111,95 juta orang, atau bertambah 2,26 juta orang dibanding Februari 2008 sebesar 111,48 juta orang. Jika hal ini tidak disadari oleh masyarakat, maka angkatan kerja yang jumlahnya semakin banyak itu akan menambah deretan pengangguran. Berdasarkan data

Kementerian Pendidikan Nasional pengangguran terbuka usia 15 tahun di kota dan desa dengan pendidikan SMA atau sederajat pada Agustus 2009 jumlahnya hampir 3,9 juta orang (Budi Suwarna dan Lusiana. Balada Lulusan SMA. Kompas 3 Oktober 2010). Dalam artikel Balada Lulusan SMA menyoroti bahwa ancaman pengangguran yang perlu mendapat perhatian khusus adalah lulusan SMA. Jika lulusan SMA tidak mampu melanjutkan Perguruan Tinggi maka akan menjadi tenaga kerja tidak terdidik, sehingga peluang untuk survive ditempat kerja akan kecil karena kalah dengan lulusan sarjana. Maka mendidik mental entrepreneur sangat diperlukan untuk semua jenjang Pendidikan.

Entrepreneur: Membangun Jiwa Mandiri

Membangun jiwa-jiwa entrepreneur tidak mudah dan membutuhkan *timeline* yang cukup panjang. Perlu upaya dan kerja keras untuk mampu membangun jiwa entrepreneur pada masyarakat Indonesia. Pemerintah sudah melakukan satu upaya konkret pada tahun 1995 yaitu Inpres No. 4 Tahun 1995 tentang GNMK (Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan). Suatu sugesti positif untuk masyarakat Indonesia bahwa kewirausahaan perlu dibudayakan sejak dini dan tidak hanya pada orang yang sudah berpenghasilan, akan tetapi dibudayakan mulai dari jenjang sekolah. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya: mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang besar (Siti Aliyyah, 2009: 3).

Pada tahun 2011 era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dalam rangka

meningkatkan pembangunan ekonomi khususnya pengembangan kewirausahaan. Dengan adanya GKN diharapkan generasi muda memiliki minat untuk menjadi wirausahawan (Eka Aprilianty, 2012: 312). Sebuah upaya dari pemerintah di era SBY bahwa kewirausahaan merupakan suatu pondasi yang harus dibangun dengan kokoh untuk memperkuat bangunan negara. Dengan kewirausahaan yang tumbuh pada generasi muda maka akan berkurang secara signifikan jumlah pengangguran dan kejahatan sosial yang ditimbulkan karena factor ekonomi. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah semakin dipermudah dan lengkap antara lain: modal, pelatihan, simulasi, bahkan networking dalam dan luar negeri.

Menurut Peter F. Drucker (Kasmir, 2006: 17), kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Maksud dari pengertian ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Zimmerer (Kasmir, 2006: 17) mengartikan bahwa kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kreativitas merupakan proses untuk diterapkan tidak hanya gagasan, sehingga perlu upaya keras dan ruang untuk mewujudkannya. Pemecahan masalah juga perlu inovasi sehingga mampu dipecahkan secara totalitas tanpa menghambat persoalan yang lain. Pada bagian pendaluan sudah dibahas mengenai persoalan ketergantungan gadget pada anak muda yang menyebabkan mereka susah untuk belajar. Solusinya dengan membuat aplikasi Ruang Guru.

Menurut Zimmer dan Scarborough (Mardiyatmo, 2008: 15), karakteristik wirausaha yang sukses adalah sebagai berikut: 1) Memiliki

komitmen tinggi terhadap tugasnya, 2) Mau bertanggung jawab, 3) Keinginan bertanggung jawab ini erat hubungannya dengan mempertahankan *internal locus of control*, yaitu minat kewirausahaan dalam dirinya, 4) Peluang untuk mencapai obsesi. Seorang wirausaha mempunyai obsesi untuk mencapai prestasi tinggi, 5) Kreatif dan inovatif, 6) Motivasi untuk lebih unggul dari apa yang sudah dikerjakannya, 7) Berorientasi ke masa depan. Karakter kewirausahaan perlu diupayakan untuk terus dikembangkan salah satunya adalah *internal locus of control* yaitu minat kewirausahaan dalam dirinya yang menjadikan seseorang tersebut termotivasi untuk menjadi wirausaha handal.

Dalam modul Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan indikator ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan antara lain: mandiri, kreatif, kepemimpinan, kerja keras, dan paham konsep (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010: 53-54). Karakter mandiri perlu dibangun sejak dini supaya kokoh dan terbentuk mental mandiri. Era 10 tahun yang lalu jika dalam jenjang Pendidikan diutamakan kewirausahaan ditanamkan pada level SMK, sehingga pada tahun 2007, Kementerian Pendidikan Nasional mengambil keputusan kebijakan besar (*Big Bang Policy*) tentang proporsi jumlah siswa SMA dan SMK dari 70% siswa SMA dan 30% siswa SMK menjadi 30% siswa SMA dan 70% siswa SMK. Kebijakan spektakuler tersebut hanya didasarkan atas asumsi (bukan data atau informasi akurat) dan juga hanya didasarkan atas supply-driven (hanya menurut pemerintah sebagai *supplier*) dan bukan didasarkan atas *demad-driven* yang bersumber dari informasi akurat kebutuhan tenaga kerja (Slamet PH, 2017). Saat ini kebijakan tersebut mulai perlahan tidak menjadi bahan kajian dan diskusi dikalangan akademisi. Kebijakan yang diambil pemerintah memang upaya untuk

mencetak tenaga siap kerja sehingga mengurangi pengangguran dan tumbuh jiwa-jiwa wirausaha dari jenjang Pendidikan SMK. Akan tetapi mental yang perlu dibangun sejak dini tidak hanya sejak bangku SMK. Mental-mental seorang *Entrepreneur* sangat perlu dididik sejak dini bahkan sejak anak tersebut bersekolah di PAUD. Mental mandiri mampu membuat bangsanya berdaya dan memiliki *bargaining position* tinggi dikalangan bangsa-bangsa lain.

Pembelajaran kewirausahaan lebih baik dimulai sejak sekolah dasar sampai menengah. Bahkan di Perguruan Tinggi, kewirausahaan begitu diutamakan karena banyak sekali program-program baik dari Direktorat Jendral Perguruan Tinggi (DIKTI) maupun dari institusi-institusi lain yang menawarkan sebuah inovasi dalam kewirausahaan sehingga mendorong untuk kreatif dalam mengembangkan diri menjadi entrepreneur sejati. Jika hal tersebut terus dikembangkan maka akan berdampak sangat baik terhadap perekonomian bangsa. Suatu negara memang membutuhkan figur wirausaha yang mampu berkompeten dalam berbagai bidang usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya pembaharuan dimulai dari lingkungan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian usaha atau kewirausahaan. Aspek tenaga kerja merupakan ujung tombak masalah ekonomi bagi negara berkembang. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pendidikan menengah dengan mulai dari perubahan kurikulum, pengembangan metode dan media pembelajaran di lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah merupakan tempat strategis yang dapat digunakan sebagai tempat pembentukan jiwa entrepreneur yang dapat dikembangkan saat mereka masih berada dalam bangku sekolah bahkan setelah mereka lulus.

Entrepreneur sebaiknya didominasi oleh anak muda yang sekarang masyarakat banyak menyebut dengan generasi milenial (Gen Z). Dalam usia produktif generasi milenial memanfaatkan perangkat teknologi yang dikuasai untuk menciptakan suatu karya nyata yang harapannya dapat menjadi kekayaan intelektual mereka yang mendapatkan HAKI dan Hak Paten. Karakteristik yang menonjol dari generasi milenial dan digital native adalah melekatnya gaya hidup mereka dengan teknologi, khususnya teknologi digital (*technology savvy*), kolaborasi virtual (*virtual collaborative*), tidak terlalu terikat dengan lokasi (*nomadic*) dan kemauan yang seketika, tidak sabar atau disebutnya “*we want it now generation*” (Muhammad Nuh, 2017: 8). Berdasarkan penjabaran dari Muhammad Nuh tersebut bahwa generasi Z memiliki ruang paling nyaman bagi mereka yaitu improvisasi teknologi. Para pemuda jika tidak ingin kalah bersaing dengan negara lain maka dekatkan diri kalian dengan kemajuan teknologi dan kolaborasi virtual. Keberlangsungan hidup saat ini dipenuhi dengan ketergantungan terhadap gadget dan media sosial. Salah satu aplikasi yang digemari masyarakat adalah contohnya Gojek dan Gofood. Gofood kalian jangan hanya menjadi konsumen dari resto dan warung makan yang menawarkan makanannya lewat Gofood, akan tetapi jadilah bagian dari pebisnis kuliner yang memasang space di Gofood.

Membangun Mental Mandiri dengan Kecapakan Hidup (*Life Skills*)

Pendidikan Berorientasi Kecapakan Hidup (PBKH) penting dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi era informasi yang semakin tinggi dan memasuki era perdagangan bebas seperti sekarang ini yaitu mulai 1 Januari 2010, Indonesia sudah membuka diri untuk FTA (Free Trade Agreements) ASEAN-China. Hal

ini sangat menungkhinkan adanya persaingan terhadap kualitas dari sumber daya manusia yang merupakan output dari pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional (2002: 21) menyatakan bahwa pendidikan berorientasi kecakapan hidup pada intinya membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar (*learning how to learn*), menghilangkan pola pikir dan kebiasaan yang tidak tepat (*learning to unlearn*), menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk dikembangkan dan diamalkan, berani menghadapi problema kehidupan, serta mampu memecahkan masalah secara kreatif. Pendidikan berorientasi kecakapan hidup bukan merupakan mata pelajaran baru. Hal ini tidak memerlukan sebuah perubahan kurikulum, yang perlu dilakukan adalah reorientasi pendidikan dari subject mater oriented menjadi life skill oriented. Mata pelajaran harus dipandang sebagai sebuah alat untuk mengembangkan kecakapan hidup yang nantinya akan digunakan peserta didik menghadapi kehidupan nyata. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya pendidikan berorientasi kecakapan hidup yang diintegrasikan dalam lingkungan sekolah terutama dalam setiap mata pelajaran.

Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2002 mulai mengimplementasikan pendidikan berorientasi kecakapan hidup pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan baik di dalam dan luar sekolah, termasuk di SMA. Pendidikan kecakapan hidup (*Life Skills Education*) selama ini hanya ada dilingkungan pendidikan SMK. Padahal pendidikan kecakapan hidup merupakan tema yang perlu dikembangkan karena memiliki substansi yang begitu besar untuk kemajuan kualitas pendidikan Indonesia. Selain itu, pendidikan kecakapan hidup sebagai pendidikan yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki kualitas peserta didik. *Life Skills Education* adalah salah

satu unsur dari pendidikan yang berorientasi pada pengarahan individu dalam memperbaiki kualitas diri. Menurut Joko Sutrisno (2003: 8) menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup terdiri dari lima unsur yaitu kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan berpikir, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.

Pengertian *Life Skills* adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Jadi masalah apapun dapat terselesaikan asal mempunyai kecakapan hidup (*Life Skills*) yang handal karena memanfaatkan pikiran yang kreatif dan menggunakan sarana dan situasi yang dimanfaatkan.

Life Skills dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup itu tidak semata-mata karena *vocational* (kemampuan mencari kerja), akan tetapi harus mempunyai kemampuan dasar secara fungsional seperti: membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mempergunakan teknologi (Satori, dalam Anwar, 2006: 20).

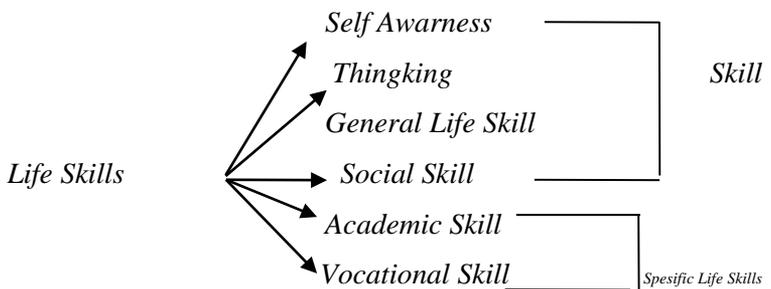
Cakupan *Life Skills* antara lain: *communication skills, decision skills-making skills, and planning skills*. Pengembangan *Life Skills* pada umumnya bersumber pada kajian (1) *the world of work*, (2) *practical living skills*, (3) *personal growth and management*, dan (4) *social skills* (Satori, dalam Anwar 2006: 21).

Life Skills sangat dibutuhkan dalam lingkup pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sebuah fenomena yang seharusnya bersifat dinamis dan mengalami kemajuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. *Life Skills* tidak membentuk peserta didik menjadi seorang yang berpikir statis, akan tetapi mereka dituntut untuk

mengembangkan kecerdasan dengan peka, kritis, dan solutif terhadap permasalahan yang ada disekitar lingkungan baik untuk kepentingan akademis maupun non akademis. Depdiknas dalam Anwar (2006: 21), ciri dari pembelajaran *Life Skills* (Kecakapan Hidup) adalah:

1. Terjadi Proses Identifikasi Kebutuhan Belajar
2. Terjadi Proses Penyadaran Untuk Belajar Bersama
3. Tejadi Keselarasan Kegiatan Belajar Untuk Mengembangkan Diri, Belajar, Usaha Mandiri, Usaha Bersama
4. Terjadi Proses Penguasaan Kecakapan Personal, Sosial, Vokasional, Akademik, Manajerial Dan Kewirausahaan
5. Terjadi Proses Pemberian Pengalaman Dalam Melakukan Pekerjaan Dengan Benar, Menghasilkan Produk Bermutu
6. Terjadi Proses Interaksi Saling Belajar Dari Ahli
7. Terjadi Proses Penilaian Kompetensi
8. Terjadi Pendampingan Teknis Untuk Bekerja Atau Membentuk Usaha Bersama.

Secara sederhana skema yang pembagian kecakapan hidup (*life skills*) yang dapat ditanamkan kepada peserta didik adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Pembagian Kecakapan Hidup
(Sumber: Joko Sutrisno, 2003: 9)

Dalam penerapan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (*Life Skills*) pada setiap jenjang pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup di TK/SD, SMP, SMA, SMK sederajat



(Sumber: Tim *Broad Based Education* Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 53)

Setiap jenjang pendidikan mempunyai lingkup kecakapan hidup yang berbeda-beda. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup harus disesuaikan dengan perkembangan fisiologis dan psikologis peserta didik. Jenjang pendidikan TK, SD dan SLTP difokuskan pada kecakapan generik (GLS) yang terdiri dari kecakapan personal dan kecakapan sosial. Hal ini didasarkan atas prinsip bahwa GLS merupakan fondasi kecakapan hidup yang akan diperlukan untuk mempelajari kecakapan hidup berikutnya dan bahkan untuk terjun dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan berarti pada tingkat SD/MI dan SLTP/MTs tidak dikembangkan kecakapan akademik dan kecakapan vokasional, namun jika dikembangkan barulah pada tahap awal.

Pada SMA/MA, pendidikan berorientasi kecakapan hidup difokuskan untuk mengembangkan kecakapan akademik dengan terus memantapkan GLS. Pada SMK, pendidikan berorientasi kecakapan hidup lebih difokuskan untuk mengembangkan kecakapan vokasional dengan juga memantapkan GLS. Namun demikian bukan berarti di

SMA/MA tidak dapat dikembangkan kecakapan vokasional dan di SMK tidak dapat dikembangkan kecakapan akademik. Pengembangan tersebut dapat terus dilakukan dengan integratif. Misalnya di SMK pengembangan kecakapan akademik terintegrasi dengan kecakapan vokasional yang menjadi fokusnya, sebaliknya di SMA/MA pengembangan kecakapan vokasional terintegrasi dengan kecakapan akademik yang menjadi fokusnya.

Tentu saja dalam pelaksanaan di lingkungan sekolah, terlebih lagi dilaksanakan dalam kelas maka harus terdapat aspek-aspek yang dapat dilihat dan diukur dengan objeknya adalah siswa. Aspek-aspek tersebut merupakan indikator yang menentukan apakah pembelajaran kecakapan hidup tersebut berhasil atau tidak. Indikator-indikator yang dapat diamati dalam pembelajaran kecakapan hidup yang salah satunya adalah kecakapan vokasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Indikator Kompetensi Kecakapan Hidup

No.	Kompetensi Kecakapan Hidup	Indikator-indikator (Perilaku Siswa yang Dapat Diamati)
1.	Bekerja dalam Kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengar orang lain secara seksama ketika bekerja dalam kelompok 2. Menghargai Opini siswa lain dalam kelompok 3. Tidak takut bertanya atau mengawali diskusi dalam kelompok.
2.	Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti instruksi secara seksama 2. Mengumpulkan tugas pada waktunya 3. Datang ke kelas tepat waktu 4. Menghadiri sekolah tiap hari

Sumber: USAID (*United State Agency International Development*) (2006: 78)

Sebagai konsekuensi dari pendidikan berorientasi kecakapan hidup terintegrasi kedalam mata pelajaran, pola evaluasi hasil belajar tidak hanya dengan tes tertulis. Apalagi untuk tingkat SMA/MA sangat dibutuhkan evaluasi berupa perilaku melalui observasi, tes perbuatan harus dilakukan. Tim *Broad Based Education* Departemen Pendidikan Nasional (2002: 61) menyatakan bahwa sedapat mungkin tes berupa pemecahan masalah (*problem based*) yang menggunakan uji kinerja otentik (*authentic*) atau paling tidak semi otentik (*shadow authentic*). Sebagai contoh siswa diajak untuk memecahkan masalah penyediaan kantin sekolah. Evaluasi juga perlu menerapkan pola *divergen*, sehingga memberikan peluang kepada siswa untuk mengajukan pemikiran yang berbeda.

Kecakapan vokasional (*Vocational Skills*) merupakan salah satu dari ruang lingkup pendidikan kecakapan hidup (*Life Skills*). Makna dari vocational skills adalah mengajarkan cara menggali, memiliki dan menggunakan ketrampilan bekerja mandiri dan mandiri usaha. Pembelajaran *Vocational Skills* dapat dilakukan di lembaga pendidikan formal seperti SMP, SMA atau SMK dan juga pendidikan non formal. Selama ini *Vocational Skills* sudah banyak dikembangkan di SMK, sedangkan SMP dan SMA belum terlihat keberadaanya. Sekolah Menengah Atas berhak menumbuhkan dan mengembangkan kecakapan vokasional dalam lingkungan pembelajaran dengan disesuaikan dengan kondisi dan potensi sekolah tersebut. Hal ini penting dilakukan agar manfaat dari pendidikan kecakapan hidup yang salah satu aspeknya adalah kecakapan vokasional dapat dirasakan oleh semua peserta didik dalam semua jenjang pendidikan.

Dalam lingkup jenjang pendidikan, pilihan terhadap Sekolah Menengah Atas tidak salah dan sangat tepat bagi peserta didik yang

ingin mendalami ilmu pengetahuan murni (*pure sciences*) sehingga arahan lulusan SMA adalah Perguruan Tinggi. Berbeda dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang notabene orientasi pembelajarannya adalah ilmu-ilmu aplikasi (*applied sciences*) sehingga lulusan dari SMK adalah untuk mencari kerja dan lebih banyak ruang kariernya pada pekerjaan yang menuntut kerja teknis. Maka dari itu untuk kurikulum SMK lebih kepada arahan kewirausahaan, sedangkan pada SMA itu arahan kurikulum kewirausahaan hanya sedikit dengan satu Standar Kompetensi saja. Ini sangat sulit ketika peserta didik dari lulusan SMA itu menjadi seorang wirausaha jika tidak diarahkan sejak dari awal. Tidak dipungkiri pada jenjang SMA dapat dilakukan pembelajaran kewirausahaan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa siswa SMA tidak diarahkan memiliki ketrampilan aplikasi akan tetapi pada pemahaman dan konseptual, sehingga dalam hal ini dibatasi pada pembelajaran kewirausahaan SMA hanya pada tataran pemahaman dan aplikasi sesuai dengan kondisi SMA tersebut.

Pembelajaran kecakapan vokasional (*Vocational Skills*) dapat terintegrasi dalam setiap mata pelajaran termasuk pelajaran ekonomi terutama dalam materi kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*) merupakan pendidikan yang berorientasi kepada pembentukan pribadi yang mandiri, tangguh, cakap, dan dapat berpikir kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, peserta didik mendapatkan sebuah pembelajaran mengenai nilai-nilai entrepreneurship yang keluarannya adalah kreativitas dalam mendirikan usaha mandiri yang notabene tidak selalu tergantung kepada sektor formal dan institusi pemerintah. Menurut Joko Sutrisno (2003: 3) pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (*Life Skills*) pada

peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah.

Menurut USAID dalam artikel “*Integrasi Kecakapan Hidup Dalam Pembelajaran,*” pengertian kecakapan vokasional adalah kecakapan yang berhubungan dengan suatu profesi yang berkaitan dengan area tertentu seperti menjahit, bertani, berternak, otomotif, keterampilan bekerja, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, dan industri; sikap yang baik dalam lingkungan bekerja. **Menurut M. Solichin Akbar (2008), pengertian dari *Vocational Skills* atau *Occupational Skills*** adalah pendidikan kecakapan yang perlu diberikan agar dapat mengembangkan kemampuan untuk menguasai dan menyenangi jenis pekerjaan tertentu. Jenis pekerjaan tertentu ini bukan hanya merupakan pekerjaan utama yang akan ditekuni sebagai mata pencaharian, yaitu menjadi bekal untuk bekerja mencari nafkah yang halal yang merupakan salah satu kewajiban dalam menempuh perjalanan hidupnya di kelak kemudian hari. Jenis pekerjaan tertentu dapat juga merupakan pekerjaan yang hanya sekadar sebagai hobi.

Kecakapan vokasional tidak hanya terdapat dalam jenjang pendidikan SMK yang memang selama ini sudah berkembang, akan tetapi terdapat dalam jenjang pendidikan SMA. Hal ini berdasarkan teori Treffinger (Tribun, 3 Desember 2009) dalam artikel berjudul “Ketrampilan Vokasional bagi SMA dan MA”, mengungkapkan bahwa siswa SMA yang memiliki keterampilan vokasional dasar berada pada fase tingkat iluminatif (tingkat III), yaitu perkembangan dan perwujudan hasil (*production development*) dan aspek afektif berupa keberanian bertanggung jawab atas hasil kreativitas, kepercayaan pada dirinya, serta komitmen terhadap hidup produktif. Selain itu, Treffinger mengungkapkan juga bahwa salah satu kriteria kreativitas dapat

berdasarkan aspek produk sebagai manifestasi dari kemampuan siswa membuat sesuatu yang baru, berbeda, dan unik. Keterampilan vokasional harus didukung oleh keterampilan berpikir yang baik. Menurut Howe (Tribun, 3 Desember 2009), mengemukakan pentingnya proses berpikir, karena kinerja (*physical performance*) dalam aktivitas-aktivitas kecakapan vokasional hanya akan bermutu apabila pelaksanaannya disertai dengan keterlibatan fungsi ranah cipta atau akal. Hal ini mengingat pola-pola gerakan yang cakap dan terkoordinasi itu tidak dapat tercapai dengan baik semata-mata dengan mekanisme sederhana, tapi dengan menggunakan proses mental yang sangat kompleks.

Tim *Broad Based Education* Departemen Pendidikan Nasional (2002: 69) menyatakan bahwa vokasional hendaknya tidak dimaknai secara sempit dengan ketrampilan manual tetapi dengan *markatable skill*, artinya kecakapan itu diyakini dapat menjadikan seseorang mampu mendapatkan penghasilan guna menopang kebutuhannya. Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam kecakapan vokasional adalah bahasa asing, olahraga, kesenian, perawatan kesehatan, pemasaran dan lain-lain. Untuk itu perlu dilakukan *need assesment* guna menentukannya. Selain itu, dalam pelaksanaan kecakapan vokasional di sekolah, penentuan pilihan paket harus didasarkan pada pilihan siswa (*personal choice*), artinya siswa SMA menentukan bidang yang akan dipilih sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya serta bidang kerja yang tersedia dan ingin dimasukinya.

Pendekatan Karakter *Entrepreneur* untuk Kemajuan Bangsa

Melihat gegap gempita perayaan kemerdekaan ke-73 dan ajang Asian Games ke-18 tentu menimbulkan rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Keinginan untuk menjadi bagian dari kemajuan bangsa tentu ada

dalam benak masyarakat. Perayaan kemerdekaan merupakan luapan rasa syukur atas kenikmatan kemerdekaan dan mengenang jasa-jasa pahlawan kemudian menyaksikan pertandingan berbagai cabang olahraga yang memperjuangkan medali emas, perak dan perunggu menjadikan masyarakat tertantang untuk melakukan hal positif untuk negara Indonesia. Selama ini masyarakat dipenuhi dengan konten negatif tentang pemerintah yang pejabatnya tertangkap melakukan korupsi, *public figure* yang menggunakan narkoba, demo anarki dan kenakalan remaja. Hal ini mampu mengurangi rasa cinta pada negeri sendiri, maka kita perlu recharging rasa kebanggaan kepada bangsa dan negara dengan salah satunya memahami makna kemerdekaan dan menjadi bagian yang mampu berkontribusi dalam upaya kemajuan bangsa.

Dalam pembahasan sebelumnya bahwa membangun jiwa Entrepreneur merupakan upaya yang dilakukan secara sistemik dan membutuhkan proses yang cukup lama. Bahkan GNMK tahun 1995 dapat dikatakan sebagai gerakan nasional yang diharapkan mampu memasyarakatkan kewirausahaan. Semakin modern system keuangan perbankan dan didukung oleh pemerintah, fasilitas untuk membuat bisnis baru untuk pengusaha pemula semakin dipermudah. Adanya program wirausaha muda, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Hibah dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu program CPPBT (Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dan masih banyak hibah dan pinjaman lunak dari berbagai Lembaga dan perusahaan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru.

Selain target untuk menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang harapannya mampu mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Pembelajaran nilai-nilai

kewirausahaan justru sangat penting untuk segera diterapkan pada system Pendidikan. Mental *entrepreneur* sejati itu harus diterapkan dengan *Bottom Up* tidak *Top Down*. Seperti yang menjadi bahan kajian tulisan ini diawal bahwa pembelajaran kewirausahaan tidak hanya pada ranah SMK akan tetapi pada setiap jenjang sudah mampu diinternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan yang mampu membentuk mental seorang *Entrepreneur* mandiri. Mental seorang *Entrepreneur* diantaranya adalah mental mandiri, bertanggung jawab, ulet, visioner, mampu bekerjasama, kreatif dan inovatif. Mental-mental tersebut yang mampu diajarkan pada anak didik sedini mungkin. Beberapa sekolah jenjang Pendidikan SMP sudah berkomitmen mengajarkan kewirausahaan yang dikemas dalam mata pelajaran pengembangan diri yaitu kewirausahaan. Bahkan ada kegiatan di luar kelas yang mengajarkan nilai-nilai kewirausahaan antara lain: *Market Day*, *Bazar*, *Field Trip* dan lain-lain. Kegiatan tersebut membangun nilai-nilai kewirausahaan secara terprogram dan sistematis. Membangun mental memang tidak mudah tapi juga tidak sulit untuk dimulai. Perkembangan kurikulum pada jenjang Pendidikan dapat dikembangkan dengan memasukkan nilai-nilai entrepreneur pada setiap KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Mental mandiri dan bertanggung jawab dapat diajarkan pada anak usia dini dalam lingkungan sekolah di PAUD. Tentu saja pilar Pendidikan keluarga berperan besar untuk turut serta membangun mental-mental entrepreneur pada anak. Diantaranya dapat dilakukan dengan mengajarkan pentingnya sopan santun pada orang lain, mengajarkan konsekuensi, melakukan pekerjaan rumah yang sederhana tetapi sendiri, membangun diskusi sehat dengan orang tua mendengarkan dan anak mendengarkan orang tua, dan diajak untuk interaksi dengan lingkungan yang baik misalnya

diajak ke taman terbuka hijau, arena bermain edukatif, panti asuhan, tempat ibadah, dan mengenal lingkungan sekitar rumah.

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Suatu negara memang membutuhkan figur wirausaha yang mampu berkompeten dalam berbagai bidang usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya pembaharuan dimulai dari lingkungan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian usaha atau kewirausahaan.
2. *Life Skills* sangat dibutuhkan dalam lingkup pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sebuah fenomena yang seharusnya bersifat dinamis dan mengalami kemajuan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. *Life Skills* tidak membentuk peserta didik menjadi seorang yang berpikir statis, akan tetapi mereka dituntut untuk mengembangkan kecerdasan dengan peka, kritis, dan solutif terhadap permasalahan yang ada disekitar lingkungan baik untuk kepentingan akademis maupun non akademis.
3. Pembelajaran kecakapan vokasional (*Vocational Skills*) dapat terintegrasi dalam setiap mata pelajaran dalam materi kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*) merupakan pendidikan yang berorientasi kepada pembentukan pribadi yang mandiri, tangguh, cakap, dan dapat berpikir kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, peserta didik mendapatkan sebuah pembelajaran mengenai nilai-nilai *entrepreneurship* yang keluarannya adalah kreativitas dalam mendirikan usaha mandiri yang notabene tidak selalu tergantung kepada sektor formal dan institusi pemerintah.

4. Mental *entrepreneur* sejati itu harus diterapkan dengan *Bottom Up* tidak *Top Down*. Mental seorang *Entrepreneur* diantaranya adalah mental mandiri, bertanggung jawab, ulet, visioner, mampu bekerjasama, kreatif dan inovatif. Mental-mental tersebut yang mampu diajarkan pada anak didik sedini mungkin. Kegiatan mengajarkan mental-mental kewirausahaan antara lain: *Market Day*, *Bazar*, *Field Trip* dan lain-lain. Kegiatan tersebut membangun nilai-nilai kewirausahaan secara terprogram dan sistematis. Membangun mental memang tidak mudah tapi juga tidak sulit untuk dimulai. Perkembangan kurikulum pada jenjang Pendidikan dapat dikembangkan dengan memasukkan nilai-nilai *entrepreneur* pada setiap KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Mental mandiri dan bertanggung jawab dapat diajarkan pada anak usia dini dalam lingkungan sekolah di PAUD. Tentu saja pilar Pendidikan keluarga berperan besar untuk turut serta membangun mental-mental *entrepreneur* pada anak.

Saran

1. Sebaiknya dalam lingkungan Pendidikan dalam keluarga mulai menumbuhkan bibit-bibit mental *Entrepreneur* dengan pola asuh yang sehat dan perlunya kesepakatan dan kekompakan seluruh anggota keluarga untuk mengajarkan anak-anak mereka memiliki mental mandiri, bertanggung jawab dan bekerja sama.
2. Lembaga Pendidikan sekolah berkomitmen untuk mengajarkan mental-mental *entrepreneur* yang terintegrasi pada kegiatan sekolah dan terlihat dalam kultur sekolah.
3. Pemerintah mendukung penuh dan memfasilitasi kegiatan yang mampu membangun mental-mental *entrepreneur* pada anak. Misalnya mendukung sekolah untuk mengadakan kegiatan-

kegiatan positif untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab pada anak.

4. Masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk turut serta mendukung lingkungan keluarga, sekolah dan pemerintah dalam menumbuhkan dan membangun mental-mental entrepreneur. Misalnya: mengadakan kegiatan positif untuk merayakan kemerdekaan RI, organisasi Karang Taruna menjadi Lembaga yang swadana dan swadaya dengan mengadakan program-program produktif misalnya: desa wisata, agrobisnis, bakti sosial, pengajian rutin.

Referensi

- Anwar. 2006. *Pendidikan Kecakapan hidup*. Bandung: AlfaBeta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2009*. (www.bps.go.id. Diakses 26 Januari 2010).
- Budi Suwarna dan Lusiana Indriasih. 2010. Balada Lulusan SMA. *Kompas*. Hal 11. Minggu 3 Oktober 2010.
- Eka Aprilianty. 2012. “Pengaruh Kepribadian Wirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK”. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol 2, Nomor 3, November 2012.
- Joko Sutrisno. 2003. *Pengembangan Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan Pada Usia Dini*. Bogor: Institute Pertanian Bogor ([rudyc.com/PPS702 ipb/07134/joko_sutrisno.pdf](http://rudyc.com/PPS702_ipb/07134/joko_sutrisno.pdf)).
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Mardiyatmo. 2008. *Kewirausahaan Untuk SMK Kelas 2*. Jakarta: Yudhistira.

- Muhammad Nuh. 2017. *Pendidikan Karakter untuk Kemandirian Bangsa Menuju Kejayaan Indonesia 2045*. Pidato Dies Natalis ke-53 Universitas Negeri Yogyakarta.
- M. Solichin Akbar. 2008. *Konsep Pendidikan Kecakapan untuk Hidup (Life Skills Education)*. (<http://catatankaryatulis.blogspot.com>. Diakses 30 Juni 2009).
- Rina Ayu. 2017. *Sejarah Baru Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana, Bendera Pusaka Dibawa Kereta Kencana*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/17/sejarah-baru-upacara-hut-kemerdekaan-ri-di-istana-bendera-pusaka-dibawa-kereta-kencana>. Diakses 26 Agustus 2018.
- Toni Firman. 2016. *Husein Mutahar; Penyelamat Bendera Pusaka*. <https://tirto.id/husein-mutahar-penyelamat-bendera-pusaka>. Diakses 26 Agustus 2018.
- Siti Alifah, dkk. 2009. *Modul Kewirausahaan "Entrepreneur"*. Solo: CV Putra Waylima.
- Slamet, PH and Bambang, Sugestiyadi. 2017. *Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa SMK terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*. Artikel Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2017. www.eprints.uny.ac.id Diakses 26 Agustus 2018.
- Tim Broad Based Education Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skills) Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas Broad Based Education*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tribun. 2009. *Keterampilan Vokasional Bagi Siswa SMA dan MA*. Tribun Jawa Barat, 3 Desember.
- USAID. 2006. *Integrasi Kecakapan Hidup Dalam Pembelajaran*. (www.dbe-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub. Diakses 30 Juni 2009).

PEMBERONTAKAN PETANI BANTEN 1888: PENDEKATAN BARU DALAM PENULISAN SEJARAH INDONESIA DAN LANDASAN FILOSOFISNYA

Ririn Darini

Pemberontakan Petani Banten 1888 adalah sebuah karya besar sejarah yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo. Nama Sartono Kartodirdjo sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu sejarah di Indonesia. Berkat kemampuan dan dedikasinya, beliau dikenal sebagai begawan sejarah, dan bahkan pemikirannya diterima sebagai sebuah mazhab baru dalam penulisan sejarah Indonesia, yaitu mazhab/aliran Sartono atau disebut juga mazhab/aliran Bulaksumur.¹ Menurut Djoko Suryo, sebagai sejarawan dan ilmuwan sosial terkemuka, posisi Sartono Kartodirdjo dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh ilmuwan Indonesianis internasional seperti J.D. Legge, Herbert Feith, G. McTurnan Kahin, Harry J. Benda, W.F. Wertheim, B.R.O’G Anderson, dan M.C. Ricklefs.²

Karya-karya dan pemikiran Sartono diakui telah banyak memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Beliau merupakan seorang pembaharu dan peletak bagi kajian sejarah kritis/modern (*modern historical study*) dan pelopor dalam penulisan sejarah sosial dan sejarah yang bersifat

¹ Istilah mazhab Bulaksumur dipopulerkan pertama kali oleh Harleem Siahaan, murid Sartono Kartodirdjo, ketika menyampaikan makalahnya dalam Musyawarah Kerja Sejarah VIII di Malang pada tahun 1984. Lihat Teuku Ibrahim Alfian, “Kata Pengantar” dalam *80 Tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo: Pelopor Sejarah Indonesia* (Bandung: MSI cabang Jawa Barat dan Satya Historika, 2001), hlm. xi.

² “Pengantar Penerbit” dalam Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan dan Pemikiran Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. vii.

Indonesia sentris. Karya besarnya, *The Peasants' Revolt of Banten* merupakan tonggak baru pada historiografi Indonesia. Selain karya tersebut, Sartono juga telah menghasilkan banyak tulisan. Beberapa di antaranya adalah *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century* yang diterbitkan Oxford Press tahun 1973, *Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, diterbitkan Gramedia Jakarta tahun 1982, *Ungkapan-Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur*, diterbitkan Gramedia Jakarta tahun 1986, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: dari Emporium sampai Imperium*, diterbitkan Gramedia Jakarta tahun 1986, dan *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Pergerakan Nasional* yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta tahun 1991.

Sepanjang kariernya Sartono Kartodirdjo telah menunjukkan keteguhannya sebagai seorang ilmuwan. Ia membuktikan diri sebagai ilmuwan yang memiliki integritas intelektual dan kejujuran sebagai ilmuwan yang tercermin dari sikapnya. Sebagai contoh adalah mundurnya Sartono sebagai penanggung jawab pada penulisan *Buku Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI karena merasa tulisan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang ada.

Sartono Kartodirdjo merupakan pelopor penulisan sejarah sosial di Indonesia. Pusat kajiannya tidak lagi berfokus pada orang besar, tetapi tema penulisannya telah bergeser ke penulisan sejarah orang kecil atau rakyat biasa. Karya besarnya sangat penting karena telah memperkenalkan petani sebagai agen yang aktif dalam panggung sejarah dan memberikan analisis secara mendetail tentang gerakan sosial. Sartono Kartodirdjo telah memperkenalkan pendekatan baru dalam penulisan sejarah Indonesia, yakni pentingnya penggunaan pendekatan

multidimensi yang bersifat interdisipliner, atau menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam kajian sejarah.

Sangat menarik untuk mengetahui apa sebenarnya landasan filosofis yang digunakan oleh Sartono Kartodirdjo dalam kajiannya tentang sejarah pemberontakan petani Banten 1888 yang dianggap sebagai tonggak historiografi baru di Indonesia. Tentu ini pekerjaan yang tidak mudah. Namun pekerjaan ini sedikit terbantu dengan buku beliau yang lain yaitu *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*³, yang menguraikan tentang pentingnya penulisan sejarah dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial lain untuk menjelaskan fenomena sejarah. Buku ini banyak digunakan sebagai rujukan terpenting dalam merekonstruksi sejarah kritis di Indonesia saat ini.

Dalam karya tersebut beliau banyak menguraikan tentang perkembangan ilmu sejarah dan masalah pendekatan dalam metodologi sejarah, terkait dengan berkembangnya penulisan sejarah sosial yang dikembangkan oleh Mazhab Annales di Prancis. Beliau juga menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai sejarah struktural. Mungkinkah bahwa pandangan beliau dalam karya disertasinya juga dipengaruhi oleh sejarawan mazhab Annales yang terpengaruh oleh strukturalisme. Hal tersebut sangat beralasan apabila dilihat kurun waktu ketika beliau menimba ilmu di luar negeri. Sartono menyelesaikan pendidikan magisternya di Amerika pada tahun 1964 dan menyelesaikan disertasinya di Universitas Amsterdam, Belanda pada tahun 1966. Pada tahun-tahun tersebut pengaruh Mazhab Annales pada penulisan sejarah baik di Amerika maupun Eropa sedang gencar-gencarnya, sehingga

³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

sangat masuk akal apabila pemikiran Sartono juga sangat dipengaruhi oleh aliran tersebut.

Selanjutnya, tulisan ini akan mencoba melihat epistemologi dalam karya Sartono Kartodirdjo yang berjudul *Pemberontakan Petani Banten 1888*.⁴ Benarkah beliau terpengaruh Mazhab Annales? Apakah beliau memakai landasan filosofis strukturalisme? Apa bukti-buktinya bahwa beliau mengikuti gaya mazhab Annales dan struktural? Supaya mendapat gambaran yang lebih jelas maka pembahasan akan diawali pandangan Sartono Kartodirdjo tentang sejarah dan historiografi di Indonesia dan deskripsi singkat tentang buku *Pemberontakan Petani Banten*.

Pandangan Sartono Kartodirdjo tentang Sejarah dan Historiografi

Sartono membagi pengertian sejarah pada pengertian yang subjektif dan objektif.⁵ Sejarah dalam arti subjektif merupakan konstruk yaitu bangunan yang disusun penulis sebagai uraian atau cerita. Uraian atau cerita itu merupakan kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta yang dirangkai untuk menggambarkan gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Sejarah itu subjektif karena merupakan penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang sehingga antara lain memuat sifat-sifatnya, gaya bahasanya, dan struktur pemikirannya.

Sebaliknya, sejarah dalam pengertian objektif menunjuk pada kejadian atau peristiwa, yaitu proses sejarah dalam aktualitasnya. Sebuah peristiwa yang terjadi bersifat *einmalig*, hanya satu kali terjadi, tidak dapat diulang atau terulang kembali. Bagi orang yang mengalami suatu

⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2015).

⁵ Sartono (1992), *op.cit.*, hlm. 14-15.

kejadian, ia hanya dapat mengamati sebagian dari totalitas kejadian tersebut. Keseluruhan proses itu berlangsung terlepas dari subjek mana pun juga. Jadi objektif di sini dalam arti tidak memuat unsur-unsur subjek (pengamat atau pencerita).

Dalam kaitannya sebagai sebuah ilmu, masalah objektivitas menjadi perdebatan besar dalam perkembangan ilmu sejarah. Dalam hal ini, Sartono memiliki pandangannya sendiri. Sudah menjadi konsesus bahwa sejarah sebagai sebuah peristiwa bersifat objektif dan sejarah sebagai cerita bersifat subjektif. Dalam hal ini subjektivitas kultural dan subjektivitas waktu paling sulit diatasi. Menurut Sartono, bertolak dari sejarah sebagai konstruk yang subjektif, sejarah atau fakta yang dikomunikasikan menjadi intersubjektif. Komunikasi secara lebih luas membuat fakta semakin intersubjektif. Pada suatu waktu fakta menjadi intersubjektivitas di kalangan yang sangat luas dan menjadi fakta keras. Intersubjektivitas yang seluas-luasnya kemudian dapat dimaknai sebagai objektivitas.⁶

Menurut Sartono, apabila suatu fakta secara intersubjektif telah diterima sebagai kebenaran, maka bagi yang menerimanya fakta tersebut dapat dikeluarkan dari subjek secara individual, dan diobjektivikasikan sebagai objek. Dengan demikian fakta tersebut dapat diterima oleh kelompok yang bersangkutan sebagai objektif. Objektivitas yang absolut merupakan konsep ideal di dalam ilmu kemanusiaan. Untuk menghindari kesepihakan atau pandangan deterministis maka Sartono menyarankan untuk menggunakan pendekatan multidimensional sehingga dapat diungkapkan berbagai dimensi dalam sebuah peristiwa, yaitu segi ekonomis, sosial, politik, dan kultural.⁷

⁶ Sartono Kartodirdjo (1992), *op.cit.*, hlm. 63-66.

⁷ *Ibid.*

Sartono menganjurkan untuk memilih jenis sejarah neosaintifik atau sejarah nonnaratif yang berusaha menguraikan struktur-struktur yang menjadi kerangka proses sejarah untuk dikembangkan di Indonesia. Menurut Sartono, suatu peristiwa sebagai suatu hal yang unik sesungguhnya hanya bisa dipahami sepenuhnya apabila dipandang sebagai aktualisasi berbagai struktur, misalnya tindakan dan peranan individu-individu yang terlibat, interaksi antara mereka, sikap dan mentalitasnya, yang kesemuanya menunjuk jelas-jelas kepada pranata, lembaga, serta struktur sebagai institusi yang mengkerangkai kejadian sebagai totalitas tindakan dan kelakuan para pesertanya. Pendekatan struktural akan mampu mengungkapkan konteks situasional di mana suatu kejadian terjadi. Konteks struktural meliputi infrastruktur ekologis, ekonomis, sosial, politik, dan kultural. Dengan demikian terungkap pula *settingnya*, kondisi-kondisi, tendensi atau kecenderungan struktural yang kesemuanya memudahkan pemahaman kausalitas yang berupa penyebab langsung. Di sini peristiwa atau kejadian hanya merupakan “letupan” dari keadaan-keadaan struktural dalam masyarakat.⁸

Menurut Sartono, untuk menjelaskan relevansi metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu sosial harus bertolak dari konsep sejarah sebagai sistem. Konsep sistem sendiri meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:⁹

1. Suatu sistem terdiri atas unsur-unsur atau aspek-aspek yang merupakan suatu kesatuan;
2. Fungsi-fungsi unsur-unsur tersebut saling pengaruh memengaruhi dan ada saling ketergantungan, dan bersama-sama mendukung fungsi sistem;

⁸ *Ibid.*, hlm. 116

⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

3. Saling ketergantungannya disebabkan karena setiap unsur-unsur memiliki dimensi-dimensi unsur lain;
4. Dalam mendeskripsi unsur-unsur serta saling pengaruhnya tidak ada satu faktor atau dimensi yang deterministik;
5. Dalam studi sejarah pendekatan sistem yang sinkronis sifatnya perlu diimbangi oleh pendekatan diakronis.

Dengan demikian, meski menggunakan teori sosial dan struktur, Sartono tetap mementingkan peristiwa dalam kajiannya, hal-hal yang berkaitan dengan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Mengenai keunikan sejarah ini Sartono sepakat dengan pendapat Weber. Keunikan dan historisitas fenomena selalu dikaji dengan menonjolkan sifat yang kongkret, individual serta hanya dapat dipahami secara kualitatif. Meskipun demikian peristiwa khusus yang terdiri atas suatu kompleks aksi manusia dapat dikaitkan dengan generalisasi, yaitu dengan memandang aksi manusia dalam hubungannya dengan sistem nilai. Menurut Sartono, Weber berhasil menjembatani kesenjangan antara partikularisme dalam historisime dan universalisme dalam positivisme. Implikasi metodologi Max Weber adalah bahwa keunikan fenomena dapat dicakup dalam kerangka referensi pola, struktur, sistem, tipologi, dan sebagainya. Menurut Sartono, metodologi Max Weber membuka kemungkinan luas untuk melakukan studi sejarah deskriptif analitis yang mampu mentransendensi keterbatasan historisime.¹⁰

Sejarawan melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber sejarah untuk memahami makna dari peristiwa sejarah yang ditelitinya. Kegiatan interpretasi dilakukan setelah proses verifikasi sumber. Sejarah juga berusaha memahami (*verstehen*) makna yang terkandung dalam fakta-fakta yang dijadikan sumber sejarah. Karena sejarah berusaha

¹⁰ Sartono (1992), *op.cit.*, hlm. 228.

memahami makna maka sumber-sumber yang digunakan selain sumber fisik juga digunakan sumber berupa sumber metafisik seperti agama, ideologi, pikiran, dan sebagainya. Fakta yang metafisik hanya dapat dipahami melalui ilmu interpretatif, yaitu hermeneutik agar fakta menjadi bermakna. Sartono tidak hanya menjelaskan (eksplanasi) fakta-fakta fisik tetapi juga fakta nonfisik (metafisik) yang berupa ideologi-ideologi pergerakan yang tumbuh dalam masyarakat petani Banten.

Selain masalah objektivitas, sebagai sebuah ilmu yang ideografis maka generalisasi adalah hal yang tidak muncul dalam ciri sejarah sebagai ilmu. Dalam hal ini Sartono menjelaskan bahwa generalisasi dalam sejarah sebenarnya merupakan *contradictio in terminis* (pertentangan arti dalam istilah).¹¹ Generalisasi menunjuk pada keteraturan (*regularity*), dalil, atau hukum. Dalam sejarah, jarang atau bahkan tidak pernah ada keteraturan. Perulangan dalam sejarah lazimnya berhubungan dengan pola kelakuan manusia berdasarkan orientasi nilai, sistem nilai, kebutuhan ekonomis, sifat psikologis, dan sebagainya. Proses sosial sebagai gejala kelakuan manusia yang berinteraksi juga menunjukkan pola atau struktur tertentu sehingga dapat digeneralisasikan meskipun tidak dapat dirumuskan sebagai hukum.

Tentang Buku Pemberontakan Petani Banten 1888

Buku ini merupakan disertasi Sartono di Universitas Amsterdam Belanda yang menjadi karya besarnya, sekaligus sebagai pelopor dalam penulisan historiografi dengan landasan filosofis Indonesia sentris. Pertama, karya ini merupakan studi awal tentang gerakan sosial di Indonesia. Kedua, studi ini juga merupakan kritik yang ditulis Sartono sebagai kritik terhadap historiografi kolonial yang Belandacentris.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 103.

Ketiga, karya ini merupakan kajian sejarah lokal yang sangat kompleks dan memiliki arti yang sangat penting. Keempat, studi ini menggunakan pendekatan multidimensional. Studi-studi sejarah Indoneisa sebelumnya hanya bersifat unidimensional.

Buku ini sangat kaya dengan sumber arsip. Sartono menjelaskan pemberontakan ini pertama, dimulai dengan aspek prapemberontakan yang mencakup aspek sosio ekonomi petani pada masa tersebut, perkembangan politik, keresahan sosial, konstruksi agama yang berkembang di masyarakat. Hal-hal tersebut mendasari terjadinya pemberontakan. Kedua, adalah aspek post pemberontakan yang meliputi aspek keberlangsungan pemberontakan sampai pada penumpasan pemberontakan tersebut. Ketiga, peristiwa pasca pemberontakan, yaitu dampak yang ditimbulkan dari adanya pemberontakan tersebut.

Strukturalisme dan Mazhab Annales

Konsep struktur digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk merujuk pada semua bagian masyarakat atau beberapa bagian dari masyarakat. Menurut Kuntowijoyo¹² konsep struktur masuk dalam ilmu sejarah melalui tradisi pemikiran strukturalis (Marxisme dan Strukturalisme). Marxisme secara deterministik (determinisme ekonomi) berpendapat bahwa struktur mempunyai hubungan kausal dengan dunia nyata (materialisme historis). Struktur (basis, infrastruktur) menentukan superstruktur. Misalnya kedudukan ekonomi menentukan cara berpikir, ideologi, mentalitas. Sementara itu kaum strukturalis non-Marxis menolak determinisme tetapi menekankan pada independensi antara yang *concius* (dunia nyata) dengan yang *unconcius* (struktur), dan hanya

12 Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 59.

menandai hubungan antara keduanya¹³ atau dengan kata lain terdapat struktur yang tidak disadari, sistemik, dan tidak berubah yang mendasari setiap jenis institusi dan adat kebiasaan manusia.¹⁴ Dalam hal ini sejarawan dari mazhab Annales Prancis menggunakan struktur untuk menjelaskan perubahan sosial dan sejarah. Konsep struktur yang digunakan dalam Mazhab Annales berasal dari Strukturalisme dan bukan Marxisme.¹⁵

Asal usul strukturalisme dapat ditemukan dalam metode linguistik yang dipakai oleh Ferdinand de Saussure, yang kemudian dikembangkan dalam antropologi oleh Claude Levi-Strauss. Saussure menjelaskan gagasannya mengenai hubungan antara kata-kata dan makna sosialnya. Ciri pertama dari metode strukturalisme adalah perhatiannya pada keseluruhan atau totalisme. Strukturalisme analitis mempelajari unsur tetapi unsur tersebut selalu diletakkan di bawah sebuah jaringan yang menyatukan unsur-unsur itu. Dengan demikian unsur-unsur hanya bisa dimengerti melalui keterkaitan (*inter-connectedness*) antarunsur. Ciri kedua, strukturalisme tidak mencari struktur di permukaan, tetapi di bawah atau di balik realitas empiris. Apa yang ada di permukaan adalah cerminan dari struktur yang ada di bawah (*deep structure*), lebih ke bawah lagi ada kekuatan pembentuk struktur (*innate structuring capacity*). Ketiga, dalam peringkat empiris

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Azyumardi Azra, “Historiografi Kontemporer Indonesia”, dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 72.

¹⁵ Kuntowijoyo, *loc.cit.* Lihat juga Michael Harsgor, “Total History: the Annales School”, *Journal of Contemporary History* (London and Beverly Hills: SAGE), Vol. 13, 1978, hlm. 2-4.

keterkaitan antar unsur bisa *binary opposition* (pertentangan antara dua hal). Keempat, strukturalisme memperhatikan unsur-unsur yang sinkronis, bukan yang diakronis. Unsur-unsur dalam satu waktu yang sama, bukan perkembangan antarwaktu, diakronis, atau historis.¹⁶

Aliran Annales merupakan kelompok penulisan sejarah yang menekuni sejarah dengan metodologi yang berbeda. Aliran ini dipelopori oleh Lucien Febvre (1878-1956) dan March Bloch (1886-1944) dengan jurnal ilmiahnya *Annales d'histoire economique et sociale* pada tahun 1929. Bloch dan Febvre memiliki banyak persamaan ide tentang natur dan hakikat sejarah, meskipun Bloch lebih tertarik pada sosiologi Durkheim dan penggunaan perbandingan dalam riset sejarah.¹⁷ Mereka mengecam sempitnya bidang penelitian sejarah dalam paradigma sebelumnya, hanya berkisar pada orang-orang besar dan politik, atau hanya pada peristiwa-peristiwa. Bloch menulis tentang masyarakat feodal Eropa dengan mempergunakan pendekatan Durkheim. Dengan pendekatan itu ia mampu membuat penjelasan tentang unsur-unsur, kondisi-kondisi, dan faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya masyarakat feodal di Eropa. Dalam karya ini terdapat pendekatan antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah.¹⁸

Bagi mazhab Annales perilaku individu dalam sejarah hanya dapat dimengerti dalam konteks masyarakat, bukan dari ilmu jiwa atau sejenisnya.¹⁹ Menurut Febvre sebagaimana dikutip Abdullah, kenyataan

¹⁶ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 13-14. Lihat juga Alun Munslow, *Deconstructing History* (London: Routledge, 1997), hlm. 27-29.

¹⁷ Marnie Hughes-Warrington, *50 Tokoh Penting Dalam Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 16-27.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Taufik Abdullah, "Lombard, Mazhab Annales, dan Sejarah Mentalitas" dalam Henry Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambariy, *Panggung Sejarah:*

sejarah adalah sesuatu yang bersifat multidimensional dan hirarkis. Dalam susunan hirarki ini, kejadian dan peristiwa ada di tingkat paling rendah sedangkan struktur berada di tingkat yang tertinggi.²⁰ Sejarah tidak semata-mata narasi tentang kejadian-kejadian melainkan analisis mengenai struktur. Sejarah deskriptif naratif atau yang disebut sebagai sejarah kejadian-kejadian hanya mengungkapkan apa yang terjadi di permukaan saja, dan hanya sebagai pantulan dari aliran besar di bawah. Aliran ini dapat diungkapkan dalam sejarah struktural yang lazimnya mencakup waktu jangka panjang yang mencakup perubahan struktur masyarakat dan lingkungan yang terjadi secara lambat laun.

Gagasan tentang struktur ini muncul, karena menurut Febvre sejarawan tidak boleh memaksakan secara *apriori* teori ke dalam penelitian tentang masyarakat dan sejarah. Namun demikian sejarawan juga tidak boleh hanya berhenti pada fakta. Sejarawan tidak boleh bersembayan fakta untuk fakta. Sejarawan harus mencari dan menemukan fakta, kemudian harus memahami, mengerti, dan menjelaskan fakta-fakta. Oleh karena itu agar sejarah tidak terjebak ke dalam teori di satu pihak dan narasi di pihak lain maka lahirlah konsep struktur. Struktur berguna untuk mengorganisasikan fakta-fakta.²¹

Aliran Annales Prancis telah mengubah penulisan sejarah secara radikal selama abad ke-20. Kalangan Annales melakukan terobosan dengan memadukan ilmu sejarah dengan berbagai cabang ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi sehingga melahirkan sejarah struktural. Febvre dan Bloch menentang dominasi sejarah politik. Mereka ingin mengganti sejarah politik dengan sejarah

Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 57.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

²¹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 61.

yang lebih luas dan lebih manusiawi, sebuah sejarah yang berbicara tentang semua kegiatan manusia dan kurang berminat pada penceritaan kejadian. Dengan kata lain, mazhab Annales lebih menekankan kepada analisis struktur.²² Mazhab Annales ingin menghilangkan dinding-dinding pembatas yang memisahkan sejarah dari kajian sosial dan ekonomi. Orang besar bukan lagi menjadi fokus penelitian melainkan masyarakat sebagai keseluruhan (*total history*). Bahkan pada tahapan awal aliran ini, manusia yang terungkap dalam peristiwa dianggap tidak penting untuk dijadikan materi sejarah.

Karakteristik pemikiran aliran ini ialah bahwa sejarawan dalam penulisannya harus mengurangi penekanan kebiasaan narative khususnya yang bersifat politik, kejadian atau peristiwa yang bersifat kronologis, dan harus lebih banyak menekankan pada analisis, struktur, dan kecenderungan (*la longe durie*). Mazhab Annales menghindari ‘peristiwa’ atau kejadian, yaitu hal-hal yang biasanya menjadi unsur utama dalam setiap studi sejarah. Hal utama yang dijawab oleh sejarawan biasanya pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa sebagai unsur-unsur utama untuk menentukan sebuah *event* atau *evenement* (kejadian).

Kelompok ini juga percaya bahwa pendekatan sejarah dari aspek ekonomi, sosio kultural dan politik harus diintegrasikan ke dalam “sejarah total” sehingga sejarawan membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial. Aliran Annales dilanjutkan oleh penerusnya Fernand Braudel yang juga menguasai ilmu ekonomi dan geografi. Karya Fernand Braudel (1902-1985) merupakan contoh penulisan sejarah total. Melalui karya agungnya, *Laut Tengah dan Dunia Sekitarnya pada Zaman*

²² Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 22.

Philips II, Braudel dianggap sebagai sejarawan paling terkemuka pada abad ke-20. Titik perhatian Braudel bukan pada Raja Spanyol Philip II atau kawasan Laut Tengah melainkan pada perubahan sosial dan irama waktu yang mengitarinya.

Melalui karyanya tersebut, Braudel membagi waktu dalam sejarah dalam tiga tingkat kecepatan, yaitu *longue duree* (jangka panjang, geografi, struktur), jangka menengah (ekonomi, konjungtur), dan jangka pendek (politik, peristiwa *l'histoire evenementielle*). Masa yang ketiga bergerak dengan cepat menyangkut peristiwa-peristiwa dan individu-individu, subjek (fokus) sejarah naratif tradisional yang menurut pandangan Braudel bersifat superfisial (dangkal) yang daya tariknya hanyalah karena sejarah ini mengungkapkan tentang kekuatan-kekuatan yang melandasi kejadian.²³ Kerangka analisis Braudel telah menjadi inspirasi bagi ilmu-ilmu sosial termasuk sejarawan dalam mengembangkan pendekatan suatu penelitian. Pengembangan ini sering disebut sebagai sejarah struktural. Corak penulisan sejarah dan analisisnya terhadap fenomena-fenomena sejarah menggunakan pendekatan struktural. Manusia sebagai pendukung sejarah berada dalam struktur yang ada dalam aspek kehidupan manusia.

Dalam pemahaman sejarah total, sebagaimana yang dikatakan Bloch, sejarah merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi struktural yang tersembunyi dan dalam, menyibakkan mekanisme-mekanisme historis yang terdapat dalam struktur-struktur geografis, ekonomi, dan kultural.²⁴ Sejarah total adalah sejarah tentang

²³ *Ibid.*, hlm. 229.

²⁴ Azyumardi Azra, "Historiografi Kontemporer Indonesia", dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari, *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 70.

seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya berkisar pada bidang-bidang yang biasanya dianggap paling penting, misalnya politik. Mazhab Annales Prancis mengembangkan tradisi konstruksionis dengan mengawinkan inferensi induktif dari bukti-bukti faktual dengan inferensi deduktif yang berdasarkan pada generalisasi umum sosiologis sebelumnya tentang struktur sosial ekonomi dan politik budaya masyarakat. Bagi para penganutnya, perkembangan ini sangat menambah kekuatan penjelasan sejarah.²⁵

Menurut aliran Annales, kenyataan dalam sejarah adalah struktur sosial yang ketat (*tightly structured*), sebagaimana dikemukakan dalam metodologi struktural dari aliran Annales dan Talcot Parsons. Sejarah struktural memperlihatkan bahwa manusia secara individu atau kelompok cenderung diatur oleh struktur sosial (sekalipun kenyataan mengenai struktur sosial hanya ada dalam tindakan manusia). Tidak dapat disangkal bahwa manusia hanya bisa menemukan dirinya dalam struktur sosial dan struktur-struktur lainnya. Tanpa bahasa, simbol-simbol dan dunia yang terstruktur tidak menyiratkan kesadaran atau tindakan yang rasional. Gambaran manusia dalam sejarah seperti itu tidak memberi harapan bahwa manusia bisa ‘menentukan nasibnya sendiri’ atau bertindak secara demokratis.

Salah satu sumbangan terbesar kelompok Annales dalam perkembangan ilmu sejarah adalah keberhasilannya menarik para sejarawan terhadap berbagai isue fundamental dan teori sosial. Beberapa sejarawan yang terpengaruh oleh Braudel misalnya Anthony Reid yang menulis mengenai Asia Tenggara dan Denys Lombard yang menulis tentang sejarah Indonesia (Jawa). Sejarah struktural yang diinginkan Fernand Braudel merupakan sebuah pandangan dari eksplanasi sosial

²⁵ Alun Munslow, *op.cit.*, hlm. 48.

yang menekankan pada pengaruh yang menentukan dari struktur terhadap masyarakat yang ada di dalamnya. Kelompok Annales ini sangat berpengaruh pada lahirnya sejarah yang bercorak ilmu sosial (*historical social science*), yang sering juga disebut sejarah struktural.

Pengaruh Mazhab Annales pada Karya Sartono Kartodirdjo

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, secara singkat beberapa hal penting dalam mazhab Annales dapat dikemukakan sebagai berikut:

Mazhab Annales memperkenalkan konsep dan metodologi baru dalam ilmu sejarah, yaitu sejarah sosial yang memfokuskan penelitiannya kepada masyarakat. Sejarah tidak terbatas pada sejarah politik, orang-orang besar, dan peristiwa-peristiwa.

Konsep dan metodologi ilmu sejarah mazhab Annales mendapat pengaruh besar dari strukturalisme, yang menyatakan bahwa struktur memengaruhi tindakan para agen. Mazhab Annales memandang sejarah sebagai perubahan (*change*).

Mazhab Annales memadukan ilmu sejarah dengan berbagai cabang ilmu sosial lainnya.

Dalam *magnum opus* Sartono, yaitu disertasi yang berjudul *The Peasants' Revolt of Banten: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, telah memperlihatkan kecenderungan Sartono dalam sejarah struktural Annales. Namun demikian, Sartono Kartodirdjo juga memiliki pandangan-pandangannya sendiri yang dikembangkannya dari pengaruh Annales tersebut. Beberapa hal yang dapat kita lihat dari pengaruh Annales pada karya besar Sartono ini adalah sebagai berikut:

Pertama, subjek kajian yang diangkat pada disertasi ini adalah kaum petani, tidak terfokus pada sejarah politik atau sejarah orang-orang besar. Artinya, Sartono juga telah keluar dari arus besar sejarah selama

ini yang hanya melihat sejarah politik sebagaimana yang ingin dikembangkan oleh sejarawan Mazhab Annales. Namun apa yang dilakukan Sartono ini juga terkait dengan historiografi tentang historiografi Indonesia yang Belandasentris. Bagi Sartono, orang kecil seperti petani juga bisa membuat sejarah. Rakyat juga turut menentukan struktur sosial, ekonomi, maupun kultural kekuasaan. Hal ini tercermin dalam pendapatnya sebagai berikut:

Akan tetapi tidaklah benar untuk menyimpulkan bahwa kaum tani tidak memainkan peran apapun dalam sejarah Indonesia. Dan tidak benar bahwa mereka bersikap masa bodoh, selalu penurut, dan pasrah kepada nasib. Huru-hara dan pemberontakan petani terjadi berulang-ulang dan menjadi endemis sosial dalam sejarah Jawa abad ke-19. Hal ini merupakan bukti tentang peranan historis yang dimainkan oleh kelompok petani.²⁶

Apa yang dilakukan Sartono sekaligus merupakan jawaban atas kritiknya terhadap pendekatan konvensional dalam historiografi kolonial yang didasarkan pada fakta bahwa pendekatan itu menganggap rakyat pada umumnya dan petani pada khususnya hanya berperan sangat pasif. Petani atau wong cilik memang tidak banyak meninggalkan catatan sejarah sehingga ada ucapan yang menyatakan bahwa petani adalah *les peoples sans historire*, atau orang-orang tanpa sejarah. Sartono berpendapat bahwa petani merupakan faktor yang memiliki peranan menentukan dalam politik modern, sebagaimana yang dibuktikan dalam disertasinya tersebut.

Menurut Sartono, historiografi kolonial mengenai abad ke-19 sangat menekankan susunan lembaga-lembaga pemerintahan dan pembuatan undang-undang serta pelaksanaannya. Sikap Belandasentris memandang sejarah Indonesia hanya sebagai sambungan sejarah Belanda, dan karenanya rakyat Indonesia tidak memainkan peran yang

²⁶ Sartono (2015), *op.cit.*, hlm. 4.

aktif. Sartono menggunakan diktum sejarawan Van Leur yang ingin mengungkapkan sejarah Indonesia dari dalam (*from within*) dan bukan dari atas geladak kapal dagang Belanda atau loji-loji kumpeni. Menurut Sartono, hal yang sangat esensial bagi sudut pandang yang Indonesiasentris adalah peran aktif manusia Indonesia dalam sejarah Indonesia. Penggunaan pendekatan struktural akan berguna dalam menemukan berbagai aspek perkembangan sejarah di Indonesia, di mana partisipannya adalah orang-orang Indonesia sendiri.²⁷

Dengan demikian sejarah konvensional tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terutama terkait dengan perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu para ahli termasuk Sartono menganjurkan untuk memadukan antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial sehingga kemudian melahirkan bentuk penulisan sejarah yang baru yang disebut sejarah sosial.

Kedua, sejarah tidak semata-mata sebagai urutan kejadian-kejadian, tetapi di dalam peristiwa yang terjadi terdapat struktur-struktur yang memengaruhinya. Pemberontakan petani Banten 1888 merupakan sebuah peristiwa yang berlangsung sangat singkat yaitu dari 9 Juli 1888 sampai dengan 30 Juli 1888, namun untuk memahaminya Sartono menelusuri pergolakan sosial yang mendahuluinya sampai ke awal tahun 1870-an.²⁸ Pendekatan struktural yang digunakannya memperjelas beragam segi masyarakat dan pola-pola perkembangannya. Hal ini tercermin dalam pendapat Sartono sebagai berikut:

Kita harus meninggalkan pendekatan historiografi kolonial yang mengikuti kecenderungan umum dalam kajian sejarah konvensional dengan hanya menyerap fakta mengenai peristiwa dan kisah politik yang besar. Kita harus mengetahui sampai ke tingkat faktor-faktor yang memengaruhi peristiwa-peristiwa

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

tersebut. Dilihat dari sudut pandang ini, peristiwa sejarah yang unik menjadi perwujudan kekuatan latar dari kekuatan yang lebih mendasar.

Kelemahan lainnya dari pendekatan yang disebutkan sebelumnya (sejarah konvensional – keterangan dari saya) adalah bahwa pendekatan itu tidak memerhatikan aspek-aspek struktural sejarah Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan konvensional gagal mengungkapkan tidak hanya berbagai proses sosial yang mendasari proses politik, tetapi juga keseluruhan acuan hubungan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Indonesia di masa lampau. Tak pelak lagi suatu pendekatan struktural terhadap sejarah Indonesia akan memperjelas beragam segi masyarakat Indonesia dan pola-pola perkembangan mereka. Pendekatan ini untuk sebagian akan meniadakan bias historiografi kolonial yang Belandasentris di satu pihak, dan akan memungkinkan kita merekonstruksikan pola-pola sejarah dalam kerangka referensi yang Indonesiasentris di pihak lain.²⁹

Sartono dalam kajian tentang petani Banten menekankan aspek proses dan struktur, kajiannya tetap berkisar pada kejadian-kejadian yang direkonstruksi dan diterangkan, dan menganalisisnya menggunakan pendekatan ilmu sosial. Sartono mengaitkan antara proses dan struktur, baik yang bercorak objektif seperti ekonomi, sistem sosial, struktur sosial, struktur kekuasaan, kependudukan, geografi, dan sebagainya; maupun yang bercorak subjektif seperti agama, tradisi, mitos, ingatan kolektif, dan sebagainya. Pendekatan struktur memusatkan perhatian pada kesatuan yang mencakup unsur-unsur serta hubungan yang pengaruh memengaruhi itu. Ditangkapnya proses interaksi antara unsur terjadi suatu waktu dan dalam situasi tertentu, yang oleh Sartono dikiasikan sebagai penampang lintang suatu batang pohon. Sementara itu pelacakan tentang terjadinya atau jalannya perkembangan di masa lampau dilakukan dengan pendekatan diakronis yang mirip dengan penampang bujur pada suatu pohon. Disini terdapat esensi perspektif

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

historis yaitu pandangan membujur mengikuti garis perkembangan sepanjang waktu tertentu. Sartono mengkombinasikan dua pendekatan sinkronis dan diakronis.

Apabila objek studi sejarah ditujukan pada suatu masyarakat atau lembaga sosial, maka untuk melacak perkembangan historis strukturnya maka mau tidak mau diperlukan kedua pendekatan itu. Contoh: bagaimana struktur feodal masyarakat abad pertengahan di Eropa kemudian berubah menjadi masyarakat abad ke-19, dengan kelas menengah atau kaum borjuis yang mempunyai kedudukan penting?

Di sini sejarah struktural dengan pendekatan rangkap dapat melakukan analisis dan mengungkapkan perubahan sosialnya.³⁰

Berbagai gejala struktural dalam peristiwa, situasi, dan perkembangan sejarah menurut Sartono dapat diekstrapolasikan dalam kerangka sebagai berikut:³¹

1. Struktur sosial yang mencakup berbagai golongan sosial atau kelas sosial serta hubungan-hubungannya,
2. Struktur agraris di pedesaan memerinci adanya berbagai golongan warga desa atau “petani” yang dibedakan berdasarkan pemilikan tanah serta hubungan kerjanya dengan tanah,
3. Struktur kekuasaan yang mencerminkan hirarki dalam sistem politik,
4. Struktur kepribadian (*personality*) yang terwujud dalam pola kelakuan dan sikap seseorang sebagai pengendapan sifat, watak, dan nilai-nilai yang dihayati oleh pribadi tersebut.
5. Struktur organisasi senantiasa tampil sebagai jaringan hubungan antara anggota dengan pengurus.

³⁰ Sartono (1992), *op.cit.*, hlm. 57.

³¹ *Ibid.*, hlm. 113.

Strukturalisme Sartono dapat dilihat dari salah satu contoh analisa berikut. Menurut Sartono ada saling pengaruh memengaruhi dan interdependensi antara unsur-unsur dalam sistem, misalnya ekologi, kultur, dan personalitas. Proses dialektis antara ekologi (aspek geografis) dan personalitas (aspek historis) secara kumulatif memberi wajah dan struktur tertentu pada suatu wilayah tertentu. Struktur yang diam dapat dilihat dari aspek spasial. Peristiwa pemberontakan petani di Cilegon tahun 1888 meliputi sebagian besar wilayah Banten Utara dan Banten Selatan. Jaringan hubungan antar pusat-pusat agama (pesantren) berpusat pada seorang guru yaitu K.H. Abdulkarim dari Tanara pada tahun 1860-1870 an. Para pemuka agama yang memimpin pemberontakan adalah para murid kyai besar itu. Di seluruh wilayah Banten Utara tersebar luas pesantren-pesantren yang akhirnya berfungsi secara efektif sebagai simpul-simpul jaringan komunikasi antara para pemimpin gerakan protes. Dengan demikian distribusi lembaga pendidikan agama sebagai pusat kultur Islam memberi ciri khusus pada daerah tersebut.

Pada dasarnya sejarah tidak berdimensi tunggal melainkan multidimensional. Dalam hal ini Sartono menggunakan analisis multikausalitas untuk menjelaskan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh petani Banten, meskipun sebenarnya para pemberontak tersebut tidak semata-mata dari golongan petani. Menurut Kuntowijoyo³², dalam analisis multikausal maka sejarawan harus melihat kasus tersebut dalam beberapa segi, baik prosesual, struktural, dan kausalitas yang kompleks.

Ketiga, Sartono menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam analisis sejarahnya, yang disebutnya sebagai pendekatan multidimensi.

³² Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 42.

Pilihan filsafat ilmu akan menentukan pilihan metodologi yang digunakan dalam penelitian dan teori-teori yang digunakan dalam menginterpretasi data. Metodologi dalam sejarah struktural lebih mengutamakan pada analisis dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sehingga penulisan sejarah kritis ini berkembang dalam kajian yang lebih luas. Metodologi ini menekankan pentingnya struktur sosial yang mengatur hidup manusia. Metodologi struktural dilandasi oleh epistemologi realis, bahwa realitas ada di luar otak manusia dan dapat ditangkap oleh manusia. Kenyataan dapat dipelajari secara objektif walaupun tidak semata-mata melalui panca indera. Dalam metodologi struktural digunakan eksplanasi kausalitas. Pendekatan struktural menggunakan eksplanasi yang bersifat determinis atau sebab-sebab yang berada di luar seperti struktur sosial, geografi, dan sebagainya.³³ Pada teori-teori yang didasarkan pada ideologi realis kaitan antara teori dan data adalah mutlak, karena keduanya mewujudkan kenyataan yang *an sich*. Dengan kata lain, fakta adalah interpretasi teoritis atas bahan-bahan yang tersedia. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pilihan teori harus konsisten dengan pilihan metodologi. Dengan demikian, metodologi struktural harus menggunakan teori-teori struktural misalnya dari Durkheim, Braudel, dan Parsons. Dalam ilmu sejarah, hal yang bisa diungkapkan adalah faktor-faktor kausal dari peristiwa atau proses tertentu. Dalam kaitannya dengan analisis sejarah ini, Sartono menyarankan agar pendekatan struktural dapat memilih teori antara lain fungsionalisme, sistemik, evolusionisme dan lain sebagainya. Baginya, hal terpenting bahwa dimensi waktu dalam sejarah struktural tidak boleh

³³ Christopher Lloyd, *Explanation in Social History* (New York: Basil Blackwell, 1986), hlm. 13-37

dikesampingkan.³⁴ Artinya aspek sinkronis (struktur) juga diikuti oleh aspek diakronis (proses).

Sartono sepakat bahwa sejarah yang deskriptif naratif sudah tidak memuaskan lagi untuk menjelaskan berbagai masalah atau gejala yang serba kompleks. Oleh karena itu pendekatan multidimensional atau *social scientific* merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan masalah atau gejala tersebut. Perkembangan ilmu-ilmu sosial yang pesat membantu sejarawan dengan menyediakan teori dan konsep yang merupakan alat analitis historis.³⁵ Pendekatan multidimensi digunakan untuk memperkaya pendekatan sejarah terhadap masalah yang dibahas. Menurut Sartono, pergerakan sosial sebagai sebuah proses adalah suatu hal yang sangat rumit. Oleh karena itu untuk memberikan penjelasan yang memadai harus menggunakan banyak alat analitis. Disiplin-disiplin lain seperti sosiologi, antropologi sosial, dan ilmu politik dapat memberikan analisis yang lebih baik mengenai fenomena pergerakan sosial. Konstruksi atau teori konseptual ilmu-ilmu tersebut diakui oleh Sartono memiliki daya menjelaskan yang lebih besar dibandingkan penuturan sejarah yang sederhana. Sartono menegaskan bahwa dalam sejarah struktural perlengkapan analitis adalah prasarana mutlak.³⁶

Sartono menegaskan perkembangan pesat pada ilmu-ilmu sosial juga menyentuh disiplin sejarah dan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ilmu sejarah. Pandangannya tentang ilmu sosial dalam disiplin sejarah sebagai berikut:

1. Ilmu sosial menyediakan alat-alat teoritis dan konseptual sehingga ilmu sejarah dapat menggunakannya untuk mengkaji

³⁴ Sartono Kartodirdjo (1992), *op.cit.*, hlm. 116.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 111.

gejala-gejala sosial di masa lampau untuk menyoroiti berbagai dimensi dan perspektif yang baru.

2. Terkait dengan rekonstruksi sejarah Indonesia sebagai Sejarah Nasional, bahwa implikasi metodologisnya adalah gambaran yang lengkap dan komprehensif yang menuntut pengungkapan berbagai dimensi kehidupan bangsa di masa lampau. Untuk merealisasikannya maka sejarawan harus menerapkan metodologi multidimensional, yaitu dengan mempergunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Dalam kajiannya tentang pemberontakan petani di Banten itu Sartono ingin menunjukkan hubungan yang dinamis yaitu interaksi kausal di antara kelompok-kelompok sosial dalam suatu pergerakan, tentang status dan peran kelompok elit, tatanan sosial, lembaga-lembaga, norma, nilai sosial, dan sikap-sikap ideologis yang membentuk dan menentukan pergerakan. Sartono dengan detail merekonstruksi peristiwa dengan teori yang multidimensional dan multidisiplin. Metodologi struktural menekankan struktur pada masyarakat sehingga manusia merupakan bagian dari struktur sosial dalam masyarakat itu sendiri. Ia menjelaskan konteks struktural hampir lebih dari separo bagian bukunya terkait dengan struktur untuk menampilkan analisis kausal. Dalam disertasinya Sartono menggunakan konsep-konsep seperti kelompok sosial, struktur sosial, stratifikasi sosial, mesianisme, nativisme, kebudayaan, dan lain-lain yang kemudian di sebut pendekatan multidimensional.

Beberapa konsep dari ilmu sosial yang digunakan Sartono untuk menganalisis pemberontakan petani Banten antara lain konsep dari Hobsbawm, Max Weber, dan Talcot Parsons. Konsep pergerakan sosial dari Hobsbawm yang menjelaskan perbedaan mengenai gerakan-gerakan

kuno (*archaic*) dan urban atau industrial untuk menjelaskan pergerakan sosial yang terjadi di Banten. Karakteristik modern dapat ditemukan dalam pergerakan sosial modern, misalnya pergerakan buruh, pergerakan petani, Naziisme, Zionisme dan komunisme. Konsepnya mengenai pergerakan sosial begitu luas sehingga mencakup pergerakan nativistik dan pergerakan petani. Menurut Sartono, gerakan-gerakan sosial di Jawa tidak menunjukkan ciri-ciri modern seperti organisasi-organisasi, dan agitasi yang meliputi seluruh negeri. Sebaliknya, gerakan di Jawa memiliki karakter yang sama, yaitu bersifat lokal, tradisional, dan berumur pendek.³⁷

Menurut Sartono, sejarah sosial adalah sejarah mengenai gerakan-gerakan sosial (*social movements*) yang muncul dan berkembang dalam sejarah. Dalam perspektif Sartono gerakan ini secara lebih sempit dan khusus lagi merupakan sejarah tentang gerakan-gerakan sosial yang cenderung marjinal dan menyempal dari arus utama masyarakat atau tatanan sosial politik yang mapan. Kajian-kajian sejarah yang dilakukan Sartono Kartodirdjo sesuai dengan pengertian sejarah sosial yang dikemukakan Hobsbawm, yaitu mengacu pada sejarah tentang orang-orang miskin atau masyarakat kelas bawah. Lebih spesifik lagi adalah mengacu pada gerakan-gerakan orang miskin. Studi Sartono tentang gerakan petani Banten dan gerakan-gerakan sosial lainnya di Jawa adalah masyarakat petani yang mengalami deprivasi sosial politik pada saat kolonialisme Belanda ada di puncak kejayaannya.³⁸

³⁷ Sartono Kartodirdjo (2014), *op.cit.*, 1.

³⁸ Azyumardi Azra, "Historiografi Kontemporer Indonesia", dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambari, *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 64-65.

Sartono menggunakan konsep Weber tentang pelembagaan kekuasaan untuk membuat analisis perbandingan tentang lembaga sosial yang tradisional dan modern di Banten. Proses diferensiasi struktural dalam sistem sosial yang terjadi sepanjang waktu mengakibatkan munculnya tipe-tipe kekuasaan yang berbeda. Weber membedakan tiga jenis kepemimpinan menurut jenis otoritas yang disandangnya. Otoritas karismatis, yaitu kepemimpinan berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi, otoritas tradisional merupakan kepemimpinan yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temurun dan otoritas legal rasional yaitu kepemimpinan yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.³⁹ Menurut Sartono tipe ideal otoritas yang kharismatik, tradisional, dan legal rasional dapat menjelaskan situasi konflik dalam masyarakat Banten abad ke-19, meskipun otoritas yang dimiliki oleh berbagai golongan elit harus ditempatkan di sepanjang satu kesatuan, mulai dari otoritas kharismatik sampai kepada otoritas rasional-legal. Tidak akan relevan untuk mencari tipe otoritas yang murni.

Sementara itu tipologi orientasi nilai sosial yang dikonstruksikan oleh Parsons digunakan oleh Sartono untuk menyoroti secara lebih tajam diferensiasi dan variabilitas struktural sistem-sistem sosial yang tradisional dan modern. Variabel pola yang *diffuse* (menebar, tanpa batas-batas yang jelas) lawan yang *spesifik* (jelas batas-batasnya) dalam pengungkapan kekuasaan (otoritas), status yang berdasarkan *ascription* (askripsi) atau *achievement* (prestasi), dan norma-norma universal lawan spesifik yang dapat ditunjukkan dalam berbagai kasus peralihan politik.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

⁴⁰ *Ibid.*

Untuk menjelaskan tentang pemberontakan, Sartono menggunakan teori sosiologi dari Neil Smelser yaitu *Theory of Colective Behavior* yang dijelaskan secara garis besar pada bagian akhir karyanya. Secara lebih mendetail teori perilaku kolektif dari Smelser dapat dilihat dari bagian-bagian tulisan sebelumnya.⁴¹ Pemberontakan petani diartikan sebagai perilaku kolektif. Determinan-determinan dalam teori tersebut untuk melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab peristiwa pemberontakan Banten, meliputi: *structural conducifness*, *structural strain*, *generalized believe*, *mobilization for action*, *participating factor*, dan *lack social control*. Sartono memulai pembahasannya dengan melihat latar belakang sosial ekonomi Banten. Penetrasi Barat menyebabkan perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi Banten, misalnya penghapusan pemilikan tanah Sultan oleh Daendels pada tahun 1808, dan pemungutan pajak pada tanah pusaka yang dilakukan pada masa Raffles (dapat dibaca pada Bab 1).

Perubahan-perubahan sosial ekonomi tersebut merupakan *structural condusifness* dalam kajian Sartono. Demikian juga perubahan pada pola administrasi dari tradisional ke modern. Hal ini banyak menimbulkan konflik antara kaum bangsawan lama dan kaum elit agama dengan pemerintahan kolonial (*structural strain*). Di sisi lain, Banten dikenal sebagai wilayah dengan masyarakatnya yang fanatik beragama Islam (*generalized believe*). Penyebaran Islam dilakukan melalui pesantren-pesantren yang tersebar di Banten. Para santri selain dididik mengenai pengetahuan keagamaan juga ditanamkan semangat anti kepada penjajah sebagai pemerintahan yang kafir. Semangat keagamaan juga ditanamkan melalui gerakan tarekat, yang berfungsi sebagai alat untuk

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 360.

mengorganisasikan gerakan keagamaan dan menyelenggarakan indoktrinasi tentang cita-cita kebangkitan kembali. Tarekat ini melakukan perluasan pengaruhnya dengan jalan memperbanyak pengikut dan menyalurkan semua otoritas ke tangan guru tarekat. Melalui lembaga ini pembentukan solidaritas kelompok ditanamkan melalui revitalisasi ritual-ritual dan upacara religio mistik. Pesantren dan tarekat memiliki peran yang strategis dalam pemberontakan petani Banten, yaitu sebagai sarana mobilisasi dan penyaluran massa (*mobilization for action*).

Penyebab determinan yang mempercepat pemberontakan (*precipitating factor*) digambarkan oleh Sartono dengan hancurnya tatanan tradisional dan munculnya keresahan sosial yang terus menerus sehingga mendorong berkembangnya kegiatan keagamaan. Pada era 1880-an gerakan keagamaan yang terus berkembang dan membenarkan aspirasi-aspirasi politik. Muncul cita-cita masyarakat untuk membangun kembali tatanan lama yang telah dihancurkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam bentuk harapan akan kedatangan Imam Mahdi. Untuk mewujudkan hal tersebut para elit agama sering melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan informal untuk membahas rencana pemberontakan melalui kegiatan pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Keberhasilan pertemuan informal elit agama ini menunjukkan kurangnya kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial (*lack of social control*).

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa Sartono tidak semata-mata menceritakan tentang peristiwanya saja atau aspek prosesual, tetapi juga melihat struktur-struktur yang ada. Peristiwa pemberontakan petani Banten merupakan sebuah peristiwa yang terbilang singkat, namun Sartono menelusuri akar-akar permasalahannya dalam jangka waktu

yang panjang, ketika perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung lambat. Pendekatan yang dilakukan sejarawan Annales telah menjadi model pendekatan dalam karya Sartono, yang kemudian terus dikembangkan dalam konteks Sartono. Melalui pendekatannya Sartono berhasil mengupas latar belakang peristiwa, jalannya peristiwa, dan pasca peristiwa pemberontakan petani tersebut. Ia dipengaruhi oleh teori-teori yang dikembangkan ilmu sosiologi dan antropologi misalnya tentang gerakan sosial dan keresahan di pedesaan.

Penutup

Melalui pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa memang Sartono mendapat pengaruh dari Mazhab Annales yang strukturalis. Pengaruh pandangan strukturalisme yang utama adalah bahwa struktur memengaruhi tindakan para agen sejarah. Sartono menegaskan bahwa setiap proses sejarah adalah perubahan sosial, sehingga di satu pihak kejadian merupakan proses dan di pihak lain dapat dipandang sebagai aktualisasi dari struktur. Menurutnya setiap struktur merupakan aspek statis dari proses dan sebaliknya setiap proses merupakan aspek dinamis dari struktur. Setiap kelakuan atau aksi telah dibentuk atau distrukturisasikan dalam suatu struktur.

Pengaruh dari mazhab Annales itu adalah: pertama, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural. Dalam tradisi mazhab Annales maka rekonstruksi sejarah yang dibangun tidak hanya mencakup dimensi diakronis tetapi juga mengungkapkan dimensi sinkronis, sehingga ada campuran antara aspek struktural dan prososual. Dalam kajiannya Sartono mengupas tentang struktur-struktur yang dalam pada masyarakat. Kedua, untuk kepentingan analisisnya, Sartono menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi,

dan antropologi. Beliau banyak menggunakan konsep-konsep ilmu sosial, karya tersebut kaya sekali dengan pendekatan ilmu sosial. Diantaranya adalah oleh pemikiran Hobsbawm tentang gerakan sosial dan konsep otoritas tradisional, karismatik, dan legal rasional dari Weber. Ketiga, kajian yang ditulis oleh Sartono adalah kajian sejarah sosial khususnya tentang gerakan petani. Hal ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mazhab Annales yang menentang penulisan sejarah yang hanya berkisar pada sejarah politik dan orang-orang besar.

Referensi

- Abdullah Taufik. Lombard, Mazhab Annales, dan Sejarah Mentalitas” dalam Henry Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Azyumardi Azra. “Historiografi Kontemporer Indonesia” dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Harsgor, Michael. “Total History: the Annales School”, *Journal of Contemporary History* (London and Beverly Hills: SAGE), Vol. 13. 1978.
- Hughes-Warrington, Marnie. *50 Tokoh Penting Dalam Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Komunitas Bambu. 2015.
- _____. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.

- _____. *Perkembangan dan Pemikiran Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak. 2014.
- _____. “Pengantar”, dalam Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian 1: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008.
- Lloyd, Christopher. *Explanation in Social History*. New York: Basil Blackwell. 1986.
- Munslow, Alun. *Deconstructing History*. London: Routledge. 1997.
- Teuku Ibrahim Alfian. “Kata Pengantar” dalam *80 Tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo: Pelopor Sejarah Indonesia* (Bandung: MSI cabang Jawa Barat dan Satya Historika. 2001.

INOVASI MEMBANGUN KEADABAN

Benni Setiawan

Inovasi—*Ibdaa'* dalam bahasa Arab-- merupakan sebuah keniscayaan. Jika mengacu pada pengertian *ibdaa'*, maka inovasi dapat diartikan sebagai *bada'a asy-syai, yabda'uhu bad'an wa ibtada'ahu* (mengadakan dan memulai sesuatu, menemukan sesuatu yang tidak belum ada sebelumnya).

Inovasi dalam pengertian di atas tampaknya sangat ideal untuk kondisi saat ini. Saya lebih suka memaknai inovasi dalam pengertian *tajdid* (pembaruan). Artinya, melakukan kerja peradaban dengan menemukan hal baru atau memperbarui apa yang sudah ada dengan melakukan penambahan, peremajaan, pembaruan, dan peningkatan fungsi bagi kehidupan.

Pemaknaan *tajdid* itu akan mendorong sebuah bangsa terus berinovasi. Tanpa inovasi sebuah bangsa akan tertinggal. Bangsa pun akan mengalami kelambatan budaya dan pembangunan. Pada gilirannya sebuah bangsa akan rapuh dan runtuh.

Percepatan laju kerapuhan dan keruntuhan bangsa salah satunya dapat dicegah melalui pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun, membangkitkan, dan mempercepat tatanan masyarakat yang beradab. Pasalnya, dari rahim pendidikan akan lahir manusia beradab. Mereka terdidik dalam sistem pemanusiaan yang manusiawi. Saat manusia terdidik dalam sistem itu, maka masa depan pun akan cerah dan cemerlang.

Tantangan dan Peluang

Masa depan bukanlah hal yang jauh di depan. Masa depan adalah hari ini. Begitu kata Rhenald Kasali (2017). Rhenald Kasali menyebut

bahwa paradigma masa depan itu misteri telah usang dan kuno. Ia menyebut masa depan ada di hadapan kita saat ini. Namun, kita sering lengah dan menyangkalnya.

Oleh karena itu menemukan inovasi berkelanjutan dalam sistem pemanusiaan manusia muda—meminjam istilah Driyarkara—menjadi sebuah tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang itu dapat terurai (baca: menjadi ringan) saat pemaknaan pendidikan dikembalikan pada proses hidup bersama (A. Sudiarja, dkk, Ed: 2006).

Hidup bersama inilah yang akan menghidupkan pendidikan dan kemanusiaan. Pendidikan perlu menerapkan langkah sigap/tanggap di tengah era dirupsi. Pendidikan perlu mengembalikan kemanusiaan di era yang mengandalkan—untuk tidak menyebut mendewakan--teknologi itu. Kemanusiaan diperlukan untuk mengembalikan jiwa manusia merdeka. Meminjam istilah Kuntowijoyo sebagai proses humanisasi.

Pak Kunto menyebut “manusia sekarang mengalami proses dehumanisasi karena masyarakat industrial menjadikan kita sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Kita mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik yang melihat manusia secara parsial” (Kuntowijoyo, 1991).

Dehumanisasi perlu dilawan dengan humanisasi. Humanisasi sebagai sebuah proses merupakan pilar utama dalam mengembangkan masyarakat. Humanisasi merupakan serangkaian proses dimana manusia paham akan kemanusiaannya. Salah satu fitrah kemanusiaan itu adalah manusia sebagai khalifah (pemimpin). Amanat kepemimpinan (khalifah)

yang diminta langsung oleh Tuhan dan tidak ada satu pun makhluk Sang Pencipta itu yang sanggup memanggulnya.

Khalifah menjadi penanda kemuliaan manusia. Peralnya, penyematan gelar khalifah bagi manusia itu langsung dari Allah. Hal itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai posisi sentral dalam relasi positif di jagat raya. Manusia tercipta untuk mengatur alam raya ini. Tuhan mengamanatkan manusia untuk memelihara alam raya ini dengan kreatifitas dan inovasi manusia.

Posisi yang mulia inilah yang menjadikan setan cemburu. Setan akhirnya mengatur siasat agar manusia terperosok dalam lembah nista. Setan pun terus berusaha mengalihkan gelar hebat itu dan mendorong manusia berperilaku culas seperti makhluk yang diazab oleh Allah.

Oleh karena itu, pilihan kemanusiaan saat ini adalah ingin tetap terhormat sebagai manusia atau terlaknat seperti setan? Tentu semua akan memilih pilihan pertama. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana agar manusia tetap terhormat dan menjadi makhluk pilihan Tuhan?

Salah satu tugas utama manusia adalah berkreasi dan berinovasi. Kreasi menjadi tugas kemanusiaan utama. Peralnya, tanpa kreasi manusia tidak akan dapat hidup. Manusia selalu hidup dalam alam yang berbeda. Kondisi yang berubah itulah yang menjadikan manusia berpikir dan mencari formula yang baik untuk tetap hidup (bertahan hidup).

Jika dulu manusia bertahan hidup dengan menggunakan batu untuk memecah tulang belulang sisa makan binatang buas, maka kini manusia tinggal menggunakan jari untuk mendapatkan makanan. Kreatifitas digital hari ini telah mengubah pola hidup manusia. Manusia tidak perlu repot dalam mengelola hidup. Peralnya penghidupan ada di dalam genggamannya.

Smartphone (gawai) telah memudahkan manusia melakukan lompatan sejarah. Dengan alat kecil itu manusia bisa berkelana menembus batas ruang dan waktu. Kreativitas digital dan kreativitas yang lain itulah yang akan terus menjadikan manusia tetap hidup di alam raya.

Era 4.0 membutuhkan manusia kreatif. Sifat dan sikap kreatif itulah yang akan tetap mengukuhkan manusia dalam posisi yang hebat. Sebaliknya, tanpa kreativitas maka manusia akan mudah terlindas oleh perubahan zaman.

Amal Salih

Pasangan dari sikap kreatif adalah inovatif. Inovasi menjadi kekuatan manusia dan menjadi pilar utama peradaban. Perintah mengembangkan inovasi termaktub dalam surat al-Mulk (67: 2). “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Lebih baik amalnya itu berarti manusia diperintahkan untuk terus beramal salih. Amal salih merupakan puncak keimanan manusia. Tanpa amal salih manusia tak akan pernah berarti. Manusia akan sama saja atau bahkan lebih buruk dari babi hutan yang hidup di belantara luas. Begitulah Profesor Hamka mengkritik manusia yang sekadar hidup, tanpa amal salih.

Amal salih menurut KRH Hadjid (2006) adalah amal yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi ahli keluarganya, bagi kaum kerabatnya, dan bagi semua manusia yang jauh dari perbuatan kemudlaratan pada seorang kecuali menolak kemudlaratan yang lebih besar, misalnya dakwah mengajak menjalankan kebenaran dan wasiat dengan sabar.

Amal salih menjadi penanda kebajikan seseorang. Amal salih itulah yang akan terus dibawa oleh manusia saat mereka telah meninggal dunia. Amal salih yang kemudian dilakukan oleh orang lain pun menjadi catatan amal baik bagi yang menginisiasi, membuat, dan atau mengembangkan. Amal salih akan terus melekat dalam diri seseorang walaupun “sang penemu” telah hilang dalam kubangan tanah.

Oleh karena itu benarlah apa yang disampaikan oleh Azaki Khoirudin (2015), bahwa amal salih merupakan wujud dari kesempurnaan budi. Manusia berbudi (berakal sehat) tentu meninggalkan *legacy* yang baik. Kebajikan itulah amal salih yang akan terus dicatat oleh malaikat. Ia akan tetap ada sampai hari perhitungan nanti.

Lebih lanjut, amal salih itulah yang hari ini disebut dengan inovasi. Inovasi sangat dibutuhkan hari ini. Pasalnya, dunia yang bergerak cepat membutuhkan inovator yang mampu mengelola percepatan perubahan itu. Inovator adalah mereka yang tak terseret arus perubahan besar. Mereka tetap berdiri dan bahwa mampu melakukan kerja peradaban dengan menemukan dan atau mengembangkan apa yang sudah ada.

Inovator pun tak takut dengan perubahan. Inovator selalu punya cara untuk bertahan atau bahkan menjadi penentu dalam proses perubahan itu. Perubahan dalam bidang pendidikan misalnya. Sistem dan tantangan dunia pendidikan menjadi sebuah keniscayaan. Pembelajaran dengan multi media menjadi kebutuhan.

Kecakapan pun tidak hanya dapat diperoleh di bangku sekolah/kuliah. Namun, sudah banyak program di internet yang menawarkan program keahlian dan kecakapan. Bahkan, program-program itu telah banyak diakui oleh perusahaan-perusahaan besar.

Mungkin suatu saat nanti, masyarakat tidak lagi membutuhkan ijazah S1, S2, atau S3. Hal ini dikarenakan syarat mendapatkan pekerjaan tidak lagi selebar kertas formal. Namun, selebar kertas yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ada di internet.

Lompatan Sejarah

Menilik hal itu inovasi pembelajaran menjadi penting. Namun, ruh utama pendidikan sebagai pemanusiaan tidak boleh terlupakan. Teknologi informasi juga penting namun manusia perlu dipandang sebagai makhluk berakal dan berakhlak. Mereka adalah pemimpin peradaban (*khalifah fi al-ardhi*). Maka selayaknya teknologi informasi tidak memperbudaknya. Teknologi informasi perlu tunduk dalam bimbingan manusia yang manusiawi.

Inovasi berkelanjutan untuk pendidikan bukan berarti menggantikan sistem pendidikan dengan teknologi. *E-learning* tidak boleh menghilangkan spirit pendidikan sebagai proses interaksi manusia merdeka. Interaksi yang menumbuhkan sikap welas asih (*compassion*). Welas asih inilah yang akan menyelamatkan manusia dari ketamakan sifat asal (*homo homini lupus*). Melalui pendidikan manusia diarahkan menuju sifat kemanusiaan utama (*homo homini socius*).

Oleh karena itu inovasi berkelanjutan adalah mengukuhkan pendidikan sebagai medium pengembangan minat bakat dan potensi. Ruang kelas bukanlah segala-galanya. Ruang kelas adalah media untuk menumpahkan gagasan dan temuan yang dirajut dari bentang alam raya. Ruang kelas merupakan sarana bertemu dan tukar menukar atau bahkan adu gagasan yang terajut dalam semangat saling asah, asih, dan asuh. Asah kemampuan dan temuan terlandasi oleh sikap saling menyayangi sesama manusia, dan pengasuhan (*saling ngemong*) satu sama lain.

Dengan demikian, ruang kelas akan menjadi medium atau sarana mendorong siswa/mahasiswa untuk terus berkarya dan bertindak merupakan salah satu inovasi. Ruang kelas menjadi tempat pertemuan dan pertukaran ide, gagasan, dan cita, untuk kehidupan yang lebih baik. Ruang kelas menjadi milik bersama, sehingga pendidikan menjadi ruang dialog hidup yang saling menyapa, menguatkan, mengangkat dan mengukuhkan derajat kemanusiaan manusia.

Saat siswa/mahasiswa “dibebaskan” untuk melakukan lompatan sesuai zamannya (baca: lompatan sejarah), maka ia akan dapat berkontribusi dalam mengurai masalah kebangsaan. Mahasiswa akan menemukan jalan pembebasan sesuai fitrah kemanusiaan.

Pelopor Inovasi

Pendidikan pun akan tetap menjadi pemandu langkah kemanusiaan manusia. Inovasi berkelanjutan memungkinkan pendidikan sebagai investasi peradaban. Pendidikan tidak sekadar mendorong seseorang pintar, namun berilmu dan berkarakter. Ilmu dan karakter yang akan menuntut oleh pintar dengan mudah bersosialisasi, berinteraksi, dan bekerjasama. Orang pintar tidak hanya berada di menara gading ilmu. Namun, mereka membumi dan menjadi penuntun kehidupan penuh harmoni.

Oleh karena itu perguruan tinggi, khususnya eks-LPTK seperti Universitas Negeri Yogyakarta perlu mengukuhkan diri sebagai pelopor inovasi berkelanjutan untuk pendidikan. Komitmen itu setidaknya tergambar dalam tema Dies Natalies ke-54 pada 21 Mei 2018 lalu. Mengangkat tema inovasi berkelanjutan untuk pendidikan, UNY ingin mengukuhkan diri sebagai lembaga yang tak usang dan lejang zaman.

Inovasi berkelanjutan untuk pendidikan sebagai tema dies natalis merupakan langkah maju UNY untuk turut serta mengukuhkan pendidikan sebagai solusi bagi bangsa. Melalui beragam inovasi, pendidikan akan tetap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tatanan masyarakat berkeadaban.

Sebagai bagian dari UNY, Fakultas Ilmu Sosial ingin bersama mewujudkan cita inovasi berkelanjutan. FIS yang konsisten mengusung tema keindonesiaan kemudian menerjemahkan gagasan itu dalam spirit “berinovasi dalam semangat keindonesiaan”. Sebagaimana telah diurai di atas, inovasi perlu memperhatikan spirit keindonesiaan. Spirit keindonesiaan itu terbentang dari khasanah pemikiran tokoh-tokoh bangsa. Kiai Dahlan dan Driyarkara telah mewariskan pengetahuan dan ancangan inovasi yang tetap menjunjung nilai keindonesiaan.

Mereka berpandangan bahwa inovasi merupakan keharusan dengan tetap memperhatikan kemanusiaan manusia sebagai manusia merdeka dan fitrah manusia untuk melakukan amal salih. Setiap pilihan yang diambil di tengah zaman yang bergerak perlu tetap bertumpu pada kemanusiaan yang mulia. Manusia bukanlah robot yang bergerak. Manusia adalah makhluk terpilih dan mengemban tugas sebagai pemimpin peradaban. Pemimpin yang mengelola alam raya ini akhir zaman nanti.

Selamat Dies Natalis ke-53 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Sukses selalu dan penuh berkah menjadi fakultas pelopor dan rujukan dalam pengembangan dan penemuan ilmu-ilmu sosial keindonesiaan.

Referensi

Al-Quran Surat al-Mulk (63: 2).

A Sudiarja, dkk Ed. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Khoirudin, Azaki. 2015. *Teologi al- 'Ashr, Etos dan Ajaran KHA Dahlan yang Terlupakan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

KRH Hadjid. 2006. *Pelajaran KHA Dahlan: Tujuh Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat al-Quran*. Yogyakarta: LPI PPM.

Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.

Rhenald Kasali. 2017. *Tomorrow is Today*. Jakarta: Rumah Perubahan dan Mizan. Proyek.

BAGIAN III: INOVASI PEMBELAJARAN KEINDONESIAAN

MENGGAGAS PARADIGMA BARU PENDIDIKAN INDONESIA: Refleksi Pemikiran Prof. Dr. Sodik A. Kuntoro, M. Ed.

Sudrajat

Memasuki purna tugas di Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Sodik Azis Kuntoro, M. Ed., melontarkan beberapa gagasan yang cerdas dan reflektif untuk membangun paradigma baru pendidikan sebagai upaya memecahkan permasalahan bangsa Indonesia yang dimana pendidikan dijadikan sebagai *entry point*-nya. Dalam pandangan beliau sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada hasil (khususnya hasil ujian yang merujuk pada aspek kognitif) telah gagal dalam mencapai tujuan utama pendidikan yaitu membentuk manusia sebagai pribadi yang utuh. Kegagalan yang paling fatal adalah ketika produk didik tidak lagi memiliki kepekaan nurani yang didasarkan pada moralitas (*sense of humanity*). Padahal substansi pendidikan adalah memanusiakan manusia, menempatkan kemanusiaan pada derajat tertinggi dengan memaksimalkan karya dan karsa (Zaim Elmubarak, 2008: 29). Ketika pendidikan tidak peduli dengan kemanusiaan, secara faktual produk pendidikan berada pada titik yang sangat kritis. Kecurangan dalam ujian, perkelahian antar pelajar, kekerasan, seks di luar nikah, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain, merupakan indikator dari kegagalan-kegagalan itu.

Dalam pandangan Prof. Dr. Sodik A. Kuntoro kehidupan di masa depan menjadi lebih sulit karena perkembangan dunia yang semakin kompleks sebagai dampak dari globalisasi yang semakin meresap ke semua aspek kehidupan. Oleh karenanya generasi muda perlu dipersiapkan secara matang untuk siap menghadapi tantangan dalam kehidupan yang demikian itu. Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan

Prof. Dr. Teuku Jacob (2006: 386) bahwa untuk menatap masa depan bangsa Indonesia harus:

1. Mempersiapkan diri untuk perubahan yang akan terjadi;
2. Memilih masa depan yang dikehendaki;
3. Mencegah hal-hal yang merugikan yang mungkin terjadi;
4. Menyesuaikan cita-cita dengan perubahan mendatang;
5. Mengungkapkan keinginan atau kritik terhadap keadaan sekarang.

Paradigma Baru Pendidikan Indonesia

Paradigma baru yang dimaksudkan oleh Prof. Dr. Sodik Azis Kuntoro adalah meletakkan tujuan pendidikan pada pengembangan manusia yang utuh, meliputi individu dan sosial. Sebagai individu manusia memiliki potensi, kemauan, dan keinginan yang semestinya dikembangkan demi kesempurnaan kemampuan manusia untuk menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu manusia juga bagian dari sistem sosial karena lahir dan besar dalam lingkungan sosial tertentu. Pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia membutuhkan penyempurnaan yang mengakomodasi modal sosial dan modal budaya. Perasaan kebersamaan, semangat, sikap dan tindakan yang akomodatif merupakan aspek-aspek yang tidak boleh diabaikan oleh pendidikan, tidak hanya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, akan tetapi juga lembaga lain seperti stasiun televisi, lembaga sosial, keagamaan dan masyarakat sendiri.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Pestalozzi yang menyatakan sebagai berikut: “... *a new system of education which would take fully into account the child himself, what he was capable of achieving mentally and physically, and he was capable of experiencing spiritually*” (Heafford, 1961. 41). Dalam paragraf tersebut Pestalozzi

mengharapkan hadirnya sebuah sistem pendidikan baru yang mengembangkan anak secara utuh baik dalam aspek intelektual, fisik, moral, maupun spiritual. Hal yang dianggap paling urgen, menurut Pestalozzi adalah pengembangan aspek moral yang diharapkan dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan anak selanjutnya. Dengan demikian gagasan Prof. Dr. Sodiq Azis Kuntoro, M. Ed. diilhami oleh tokoh tersebut yang selalu dikaji dan dianalisis oleh beliau bersama para mahasiswanya selama perkuliahan.

Dalam proses belajar mengajar, Prof. Dr. Sodiq A Kuntoro, M. Ed., juga menggagas metode refleksi yang memungkinkan anak didik melakukan refleksi atas pengamalan-pengalaman belajarnya. Hal ini berangkat dari suatu perspektif bahwa belajar secara alami dalam kehidupan sehari-hari terjadi secara tidak sengaja dan bersifat insidental. Merefleksikan pengalaman yang dialami merupakan cara yang sesuai untuk memperoleh makna pengalaman yang kemudian dipergunakan untuk menghadapi pengalaman baru. Dengan demikian siswa telah mempunyai bekal pengalaman untuk menyongsong kehidupan baru yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Bekal pengalaman ini diharapkan dapat menjadi *framework* untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya, sehingga mereka akan sukses dalam kehidupan. Pandangan ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang digagas oleh John Dewey (2001: 105) bahwa pendidikan merupakan rekonstruksi pengalaman. Kualitas pengalaman yang dibutuhkan oleh anak yaitu aspek langsung, yaitu menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan aspek kedua ialah pengaruhnya atas berbagai pengalaman kemudian. Pandangan tersebut merupakan akumulasi reflektif dari seorang begawan pendidikan yang telah lama bergumul dengan teori-teori pendidikan serta pandangan

tokoh-tokoh besar dunia pendidikan seperti John Dewey, Pestalozzi, Emile Durkheim, dan lain-lain.

Harmonisasi Pendidikan

Gagasan Prof. Dr. Sodik A Kuntoro untuk membangun harmonisasi pendidikan dalam semua lini: formal, informal dan nonformal mencerminkan kejernihan pemikiran yang berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa ini. Sebagai seorang begawan pendidikan yang sadar bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, beliau mempunyai pemikiran besar untuk menyatukan insitusi kemasyarakatan dalam proses pendidikan. Hal ini memang sangat beralasan, karena pendidikan tidak sekadar persekolahan, akan tetapi meliputi seluruh proses sosial di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Harmonisasi pendidikan di sekolah merupakan hal yang *urgent* dalam kehidupan yang semakin global dan modern dewasa ini.

Proses pendidikan di sekolah tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh institusi lain di masyarakat seperti keluarga, dan masyarakat itu sendiri sehingga diperlukan kerjasama yang sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Beliau menekankan bahwa sekolah mempunyai peran untuk menciptakan lingkungan yang membangun harmoni, serta memberikan kesempatan yang luas untuk membangun kehidupan. Sekolah harus membangun harmonisasi kegiatan belajar antara formal, informal dan nonformal.

Pendidikan sepanjang hayat (*life long education*) merupakan aspek terakhir yang digaris bawahi dalam orasi ilmiah tanggal 29 April 2013 tersebut. Dalam pandangan beliau belajar tidak berhenti setelah selesai menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi dilanjutkan dengan cara membaca dan memahami perubahan dan

perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dalam pandangan beliau sekolah bukan sekadar sebagai *transfer of knowledge*, namun yang paling urgen adalah membangun budaya belajar, menumbuhkan semangat gemar membaca, gemar berfikir, dan lain sebagainya. Pandangan ini sejalan dengan hadits nabi yang menyatakan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban muslim (laki-laki dan perempuan) dari buaian sampai liang kubur. Hal itu merupakan refleksi tentang pentingnya belajar sepanjang hayat sebagai upaya untuk terus meningkatkan pemahaman dan kejernihan dalam menangkap konteks kehidupan. Kegiatan belajar di masyarakat seperti kajian-kajian keagamaan, diskusi, seminar, dan lain-lain perlu ditingkatkan sehingga dapat menarik minat orang untuk mengikutinya. Jam belajar masyarakat juga perlu untuk diaktifkan sehingga tidak hanya anak-anak sekolah saja yang belajar, akan tetapi orang dewasa yang sudah tidak sekolah juga dikenai jam belajar dengan membaca buku, majalah, koran, dan sumber belajar lainnya. Dengan demikian pendidikan telah menjadi denyut nadi dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan.

Referensi:

Dewey, John. 2001. *Democracy and Education*. A Penn State Electronic Classic Series.

Elmubarak, Zaim. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.

Heafford, Michael. 1961. *Pestalozzi: His Thought and its Relevance*. London: Methuen & Co.

Jacob, Teuku. 2006. *Manusia Makhluq Gelisah*. Surakarta: UMS Press.

PROYEK PEKAN HAM: INOVASI PEMBELAJARAN DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

Halili

Secara substantif, hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia. Oleh karena itu, orientasi paling tinggi HAM adalah bagaimana menjaga kehormatan dan martabat atau harga diri manusia (*human dignity*). Harga diri manusia, sebagai manusia maupun sebagai warga negara, dengan demikian, tergantung antara lain pada bagaimana pemenuhan hak-hak dasar bagi setiap manusia tersebut.

Persoalannya dinamika HAM belakangan ini menunjukkan gejala negatif yang disebut oleh Irene Khan (2005) sebagai krisis nilai HAM. Krisis nilai tersebut diindikasikan oleh beberapa gejala. Pertama, ambivalensi negara-negara dalam menempatkan nilai-nilai HAM sebagai nilai yang meggerakkan perilaku dan kebijakan negara-negara. Hal itu disebabkan pada pokoknya oleh fakta adanya inkonsistensi negara-negara dalam merespons aneka tragedi kemanusiaan yang terjadi di muka bumi. Masyarakat dunia di satu sisi dipertontonkan dengan berbagai tragedi kemanusiaan di Palestina, Myanmar, China, Korea Utara, negara-negara Afrika dan Timur tengah, dan sebagainya, namun di sisi lain kita juga menyaksikan kegagalan negara-negara, terutama negara-negara kuat di PBB, dalam memberikan respons tunggal dalam aneka tragedi kemanusiaan.

Hal itu kemudian mendorong begitu banyak pakar untuk melabeli situasi tersebut sebagai standar ganda HAM. Dalam isu-isu kemanusiaan di negara-negara dunia ketiga, PBB dan negara-negara kuat di dalamnya kerap kali mengeluarkan resolusi bahkan yang memuat pemberian sanksi, akan tetapi kita saksikan betapa Israel kedap terhadap resolusi apalagi

sanksi atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina dalam beberapa dekade terakhir.

Kedua, kekeliruan dalam menempatkan Barat sebagai “sumber” dan kiblat HAM. Di dunia timur, termasuk Indonesia, HAM ditempatkan sebagai agenda Barat dan berkiblat pada standar-standar Barat. Situasi ini melahirkan berbagai sinisme tentang HAM. Mulai dari lontaran sinis tentang ontologi HAM hingga imperativitasnya. HAM di sebuah konferensi di Malaysia dinyatakan bukan sebagai *human rights* akan tetapi *human wrongs* (Chandra Muzaffar, 2007). Di level negara bahkan muncul penolakan untuk menjadikan HAM sebagai nilai pokok yang menggerakkan perilaku dan kebijakan negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Tiga pemimpin negara pada era kejayaannya, yaitu Lee Kwan-Yew, Mahathir Muhammad, dan Soeharto kerap kali mengekspresikan statemen dan gestur penolakan pada nilai-nilai HAM yang mereka identifikasi sebagai nilai-nilai Barat, dan sebagai gantinya mereka memperkenalkan apa yang disebut sebagai *Asian values* yang pada prakteknya dalam pemerintahan sesungguhnya kerap dijadikan alibi atas terjadinya kasus-kasus kemanusiaan.

Ketiga, dan ini yang paling akut, adalah rendahnya pemahaman dan juga kepedulian warga tentang HAM. Dalam konteks Indonesia, kepedulian warga merupakan tantangan serius pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam Indeks Persepsi HAM yang dirilis oleh Setara Institute for Peace and Democracy (2013), dinyatakan bahwa HAM berhadapan dengan beberapa tantangan serius, yaitu; 1) lemahnya komitmen Presiden, 2) masyarakat yang tidak peduli, 3) dasar hukum yang tidak memadai, dan 4) lemahnya dukungan DPR.

Tiga problema aktual tersebut menegaskan pentingnya pemajuan HAM melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai

kemanusiaan merupakan aspek kemanusiaan yang bersifat universal. Penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang baik dan efektif akan mengatasi masalah fundamental krisis nilai HAM. Promosi HAM dapat dilakukan melalui kegiatan, proses, dan lembaga-lembaga pendidikan, di antaranya melalui subjek formal kurikuler. Untuk kepentingan tersebut, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta melakukan kurikulerisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia (Pendidikan HAM) sejak tahun 2009.

Persoalannya kemudian, bagaimana menghadirkan inovasi pembelajaran yang memungkinkan proses pemajuan hak asasi manusia melalui proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna? Dalam konteks itu Proyek Pekan HAM merupakan inovasi yang dipilih sebagai bagian dari keseluruhan pembelajaran Pendidikan HAM.

Konsep dan Urgensi Hak Asasi Manusia

HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.

Beberapa pakar dan praktisi gerakan HAM berada dalam simpang pemikiran yang berbeda dalam memahami (dan juga memperjuangkan)

HAM.. Jack Donnelly menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003: 70). Pandangan Donnelly menegaskan bahwa HAM muncul bersamaan dengan lahirnya kedirian manusia.

Terdapat beberapa pengertian yang pendekatannya yuridis. Louis Henkin sebagaimana dikutip Rafael Edy Bosko (2004: 3), misalnya, mengartikan HAM sebagai: kebebasan-kebebasan (*liberties*), kekebalan-kekebalan (*immunities*) dan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-keuntungan (*benefits*), yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada seyogyanya dapat diklaim (*should be able to claim*) sebagai hak oleh individu atau kelompok kepada masyarakat dimana dia tinggal. Definisi tersebut menunjukkan kecenderungan HAM sebagai apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, namun sekaligus sesuatu yang dapat diperjuangkan atau dituntut oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat.

Tidak jauh berbeda dengan Henkin, Osita Eze menyatakan bahwa HAM merupakan tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan di masa depan (Bosko, 2004: 3). Eze memberikan tekanan pada realitas bahwa hak-hak dasar tersebut belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum negara. Dalam perspektif demikian, pemenuhan HAM yang ideal secara filosofis membutuhkan perjuangan individu atau kelompok untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan legal dari negara.

Frans Magnis-Suseno menekankan dua unsur utama dalam pengertian HAM. *Pertama*, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan Donnelly di muka. *Kedua*, bahwa hak-hak itu bersifat universal. Universalitas HAM merujuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh ras manusia, tanpa melihat apa warna kulitnya, dalam latar etnis atau suku apa ia lahir, apa agamanya, bagaimana asal-usul keturunannya, dan sebagainya.

Dengan spektrum konseptual tersebut, tampak jelaslah bahwa substansi HAM secara generik diakui sebagai sesuatu yang melekat (*inherent*) pada manusia, tidak dapat dicabut dan dipisahkan (*inalienable and indivisible*), bersifat kodrati (*natural*), dan berkaitan dengan penegakan atau penghormatan martabat kemanusiaan (*human dignity*). Namun secara legal, HAM merupakan sejumlah hak dasar berupa tuntutan-tuntutan (*claims*) yang dapat dituntut pemenuhannya kepada hukum dan pemerintahan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebagai norma universal bagi negara-negara beradab, menyebut pada konsideransnya bahwa "...recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world", dan kemudian segera ditegaskan bahwa "...it is essential, if a man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law" (Paragraf Ketiga *Preamble*, Universal Declaration of Human Rights 1948). Secara substantio-filosofis, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati, namun secara legal hal itu harus mendapatkan jaminan perlindungan dari sistem hukum negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini sebangun dengan afirmasi dalam

sistem hukum Indonesia yang menyatakan filosofi HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati **melekat pada diri manusia**, bersifat **universal** dan **langgeng**, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, yang kemudian ditegaskan keharusan penghormatan dan perlindungannya oleh sistem hukum negara melalui statemen bahwa “...HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

HAM teramat penting untuk menjadi *concern* kita semua, tak hanya di dunia aktivisme akan tetapi juga di lingkungan akademis. Hal itu dikarenakan oleh berbagai latar, antara lain sebagai berikut:

Pertama, HAM adalah hak elementer dan fundamental tentang manusia, harkat dan martabatnya. Kajian HAM terkait dengan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang sangat generik, bahkan sebelum manusia terpilah-pilah atas dasar label identitas: sebelum manusia terbagi ke dalam berbagai kewarganegaraan, terkontak-kotak ke dalam berbagai anggota komunitas dunia, dan seterusnya. Label identitas merupakan situasi yang hadir kemudian.

HAM tidak berbicara mengenai hak-hak seseorang ketika dia menjadi anggota atau bagian dari komunitas tertentu. Memang, melekatnya hak pada individu di satu sisi, jelas melahirkan kewajiban dan tanggung jawab pada komunitas di sisi yang lain. Ketika berbicara mengenai hak dasar yang melekat pada suatu kelompok, sekaligus berbicara mengenai kewajiban dan tanggung jawab pada kelompok yang

lebih besar (supra komunitas). Namun, relasi demikian lebih banyak terkait dengan mekanisme formal pemenuhan, penegakan, dan penghormatan hak-hak dasar tersebut.

Kedua, HAM merupakan alat peradaban/sarana sipilisasi (*a civilizing tool*). Potret kebiadaban negara sudah berlangsung jauh sebelum Perang Dunia II. Realitas tersebut mengakibatkan kemunduran besar kemanusiaan: secara fisik, jiwa, sosio-ekonomi, sosio-kultural. Isu HAM menjadi gerakan global untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih beradab (*civilized*). Ketika isu demokrasi dan demokratisasi dijadikan pintu gerbang untuk menetralkan dan mereduksi kebiadaban negara atas warga negaranya, kegagalan segera membayang karena negara lalu bersembunyi di balik tameng kedaulatan negara (*state sovereignty*).

Banyak contoh keberhasilan penggunaan isu HAM dalam memberikan pelajaran kepada negara-negara yang abai menjamin penegakan, pemenuhan, dan penghormatan kepada warganya. Contoh paling dekat adalah Indonesia. Ketika berbagai kebiadaban pemerintahan Orde Baru berlangsung atas warganya, banyak kalangan termasuk Asing yang berpikir untuk memperbaiki keadaan di Indonesia dengan menggunakan isu demokrasi. Namun, pemerintah Orde Baru dapat berkelit dengan mengatakan bahwa “kami negara yang demokratis”. Buktinya, proses elektoral selalu berlangsung secara reguler, partai politik hidup, kebebasan berorganisasi dijamin, pemuda berorganisasi, wartawan memiliki wadah organisasi, kelompok agamawan juga berhimpun dalam organisasi, buruh tergabung dalam asosiasi, dan seterusnya. Namun, Pemerintah tidak bisa mengelak dari tuduhan pihak luar soal isu HAM. Secara faktual telah terjadi pembantaian atas satu jutaan lebih warga negara setelah “Revolusi Komunis” yang gagal pada

tahun 1965. Pemerintah Orde Baru sulit berkelit atas terjadinya pembantaian sipil oleh tentara dalam Tragedi Tanjung Priok. Pemerintah tidak bisa menyangkal ketika Kasus Marsinah, Udin, dan sejenisnya lalu diangkat bukan sebagai isu demokrasi, akan tetapi sebagai isu HAM.

Contoh yang lain adalah Myanmar. Ketika isu demokratisasi digulirkan oleh masyarakat internasional dengan ikon lokal Aung San Suu Kyi, junta militer bergeming. Saat komunitas internasional mendesak Myanmar untuk masuk ke dalam gelombang demokrasi dan membebaskan aktivis pro demokrasi Suu-Kyi, Pemerintah Militer Myanmar tidak mengindahkan respon tersebut sambil terus berargumentasi bahwa persoalan dalam negeri Myanmar adalah yurisdiksi mereka dan Myanmar memiliki kedaulatan atas yurisdiksi mereka sendiri. Sehingga setiap permintaan dunia internasional untuk masuk ke Myanmar, bahkan sekedar untuk menunjukkan solidaritas kepada Suu-Kyi selalu ditolak oleh Pemerintah Myanmar. Sampai kemudian internasional menggeser isu demokrasi kepada isu HAM. Kira-kira persuasi masyarakat internasional berbunyi: “Tak masalah Myanmar akan memilih sistem pemerintahan apapun, tapi tak ada legitimasi bagi pemerintah negara manapun untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warganya”. Dengan berbekal “bendera” HAM, sebuah tim internasional akhirnya diperkenankan masuk ke Myanmar untuk menyatakan simpatinya kepada aktivis pro demokrasi tersebut. Bahkan dalam kerangka isu kemanusiaan, masyarakat internasional menegaskan pentingnya Badan PBB untuk Investigasi Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar (Kompas, 18 Agustus 2010: 3).

Ketiga, HAM merupakan nilai dasar peradaban global. Pasca Perang Dunia II muncul semacam kesadaran kolektif masyarakat dunia

bahwa tatanan dunia harus diubah agar lebih damai dan mendamaikan. Pengalaman korban perang yang mengerikan karena penggunaan berbagai produk teknologi persenjataan yang nir pertimbangan kemanusiaan mendorong komunitas internasional untuk melakukan pertobatan massal dan mengikatkan diri dalam komitmen global yang damai dengan nilai-nilai baru berbasis kemanusiaan. Komitmen masyarakat dunia tersebut diejawantahkan dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut didasarkan pada keyakinan penuh bahwa hak asasi manusia adalah nilai dasar yang menempatkan kemanusiaan melampaui berbagai pertimbangan apapun: politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, kedaulatan negara, dan sebagainya.

Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Penanaman Nilai-nilai Kemanusiaan

Pendidikan HAM merupakan salah satu isu penting dalam diskursus dan gerakan kemanusiaan universal. Dunia telah memberikan penegasan tentang pentingnya Pendidikan HAM melalui PBB. The World Conference on Human Rights (Vienna, June 1993) melalui the Vienna Declaration and Programme of Action menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan informasi publik HAM sangat penting untuk memajukan dan mewujudkan hubungan yang harmonis dan stabil di tengah-tengah masyarakat dan untuk memajukan kedamaian, toleransi, dan saling memahami.

Apa urgensi Pendidikan HAM tersebut? Pertama, ada konsensus universal bahwa pendidikan hak asasi manusia adalah penting dan dapat berperan mengurangi pelanggaran HAM, dan mewujudkan pembangunan masyarakat yang bebas, adil, dan damai. Selain itu,

pendidikan HAM juga semakin diakui sebagai strategi yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia (Report of the Secretary-General on Guidelines for national plans of action for human rights education, 1997).

Untuk memenuhi urgensi tersebut di atas, mengacu pada dokumen di atas, HAM dipromosikan melalui tiga dimensi kampanye pendidikan:

1. Pengetahuan. Dimensi pengetahuan dalam kampanye HAM memberikan informasi tentang hak-hak dan mekanisme manusia untuk melindungi mereka.
2. Nilai, keyakinan dan sikap. Dimensi ini merupakan promosi budaya hak asasi manusia melalui pengembangan nilai-nilai, keyakinan dan sikap yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Aksi. Dimensi aksi dalam pendidikan ini mendorong orang untuk mengambil tindakan guna membela HAM dan mencegah pelanggaran HAM.

Setelah memahami urgensi tersebut, tampaknya perlu untuk diulas apa sesungguhnya pendidikan hak asasi manusia tersebut. Mengacu pada berbagai instrumen internasional hak asasi manusia, PBB melalui dokumen Dekade Pendidikan Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa yang dimaksud Pendidikan HAM adalah pelatihan, penyebaran informasi dan upaya-upaya yang ditujukan untuk membangun budaya universal hak asasi manusia melalui menanamkan pengetahuan dan keterampilan dan mencetak sikap, yang diarahkan untuk:

1. Penguatan respek hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
2. Pembangunan secara utuh kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya

3. Peningkatan pemahaman, toleransi, kesetaraan gender dan persahabatan di antara semua bangsa, masyarakat adat dan ras, kelompok nasional, etnis, agama dan bahasa
4. Memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas;

Dalam perspektif demikian, salah satu dimensi yang ingin ditekankan dalam Pendidikan HAM adalah mengenai penanaman nilai-nilai, dalam hal ini nilai-nilai yang menopang pemenuhan, perlindungan, dan promosi HAM. Nilai-nilai tersebut akan menjadi salah satu yang menggerakkan tindakan dan perilaku manusia dalam tatanan masyarakat demokratis dan damai.

Apakah nilai itu? Nilai merupakan kualitas yang melekat pada atau di dalam suatu objek. Kalau kita bicara mengenai kualitas, berarti kita bicara mengenai keberhargaan (*worth*). (Rukiyati, 2008). Sebuah barang yang berkualitas biasanya berharga. Suatu komoditas atau barang dagangan yang berkualitas biasanya berharga atau dihargai dengan harga yang mahal. Seorang penjual tidak keberatan mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal tinggi sebagai harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas.

Nilai juga berkenaan dengan kebaikan (*goodness*) (Rukiyati, 2008). Sesuatu yang baik disebut bernilai atau memiliki nilai. Sesuatu yang buruk tidak disebut bernilai. Jika kita berperilaku baik ditengah-tengah kehidupan sosial atau bermasyarakat, maka kita akan menjadi anggota masyarakat yang bernilai. Kehadiran kita pasti ditunggu-tunggu dan diharapkan. Sebaliknya jika kita berperilaku buruk atau tidak baik maka kita akan menjadi orang yang tidak bernilai di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan kita pun tidak diharapkan oleh masyarakat.

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak. Karena abstrak, nilai merupakan konsep yang tidak mudah untuk dijelaskan. Namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan (Bertens, 1993). Intinya, nilai adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang positif, yang diinginkan dan dicari, sehingga memandu langkah kita untuk mewujudkannya.

Dalam perspektif psikologis, Gordon Allport memandang bahwa nilai merupakan keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya (Mulyana, 2004). Sementara itu keyakinan menempati wilayah psikologi yang lebih tinggi dari area psikologis lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Dengan demikian, nilai berada di atas hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan.

Secara lebih konkrit kaitannya dengan tindakan, Kuperman mengatakan bahwa nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara berbagai alternatif tindakan (Mulyana, 2004). Nilai dengan demikian memandu tindakan yang diambil oleh seseorang agar senantiasa mengacu dan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Pembahasan mengenai nilai selalu kompleks. Namun, dengan berpijak pada berbagai konsep yang ada dapat disintesisasikan bahwa nilai adalah kebaikan dan keberhargaan yang menjadi patokan normatif dan memandu keyakinan seseorang untuk mengambil sikap dan tindakan tertentu dari berbagai alternatif sikap dan tindakan yang tersedia.

Nilai dapat dikategorikan ke dalam beberapa lapis yang saling mengisi satu sama lain. Meminjam Logoterapi Viktor Frankl, nilai dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe: *creative values*, *experiential values*, dan *attitudinal values* (Millon, 2004). Secara sederhana, *creative values*

ialah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam proses internal berkarya atau berkreasi, contoh: melalui melukis akan tumbuh dan berkembang nilai menghargai keindahan dan harmoni. *Experiential values* merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari mengalami langsung melalui proses interaksional di dalam lingkungan, misal nilai kejujuran akan tumbuh dan berkembang dari mengalami sendiri indahnya lingkungan yang jujur dan melalui interaksi yang jujur pula. Sedangkan *attitudinal values* merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh diri, seperti nilai respek dan menghargai diri sendiri akan tumbuh dan berkembang dari perilaku membantu dan menolong orang lain.

Kemudian apa yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan dalam studi ini? Nilai-nilai kemanusiaan adalah konsep universal yang dapat ditemukan di banyak masyarakat, aneka kebudayaan, dan di berbagai tempat dimana manusia hidup. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan kebajikan dan keberhargaan yang mendorong manusia untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan derajat tertinggi harkat dan martabat dirinya sebagai manusia.

Mengacu pada pandangan Parnell (2014), ada lima nilai kemanusiaan yang dapat kita temukan dalam semua kebudayaan, seluruh masyarakat dan dalam setiap agama, yaitu kebenaran (*truth*), perilaku benar (*right-conduct*), cinta (*love*), perdamaian (*love*), dan anti-kekerasan (*non-violence*). Nilai-nilai ini abadi dalam setiap konteks tempat dan waktu yang dimiliki seluruh manusia. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi abadi, yang mengangkat kehidupan manusia untuk ekspresi tertinggi dan kapasitas tertinggi. Mereka membawa manusia ke puncak tertinggi kebahagiaan. (<http://www.saieditor.com/falco/values.html>).

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut harus dibangun dan ditanamkan melalui metode yang paling tepat. Berkaitan dengan perspektif Frankl di atas, maka dalam konteks pendidikan, penanaman nilai-nilai kemanusiaan tersebut semestinya dilakukan melalui proses-proses kreatif, dalam pengalaman-pengalaman riil, dan perilaku langsung subjek didik.

Dalam rangka penanaman nilai-nilai kemanusiaan tersebut, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum melalui mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan proyek pembelajaran berupa pekan Hak Asasi Manusia. Dengan salah satu bentuk kegiatan promosi hak asasi manusia tersebut, diharapkan akan tumbuh semakin kuat nilai-nilai; kebenaran, perilaku-baik, cinta, kedamaian, dan anti-kekerasan. Dengan menyebarnya pengembangan nilai-nilai tersebut, akan terjadi proses eskalasi kemanusiaan yang akan sangat memberikan maslahat, tidak saja bagi manusia itu sendiri, akan tetapi juga bagi masyarakat secara lebih luas.

Proyek Pekan Hak Asasi Manusia

Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi

Pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia dibagi ke dalam beberapa tahapan agar pelaksanaan pelaksanaan proyek sesuai dengan tujuan dan dapat memberi manfaat, tahap pelaksanaan yaitu: perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Perencanaan

Tahap Perencanaan sebagai tahap awal pelaksanaan proyek meliputi: penentuan tujuan, penentuan tema, menetapkan struktur organisasi pelaksana, merancang program, penentuan lokasi, alokasi dana, merencanakan strategi implementasi, dan merencanakan evaluasi.

Pada tataran tujuan, pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia dalam beberapa tahun terakhir memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan (mempromosikan) hak asasi manusia sebagai bagian dari penopang terbangunnya masyarakat yang setara, damai, dan demokratis. Unsur yang membedakan pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia dari tahun ke tahun terletak pada tema kegiatan dan pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan tema kegiatan merupakan hasil formulasi dari isu Hak Asasi Manusia yang berkembang di setiap tahun pelaksanaan.

Sebagai contoh pada tahun 2011, situasi hak asasi manusia di Indonesia sedang merosot, khususnya dalam segi kebebasan beragama ditandai dengan mencuatnya aksi-aksi kebringasan massal yang seringkali dikaitkan dengan sentimen keagamaan, terutama dengan dirusaknya tempat-tempat ibadah. Sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dilaporkan pada tahun 2011, antara lain pembunuhan tiga jemaah Ahmadiyah pada bulan Februari 2011, kondisi tersebut menjadi titik fokus penyelenggaraan Pekan HAM di tahun ini. Melalui kampanye “Hak Manusia untuk Persatuan” dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan secara universal diharapkan mampu mendobrak batas ikatan-ikatan sektarian atau “primordial”. Oleh karena itu, Pekan HAM 2012 mengusung tema “Hak Manusia untuk Persatuan” dengan tujuan untuk mengkampanyekan hak asasi manusia sebagai faktor pemersatu.

Tujuan, tema, dan pesan yang ingin disampaikan kemudian dieksekusi dalam rancang program-program yang akan dilaksanakan. Bentuk-bentuk program disepakati lewat diskusi dalam organisasi pelaksana. Selain itu, juga disepakati strategi dan mekanisme pelaksanaan program disertai dengan penanggungjawab masing-masing program.

Penentuan lokasi kegiatan juga menjadi fokus utama yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan, tema, dan pesan yang ingin disampaikan pada tahun pelaksanaan. Sebagai contoh, pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia tahun 2013 mengusung tema “*Right Human for Human Rights*”, pesan yang ingin disampaikan pada pelaksanaan Pekan HAM ini adalah mengenang kembali jasa-jasa pejuang HAM, sehingga semangat para pejuang HAM akan terwarisi oleh generasi muda di masa sekarang. Oleh karena itu, kampus sebagai basis massa usia muda menjadi lokasi pelaksanaan program. Hal lain yang sangat penting dalam tahap perencanaan adalah pembiayaan dan alokasi dana setiap program. Pembiayaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia sepenuhnya dari iuran mahasiswa dan sponsor, dana yang ada kemudian dialokasikan pada masing-masing program sesuai dengan proporsinya.

Implementasi

Implementasi program merupakan eksekusi dari tahapan perencanaan yang terdiri atas 2 langkah utama, yaitu sosialisasi dan pelaksanaan program itu sendiri. Sosialisasi yang dimaksud berupa pemberian informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang proyek Pekan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan *stakeholder* memahami program Pekan Hak Asasi Manusia mengenai apa latar belakang dan tujuan program, hasil apa yang ingin dicapai, manfaat apa yang didapat oleh masyarakat dan *stakeholder*, dan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi adalah masyarakat dan *stakeholder* dapat memahami secara utuh program Pekan Hak Asasi Manusia, dengan meningkatnya pemahaman secara utuh terhadap program program Pekan Hak Asasi Manusia, diharapkan

masyarakat dan *stakeholder* akan termotivasi untuk mendukung program tersebut. Untuk itu, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja tetapi berlangsung secara terus menerus sampai pada akhir pelaksanaan program. Sosialisasi program Pekan Hak Asasi Manusia melalui berbagai media informasi dan publikasi, baik cetak maupun elektronik Media cetak yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah leaflet/brosur, koran, serta media elektronika seperti internet. Selain itu, sosialisasi program juga dilakukan secara personal dengan memanfaatkan jaringan dengan *stakeholder* dan masyarakat.

Pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia selama ini diisi dengan berbagai program kegiatan yang berbeda setiap tahunnya, meskipun pada beberapa program kegiatan, rutin diselenggarakan tiap tahunnya. Sebagai gambaran, penulis akan menggambarkan pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut.

Pekan Hak Asasi Manusia Tahun 2012

Pekan HAM 2011 digelar pada 5-10 Desember 2012 dengan tujuan untuk mengkampanyekan hak asasi manusia sebagai faktor pemersatu. Kampanye “Hak Manusia untuk Persatuan” ditransformasikan ke dalam berbagai kegiatan Pekan HAM tahun 2011, tercatat ada 6 kegiatan besar.

Kegiatan pada tahun ini dibuka dengan pameran yang menampilkan puluhan foto dan lukisan. Dengan mengusung tema “Hak Asasi Manusia”, seniman, mahasiswa, dan LSM yang *concern* terhadap isu-isu HAM asal Yogyakarta mencoba menampilkan potret perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM di Yogyakarta. Pameran ini mendapat apresiasi tinggi dari civitas akademika kampus, selain karena lokasi strategis di tengah-tengah lingkungan kampus, animo pengunjung pameran muncul dari

keberhasilan seniman dalam mengemas karya bernuansa “*human interest*” sehingga kita seolah berada di ruang dan waktu yang sama dengan obyek foto dan lukisan.

Kegiatan hari kedua tanggal 6 Desember 2012 diisi dengan pemutaran dan diskusi film “*The Pianist*”. Lewat film garapan sutradara Roman Polanski ini, peserta diskusi diajak menyelami sisi-sisi konflik masa invasi Nazi (Jerman) ke Polandia, masa yang menggambarkan konflik atas dasar perbedaan ras dan agama yang menimbulkan teror, kekejaman, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Pada tanggal 7 Desember 2012, Pekan HAM 2012 diisi dengan kegiatan seminar bertemakan “Hak Asasi Manusia untuk Persatuan Bangsa”. Seminar tersebut menghadirkan akademisi dan pegiat hak asasi manusia serta mahasiswa untuk duduk bersama membahas potensi konflik dari negara bangsa Indonesia, serta berbagai solusi yang ditawarkan termasuk dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia dan tanggung jawab sosial untuk dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, kegiatan Pekan HAM 2012, 8 Desember 2012 dilaksanakan di lingkungan Panti Asuhan. Bentuk kegiatan berupa bhakti sosial/pemberian bantuan serta Pendidikan HAM bagi anak-anak penghuni panti asuhan. Hari Jumat 9 Desember 2012 digelar konser amal bertajuk “*Music for Humanity*” guna menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM. Pekan HAM 2012 ditutup dengan aksi damai (demonstrasi), bertepatan *Human Rights Day* yang secara internasional diperingati tanggal 10 Desember. Kegiatan hari terakhir ini selain untuk melakukan kampanye pentingnya “Hak Manusia untuk Persatuan” kepada masyarakat Yogyakarta juga untuk menyapaikan tuntutan kepada

pemerintah untuk menindak tegas pelanggar HAM dan melindungi hak-hak kaum minoritas.

Pekan Hak Asasi Manusia Tahun 2013

Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, perbedaan mendasar terletak pada tema kegiatan. Pekan HAM tahun ini mengusung tema “*Right Human for Human Rights*”. Pesan yang ingin disampaikan pada pelaksanaan kali ketiga ini adalah mengenang kembali jasa-jasa pejuang HAM, sehingga semangat para pejuang HAM akan terwarisi oleh generasi muda di masa sekarang. Bulan Desember dianggap sebagai momentum yang tepat untuk menggugah kesadaran generasi muda mengenai HAM, sebagai instrumen pengingat bahwa peradaban manusia pernah mengalami pelanggaran-pelanggaran krusial dan massif atas kemanusiaan.

Pekan HAM 2012 digelar pada tanggal 3-10 Desember 2013, tercatat ada 6 acara besar dalam pelaksanaan kali ini. Serupa dengan tahun sebelumnya, kegiatan pembuka Pekan HAM 2012 tanggal 03 Desember 2012 diisi dengan pameran foto dan lukisan bertemakan “*Art for Human Rights*”. Pameran bersama yang diikuti oleh mahasiswa dan seniman asal Yogyakarta tersebut menjadi ajang untuk mengekspresikan ide dan gagasan dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Tanggal 04 Desember 2013, dilaksanakan kegiatan donor darah dengan mengusung tema “Setetes Darah untuk Kemanusiaan”. Peserta donor darah berasal dari kalangan mahasiswa. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian sosial generasi muda terhadap isu-isu kemanusiaan. Pekan HAM 2012 hari ketiga, 05 Desember 2013 diisi dengan pemutaran dan diskusi film bertemakan hak asasi manusia.

Salah satu upaya untuk menggugah kesadaran generasi muda mengenai HAM adalah dengan mengemas isu-isu HAM sesuai selera generasi muda, oleh karena itu kegiatan hari keempat, 06 Desember 2013 diisi dengan konser musik bertemakan “*Music for Human Rights*”. Kampanye “*Right Human for Human Rights*” juga dilaksanakan di luar kampus dengan menggelar Pendidikan HAM di Dusun Walikan, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul, 08 Desember 2013. Kampanye yang dikemas dalam bentuk Pendidikan HAM ini mengusung tema “*Human Rights from Me for You*” dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM sebagai hak fundamental.

Pekan HAM 2013 ditutup dengan kampanye “*Right Human for Human Rights*” di pusat Kota Yogyakarta. Aksi damai tersebut bertepatan dengan *International Human Rights Day*, 10 Desember 2013. Pada kegiatan tersebut dibagikan 1000 bunga bagi masyarakat Kota Yogyakarta sebagai simbol untuk menggugah kesadaran publik mengenai HAM yang merupakan elemen fundamental martabat ras manusia (*human dignity*).

Pekan Hak Asasi Manusia Tahun 2014

Pada tahun 2013, pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia secara konsep dan ruang lingkup kegiatan sedikit berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Bila Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia tahun 2012 dan 2013 terbatas pada lingkup regional DI Yogyakarta, maka ruang lingkup pelaksanaan pada tahun ini berskala Nasional. Beberapa kegiatan dibuat dengan melibatkan partisipasi warga negara dari beberapa wilayah Indonesia. Tema yang diusung pada pelaksanaan tahun ini adalah “Indonesia, Kita, dan HAM”.

Pembukaan Pekan HAM 2013 pada tanggal 05 Desember 2014 diawali dengan pelaksanaan Seminar Nasional bertajuk “Hak Asasi

Manusia dan Etnonasionalisme”. Maraknya gerakan-gerakan etnonasionalisme di banyak tempat di Indonesia serta konsepsi HAM sebagai perlindungan individu-individu warga negara atukah HAM dipahami sebagai "hak segala bangsa" menjadi titik fokus pembahasan. Isu tersebut dibedah secara apik oleh Penulis buku “Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh”, Dr. Antje Missbach yang juga seorang pakar hukum dari University of Melbourne, Dr. Otto Syamsuddin Ishak sebagai Ketua KOMNAS HAM periode 2012-2013, serta Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.

Kegiatan dilanjutkan dengan donor darah pada senin, 9 Desember 2014. Serupa dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial generasi muda terhadap isu-isu kemanusiaan. *Human Rights Day* yang diperingati secara internasional pada 10 Desember 2014 masih menjadi kegiatan terpenting pada tahun ini, meskipun bukan lagi menjadi acara penutup seperti tahun-tahun sebelumnya. *Human Rights Day* diperingati dengan pembagian 1000 bunga kepada masyarakat Kota Yogyakarta sebagai simbol untuk menggugah kesadaran publik mengenai HAM yang merupakan elemen fundamental martabat ras manusia (*human dignity*). Di hari yang sama juga digelar aksi damai menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap wartawan Udin.

Dalam rangka pemajuan HAM (*promoting human rights*) di level diskursif (wacana) di gelar Lomba Debat tingkat Regional Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2014. Peserta debat merupakan siswa-siswa Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. Pemajuan HAM pada tataran pengembangan sudut pandang dan gagasan dalam melihat isu-isu aktual HAM menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.

Hal baru dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah digelarnya lomba fotografi tingkat Nasional. Tujuan lomba adalah mengajak warga negara

Indonesia untuk berpartisipasi menampilkan potret persoalan pemenuhan HAM di berbagai tempat di Indonesia. Ratusan partisipan tercatat ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Semua karya fotografi yang masuk, diseleksi untuk kemudian ditampilkan dalam pameran Fotografi dan lukisan bertajuk “Wajah HAM Indonesia”. Pameran Fotografi dan lukisan yang digelar pada tanggal 16 Desember 2014 menjadi potret HAM Indonesia, bahwa sesungguhnya perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM di Indonesia masih menyisahkan banyak masalah. Di hari yang sama dengan pelaksanaan Pameran Foto, juga digelar Konser musik bertemakan kemanusiaan sekaligus menjadi acara penutup dari rangkaian acara Pekan Hak Asasi Manusia.

Jadi, dalam cuplikan empat tahun pelaksanaan Pekan HAM di atas, terlaksana beberapa kegiatan dalam Proyek Pekan HAM. Kegiatan tersebut adalah: 1) Pameran Foto dan Lukisan pada 2012 dan 2013, 2) pemutaran dan diskusi film pada 2012 dan 2012, 3) Seminar Hak Asasi Manusia pada 2012 dan 2014, 4) Bakti Sosial dan Pendidikan HAM bagi Anak-anak Panti Asuhan pada 2012 dan 2013, 5) Donor darah, pada 2013 dan 2014, 6) Konser musik kemanusiaan dalam 3 kali Pekan HAM, 7) Kampanye Pendidikan HAM pada tahun 2013, 8) Lomba foto kemanusiaan pada 2014, 9) Lomba debat pada 2014, dan 10) Unjuk Rasa Damai dalam tiga tahun Pekan HAM, plus pembagian 1000 bunga dalam rangka Peringatan Hari HAM Internasional pada 2014.

Evaluasi

Evaluasi program secara sederhana ditujukan untuk menilai capaian kerja serta bagaimana menyempurnakan program selanjutnya. Keberhasilan program dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan capaian program yang diperinci dengan indikator keberhasilan program. Secara umum, tujuan pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia

adalah sebagai instrument untuk membangun kepedulian antar sesama ras manusia dan kesadaran akan pentingnya HAM sebagai hak dasar manusia, sehingga indikator sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan proyek Pekan Hak Asasi Manusia adalah seberapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan dan seberapa besar posisi tawar program untuk membuat gerakan penyadaran akan pentingnya HAM.

Ada 2 bentuk evaluasi yang digunakan pada pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia, yaitu *formative evaluation* dan *summative evaluation*. *Formative evaluation* merupakan penilaian yang dilakukan saat program masih atau sedang berjalan guna meningkatkan kinerja program. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan jadwal sehingga tujuan dapat tercapai tepat waktu. Evaluasi seperti ini rutin diadakan, setiap sore pada hari pelaksanaan proyek, biasanya dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok antar pelaksana program.

Evaluasi yang kedua adalah *summative evaluation*, yaitu evaluasi di akhir program untuk memastikan bahwa program yang dijalankan berhasil sesuai tujuan program. Jika alat ukur untuk menilai keberhasilan adalah seberapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan, maka proyek ini dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan, seperti: mahasiswa, *Indonesian Legal Aid and Human Rights Assosiation*, Seniman, Komunitas Fotografi. Panti asuhan, *Indonesian Red Cross Society*, dan media Massa.

Bahkan secara kuantitatif, jumlah peserta dalam beberapa program, dari pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia tahun 2012 sampai 2014 mencatat angka yang signifikan bila dibandingkan dengan kegiatan lain di tempat tempat yang sama. Sebagai contoh: pelaksanaan

konser amal bertajuk “*Music for Humanity*” pada hari Jumat 9 Desember 2012 berhasil menghadirkan peserta sebanyak 210 orang mahasiswa. Kegiatan donor darah yang dilakukan tanggal 04 Desember 2013 diikuti oleh 95 orang pendonor. Kegiatan lomba fotografi pada tahun 2014 diikuti oleh 90 orang fotografer dari seluruh Indonesia, pameran Fotografi dan lukisan bertajuk “Wajah HAM Indonesia” pada tanggal 16 Desember 2014 dihadiri oleh 251 orang, dan seminar HAM pada tanggal 05 Desember 2014 dihadiri oleh 310 orang. Keberhasilan lain juga dapat dilihat dari hasil kuantitatif melalui aksi solidaritas dan pembagian bunga yang rutin dilakukan bertepatan dengan *Human Rights Day* yang secara internasional di peringati tanggal 10 Desember.

Para pihak yang terlibat

HAM kini menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara politik dan ekonomi maupun sosial dan budaya, baik dalam konteks nasional maupun global. Keterlibatan semua pihak dalam gerakan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM selayaknya dilakukan secara komprehensif dalam berbagai level gerakan, utamanya di level diskursif (wacana), di aras politik, dan di wilayah hukum. Masing-masing level memberikan sumbangsih terhadap pemajuan HAM (*promoting human rights*). Hal ini tentunya menjadikan proyek Pekan Hak Asasi Manusia sebagai wahana bagi semua pihak untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

Proyek Pekan Hak Asasi Manusia tidak dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa atau pun diserahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Pelaksanaan progam proyek Pekan Hak Asasi Manusia bekerjasama dan melibatkan pemerintah daerah dan *stakeholder* yang yang memiliki

keterkaitan dan kepentingan secara langsung terhadap perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM, misalnya: *Indonesian Legal Aid and Human Rights Assosiation*, Seniman, Komunitas Fotografi. Panti asuhan, *Indonesian Red Cross Society*, dan media Massa. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, hal ini sangat mendorong keberhasilan Proyek Pekan Hak Asasi Manusia.

Disain Dampak bagi Penanaman Nilai-nilai Kemanusiaan

Proyek Pendidikan HAM didisain untuk menghasilkan dampak signifikan bagi penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Promosi HAM melalui Proyek HAM diharapkan dapat menjadi media pembelajaran untuk memperkuat tumbuhnya nilai-nilai yang mendorong dan memberikan keyakinan kepada peserta untuk bersikap dan bertindak secara konstruktif bagi penghormatan kepada derajat kemanusiaan yang setinggi-tingginya.

Meminjam perspektif Frankl, penanaman nilai-nilai kemanusiaan didisain melalui tiga proses utama:

1. *Creation*/karya. Kegiatan-kegiatan dalam Proyek Pekan HAM didisain untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan melalui proses kreatif. Aktivitas-aktivitas di dalam Pekan HAM akan menumbuhkan dan memperkuat tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan seperti menghasilkan karya fotografi, menyanyikan lagu-lagu kemanusiaan, mengorganisasi kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan sebagainya.
2. *Experience*/pengalaman langsung. Pekan HAM didisain untuk membiasakan para peserta berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman yang menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Seminar dan diskusi publik tentang Hak Asasi Manusia tidak saja

meluaskan wawasan mahasiswa tentang HAM, namun juga menanamkan nilai-nilai HAM dalam interaksi dengan para aktivis HAM dan korban pelanggaran HAM seperti keluarga korban penghilangan paksa. Kegiatan donor darah, misalnya, memberikan pengalaman tentang bagaimana membangun kepedulian pada isu-isu kemanusiaan.

3. *Attitude/tindakan* dan perilaku nyata. Beberapa kegiatan dalam proyek Pekan HAM didisain untuk mendorong peserta memilih tindakan dan perilaku yang berdasar kepada nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, ketika mahasiswa membagikan 1000 bunga kepada masyarakat sebagai bentuk respek, mereka sesungguhnya sedang mempraktikkan perilaku peace, love, dan non-violence. Begitu pula ketika mereka mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan, mereka sedang melakukan tindakan yang benar kepada sesama umat manusia.

Dengan memberikan penanaman nilai-nilai melalui creative, experiential, dan attitudinal processes, diharapkan mahasiswa dan peserta Pekan HAM pada umumnya dapat membangun nilai-nilai kemanusiaan berupa kebenaran, perilaku baik, kedamaian, cinta, dan anti-kekerasan. Jika nilai-nilai tersebut sudah tertanam, maka buahnya adalah akan tercipta masyarakat demokratis yang damai dan setara serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penutup

Simpulan

Proyek Pekan HAM merupakan ikhtiar akademis untuk menghadirkan inovasi pembelajaran yang memberikan ruang bagi partisipasi peserta didik, berpusat pada peserta didik, dan

mengakomodasi keterlibatan publik dan multi sektor. Secara umum, melalui evaluasi yang dilakukan bersama, inovasi ini terbukti merupakan terobosan yang menyenangkan sekaligus memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari pengalaman-pengalaman belajar yang bersifat klasikal semata.

Keterbatasan dan Kelemahan

Namun demikian, pelaksanaan Pekan HAM berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan juga mengandung beberapa keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan dan kelemahan tersebut dapat diurai sebagai berikut: Pertama, pemilihan kegiatan dalam Pekan HAM. Dalam pandangan peserta Pekan HAM dalam studi ini, tidak semua kegiatan dapat secara spesifik dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Paling tidak, tiga kegiatan tidak disebut secara khusus dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu seminar nasional, lomba foto, dan lomba debat.

Kedua, kesulitan manajemen waktu. Kegiatan Pekan HAM sebagai salah satu metode pendidikan untuk penanaman nilai-nilai kemanusiaan selama ini selalu diselenggarakan dalam rentang waktu antara tujuh sampai sepuluh hari, dengan kegiatan rata-rata enam kegiatan. Banyaknya kegiatan tersebut membutuhkan manajemen waktu yang baik, sementara di sisi lain kegiatan Pekan HAM tidak dapat meliburkan kegiatan akademik. Sehingga di samping menyelenggarakan proyek Pekan HAM, peserta juga harus mengikuti perkuliahan mata kuliah-mata kuliah yang lain dalam semester yang sedang berjalan.

Ketiga, biaya besar. Kegiatan Pekan HAM dengan sub-sub kegiatan yang banyak membutuhkan pembiayaan yang relatif besar. Selama ini, kegiatan didukung oleh anggaran negara melalui DIPA

Fakultas Ilmu Sosial serta urunan dosen dan mahasiswa. Beberapa kegiatan didukung juga oleh kontribusi peserta lomba, yaitu kegiatan lomba debat dan lomba fotografi. Di luar itu, juga ada dukungan sponsor, meskipun tidak signifikan dan tidak pernah dalam bentuk dana segar atau uang *cash*. Dalam tingkatan tertentu dan bagi beberapa mahasiswa, kegiatan Pekan HAM relatif memberatkan dari sisi biaya penyelenggaraan kegiatan.

Referensi

- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Eko Riyadi (ed.). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: PusHAM UII.
- International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966.
- Khan, Irine. 2005. "Human rights and civil society: the last frontier". *Public Lecture*. London School of Economics. 19 January 2005.
- Kompas. 18 Agustus 2010.
- Millon, Theodore. 2004. *Masters of Mind: Exploring the Story of Mental Illness from the Ancient Times to the New Millenium*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Mulyana, Rohmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Muzaffar, Chandra, dkk. 2007. *Human`s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM* (terj.) Yogyakarta: Pilar Media.

Parnell, Chris. 2014. *Human Values*.
<http://www.saieditor.com/falco/values.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014.

Preamble (pembukaan) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Rafael Edy Bosko, "Prinsip-prinsip HAM", materi dalam *Modul Penataran Hak Asasi Manusia Untuk Guru*, dilaksanakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, di Bogor, tanggal 5-8 Oktober 2004.

Rukiyati, et.al. 2011. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press.

Setara Institute. 2013. "Laporan Indeks Kinerja HAM Indonesia tahun 2013". *Press Release*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations. 1993. *Vienna Declaration and Programme of Action*, adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993.

_____ 1996. *Resolution of General Election No. 51/104. United Nations Decade for Human Rights Education and public information activities in the field of human rights*. 12 Desember 1996.

_____ 1997. *United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004) and public information activities in the field of human rights*. A/52/469/Add.1, 20 October 1997.

MOUNTAIN GEOSPATIAL MODELLING: **INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PENDAKIAN DAN** **KEGIATAN DI ALAM BEBAS**

Dyah Respati Suryo Sumunar

Pendakian Gunung merupakan salah satu aktivitas perjalanan di alam bebas yang bersifat menyenangkan dan memiliki banyak tujuan, antara lain sebagai sarana olahraga, media pembelajaran dan pelatihan, hingga untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, ditinjau dari sifatnya aktivitas pendakian gunung merupakan kegiatan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dapat menyebabkan cacat hingga kematian. Secara umum, kecelakaan dalam pendakian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dari dalam diri pendaki (internal) dan dari faktor alam (eksternal).

Risiko kecelakaan dari faktor eksternal merupakan bahaya yang muncul dari luar diri pendaki atau kondisi alam. Misalnya, akibat dari pengaruh alam seperti siklus cuaca pegunungan yang sangat dinamis dan sering kali muncul sebagai cuaca ekstrem yang mendadak pada suatu daerah pegunungan, medan berbahaya, hingga kasus sumber air yang kurang keberadaannya pada suatu daerah pendakian, sehingga menimbulkan kegiatan pendakian tidak bisa dilakukan dengan baik dan aman. Risiko dari faktor eksternal ini cenderung sulit untuk dikurangi (Sucipto, 2009), sedangkan, risiko atau bahaya kecelakaan dari faktor internal adalah bahaya yang bersumber dari dalam diri seorang pendaki. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kegiatan persiapan atau pra-lapangan. Selain kondisi fisik pendaki, kondisi pengetahuan pendaki sangat penting dalam menentukan kegiatan pendakian yang aman, yaitu kemampuan untuk menguasai medan, pengalaman yang cukup, serta pengetahuan yang memadai.

Terkait dengan penguasaan medan, seorang pendaki harus mengetahui data informasi mengenai lokasi, jalur, medan, serta cuaca dan keahlian khusus meliputi perencanaan, persiapan perlengkapan dan alat dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan dalam aspek khusus yang disebut sebagai manajemen perjalanan.

Manajemen Perjalanan

Perencanaan perjalanan di alam bebas sangat berbeda dengan perencanaan perjalanan biasa. Banyak hal yang harus diperhatikan agar perjalanan dapat mencapai hasil yang baik dan mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Kunci sukses perencanaan perjalanan adalah memulai perencanaan perjalanan sedini mungkin dengan meliputi beberapa hal, yaitu :

Persiapan Perjalanan

1. Pemilihan Lokasi

Perjalanan bisa dikatakan berhasil jika mencapai daerah yang menjadi tujuan perjalanan tersebut. Maka perlu untuk menentukan dan memperhatikan apa yang menjadi tujuan perjalanan atau pendakian. Perjalanan pendakian yang bersifat petualangan dan rekreasi biasanya menjadikan puncak gunung sebagai tujuan perjalanannya. Jika pendakian dengan sifat ini dilakukan di daerah pegunungan yang landai dan *track* yang pendek maka akan mudah dalam melakukan manajemen pendakian. Akan tetapi, manajemen akan sangat berbeda terkait pemilihan lokasi yang memiliki medan yang terjal dan *track* yang panjang, sehingga pemilihan lokasi akan sangat berpengaruh sebagai persiapan perjalanan yang pertama, karena akan mempengaruhi semua perencanaan perjalanan selanjutnya.

2. Pengumpulan Data dan Studi Pustaka

Setelah mengetahui tujuan dalam melakukan aktivitas pendakian, maka hal yang perlu dilakukan berikutnya adalah pengumpulan data dan mempelajarinya. Hal-hal yang perlu kita ketahui dan dapatkan antara lain :

- a. Peta, dengan adanya peta kita bisa memperkirakan lamanya perjalanan yang akan berpengaruh pada banyak aspek-aspek lain dalam persiapan perjalanan, meliputi aspek logistik, peralatan, hingga keuangan.
- b. Keadaan Daerah yang dituju, informasi tentang kebudayaan dan adat kebiasaan penduduk setempat, kemudian keamanan daerah tersebut serta kondisi iklim dan medannya dirasa penting untuk diketahui sebelum melakukan pendakian sehingga proses persiapan hingga pulang kembali tidak menemui kendala. Selain itu, terkait dengan daerah yang dituju, penting juga untuk mengetahui tata cara dan syarat perizinan mendaki di daerah tersebut. Saat ini sebagian besar gunung di Jawa sudah dikelola oleh Taman Nasional, sehingga informasi mengenai perizinan dan biaya retribusi masuk termasuk asuransi sudah sistematis dan dapat didapatkan dengan mudah di media internet.
- c. Transportasi, kita perlu mempelajari jalur transportasi yang akan digunakan untuk mencapai daerah tersebut berikut jadwal dan alternatifnya. Selain itu pertimbangan mengenai waktu tempuh, jenis transportasi, dan biaya juga perlu untuk diketahui dalam tahap persiapan.

3. Latihan Fisik

Latihan fisik digunakan untuk mempersiapkan fisik selama perjalanan, mulai dari tahap menuju daerah pendakian hingga dalam menghadapi medan berat dan kondisi pegunungan yang mungkin membutuhkan kondisi fisik yang kuat. Jika perlu, kita dapat berkonsultasi dengan ahli olahraga untuk menentukan jenis latihan fisik seperti apa yang diperlukan dan sesuai dengan perjalanan yang akan kita tempuh. Tips :

- a. Untuk mendapatkan daya tahan tubuh atau stamina, dapat dilakukan dengan jogging dengan sistematika tertentu untuk melatih kinerja jantung dan paru-paru. Latihan ini disebut sebagai *endurance training*. Contoh latihan *endurance training* antara lain dengan melakukan jogging 2 kali putaran dengan tempo kecepatan yang pelan sebagai pemanasan, kemudian istirahat. Sesi inti dengan melakukan jogging mengitari lapangan dengan target sebanyak 5 kali putaran dalam waktu 8 menit (sesuaikan dengan menambah jumlah setiap kali latihan, misalnya sudah didapatkan tubuh yang prima dapat mencoba latihan 10 kali putaran lapangan dengan waktu 13 menit).
- b. Jika berkelompok, dapat juga melakukan latihan jogging berbaris sesama tim, kemudian seseorang yang paling belakang dapat lari *sprint* hingga mencapai ke barisan paling depan. Diulangi hingga 5 kali putaran (menyesuaikan kondisi fisik).
- c. Tips otot lokal mendaki, dapat dilakukan dengan gerakan *squat*, kemudian membawa beban, lompat kijang, dan lompat vertikal setinggi-tingginya. Selain itu, untuk melatih betis dapat dengan melakukan latihan berjalan dengan posisi kaki jinjit dan naik turun tangga.

d. Dalam mendaki, biasanya semua otot akan terpakai dengan aktivitas teknis yang digunakan, misalnya untuk memakai carier dan lain sebagainya. Otot lokal bagian atas juga perlu untuk dilatih yaitu dengan *push up* dan *planck*.

4. Kenali Bahaya Setempat

Sebagai seorang pendaki yang menerapkan manajemen pendakian yang aman, seorang pendaki sudah pasti mengerti kalau dirinya akan melewati suatu daerah terpencil dan kondisi hutan yang lebat. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mengenali bahaya potensial yang mungkin muncul sehingga menghindarkan kegiatan pendakian dari kecelakaan dan menyebabkan kegagalan dari tujuan pendakian itu sendiri. Bahaya potensial dapat berasal dari hewan liar, alam, dan bisa berasal dari jenis atau bahan makanan setempat yang menyebabkan alergi atau tidak cocok dengan pencernaan kita.

5. Jumlah Personil dan Lama Kegiatan

Hal terakhir yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan sebelum melakukan pendakian adalah jumlah personil dan lama kegiatan yang akan kita lakukan. Perencanaan terkait jumlah personil serta lama perjalanan yang akan ditempuh biasanya tergantung pada tujuan mendaki.

Pendakian dengan tujuan olahraga dan petualangan biasanya membutuhkan waktu lebih pendek dan peralatan yang sedikit daripada pendakian dengan tujuan semi ilmiah dan ilmiah dan membutuhkan peralatan tambahan misalnya instrumen dan alat-alat pengukuran dan observasi lapangan yang lebih bervariasi.

Selain itu, pada tahap ini akan diketahui permasalahan yang harus diselesaikan yang berhubungan dengan kebutuhan logistik dan nutrisi di

lapangan, yaitu jumlah bekal yang harus memperhitungkan jumlah personil dan lama perjalanan.

Outdoor Leadership

Leadership atau kepemimpinan bukanlah bakat yang diturunkan, tapi seni yang dapat dipelajari untuk mencapai tujuan secara bersama-sama dengan kooperatif. *Skill* ini dapat dibangun dengan pengalaman atau jam terbang pendakian yang banyak, keterampilan, dan melatihnya dalam dirinya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari melalui simulasi maupun metode lainnya. Kepemimpinan di alam bebas merupakan hal yang pokok bagi satu regu pendaki baik untuk tujuan yang serius seperti ekspedisi hingga untuk perjalanan rekreasi, sehingga keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan perjalanan di alam bebas. Hal tersebut dikarenakan di alam bebas harus dapat menentukan suatu keputusan untuk menghadapi rintangan yang mungkin muncul di lapangan.

Suatu tim perjalanan dengan *outdoor leadership* akan membentuk keteraturan dalam seluruh aspek organisasi perjalanan. Antara lain tim dapat diorganisasikan dan dapat dibagi kedalam sub-sub tugasnya dalam suatu kelompok. Misalnya, sub bagian pembaca peta, sub bagian logistik dan peralatan, dan lain sebagainya.

Berikut merupakan kemampuan yang perlu selalu dibina, yaitu *competence*, *self-awareness*, penilaian dan kemampuan memutuskan, toleransi pada kemalangan dan hal yang tak pasti, *expedition behaviour*, komunikasi.

1. Competence

Pemimpin dari tim perjalanan tidak harus merupakan seorang yang ahli di bidang panjat tebing, peta kompas atau bidang

tertentu lainnya. Seseorang yang kompeten dengan teknik pengorganisasian, akan lebih efektif jika dijadikan pemimpin.

2. *Self-Awareness*

Tidak ada seseorang yang secara sempurna memiliki pandangan dan situasi akan dirinya. Akan tetapi, dengan melakukan mawas diri dia lebih bisa melihat dan menilai sesuatu yang benar. Mawas diri seorang pemimpin mempunyai prasangka, ketakutan, kekuatan, dan kemampuan mempelajari dan juga bagaimana semua kualitas tersebut mempengaruhi keputusannya.

3. Penilaian dan Kemampuan Memutuskan

Satu dari sekian banyak aspek kepemimpinan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang berkualitas, keputusan yang berdasarkan pada penilaian yang baik, yang bisa dipakai serta aman dan bisa melindungi lingkungan dan juga bisa menyukseskan tujuan perjalanan.

4. Toleransi pada Kemalangan dan Hal yang Tidak Pasti

Mudah sekali menjadi pemimpin saat berjalan melewati rute yang baik dengan rute yang baik dengan matahari yang cerah, tim dalam kondisi baik dan penuh energi dan dalam keadaan sehat. Namun pada saat salah satu anggota tim ada yang tersesat di tengah hutan, atau ada yang mengalami kelelahan atau bahkan cedera, bahkan dari faktor eksternal ternyata terjadi cuaca ekstrem dan mempengaruhi mental dan kondisi tim. Kemampuan memimpin seorang leader tim akan benar-benar diuji. Pada keadaan seperti inilah kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan. Saat orang atau anggota tim merasa terancam dan tidak merasa nyaman, secara alamiah mereka akan membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Definisi kepemimpinan yang dimaksud

dalam kasus ini adalah seorang pemimpin yang dapat mengatur ulang rencana-rencana yang telah dipersiapkan dengan rencana cadangan menyesuaikan dengan kondisi tim, tahu jalan dan cara, dan bergerak bersama anggota tim yang kesulitan atau mengalami kepayahan.

5. *Expedition Behavior*

Aspek ini erat hubungannya dengan kemampuan dalam mendesain atau merencanakan sebuah perjalanan dengan baik dan terperinci.

6. Komunikasi

Pemimpin yang baik adalah yang dapat berperan sebagai komunikator yang baik juga, untuk memulai komunikasi yang baik, dan dapat memberi tahu apa yang ia harapkan dari timnya serta sebaliknya apa yang diharapkan tim dari dirinya. Pada aspek ini lebih pada cara mengkomunikasikan atau menyampaikan maksud dengan cara sebaik-baiknya.

Tips *Self-Leadership* :

1. Bertanggungjawablah pada diri sendiri
2. Bertanggungjawablah pada apa yang telah dipelajari
3. Tahu risiko perkataan
4. Miliki apa yang kita katakan
5. Jika perlu melakukan sesuatu, lakukan!
6. Jika tidak mengerti, tanyakan
7. Nikmati apa yang ada di sekeliling kita
8. Peliharalah rasa humor
9. Bantulah yang lain untuk belajar dan sukses
10. Berbaik hati
11. Dorong semangat kita

12. Terimalah kesalahan kita
13. Jika ada hal yang tidak aman untuk tim, jangan lakukan
14. Partisipasi dan Observasi
15. Belajarlah dari pengalaman

Pengenalan Kondisi Medan Pada Tahap Persiapan Mendaki Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pengenalan kondisi medan suatu gunung sebelum mendaki merupakan suatu hal yang memang perlu untuk dilakukan dalam kaitannya mengantisipasi terjadinya kecelakaan, yaitu melalui persiapan-persiapan yang berkaitan dengan manajemen nutrisi, mengetahui estimasi lamanya pendakian, tingkat kesulitan medan, hingga keberadaan mata air untuk menunjang kegiatan selama lapangan. Salah satu hal yang perlu diketahui dalam suatu persiapan pendakian adalah informasi medan, baik itu untuk persiapan pendakian yang sifatnya untuk bersenang-senang maupun pada rangkaian tatanan pendakian yang bersifat lebih serius berupa ekspedisi maupun ekspedisi ilmiah sekalipun. Kesulitan-kesulitan mendapatkan informasi medan pokok dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis.

Perkembangan panjang gelombang teknologi satelit yang sudah demikian pesat dapat menunjang pemenuhan kebutuhan informasi medan yang murah, akurat, dan meliputi daerah yang luas. Bahkan pembaharuan yang dapat dilakukan setiap periode yang cepat setiap bulan bahkan setiap minggu. Informasi medan minimal untuk perencanaan perjalanan biasanya terdiri dari peta kontur, namun demikian citra satelit dapat memperoleh lebih dari peta kontur pada satu bidang yang sama. Persiapan pemenuhan informasi medan yang

memanfaatkan teknologi satelit penginderaan jauh akan mendapatkan data lebih lengkap terkait relief gunung, yaitu selain peta kontur, mereka akan mendapatkan informasi tingkat kemiringan lereng yang disajikan dalam satuan persen maupun derajat, tingkat kelerengan, hingga arah hadap lereng.

Pengembangan selain pada relief, teknologi penginderaan jauh untuk manajemen pendakian dapat pula memberikan informasi yang akurat terkait persebaran suhu permukaan dan kondisi vegetasi yang berguna untuk mengatur dan memilih peralatan apa yang hendak dibawa. Sebagai contoh kondisi medan yang memiliki kontur agak curam ditambah dengan kondisi medan berpasir yang ditunjukkan vegetasi tipis memberikan kita informasi untuk memutuskan membawa perbekalan *trekking pole* dan *geiter*.

Langkah per langkah dalam mendapatkan peta perjalanan secara mandiri dalam hal persiapan pendakian di suatu gunung atau di suatu daerah yang berkaitan dengan variabel terjadinya kecelakaan, diantaranya kondisi geomorfologis, kondisi klimatologis, dan kondisi biogeografis.

Informasi Geomorfologis dengan Data *Digital Elevation Model*

DEM atau *Digital Elevation Model* telah digunakan secara luas selama kurun waktu 20 tahun terakhir. data DEM secara umum dideskripsikan sebagai data yang memiliki referensi geografis yang bertujuan mendapatkan informasi topografi untuk melakukan pemodelan lingkungan di bumi (Toz & Erdogan 2008). Sependapat dengan pendapat tersebut, Kiyoshi menjelaskan Data DEM dapat mensimulasikan parameter elevasi atau unsur ketinggian yang nyata pada suatu bidang lahan, lereng, dan hadap lereng sehingga banyak dimanfaatkan dalam kegiatan observasi di permukaan bumi.

Lebih lanjut selain banyak dimanfaatkan dalam kegiatan observasi di permukaan bumi, data DEM merupakan salah satu model yang digunakan untuk menggambarkan bentuk topografi permukaan bumi sehingga dapat divisualisasikan kedalam tampilan 3D (tiga dimensi). Lebih lanjut menurut Indarto & Prasetyo (2014) Informasi tentang ketinggian suatu tempat (elevasi) merupakan elemen yang fundamental dari suatu data geospasial dan dapat digunakan pemetaan luas genangan banjir, perencanaan wilayah, perencanaan jaringan jalan, jaringan irigasi, pembuatan peta jaringan sungai, dan lain-lain. DEM selanjutnya dapat diintegrasikan dengan data geospasial lainnya di dalam SIG untuk berbagai keperluan.

Perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan *Digital Elevation Model* (DEM) memungkinkan untuk melakukan pengamatan fenomena alam di permukaan bumi melalui pemodelan spasial. Berkembangnya perangkat lunak SIG sebagai perkembangan sistem penginderaan jarak jauh seperti *ERmapper*, MapInfo (Indharto, 2004).

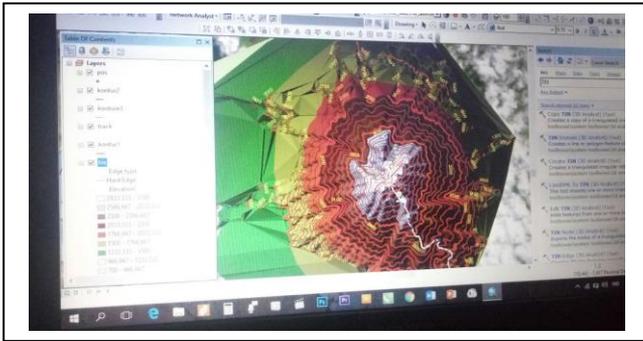
Ada banyak cara untuk memperoleh data DEM, yaitu interferometri SAR (*Synthetic Aperture Radar*) merupakan salah satu algoritma untuk membuat data DEM. Data citra SAR atau citra radar yang digunakan dalam proses interferometri dapat diperoleh dari wahana satelit atau pesawat (Indarto & Faisol, 2009).

Definisi lain, menyatakan bahwa DEM merupakan suatu file atau database yang menampung titik-titik ketinggian dari suatu permukaan (Jensen, 2007). Selanjutnya, Jensen (2007), membedakan DEM menjadi dua, yaitu: DSM dan DTM.

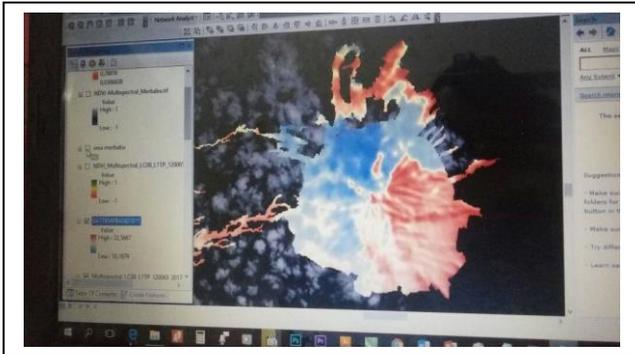
1. DSM (*Digital Surface Model*), yang memuat informasi ketinggian semua fitur di permukaan bumi meliputi: vegetasi, gedung-gedung dan fitur lainnya.
2. DTM (*Digital Terrain Model*), hanya memuat informasi ketinggian permukaan tanah (*bareearth surface*) tanpa terpengaruh oleh vegetasi atau fitur buatan manusia lainnya.

Proses untuk menghasilkan DEM dengan teknik ini dapat dengan *stereoplotting*, teknik ini mencakup wilayah yang lebih luas dan ketelitian spasial yang lebih tinggi, sehingga permukaan bumi yang dimaksud dapat digambarkan dengan lebih detail. Teknik stereo menggunakan citra satelit juga sudah umum digunakan untuk memproduksi DEM. Beberapa satelit dengan ketelitian spasial tinggi (misalnya: GeoEye-1, WorldView-1, WorldView-2, Pléiades 1A, Pléiades 1B dan IKONOS) mampu menghasilkan DEM untuk lokasi tertentu dengan ketelitian spasial tinggi, menggunakan teknik citra satelit stereo (*Stereo Satellite Imagery*). Satelit lain (misalnya: SPOT-6, ALOS, dan ASTER) mampu menghasilkan DEM dengan ketelitian sedang. ASTER GDEM2 merupakan contoh produk DEM yang mencakup hampir seluruh permukaan bumi. ASTER GDEM2 dikembangkan bersama oleh METI (*Ministry of Economy, Trade, and Industry*) milik Jepang dan *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) milik Amerika Serikat (Indarto & Prasetyo, 2014). Hal yang harus dipersiapkan adalah citra Digital Elevation Model (DEM), saat ini keberadaannya gratis di media internet dan dapat diunduh untuk semua kalangan via USGS di laman <http://www.earthexplorer>.

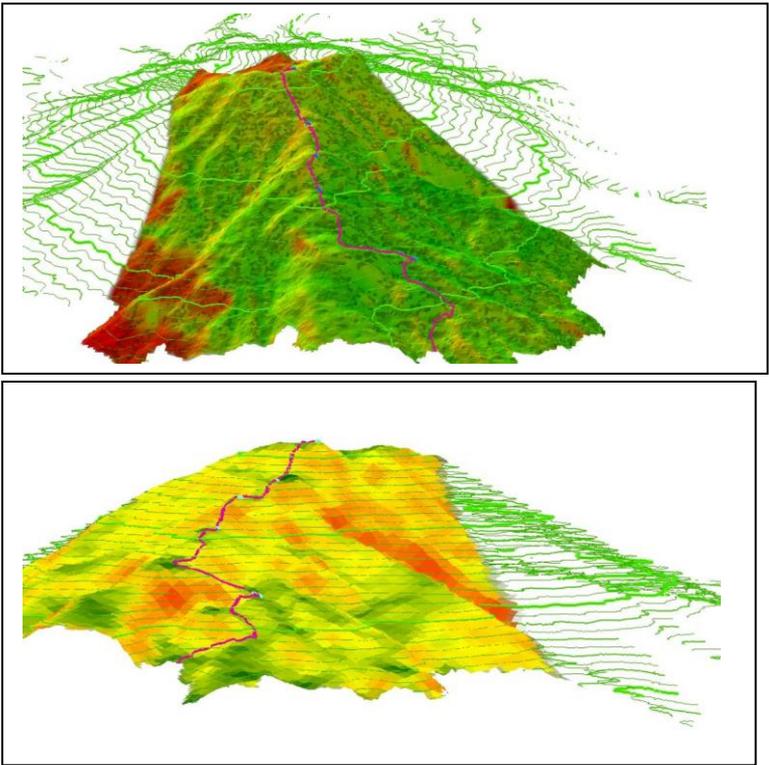
Beberapa peta tematik yang berguna pada aspek persiapan pada manajemen pendakian, antara lain adalah peta geomorfologis yang meliputi tingkat kelerengan, arah hadap lereng, dan kemiringan lereng.



Gambar 1. *Geospatial Modelling* dengan program ArcGIS 10.3

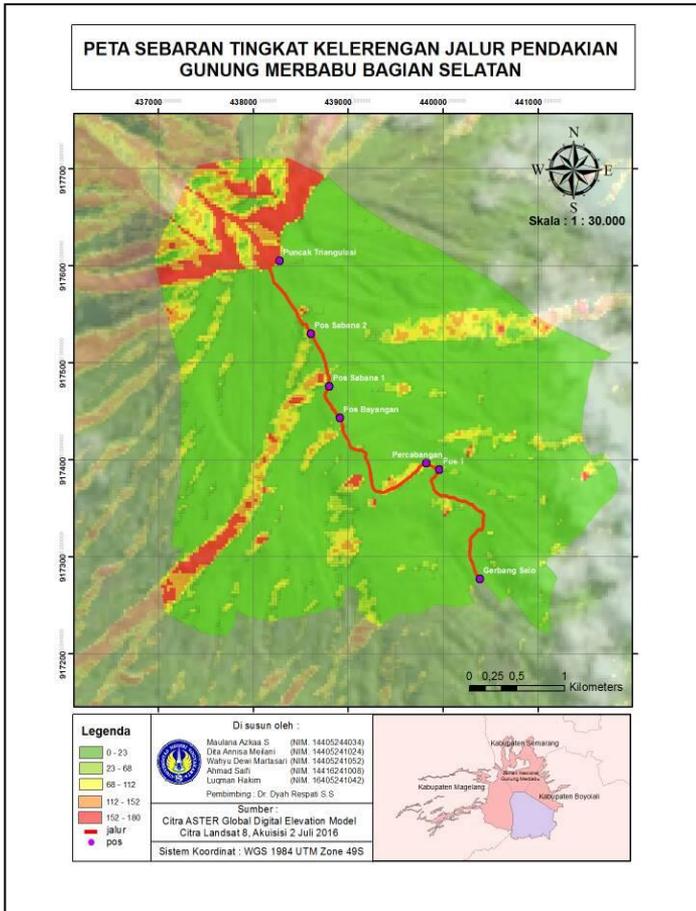


Gambar 2. *Geospatial Modelling* dengan tampilan citra multispektral dengan program ArcGIS 10.3

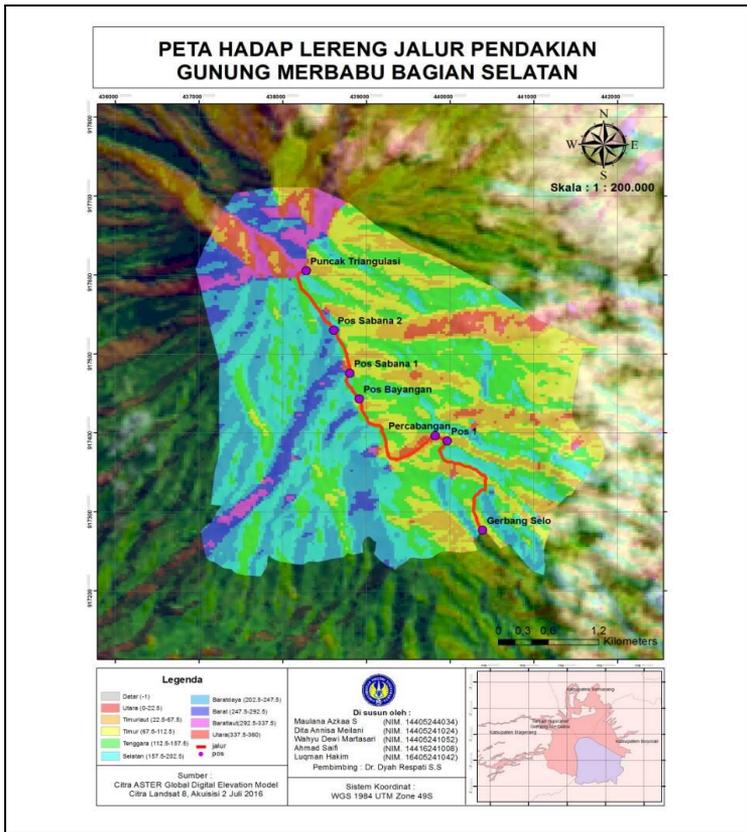


Gambar 3 dan 4. Contoh Hasil Penggunaan Sistem Informasi Geografis dan Digital Elevation Model

Gambar peta di atas menunjukkan salah satu jalur pendakian gunung Merbabu hasil dari kombinasi berbagai aspek pengukuran di lapangan dan aplikasi SIG/penginderaan jauh. Gambar tersebut menunjukkan hasil dari pengolahan data atribut yang berasal dari lapangan kemudian diolah dengan *Digital Elevation Model*. Hasil yang diperoleh berupa penggambaran kondisi lapangan dengan bentuk 3 dimensi.



Gambar 5 . Peta Sebaran Tingkat Kelerenghan Jalur Pendakian Gunung Merbabu Bagian Selatan



Gambar 6. Peta Hadap Lereng Jalur Pendakian Gunung Merbabu Bagian Selatan

Penutup

Pendakian yang berisiko tinggi hendaklah diikuti juga dengan manajemen perjalanan yang baik untuk meminimalisasi setiap risiko kecelakaan pendakian. Pengenalan medan dan lingkungan melalui referensi geospasial dengan peta-peta tematik sangat penting dan diperlukan. Selain itu, perlu juga untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku di daerah tempat pendakian. Memahami dan mematuhi beberapa mitos di daerah pendakian juga tidak salah karena pasti ada alasan tertentu sehingga aturan tersebut dimunculkan. Kemudian yang

harus diperhatikan adalah berkaitan dengan moralitas seperti mematuhi leader perjalanan dan juga tidak egois ketika sedang melakukan pendakian. Bekerja samalah dengan semua anggota dan orang-orang di sekitar untuk mencapai puncak yang dinantikan. Kesabaran dan usaha keras bersama-sama meningkatkan semangat dan kepercayaan diri akan meminimalisir setiap risiko perjalanan. Sikap saling membantu terhadap sesama pendaki juga harus dilakukan. Kemudian perhatian terhadap pertanda alam agar terhindar dari kecelakaan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Lalu cintailah alam dengan tidak membuang sampah yang telah dibawa secara sembarang. Namun, bawa kembali sampah tersebut untuk diletakkan di tempat yang semestinya maupun di daur ulang. *“Mendaki bukan hanya soal mencapai puncak tertinggi tapi juga tentang keselamatan dan kenyamanan perjalanan”*

Referensi

- Indarto, Prasetyo.D. R., 2014. “Pembuatan Digital Elevation Model Resolusi 10m dari Peta RBI dan Survei GPS dengan Algoritma ANUDEM”. *Jurnal Keteknikaan Pertanian*. Volume 2 No. 1 Halaman 55 – 63.
- Indarto dan Faisol A., 2009. “Identifikasi dan Klasifikasi Peruntukan Lahan Menggunakan Citra Aster”. *Jurnal Media Teknik Sipil*, Volume IX.
- Indharto, Yopi. 2004. “Operator Hidrologi Untuk Penyusunan Sistem Informasi Kebutuhan Air Tanaman”. *Jurnal Pertanian* Vol. 14 No. 1.
- Jensen, J. R., 2007. *“Remote Sensing of the Environment: An earth resource perspective. 2ed Prentice-Hall series in Geographic Information Science, USA.*
- Photographs. International Journal of Photogrammetry, Remote Sensing, and Spatial Information Sciences*”. Vol XXXVII : 775 – 780.

- Silva Mapalagama. Unknown. *Buku Panduan Gladian*. Silva Mapalagama Fakultas Kehutanan UGM: Yogyakarta.
- Tim MPA Mahameru. 2008. *Materi Dasar Kepecintaalaman*. FISE UNY: Yogyakarta.
- Toz, G., Erdogan, M. 2008. *DEM (Digital Elevation Model) Production and Accuracy Modelling of DEMS from 1:35.000 Scale Aerial*

IMPLEMENTASI STRATEGI “PETRUK” SEBAGAI UPAYA PENGUATAN NILAI KEARIFAN LOKAL DI SEKOLAH BERBASIS BUDAYA

Agustina Tri Wijayanti

Indonesia sebagai bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Kondisi keberagaman masyarakat dan budaya Indonesia, secara positif menggambarkan kekayaan potensi sebuah masyarakat yang pluralis, namun secara negatif orang merasa tidak nyaman karena tidak saling mengenal budaya orang lain. Setiap etnik atau ras cenderung mempunyai semangat dan ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain. Terjadinya tidak saling mengenal identitas budaya orang lain, bisa mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan. Prasangka juga diarahkan kepada sebuah kelompok secara keseluruhan, atau kepada seseorang hanya karena itu adalah anggota kelompok tertentu. Dengan demikian, bentuk prasangka memiliki potensi dalam mengkambinghitamkan orang lain melalui stereotype, diskriminasi dan penciptaan jarak sosial. Maka tidaklah heran apabila para masyarakat yang plural hidup dengan keberagaman budaya, dimana setiap perbedaan dapat menimbulkan dampak positif dan juga negatif.

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan kini dapat kita lihat seperti munculnya pertikaian antar warga yang berakhir dengan tewasnya kepala suku, perkelahian antar warga, demo mahasiswa

dengan aparat yang berakir ricuh, hingga kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa-siswanya, dan baru-baru ini terjadi perkelahian yang dilakukan beberapa siswa putri di dalam sekolah. Fakta-fakta diatas mengindikasikan bahwa budaya kekerasan sudah mulai menyerang masyarakat kita. Yang lebih mengkhawatirkan bahwa budaya kekerasan kini makin berkembang dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu jelas telah merusak jalinan persatuan dalam masyarakat dan tentu saja sudah menurunkan kualitas budaya bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu adanya budaya kekerasan harus segera diatasi dengan jalan menumbuhkan budaya perdamaian.

Hal itu yang kita harapkan, tetapi sampai saat ini yang terjadi pada substansi kurikulum dunia pendidikan di Indonesia masih mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek pendidikan yang efektif sehingga proses humanisasi dalam pendidikan menjadi sesuatu yang jauh dari harapan. Di samping tetap menekankan aspek akademik yang juga sangat esensial adalah penanaman pendidikan nilai-nilai moral dan perdamaian dalam masyarakat. Penanaman pendidikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai alternative pola pembelajaran yang menyeluruh dapat membantu menyiapkan para generasi muda agar mempunyai kemandirian, kecerdasan intelektual, religius, cultural dan sosial yang siap memecahkan segala permasalahan sosial dan konflik dalam masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik dan penuh kedamaian. Implementasi dari pendidikan nilai-nilai kearifan lokal sebaiknya diberikan pada subjek didik lebih dini, hal ini dimaksudkan agar anak mulai dari dasar sudah mulai tertanam nilai-nilai tingkah laku yang baik sehingga mampu berpikir kritis, kreatif dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat.

Dengan kecerdasan intelektual diharapkan siswa mampu mengembangkan berpikir logis-matematis, selain itu siswa diharapkan mempunyai kecakapan emosional yang mencakup pengendalian diri, semangat dan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Hal ini diajarkan dan akan memberikan peluang yang lebih baik dalam memanfaatkan potensi intelektual. Tentu saja kecerdasan kultural juga tidak mungkin dipisahkan dengan kecerdasan intelektual, karena kecerdasan cultural terkait dengan gagasan, konsep dan pemikiran yang meliputi ranah kognisi, perilaku dan produk. Gagasan dan pemikiran dapat di aktualisasikan dalam bentuk ketrampilan dan kecerdasan sosial yang mencakup kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi (kerjasama). Maka dari itu dengan muatan cerdas intelektual, kultural dan sosial, kecerdasan rohani mempunyai kedudukan sangat penting karena berada pada potensi imajinatif kreatif yang memberikan arah yang jelas kemana dan bagaimana imajinatif berpikir kreatif harus diarahkan (Darmiyati, Z. 2008: 109). Pengembangan berbagai kecerdasan secara integrative dapat di implementasikan melalui pendekatan pendidikan nilai-nilai perdamaian. Caranya dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang ditargetkan akan dikembangkan ke dalam proses pembelajaran di setiap mata pelajaran.

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti bermaksud memberikan solusi permasalahan di atas. Dengan subjek didik adalah siswa SMP yang mempunyai berbagai macam karakter dalam belajar, sehingga hal ini memudahkan peneliti untuk menanamkan pendidikan yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya dalam meningkatkan kecerdasan emosional pada diri siswa. Langkah ini juga sebagai upaya untuk memperbaiki pola pembelajaran yang kini telah banyak menekankan pada hasil bukan proses dalam belajar. Maka dari

itu keempat kecerdasan tersebut sudah seharusnya kita tanamkan pada anak didik kita mulai dari sekolah dasar melalui pola pendidikan dengan mengimplementasikan pembelajaran nilai-nilai kearifan lokal.

Penerapan nilai-nilai kearifan lokal pada anak SMP merupakan alasan peneliti dimana siswa di SMP masih pada tahap pencarian karakter dan jati diri sehingga dapat dengan mudah untuk menanamkan sikap tenggang rasa, empati, saling menghargai, menghormati, mampu mengendalikan diri, dan memotivasi diri. Dengan penanaman nilai-nilai kearifan lokal pada siswa SMP berbasis budaya melalui strategi PETRUK diharapkan pengembangan budaya dapat terwujud.

Kearifan lokal

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan demikian, kearifan lokal dapat berarti kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.

Kearifan lokal yang merupakan pandangan hidup dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai “kebijakan setempat” (*local wisdom*), “pengetahuan setempat” (*local knowledge*), atau “kecerdasan setempat” (*local genius*). Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan: agama,

ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka itu, dengan memperhatikan ekosistem (flora, fauna dan mineral) serta sumberdaya manusia yang terdapat pada warga mereka sendiri.

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Keberagaman ini merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi. Kebhinekaan menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (*virtue and wisdom*). Kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya menunjukkan sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan.

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik atau subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 2009: 166). Tiap hasil karya putra Indonesia dari suku-bangsa mana pun asalnya, pokoknya asal khas dan bermutu, sedemikian rupa sehingga sebagian besar orang Indonesia mau dan bisa mengidentifikasi diri dan merasa bangga dengan karya tadi, maka itulah Kebudayaan nasional Indonesia.

Oleh karena itu, apabila ada suatu gaya pakaian wanita yang khas sifatnya tetap indah, sehingga kita bangga mempertontonkannya, maka itulah unsur dalam Kebudayaan Nasional. Soal apakah gaya pakaian itu berasal dari kebudayaan Bugis, Minangkabau, Jawa, Bali, ataupun Maluku, menjadi tidak penting lagi (Koentjaraningrat, 2000: 109-110). Pengakuan budaya lokal sebagai kebudayaan Nasional inilah yang disebut dengan pengakuan atas multikultural.

Indonesia tentu saja konsep nasionalisme erat kaitannya dengan kesadaran multikultural. Nasionalisme adalah komunitas politik yang dibayangkan (*imagined political communities*), maka perlu ada *sharing of ideas* dan bahkan *socio-political sharing* antar berbagai masyarakat pendukungnya (*fellow-members*). Tanpa itu semua, jangan heran bila eksistensi nasionalisme akan terganggu, dan pada gilirannya temuan (*invent*) itu akan hilang. Apalagi untuk negara bangsa sebesar dan sekompleks Indonesia sekarang, *justice sharing* (pembagian yang berkeadilan) antara berbagai elemen bangsa dan daerah menjadi sebuah keharusan. Karena kemajemukan (bhineka) menjadi dasar dari kesatuan (Ika), menjadi mutlak sifatnya bagi siapa pun untuk memberi perhatian kepada keadilan baik dalam bentuk maupun substansinya antar golongan, antar agama, antar suku, antar wilayah, antar gender, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, nasionalisme Indonesia hanya dapat dikontekstualkan apabila kita semua memperhatikan peran berbagai nilai-nilai lokal di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada siswa kelas VIII, guru dan kepala sekolah di SMP Negeri 3 Banguntapan Bantul.

Proses pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dari prosedur penelitian sebab dari data yang diperoleh sebuah penelitian akan diolah. Data tersebut akan dianalisis untuk membuat deskripsi dan inferensi penelitian. Menurut Suwarsih Madya (1994: 34-35) untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian tindakan ini menggunakan metode sebagai berikut: 1) deskripsi perilaku: Teknik ini berusaha mencatat observasi dan pemahaman terhadap urutan perilaku lengkap. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai *participant observer* dimana observer mempunyai hubungan yang akrab dengan pihak yang diamati disini adalah siswa. 2) catatan lapangan, metode yang digunakan untuk mengungkapkan data-data yang bersifat penafsiran subjektif. Catatan berasal dari hasil observasi yang mencakup referensi selama tindakan berlangsung yang didalamnya juga termasuk hasil diskusi dan berbagai informasi yang mendukung tindakan mulai dari tindakan awal hingga pada tindakan akhir. 3) wawancara, pengumpulan data dengan teknik wawancara digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan catatan lapangan. Dengan wawancara dapat dilakukan melalui narasumber guru, siswa, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Model analisis data yang dipergunakan adalah model Miles & Huberman analisis data terdiri dari pertama meliputi pengumpulan data dengan deskripsi perilaku ekologis/observasi, catatan lapangan dan analisis dokumen; kedua, reduksi data yang berarti proses pemilihan, menajamkan, menggabungkan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan; ketiga, penyajian data yaitu tahapan memaknai apa yang terjadi; keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Strategi dan Metode Penanaman nilai kearifan lokal di Sekolah

SMP Negeri 3 Banguntapan merupakan sekolah berbasis budaya yang baru dicanangkan mulai tahun 2010. Beberapa kegiatan sekolah baik di kelas maupun di luar kelas berorientasi pada pengembangan nilai-nilai budaya. Dalam proses pembelajaran semua mata pelajarannya diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, dalam program sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler diarahkan pada pembinaan potensi siswa pada pengembangan budaya melalui seni tari, music gamelan, macapat, pidato bahasa jawa dan lain sebagainya.

Berbagai strategi penanaman nilai kearifan lokal yang sudah dilakukan SMPN 3 Banguntapan adalah menggunakan strategi "PETRUK". Strategi PETRUK merupakan kependekan dari P untuk Pemodelan, E untuk *Empowering*, T untuk *Teaching*, R untuk *Reinforching*, U untuk *Unik* dan K untuk *Komprehensif*.

1. Huruf P yaitu untuk mewakili kata Pemodelan, kepala sekolah harus menjadi model bagi para guru, guru juga menjadi model bagi para siswa. Pemodelan jika dilihat lebih lanjut maka akan terkait dengan metode keteladanan, sama halnya pendapat beberapa guru, strategi yang dilakukan adalah dengan keteladanan atau memberikan contoh.
2. Huruf E yaitu untuk mewakili kata *Empowering* atau pemberdayaan. Pemberdayaan meliputi guru, siswa, sampai orang tua murid, pemberdayaan terkait dengan usaha sekolah budaya, semua ikut dalam proses penanaman nilai budaya/kearifan lokal ini. Sekolah mengajak orang tua/wali murid dalam upaya penanaman nilai kearifan lokal. SMPN 3 Banguntapan bahkan sejak sebelum launching sudah rapat dengan orangtua wali murid

terkait penancangan sekolah berbasis budaya dan respon orang tua wali murid sangat positif, bahkan wali murid juga berperan dalam *launching* sekolah berbasis budaya. Sekolah selalu rutin mengadakan pertemuan dengan wali murid setiap tiga bulan sekali sehingga orang tua juga ikut aktif dalam penanaman nilai kearifan lokal.

3. Huruf T untuk mewakili *Teaching* atau disebut pembelajaran. Pembelajaran tentu berkaitan dengan kurikulum, di SMPN 3 Banguntapan kurikulum sudah disesuaikan dengan sekolah berbasis budaya. Penanaman dalam pembelajaran yang dilakukan SMPN 3 Banguntapan melalui tiga bentuk yaitu:
 - a. Monolitik; Penanaman nilai kearifan lokal yang dilakukan oleh SMPN 3 Banguntapan yaitu juga masuk dalam mata pelajaran tersendiri atau bisa disebut Monolitik. Mapel yang masuk dalam monolitik yaitu ada mapel Bahasa Jawa.. Mata Pelajaran Bahasa Jawa termasuk dalam muatan lokal.
 - b. Penanaman dengan integrasi dalam pembelajaran; penanaman yang dilakukan SMPN 3 Banguntapan juga dengan cara mengintegrasikan dalam mata pelajaran. Mata pelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal, seperti Karawitan yang terintegrasi dalam mata pelajaran Seni Budaya. Materi Karawitan diajarkan kepada siswa kelas VIII. Mata pelajaran yang selanjutnya yaitu Keterampilan yang di integrasikan dengan materi Batik. Batik diajarkan kepada siswa kelas IX. Penanaman juga dilakukan dengan mengintegrasikan dalam materi seperti pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menyisipkan materi cerita rakyat Roro Jonggrang. Mata pelajaran Penjasorkes dengan materi

Jemparingan Guru menyampaikan nilai-nilai dalam pembelajaran dengan menyisipkan dalam materi yang sesuai, terintegrasi dengan materi dan RPP. Guru juga secara aktif melaksanakan dengan aktivitas yaitu berupa salam bahasa Jawa hal ini juga sebagai nilai kesopanan. Penyampaian selain terintegratif dalam materi, guru juga menyampaikan dalam bentuk nasehat dan motivasi.

- c. Pendidik sebelum menanamkan nilai kearifan lokal terlebih dahulu diberi pembekalan dan sosialisasi. Sosialisasi terkait butir nilai kearifan lokal dilakukan dengan workshop silabus dan rpp berbasis budaya, yang melaksanakan dari Dinas Pendidikan dan tim budaya, juga urusan kurikulum. Outputnya hasil karya guru dan sertifikat. Targetan untuk bukti fisik sekolah berbasis budaya. Kemudian selain workshop dari Dinas, sekolah juga selalu mengadakan workshop setiap awal semester. Karyawan juga tidak lepas dari sosialisasi yaitu melalui briefing-briefing.
 - d. Program Ekstrakurikuler dalam Upaya Penanaman Nilai Kearifan Lokal Program ekstrakurikuler yang diadakan di SMPN 3 Banguntapan ada pedhalangan (namun macet dan tidak terlaksana), karawitan, tari tradisional, lalu ada panambromo, ada jemparingan gaya Yogyakarta, yaitu memamah dengan bersila dan terakhir ada batik. Tujuan nya untuk menumbuhkan cinta budaya, karena standar komepetensinya dari mengenal, mengapresiasi, mencintai dan mengaktualisasi (melestarikan).
4. Huruf R untuk mewakili kata *Reinforching* atau penguatan, penguatan yang dimaksud adalah penguatan lingkungan fisik dan

non fisik. Penguatan lingkungan fisik berkaitan dengan penataan lingkungan sekolah. Lingkungan fisik berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMPN 3 Banguntapan diantaranya ada museum budaya yang bertujuan untuk mengumpulkan artefak-artefak budaya misalnya alat-alat tradisional, sarana olahraga jemparingan, alat gamelan slendro, alat pedhalangan, depan kelas sudah terdapat slogan-slogan, dan petuah Jawa, bel sekolah dengan instrumen gamelan, ruang untuk membuat. Secara umum sarana dan prasarana sudah mencukupi dan sudah bisa digunakan dengan baik. Sarana dan prasarana memang sudah ada namun masih ada beberapa hal yang dibutuhkan seperti gamelan set pelog, dan benda-benda untuk museum budaya. Penguatan lingkungan non fisik berupa penanaman melalui kultur sekolah (budaya sekolah) di SMPN 3 Banguntapan bentuknya, berupa 3 S yaitu Senyum, Salam, dan Sapa ditambah Sopan dan Santun. Membiasakan menyapa dengan bahasa Jawa dan guru membetulkan jika siswa kurang tepat dalam berbahasa Jawa, lalu unggah-ungguh dan siswa dibiasakan mengucapkan *matur nuwun* ketika selesai kegiatan pembelajaran.

5. Huruf U untuk mewakili kata *unik*. Unik yang dimaksud adalah dalam penanaman nilai budaya atau kearifan lokal berbeda dengan yang lainnya. Penanaman dengan bel sekolah yang berbeda dengan sekolah lain, bel sekolah di setting dengan instrumen gamelan, lalu ada karawitan dan memutar lagu dolanan anak saat istirahat. Kepemimpinan kepala sekolah sesuai dengan sekolah berbasis budaya. Kepala sekolah menerapkan kepemimpinan berdasarkan nilai budaya, hal ini disebutkan SMPN 3 Banguntapan menjadi Sekolah Berbasis Budaya maka budaya

menjadi identitas semua warga sekolah. Kepala sekolah juga menerapkan gaya kepemimpinan seperti filosofi Ki hadjar Dewantara yaitu, *ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*.

6. Huruf K untuk mewakili kata *komprehensif*. Komprehensif artinya menyeluruh, hal ini dimaksudkan bahwa penanaman nilai kearifan lokal melibatkan semua elemen di sekolah, stakeholder, dan masyarakat. Sekolah juga bekerjasama dengan lembaga lain, contohnya UNY, ISI, dan Dinas terkait. Kerja sama juga dengan salah satu radio untuk rekaman bel sekolah berupa instrumen gamelan, TVRI yang menayangkan ketoprak siswa SMPN 3 Banguntapan. Alumni dan dari wali murid yang secara ekonomi lebih dari cukup juga memberikan sponsor dan dana. Bekerjasama dengan SMKI dan SMSR, karena kedua sekolah tersebut fokus pada seni dan budaya.

Metode Penanaman Nilai Kearifan Lokal di SMPN 3 Banguntapan antara lain yang diterapkan melalui pembiasaan:

1. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin yang dilaksanakan di SMPN 3 Banguntapan yang pertama yaitu salaman pagi. Salaman pagi dilaksanakan oleh guru piket, serta kader pokja budaya kepada siswa di SMPN 3 Banguntapan. Salaman dilakukan sebagai bentuk saling menghormati, sekaligus mendekatkan interaksi antara Guru dan murid, sehingga tercipta kondisi lingkungan yang nyaman dalam pembelajaran.

2. Senyum, sapa, salam

Siswa memberi salam baik kepada guru maupun siswa yang lain, guru juga melakukan hal tersebut, termasuk di dalam kelas, ada

tembang sapaan bahasa Jawa ketika memulai pembelajaran, liriknya sebagai berikut “Guru: Sugeng enjing para siswa, kadospundi pawarto dinten punika? Siswa atur wangsulan: Sugeng enjing katur Bu Endri ugi, kula samya wilujeng nir sambekala, sampun samekta nampi piwucalan basa Jawa, sastra sarta budaya”.

3. Kegiatan memakai pakaian adat

Setiap tanggal 20 di setiap bulannya, siswa, guru, karyawan dan kepala sekolah memakai pakaian adat yang dimana tanggal 20 bertepatan dengan hari jadi sekolah sebagai sekolah berbasis budaya, yaitu tanggal 20 Desember 2013.

4. Kegiatan infak labuh budaya setiap hari pasaran kliwon dan piket museum. Program infak labuh budaya dan piket museum merupakan tanggung jawab dari tim pokja budaya.

5. Kegiatan Tadarus sebelum pembelajaran jam pertama, shalat Dhuha, Dhuhur berjamaah dan doa ketika memulai dan selesai pembelajaran.

6. Kegiatan rutin selanjutnya adalah ketika peringatan hari besar seperti hari kartini dan peringatan yang lain diadakan lomba-lomba budaya Jawa, seperti lomba geguritan, dimas diajeng, macapat, sesorah dan paduan suara.

7. Kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat awal pelajaran, dan ketika akan pulang sekolah menyanyikan lagu tembang Jawa.

Program inovasi dan kreativitas yang lain dalam upaya penanaman nilai kearifan lokal di SMPN 3 Banguntapan ditunjukkan dengan pembuatan batik cap, yang di pelopori oleh Bapak Nuryadi. Selanjutnya yaitu menciptakan lagu mars sekolah dengan bahasa Jawa. Materi juga mengalami kreativitas dan inovasi, misalnya mapel Bahasa

Inggris yang memasukan materi prosedur pembuatan gudeg, dalam mapel Penjasorkes ada gobak sodor, dan ada tari cetak banon atau cetak bata, yang terinspirasi dari lingkungan sekitar. Kegiatan bapak ibu guru juga ada seperti karawitan, dan lagu langen carita. Selain itu, keteladanan juga ditunjukkan oleh bapak/ibu guru yang kemudian ditirukan oleh siswa, hal ini dalam konteks pembelajaran dan di sekolah. Keteladanan yang dicontohkan seperti, menyapa, bagaimana berkomunikasi, dan berbahasa dengan bahasa Jawa Krama, lalu membuang sampah agar tidak sembarangan, berangkat ke sekolah pagi dan ikut melakukan salaman pagi. Pihak sekolah, dalam hal ini kebijakan dari kepala sekolah juga memberikan apresiasi kepada para guru teladan di sekolah. Memberikan apresiasi kepada tiga guru teratas dan juga memberikan kegiatan khusus berupa sharing kepada sepuluh guru terbawah, hal ini sebagai treatment bagi para guru agar selalu bersemangat dalam mengajar dan menanamkan nilai kearifan lokal.

Selain keteladanan, pengkondisian juga penting dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dan mendukung dalam usaha pendidikan dan pembelajaran. Pengkondisian dengan dekorasi ruangan disetiap kelas ada wayang, kemudian di setiap depan ruang kelas terdapat batik dari hasil karya para siswa. Pemasangan berupa slogan-slogan dan petuah jawa juga digantungkan pada depan kelas, sebagai sarana untuk mendukung penanaman nilai kearifan lokal.

Referensi

Agus Mulyana, "Mengembangkan Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Sejarah",
<http://file.upi.edu/Direktori/2009/B%20%20FPIPS/JUR.%20PEND.%20SEJARAH/196608081991031%20-%20AGUS%20MULYANA/Makalah%20Garut.pdf>, diakses
Tanggal 26 Januari 2014.

- Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2009, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemnusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan.
- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmiyati, Z. 2008. *Humanisasi Pendidikan, Menemukan kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dhanang, “Membangun Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Brebes”, <http://staff.undip.ac.id/sastra/dhanang/2010/11/22/membangun-masyarakat-madani-berbasis-kearifan-lokal-di-kabupaten-brebes/>, diakses Tanggal 26 Januari 2014.
- Emzir, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Etin Solihatin & Raharjo.(2008). *Cooperatif learning analisis model pembelajaran IPS*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indria Samego, “Menumbuhkan (Kembali) Nasionalisme Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal”, http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2796.
- Irwan Abdullah, 2010, *Bepihak Pada Manusia:Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, 2000, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- , 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo, 1999, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang.
- Lafinus, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat”, http://lafinus.filsafat.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70:menggali-kearifan-lokal-nusantara-sebuah-

[kajian-filsafat&catid=40:kearifan-lokal](#), diakses Tanggal 26 Januari 2014.

- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nafi Sanggenafa, 2009, “Integrasi Nasional dan Penguatan Negara dalam Perspektif Natropologi, Kasus Papua”, dalam Bambang Widiyanto dan Iwan Meulia Pirous (peny.), *Perspektif Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Sanapiah Faisal, 2001, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sartono Kartodirdjo, 2003, *Multidimensi Pembangunan Bangsa; Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Susanto Zuhdi, 2005, “Keindonesiaan dalam Perspektif Sejarah”, dalam *Sejarah dan Dialog Peradaban: Persembahan 70 tahun Prof. Dr. Taufiq Abdullah*, Jakarta: LIPI.

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN IPS BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA PENYUSUNAN LEMBAR KERJA SISWA

Yuhanida Milhani

Arus globalisasi saat ini menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan pada warga negara Indoensia khususnya para pelajar diberbagai tingkat pendidikan. Fenomena tersebut bahkan telah menyebabkan lunturnya identitas kebangsaan dikalangan para siswa. Hal ini tentu saja harus mendapatkan perhatian serius dari kita semua khususnya para pelaku dunia pendidikan. Fakta yang muncul adalah siswa lebih bangga dengan hasil budaya asing daripada budaya bangsanya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa bangga yang lebih pada diri anak manakala menggunakan produk luar negeri (impor), dibandingkan jika menggunakan produk bangsanya sendiri. Dalam hal kehidupan sehari-hari misalnya mereka lebih bangga memainkan permainan video game (Play Station) dari pada bermain permainan tradisional seperti congklak, egrang dan sejenisnya.

Fenomena lain adalah munculnya sempat munculnya sekolah berstandar internasional yang juga menjadi salah satu indikasi penurunan sikap nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa asing dalam proses pembelajaran maka dapat mengakibatkan siswa juga lebih bangga menggunakan bahasa asing dan lupa dengan bahasa daerahnya atau bahkan bahasa nasionalnya sendiri yaitu bahasa Indoensia. Padahal, bahasa sebagai alat dalam menyampaikan pembelajaran sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter peserta didik.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu upaya menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik melalui pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal) dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang nilai-nilai budaya lokal setempat dan sebagai filter terhadap ganasnya arus globalisasi. Dengan demikian diharapkan para siswa tidak akan tergerus oleh derasnya arus globalisasi yang terus datang menerpa bangsa Indonesia.

Beberapa kelemahan dan masalah-masalah yang sifatnya konseptual dalam pembelajaran pendidikan IPS, yakni orientasi yang sangat kuat terhadap pencapaian target kurikulum dalam arti sempit, yaitu menyajikan semua bahan dalam kurikulum. Para siswa kurang tertarik dengan pendidikan IPS antara lain karena kurang dirasakan kegunaannya. Hal ini ada kaitannya dengan pendapat bahwa IPS kurang menarik minat siswa karena dinilai sebagai pelajaran lunak dan hapalan belaka.

Hal tersebut disebabkan lemahnya dalam poses pembelajaran, yang kurang menyentuh pengembangan kemampuan berpikir dan nilai sehingga output yang diperoleh dari pengajaran ilmu sosial (IPS) di sekolah itu, baik yang bersifat kognitif, afektif maupun psikomotor tidak banyak dapat dimanfaatkan di luar sekolah, alias kurang berdaya atau kurang instrumental sebagai pembelajar, pemikir dan pengambil keputusan aktif dan mandiri. Adapun ciri dari kurangnya kemampuan berpikir kreatif diantaranya adalah : kurangnya bertanya, kurangnya minat siswa untuk bertanya jawab dengan guru maupun dengan siswa lain dan siswa cenderung pasif.

Dalam mengembangkan layanan berupa mutu pembelajaran dari guru IPS, maka dituntut kemampuan dan keterampilannya secara profesional. Terutama mencapai tujuan pokok dari pembelajaran IPS untuk memajukan kecerdasan para siswa dalam membangun kehidupan dalam berbagai bidang, tingkat atau tahapan perkembangan, masyarakat.

Tantangan-tantangan terhadap kearifan lokal yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Kurang adanya partisipasi dari masyarakat, terutama kalangan muda dan dunia pendidikan mengenai upaya untuk mengaplikasikan, mempertahankan, dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
2. Adanya perkembangan nilai-nilai budaya modern menyebabkan banyak masyarakat yang meninggalkan budayanya bersamaan dengan nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya sehingga hanya sedikit sekali masyarakat yang masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut.
3. Kurangnya perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.
4. Kesadaran yang kurang dari warga masyarakat di Indonesia untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada.
5. Jumlah Penduduk menuntut pemenuhan kebutuhan yang tinggi pula terutama masalah pangan, maka revolusi hijau di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada ditempuh. Pada akhirnya petani meninggalkan kearifan lokal dalam hal pengolahan lahan pertanian yang sudah terlebih dahulu digunakan dalam budidaya pertanian yang selaras selaras dengan alam. Bibit

lokal yang sebenarnya mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit, pupuk kandang dan pupuk organik yang digantikan dengan pupuk kimia, penggunaan hewan untuk membajak yang digantikan traktor, penggunaan obat-obatan dari tanaman untuk pertanian diganti dengan obat-obatan kimia yang pada faktanya sangat merusak lingkungan terutama tanah dan air.

6. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi ikut berperan dalam merubah pola pikir masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi modern dianggap lebih bagus dan cepat untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan yang tradisional (lokal) dengan mengesampingkan berbagai dampak negatifnya. Pada akhirnya kerusakan lingkunganlah yang timbul. Hutan banyak dieksplotasi dijadikan perkebunan, sungai jadi tempat pembuangan limbah dan sebagainya.

Kearifan Lokal

Menurut pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Menurut Keraf (2002), kearifan lokal/tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Kearifan lokal menurut Naritoom (Wagiran, 2010) paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu:(1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemilikinya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Konsep demikian juga sekaligus memberikan gambaran bahwa kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim global yang melanda kehidupan manusia.

Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*), dan lokal (*local*). Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. (<http://filsafat.ugm.ac.id>).

Cakupan Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena dia dapat mencakup kearifan masa kini, dan karena itu pula bisa lebih luas maknanya daripada kearifan tradisional. Untuk membedakan kearifan lokal yang baru saja muncul dengan kearifan lokal yang sudah lama dikenal komunitas tersebut, dapat digunakan istilah "kearifan kontemporer". Kearifan tradisional dapat disebut juga "kearifan klasik".

Ditinjau dari sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu: (a) gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak; dan (b) kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, dapat dilihat. Kearifan lokal kategori (a) mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik- praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya dari komunitas tersebut maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, termasuk juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain. Kearifan lokal kategori (b) biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan bermakna simbolik.

Jenis-Jenis Kearifan Lokal

Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam

nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata (tangible) dan yang tidak berwujud (intangible).

Potensi Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan modal pembentukan karakter luhur suatu bangsa yang kemudian akan menjadi jati diri bangsa itu sendiri. Karakter luhur adalah watak bangsa yang senantiasa bertindak dengan penuh kesadaran dan pengendalian diri. Kearifan lokal juga bersumber pada berbagai budaya yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur. Tiap suku dan daerah di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat sendiri-sendiri dengan nilai kearifan lokal tertentu yang terkandung di dalamnya. Maka kekayaan tersebut tentu saja menjadi modal tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan dunia pendidikan dengan berbasis pada kearifan lokal dan budaya dimasing-masing daerah.

Berbagai bentuk kearifan lokal yang merupakan daya dukung bagi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Kearifan lokal masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis tentang kewajiban belajar, seperti kewajiban mengikuti kegiatan pembelajaran bagi warga masyarakat yang masih buta aksara.

2. Kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan hubungan antarsesama manusia, melalui aktivitas gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam berbagai aktivitas.
3. Kearifan lokal yang berkaitan dengan seni. Keseniaan tertentu memiliki nilai untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan keteladanan serta rasa penghormatan terhadap pemimpin dan orang yang dituakan.
4. Kearifan lokal dalam sistem anjuran (tidak tertulis), namun disepakati dalam rapat yang dihadiri unsur-unsur dalam masyarakat untuk mewujudkan kecerdasan warga, seperti kewajiban warga masyarakat untuk tahu baca tulis ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Prospek pengembangan kearifan lokal dalam dunia pendidikan di masa depan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Maka dari itu penting untuk melibatkan dunia pendidikan dalam rangka untuk tetap menjaga kearifan lokal yang ada di Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut ke dalam konten dan proses pembelajaran.

Peran Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran IPS

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Dengan dihadapkan pada masalah dan situasi konkret yang dihadapi, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapinya secara kritis dan melatih keaktifan dan kemandirian siswa. Pendidikan juga harus memperhatikan sinergitas antar budaya

dengan pendidikan agar pendidikan yang berlangsung lebih memiliki karakter dan lebih sesuai dengan budaya yang berkembang sehingga akan lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupannya.

Kearifan lokal merupakan usaha untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Proses ini akan menghasilkan pengetahuan yang menggambarkan tentang kearifan lokal itu sendiri, yaitu gambaran mengenai sikap atau tingkah-laku yang mencerminkan budaya asli suatu daerah tertentu. Hal ini dapat dijadikan sebagai sumber materi dan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pembelajaran IPS di sekolah.

Upaya pengembangan pendidikan dengan pembelajaran IPS yang berbasis kearifan lokal tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peran serta masyarakat secara optimal. Keikutsertaan berbagai unsur dalam masyarakat dalam mengambil prakarsa dan menjadi penyelenggara program pendidikan merupakan kontribusi yang sangat berharga, yang perlu mendapat perhatian dan apresiasi dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Kearifan lokal sesungguhnya mengandung banyak sekali keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan secara luas adalah bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai identitas sebuah bangsa. Pendidikan bukan sekedar mengajarkan sesuatu yang benar dan yang salah tetapi pendidikan juga menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan

salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotorik).

Pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran student centered daripada teacher centered. Hal ini sejalan dengan konsep ideal bahwa belajar bukan sekedar kegiatan pasif menerima materi dari guru, melainkan proses aktif menggali pengalaman lama, mencari dan menemukan pengalaman baru serta mengasimilasi dan menghubungkan antara keduanya sehingga membentuk makna. Makna tercipta dari apa yang siswa lihat, dengar, rasakan, dan alami. Untuk guru, mengajar adalah kegiatan memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi sendiri pengetahuannya lewat keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran berbasis kearifan lokal yang dipadukan dengan pembelajaran IPS di sekolah sangatlah tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS yaitu agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di kehidupan siswa, sesuai dengan kemampuan belajarnya. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam mata pelajaran IPS itu sendiri.

Metode Pelaksanaan

Kerangka Pemecahan Masalah

Pembelajaran IPS yang berbasis kearifan lokal dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai bentuk kearifan lokal tersebut ke dalam mata pelajaran IPS. Strategi ini dilakukan dengan cara memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal di daerah setempat pada mata pelajaran IPS, sehingga siswa menyadari akan pentingnya nilai-nilai tersebut dan

menginternalisaikan nilai-nilai itu ke dalam tingkah lakunya sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas.

Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku yang sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat setempat.

Metode yang digunakan

Metode kegiatan yang akan dilakukan adalah pelatihan yang dilakukan melalui ceramah pengembangan model pembelajaran IPS dengan pendekatan scientific (*scientific approach*) berbasis kearifan local menggunakan lembar kerja siswa.. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengembangan model pembelajaran IPS dengan pendekatan scientific (*scientific approach*) berbasis kearifan lokal yang dipandu oleh tim PPM Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Langkah kegiatan PPM dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan

Dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan koordinator MGMP IPS SMP setempat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan pelatihan yang diawali dengan ceramah tentang pengembangan model pembelajaran IPS dengan pendekatan scientific (*scientific approach*) berbasis kearifan lokal

menggunakan lembar kerja siswa oleh tim PPM Jurusan Pendidikan IPS, FIS, UNY.

3. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilakukan setelah kegiatan pelatihan berlangsung. Pendampingan dilakukan untuk memberikan penguatan dalam pengembangan model pembelajaran IPS dengan pendekatan scientific (*scientific approach*) berbasis kearifan lokal menggunakan lembar kerja siswa.

4. Pelaporan

Setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan, maka disusun suatu laporan kegiatan.

Rancangan Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam dua cara, yaitu:

1. Evaluasi terhadap pemahaman materi pelatihan, kriteria yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini jika 75% peserta memahami materi pelatihan. Peserta dikatakan paham jika nilai dari hasil evaluasi mencapai minimal 70.
2. Evaluasi hasil, kriteria yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini 75% mampu menyusun soal terstandar, dibuktikan dari tugas-tugas yang disusun.

Hasil Dan Pembahasan

Perencanaan

Menyusun materi pelatihan:

1. Pengenalan hakikat bahan ajar dalam pembelajaran IPS

Garis besar isi materi adalah tentang pengertian IPS, tujuan pendidikan IPS, pentingnya bahan ajar dalam pembelajaran IPS, pemilihan bahan ajar IPS, Bahan ajar IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal, dan pengembangan bahan ajar IPS.

2. Penyusunan bahan ajar IPS

Berisi materi tentang teknis penyusunan bahan ajar IPS yang meliputi merencanakan, mengembangkan, ujicoba, dan revisi.

3. Praktik menyusun kisi-kisi dan soal tes terstandar

Para peserta menyusun bahan ajar IPS sesuai dengan materi IPS.

Menentukan peserta pelatihan

1. Para guru IPS SMP

Panitia secara teknis meminta MGMP setempat mengirimkan 40 peserta untuk kegiatan ini.

2. Mengundang para peserta pelatihan.

Mempersiapkan peralatan pelatihan

1. Membentuk panitia

Panitian terdiri dari dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan IPS FIS UNY

2. Mengurus surat-menyurat

Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan, maka kenyataannya para guru IPS masih mengalami kesulitan memahami jati diri pendidikan IPS. Para guru jarang mengembangkan bahan ajar, khususnya lembar kerja siswa yang sesuai kaidah bahan ajar. Rata-rata para guru menggunakan bahan ajar LKS yang selama ini diterbitkan berbagai penerbit, yang sesungguhnya tidak sesuai dengan hakikat LKS dan kebutuhan peserta didik.

Kurang mampunya para guru dalam pengembangan bahan ajar IPS bukan semata kesalahan para guru dalam mengembangkan kompetensi. Dalam kenyataannya tidak semua guru IPS merupakan lulusan dari prodi kependidikan, sehingga kedalaman penguasaan profesional dan pedagogik masih belum optimal. Selama ini para guru belum terbiasa menyusun bahan ajar dalam kelompok bidang studi, yang didiskusikan dengan teman sejawat maupun nara sumber.

Pelatihan Pengembangan bahan ajar IPS yang dilaksanakan sangat singkat memang dirasa masih sangat kurang. Tetapi minimal para guru telah memiliki tambahan pemahaman hakikat menyusun bahan ajar IPS. Respon para guru yang cukup positif, diharapkan program ini akan berdampak pada pengembangan pembelajaran IPS di sekolah.

Para guru pada kenyataannya sangat memerlukan pelatihan-pelatihan sejenis, karena selama ini kegiatan pelatihan jarang dilaksanakan. Bahkan ada beberapa guru yang menyatakan sudah beberapa tahun tidak mengikuti pelatihan pengembangan bidang studi. Pendeknya waktu yang tersedia dan terbatasnya anggaran yang dapat digunakan untuk pelatihan ini, maka sudah sepantasnya apabila kegiatan ini memperoleh tindak lanjut dengan pelaksanaan yang lebih profesional.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, upaya meningkatkan kemampuan para guru IPS dalam mengembangkan model pembelajaran IPS dengan pendekatan scientific (*scientific approach*) berbasis kearifan lokal menggunakan lembar kerja siswa dengan strategi pelatihan workshop dan penugasan individu. Peningkatan kemampuan didasarkan pada tes potensi awal hasil

workshop para peserta. Secara umum peserta telah memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam perangkat pembelajaran IPS.

Selain kesimpulan di atas, pengabdian juga menghasilkan beberapa hal penting kaitannya dengan pengembangan kompetensi guru IPS. Pelatihan pembelajaran IPS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan masih sangat minim sebagai upaya pengembangan ketrampilan mengajar guru IPS. Program PPM pelatihan pengembangan bahan ajar lembar kerja IPS membantu para guru untuk menyusun bahan ajar sesuai kaidah penyusunan bahan ajar.

Referensi

- Abdul Gafur. 2003. "Penerapan Konsep dan Prinsip Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) dan Disain Pesan dalam Pengembangan Pembelajaran dan Bahan Ajar". *Cakrawala Pendidikan*, 0216-1370.
- Arnie Fajar. 2004. *Portofolio dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Barth, James L. *Methods of Instruction in Social Studies Education*. University Press of America. New York.
- Darmiyati Zuchdi. 2008. "Humanisasi Pendidikan" *Makalah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- James A Beane, et.al. 1986. *Curriculum Planning and Development*. Allyn and Bacon inc., Toronto.
- Jarolimek, John. 1982. *Social Studies in Elementary Education*. Mac Millan: London.

- Krattwohl, David R., Bloom, Benjamin S., & Masia, Betram B., (Eds). 1964. *Taxonomi of Educational Objectives Handbook II. Affective Domain*. London: Longman Group.
- Mawardi Lubis. 2008. *Evaluasi Pendidikan Nilai*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Martorella, Peret H. 1994, *Social Studies for Elementary School Children*. Mac Millan: New York.
- M. Numan Somantri. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Rosda: Bandung.
- N. Daljoeni. 1992. *Dasar-dasar IPS*. Alumni: Bandung.
- Noeng Muhadjir. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Rake Sarasin: Yogyakarta.
- S. Nasution. 2003. *Asas-Asas Kurikulum*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mahood, Wayne, et.al. 1991. *Teaching Social Studies in Middle and Senior High Schools*. Macmillan: Toronto.
- Rohmat Mulyana. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Epilog

INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Danu Eko Agustinova

Saat ini Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0. Era tersebut menuntut inovasi dalam berbagai bidang. Menurut Suwardana (2017: 103) pada konteks revolusi industri dapat diterjemahkan proses yang terjadi sebenarnya adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok (*needs*) dengan keinginan (*wants*) masyarakat. Perjalanan perubahan dalam revolusi yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan hasrat keinginan pemenuhan kebutuhan manusia secara cepat dan berkualitas. Revolusi Industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan *manual* menjadi *otomatisasi* atau *digitalisasi*. Inovasi menjadi kunci eksistensi dari perubahan itu sendiri.

Revolusi industri 4.0 berdampak pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan dituntut untuk berinovasi agar sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Inovasi pembelajaran sejarah ditekankan terhadap metode pembelajaran dan media pembelajaran. Metode pembelajaran sejarah yang kurang tepat menjadikan peserta didik tidak tertarik untuk belajar sejarah. Menurut Alfian (2011) tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat

Indonesia umumnya. Agaknya pernyataan tersebut tidaklah terlalu berlebihan. Namun sampai dengan saat ini masih terus dipertanyakan keberhasilannya, mengingat fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia khususnya para generasi muda makin hari makin diragukan eksistensinya. Dengan kenyataan tersebut artinya ada sesuatu yang harus dibenahi dalam pelaksanaan pendidikan sejarah.

Menurut Nuryanti (2016) pembelajaran di sekolah pada saat ini mulai disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga terjadi perubahan dan pergeseran paradigma pendidikan. Perkembangan yang sangat pesat tersebut mempercepat aliran ilmu pengetahuan yang menembus batas-batas dimensi ruang dan waktu. Tentu saja hal ini berpengaruh pada kebiasaan dan budaya pendidikan yang dikelola selama ini. Kemajuan dan perkembangan teknologi sudah demikian menonjol sehingga penggunaan alat-alat bantu mengajar berupa media harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman saat ini. Selain itu juga harus disesuaikan dengan tuntutan kurikulum baik materi, metode maupun tingkat kemampuan belajar peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan optimal disekolah. Menurut Saiman (2011) Inovasi terjadi karena perasaan tidak puas terhadap kondisi dan situasi yang ada serta adanya peluang untuk memperbaiki keadaan yang ada, inovasi harus dijadikan sebagai suatu alat dan bukan suatu tujuan, tujuan dari suatu inovasi adalah perubahan atau perbaikan dari kondisi yang ada menjadi lebih baik, namun tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai suatu inovasi.

Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi peserta didik. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah

memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki peserta didik. Kelemahan para pendidik, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi peserta didik. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan peserta didik. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk kreatif. Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan generasi penerus bagi suatu bangsa. Bangsa yang maju peradabannya tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan yang berjalan di negara tersebut. Menurut Susanto dalam Siswoyo (2013:20) pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis menulis artikel berjudul *“Inovasi Media Pembelajaran Sejarah pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Augmented Reality”*. Tujuan dari penulisan artikel tersebut adalah untuk mengembangkan media pembelajaran sejarah yang sesuai dengan perkembangan zaman atau pada era revolusi industri 4.0.

Media Pembelajaran Sejarah

Menurut Prasetya (2015:1) istilah media sangat populer dalam bidang komunikasi. Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Makna lain komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses komunikasi itu sendiri baru terjadi setelah ada reaksi balik (feedback). Saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau

menyampaikan sesuatu pesan, di mana medium ini merupakan jalan atau alat dengan mana suatu pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan. Agar proses komunikasi pembelajaran berjalan efektif dan efisien, guru perlu menggunakan media untuk merangsang siswa dalam belajar. Jadi, media bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran, hal ini bukan saja membuat penyajian menjadi lebih konkrit, tetapi juga ada beberapa kegunaan yang lain.

Menurut Hamid (2014:39) pembelajaran sejarah sering diidentikan dengan menghafal tanggal, tahun, tempat, tokoh, dan rentetan peristiwa masa lalu. Karena itu, semua orang bisa mempelajarinya, meskipun tidak melalui proses formal belajar di jurusan atau program studi sejarah di perguruan tinggi. Itulah sebabnya banyak kalangan dalam masyarakat tertarik belajar dan mengajarkan sejarah, lalu mengatasnamakan dirinya sejarawan. Orang yang belajar sejarah lewat proses akademik disebut sejarawan akademik (*academic historian*) atau sejarawan profesional (*historian by profession*). Sedangkan orang yang tidak pernah mengikuti proses akademik disebut sejarawan informan (*informal historian*). Aspek pembeda utama anatara sejarawan akademik dan sejarawan informal terletak pada pemahaman dan penggunaan metode informal terletak pada pemahaman dan penggunaan metode sejarah dalam merekonstruksi masa silam. Cara dan hasil kerja kelompok pertama dipandu oleh metode sejarah, sedangkan yang kedua tidak memperhatikan aspek metodelis.

Aplikasi Augmented Reality

Augmented Reality (AR) merupakan sebuah konsep menggabungkan dunia maya dengan dunia nyata untuk menghasilkan

informasi dari data yang diambil dari sebuah sistem pada objek nyata yang ditunjuk sehingga batas antara keduanya menjadi semakin tipis. AR dapat menciptakan interaksi antara dunia nyata dengan dunia maya, semua informasi dapat ditambahkan sehingga informasi tersebut ditampilkan secara *real time* seolah-olah informasi tersebut menjadi interaktif dan nyata. Dengan demikian *Augmented Reality* (AR) dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya dalam dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata kemudian memunculkannya atau memroyeksikannya secara *real time* (Mustaqim, 2016).

Sejarah tentang AR dimulai dari tahun 1957-1962, ketika seorang penemu yang bernama Morton Heilig, seorang *sinematografer*, menciptakan dan mempatenkan sebuah *simulator* yang disebut Sensorama dengan *visual*, getaran dan bau. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan *head-mounted display* yang dia klaim adalah jendela ke dunia *virtual*. Tahun 1975 seorang ilmuwan bernama Myron Krueger menemukan *Videoplace* yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan objek *virtual* untuk pertama kalinya. Tahun 1989, Jaron Lanier memperkenalkan *Virtual Reality* dan menciptakan bisnis komersial pertama kali di dunia *maya*, Tahun 1992 mengembangkan AR untuk melakukan perbaikan pada pesawat *boeing*, dan pada tahun yang sama, LB Rosenberg mengembangkan salah satu fungsi sistem AR, yang disebut *Virtual Fixtures* (Afdal dkk, 2011: 3).

Materi Pembelajaran Sejarah yang Dapat Menggunakan *Augmented Reality*

Augmented reality dapat digunakan untuk media pembelajaran sejarah. penggunaan *augmented reality* mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang sedang dipelajari. *Augmented reality* memungkinkan adanya ilustrasi atau visualisasi dari peristiwa sejarah yang telah terjadi. Selama ini media pembelajaran sejarah berupa buku ataupun *power point* kurang optimal dalam ilustrasi dan visualisasi peristiwa sejarah. Dengan adanya inovasi media pembelajaran sejarah menggunakan *augmented reality* selaras dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 menuntut adanya penggunaan teknologi dalam beberapa bidang salah satunya adalah bidang pendidikan. Berikut adalah materi pembelajaran sejarah pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah aliyah (MA) yang dapat menggunakan *augmented reality* adalah.

1. Kelas X SMA/MA

Materi kelas X SMA/MA kompetensi dasar (KD) 3.2 *Memahami corak kehidupan masyarakat pada masa praaksara*, 3.3 *Mendeskripsikan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia (Proto, Deutero Melayu dan Melanesoid)*, 3.4 *Menganalisis berdasarkan tipologi hasil budaya Praaksara Indonesia termasuk yang berada di lingkungan terdekat* (Kemdikbud, 2013). Kompetensi Dasar (KD) yang telah disebutkan di atas potensial untuk dijadikan bahan sebagai media pembelajaran *augmented reality*. Materi praaksara merupakan salah satu materi yang perlu menggunakan visualisasi. Visualisasi tersebut dapat diwujudkan dengan *augmented reality*.

Kehidupan masa praaksara merupakan materi sejarah yang perlu direkonstruksi. Kehidupan berburu meramu, bercocok tanam, dan migrasi yang telah diteliti dapat diwujudkan visualisasinya. Aktivitas berburu dan meramu dapat direkonstruksi berdasarkan temuan peninggalan sejarah. Hasil rekonstruksi tersebut divisualisasikan dalam *augmented reality*. Peserta didik dapat memahami aktivitas berburu dan meramu. Aktivitas bercocok tanam dan migrasi akan lebih mudah dipahami dengan adanya visualisasi melalui *augmented reality*.

2. Kelas XI SMA/MA

Materi pembelajaran sejarah kelas XI SMA/MA yang strategis untuk diterapkan menggunakan *augmented reality* adalah kompetensi dasar (KD) 3.2 dan 3.3. Isi dari kompetensi dasar (KD) tersebut adalah 3.2 *Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan Bangsa Barat di Indonesia*, 3.3 *Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20* (Kemdikbud, 2013). Kompetensi dasar tersebut memerlukan visualisasi dalam kegiatan pembelajaran. Visualisasi dilakukan supaya peserta didik dapat melihat peristiwa sejarah dari sudut pandang berbeda. Penjajahan bangsa barat di Indonesia berawal dari penjelajahan samudera oleh Bangsa Barat. Penjelajahan samudera tidak dapat dilepaskan dari aspek geografis. Sehingga peserta didik dapat melihat perspektif sejarah dari sudut pandang geografi.

Visualisasi dilakukan dengan objek berupa pahlawan, tempat, dan waktu terjadinya perlawanan terhadap penjajah. Visualisasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bermanfaat untuk

menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme peserta didik. Visualisasi tersebut berupaya untuk menjelaskan semangat juang para pahlawan ketika berperang melawan penjajah. Hasil yang diharapkan peserta didik memiliki kesadaran terhadap semangat nasionalisme. Selain itu diharapkan peserta didik dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat.

3. Kelas XII SMA/MA

Augmented reality dapat diaplikasikan pada materi pembelajaran sejarah kelas XII kompetensi dasar (KD 3.2.). Kompetensi dasar tersebut adalah *3.2 Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Jepang, Sekutu, dan Belanda* (Kemdikbud, 2013). Visualisasi dapat berupa tempat berlangsungnya perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peserta didik akan dengan mudah memahami cara bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Materi pembelajaran yang mudah dipahami akan mendukung tujuan dari proses pembelajaran sejarah. Selain itu peserta didik diharapkan memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Mata pelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di jenjang sekolah menengah atas. Inovasi pembelajaran sejarah di era revolusi industri penting untuk dilakukan. Inovasi tersebut dilatarbelakangi oleh isi dari pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah berisi rekonstruksi peristiwa masa lampau. Visualisasi rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan media *augmented reality*. Media

augmented reality mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sejarah. Melalui media *augmented reality* peserta didik diharapkan dapat mengetahui rekonstruksi peristiwa masa lampau. Berdasarkan analisis kompetensi dasar (KD) pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh penulis, media *augmented reality* dapat diterapkan pada mata pelajaran sejarah kelas X, XI, XII SMA/MA.

Penggunaan media pembelajaran sejarah berbasis *augmented reality* sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peseta didik. Pembelajaran sejarah tidak hanya menggunakan buku ataupun ceramah. Pembelajaran sejarah dapat menggunakan media *augmented reality* yang memperjelas visualisasi dari peristiwa sejarah yang telah terjadi. Peristiwa sejarah hasil rekonstruksi merupakan ciri khas dari pembelajaran sejarah. Pada hakikatnya pembelajaran sejarah adalah menanamkan nilai-nilai karakter. Sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Afdal, M dkk. 2018. “Penerapan Teknologi Augmented Reality pada Media Pembelajaran Lapisan Permukaan Bumi Berbasis 3D”. *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 4, No. 1, Februari 2018, Hal. 1-10
- Alfian, Magdalia. 2011. “Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi”. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. III, No. 2 (Maret 2011).
- Hamid, Abd. Rahman. 2014. *Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Kompetensi Dasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mustaqim, Ilmawan. “Pemanfaatan *Augmented Reality* sebagai Media Pembelajaran”. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol.13, No.2, Juli 2016, Hal:174
- Nuryanti. 2016. “Pemilihan Media yang Tepat dalam Pembelajaran Sejarah”.*Jurnal Pawiyatan* ,Volume 23, Nomor 1, 2016.
- Prasetya, Sukma Perdana. 2015. *Media Pembelajaran Geografi*. Yogyakarta : Ombak.
- Saiman, Marwoto. 2011. “Inovasi Metode Pembelajaran Sejarah”. *Jurnal Lentera*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2011.
- Siswoyo, Dwi dkk. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Suwardana, Hendra. 2017. “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental”. *Jurnal JATI UNIK*, 2017, Vol.1, No.2, Hal. 102-110.